

# LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA TENGAH

**AGUSTUS 2019**





# KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya “Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Agustus 2019” dapat dipublikasikan. Buku ini menyajikan berbagai informasi mengenai perkembangan beberapa indikator perekonomian daerah khususnya bidang moneter, perbankan, sistem pembayaran, dan keuangan daerah, yang selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan internal Bank Indonesia juga sebagai bahan informasi bagi pihak eksternal.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan bagi penyusunan buku ini. Harapan kami, hubungan kerja sama yang baik selama ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan lagi pada masa yang akan datang. Kami juga mengharapkan masukan dari berbagai pihak guna lebih meningkatkan kualitas buku kajian ini sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah dan karunia-Nya serta kemudahan kepada kita semua dalam upaya menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan ekonomi regional khususnya dan pengembangan ekonomi nasional pada umumnya.

Semarang, Agustus 2019  
KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA  
PROVINSI JAWA TENGAH

Ttd

**Soekowardojo**  
Direktur Eksekutif

# Daftar Isi



Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Grafik	vii
Daftar Tabel	xii
Tabel Indikator	xiv
Ringkasan Eksekutif	01

## SUPLEMEN

SUPLEMEN I	45
Peningkatan Daya Saing Industri Garmen Jawa Tengah	
SUPLEMEN II	50
Studi Kasus Perkembangan Kawasan Industri Di Jawa Tengah	

## BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL

1.1 Perkembangan Ekonomi Makro Regional Triwulan II 2019	09
1.1.1 Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran	11
1.1.2 Perkembangan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha	27
1.2 <i>Tracking</i> Perkembangan Ekonomi Makro Regional Triwulan III 2019	38
1.2.1 <i>Tracking</i> Perkembangan Ekonomi Triwulan III 2019 Sisi Pengeluaran	38
1.2.2 <i>Tracking</i> Perkembangan Ekonomi Triwulan III 2019 Sisi Lapangan Usaha	42

## BAB II KEUANGAN PEMERINTAH

2.1. Gambaran Umum APBD 2019	57
2.2. Realisasi APBD Triwulan II 2019	57
2.2.1. Realisasi Pendapatan Triwulan II 2019	58
2.2.2. Realisasi Belanja Triwulan II 2019	60
2.3. Struktur APBN Provinsi Jawa Tengah 2019	61
2.4. Potensi Optimalisasi Kinerja Fiskal di Jawa Tengah	62



# LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA TENGAH AGUSTUS 2019

## BAB III PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

3.1. Inflasi Secara Umum	67
3.2. Inflasi Berdasarkan Kelompok	69
3.2.1. Kelompok Bahan Makanan	70
3.2.2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	70
3.2.3. Kelompok Kesehatan	71
3.2.4. Kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	72
3.2.5. Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	73
3.2.6. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	73
3.2.7. Kelompok Sandang	74
3.3. Inflasi Kota – Kota di Provinsi Jawa Tengah	74
3.3.1. Disagregasi Inflasi Kota Semarang	75
3.3.2. Disagregasi Inflasi Kota Surakarta	76
3.3.3. Disagregasi Inflasi Kota Cilacap	77
3.3.4. Disagregasi Inflasi Kota Kudus	78
3.3.5. Disagregasi Inflasi Kota Tegal	78
3.3.6. Disagregasi Inflasi Kota Purwokerto	79
3.4. Tracking Inflasi Triwulan III	80
3.4.1. Inflasi Juli 2019	80
3.4.2. Inflasi Agustus 2019	80
3.4.3. Tracking Inflasi Triwulan III 2019	81
3.5. Program Pengendalian Inflasi Daerah	82

## BAB IV STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

4.1. Perkembangan Stabilitas Sistem Keuangan Jawa Tengah	87
4.1.1. Ketahanan Lapangan Usaha Jawa Tengah Triwulan II 2019	87
4.1.2. Ketahanan Sektor Korporasi Jawa Tengah Pada Triwulan II 2019	89
4.1.3. Kerentanan Sektor Rumah Tangga Pada Triwulan II 2019	90
4.2. Kondisi Umum Perbankan Jawa Tengah	94
4.2.1. Perkembangan Bank Umum	96
4.3. Perkembangan Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Provinsi Jawa Tengah	100
4.4. Perkembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)	101

## BAB V PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

5.1. Perkembangan Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)	105
5.2. Perkembangan Pengelolaan Uang Rupiah	106
5.3. Perkembangan Transaksi Penukaran Valuta Asing	108
5.4. Perkembangan Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif	109



# LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA TENGAH AGUSTUS 2019



## **BAB VI** **KETENAGAKERJAAN** **DAN KESEJAHTERAAN**

6.1. Ketenagakerjaan	113
6.2. Pengangguran	117
6.3. Nilai Tukar Petani	118
6.4. Tingkat Kemiskinan	120
6.5. Pembangunan Manusia	122
6.6. Pemerataan Penduduk	123

## **BAB VII** **PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH**

7.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019	127
7.1.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran	127
7.1.2. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha	128
7.2. Prospek Inflasi Keseluruhan Tahun 2019	130

# Grafik



Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah	09	Grafik 1.18 Perkembangan Investasi Pelaku Usaha (Hasil Liaison)	18
Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa, dan Nasional	09	Grafik 1.19 Likert Scale Investasi (Hasil Liaison)	18
Grafik 1.3 Struktur Perekonomian Kawasan Jawa berdasarkan Provinsi	09	Grafik 1.20 Perkembangan SBT Realisasi Investasi (SKDU) dan Pertumbuhan PDRB Investasi	18
Grafik 1.4 Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi	10	Grafik 1.21 Perkembangan SBT Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha (hasil SKDU)	18
Grafik 1.5 Pertumbuhan Tahunan Outflow Uang Kartal, Rata-Rata Perputaran Kliring Harian, dan Pertumbuhan Ekonomi	10	Grafik 1.22 Realisasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri	19
Grafik 1.6 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga	12	Grafik 1.23 Pertumbuhan PDRB Ekspor Luar Negeri	20
Grafik 1.7 Indeks Tendensi Konsumen	13	Grafik 1.24 Komposisi Ekspor Luar Negeri Nonmigas Berdasarkan Komoditas	20
Grafik 1.8 Perkembangan Inflasi dan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga	13	Grafik 1.25 Pertumbuhan Nilai Ekspor TPT	21
Grafik 1.9 Perkembangan Kredit Konsumsi, DPK Perorangan, dan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga	14	Grafik 1.26 Pertumbuhan Volume Ekspor TPT	21
Grafik 1.10 Perkembangan Kredit Konsumsi berdasarkan Jenis Konsumsi	14	Grafik 1.27 Pertumbuhan Nilai Ekspor Kayu	22
Grafik 1.11 Pertumbuhan Konsumsi LNPRT	15	Grafik 1.28 Pertumbuhan Volume Ekspor Kayu	22
Grafik 1.12 Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah	15	Grafik 1.29 Struktur Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan	22
Grafik 1.13 Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	15	Grafik 1.30 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan	22
Grafik 1.14 Pertumbuhan Giro Pemerintah dan PDRB Konsumsi Pemerintah	15	Grafik 1.31 Pertumbuhan PDRB Impor Luar Negeri	23
Grafik 1.15 Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto	16	Grafik 1.32 Perkembangan Impor Jawa Tengah	24
Grafik 1.16 Pertumbuhan PDRB Investasi, PDRB Konstruksi, dan Konsumsi Semen	17	Grafik 1.33 Pertumbuhan Impor Migas dan Nonmigas Jawa Tengah	24
Grafik 1.17 Pertumbuhan Kredit Investasi dan Suku Bunga Kredit Investasi	17	Grafik 1.34 Struktur Impor Nonmigas Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Pengeluaran	24
		Grafik 1.35 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Pengeluaran	24
		Grafik 1.36 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan	25
		Grafik 1.37 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Komoditas	25

# Grafik



Grafik 1.38 Pangsa Negara Asal Impor Jawa Tengah	25	Grafik 1.53 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil berdasarkan Sektor (% , YOY)	32
Grafik 1.39 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Negara Asal	25	Grafik 1.54 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor	34
Grafik 1.40 Pertumbuhan Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Negara Asal	26	Grafik 1.55 SBT Kegiatan Usaha, Likert Scale Penjualan Domestik, Pertumbuhan PDRB Perdagangan	34
Grafik 1.41 Pertumbuhan PDRB Net Ekspor Antardaerah	27	Grafik 1.56 Indeks Penjualan Riil (Hasil SPE) dan Pertumbuhan PDRB Perdagangan	35
Grafik 1.42 Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29	Grafik 1.57 IPR Perdagangan Eceran berdasarkan Kelompok Komoditas	35
Grafik 1.43 Perkembangan Luas Tanam dan Panen Padi di Jawa Tengah	29	Grafik 1.58 Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	37
Grafik 1.44 Pertumbuhan Luas Tanam dan Luas Panen Padi di Jawa Tengah	29	Grafik 1.59 Pertumbuhan PDRB Informasi dan Komunikasi	37
Grafik 1.45 Perkembangan Hasil Produksi Padi di Jawa Tengah	29	Grafik 1.60 Pertumbuhan PDRB Konstruksi	37
Grafik 1.46 Perkembangan SBT Realisasi Kegiatan Usaha (SKDU), Likert Scale Penjualan Domestik, dan Pertumbuhan PDRB Pertanian	30	Grafik 1.61 LS Penjualan, LS Kapasitas Utilisasi LU Konstruksi, dan Pertumbuhan Konsumsi Semen	37
Grafik 1.47 Pertumbuhan dan NPL Kredit Pertanian	30	Grafik 2.1 APBD Provinsi Jawa Tengah T.A. 2018 dan T.A. 2019	57
Grafik 1.48 Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	31	Grafik 2.2 Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Triwulan II 2018 dan 2019	57
Grafik 1.49 Likert Scale Penjualan Domestik, Nilai Impor Bahan Baku, dan Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	32	Grafik 2.3 Realisasi Pendapatan Daerah	58
Grafik 1.50 Pertumbuhan dan NPL Kredit Industri Pengolahan	32	Grafik 2.4 Realisasi Belanja Daerah	58
Grafik 1.51 Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai Subsektor Industri Pengolahan (Hasil SKDU)	33	Grafik 2.5 Pertumbuhan Tahunan Pajak Daerah dan Pendapatan Jawa Tengah	59
Grafik 1.52 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang berdasarkan Sektor (% , YOY)	33	Grafik 2.6 Tax Ratio Jawa Tengah dibandingkan Nasional	59
		Grafik 2.7 Rasio Pajak per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	59



# LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA TENGAH AGUSTUS 2019

Grafik 2.8 Kontribusi Pos Pendapatan Daerah Triwulan II 2019	60	Grafik 3.15 Inflasi Kota di Provinsi Jawa Tengah per Kelompok pada Tw I 2019	75
Grafik 2.9 Kontribusi Pos Belanja Daerah Triwulan II 2019	60	Grafik 3.16 Perbandingan Inflasi Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok	76
Grafik 2.10 Penggunaan Belanja APBD Jawa Tengah 2019	60	Grafik 3.17 Perbandingan Inflasi Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok	77
Grafik 3.1 Perkembangan Inflasi Jawa Tengah dan Nasional	67	Grafik 3.18 Perbandingan Inflasi Kota Cilacap dan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok	78
Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi di Kawasan Jawa	67	Grafik 3.19 Perbandingan Inflasi Kota Kudus dan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok	78
Grafik 3.3 Inflasi Tahunan Provinsi di Jawa	67	Grafik 3.20 Perbandingan Inflasi Kota Tegal dan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok	79
Grafik 3.4 Inflasi Bulanan Provinsi di Jawa	67	Grafik 3.21 Perbandingan Inflasi Kota Purwokerto dan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok	79
Grafik 3.5 Perbandingan Inflasi Triwulanan Berdasarkan Kelompok	68	Grafik 4.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Sektor Pertanian	88
Grafik 3.6 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Bahan Makanan	70	Grafik 4.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Sektor Konstruksi	88
Grafik 3.7 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	71	Grafik 4.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Sektor Industri Pengolahan	88
Grafik 3.8 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Kesehatan	71	Grafik 4.4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, serta Risiko Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	88
Grafik 3.9 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	72	Grafik 4.5 Perkembangan ROA, ROE Korporasi Jawa Tengah	90
Grafik 3.10 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	73	Grafik 4.6 Perkembangan Debt to Equity Ratio Korporasi Jawa Tengah	90
Grafik 3.11 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	73	Grafik 4.7 Perkembangan TA/TL Korporasi Jawa Tengah	90
Grafik 3.12 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Sandang	74	Grafik 4.8 Perkembangan Current Ratio Korporasi Jawa Tengah	90
Grafik 3.13 Inflasi Tahunan Triwulan IV 2018 pada Seluruh Kota Pantauan di Jawa Tengah	75	Grafik 4.9 Perkembangan Pertumbuhan DPK, Perseorangan, dan Bukan Perseorangan Jawa Tengah	91
Grafik 3.14 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Pantauan di Jawa Tengah	75		

# Grafik



Grafik 4.10 Perkembangan Pangsa DPK, Perseorangan, dan Bukan Perseorangan Jawa Tengah	91	Grafik 4.24 Perkembangan Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) Perbankan Jawa Tengah	95
Grafik 4.11 Perkembangan Ekspektasi Masyarakat terhadap Peningkatan Tabungan Berdasarkan Survei Konsumen	91	Grafik 4.25 Perkembangan Indikator Perbankan Jawa Tengah	95
Grafik 4.12 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah	92	Grafik 4.26 Perkembangan Pertumbuhan Indikator Perbankan Jawa Tengah	95
Grafik 4.13 Perkembangan Pangsa Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah	92	Grafik 4.27 Perkembangan DPK Perbankan Umum Jawa Tengah	97
Grafik 4.14 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah	93	Grafik 4.28 Perkembangan Pertumbuhan Tabungan Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai	97
Grafik 4.15 Pangsa Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah	93	Grafik 4.29 Perkembangan Pangsa Tabungan Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai	97
Grafik 4.16 Perkembangan NPL Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah	93	Grafik 4.30 Perkembangan Pertumbuhan Deposito Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai	97
Grafik 4.17 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah	93	Grafik 4.31 Perkembangan Pangsa Deposito Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai	97
Grafik 4.18 Perkembangan NPL Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah	94	Grafik 4.32 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankan Jawa Tengah	97
Grafik 4.19 Pangsa Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah	94	Grafik 4.33 Perkembangan Nominal Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Sektor	98
Grafik 4.20 Perkembangan Pertumbuhan Aset Perbankan di Pulau Jawa	94	Grafik 4.34 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Sektor	98
Grafik 4.21 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Perbankan di Pulau Jawa	95	Grafik 4.35 Perkembangan Suku Bunga Simpanan Perbankan Jawa Tengah	99
Grafik 4.22 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankan di Jawa Tengah	95	Grafik 4.36 Perkembangan Suku Bunga Kredit Perbankan Jawa Tengah	99
Grafik 4.23 Perkembangan Rasio Non-Performing Loan (NPL) Kredit Perbankan Jawa Tengah	95	Grafik 4.37 Perkembangan Suku Bunga Sektor Ekonomi Utama di Jawa Tengah	99
		Grafik 4.38 Perkembangan Pertumbuhan Aset BPR di Jawa Tengah	100



# LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA TENGAH AGUSTUS 2019

Grafik 4.39 Perkembangan Pertumbuhan DPK BPR di Jawa Tengah	100	Grafik 5.5 Perkembangan Rata-Rata Penarikan Cek dan Bilyet Giro Kosong Harian di Jawa Tengah	106
Grafik 4.40 Pangsa Dana Pihak Ketiga BPR di Jawa Tengah	100	Grafik 5.6 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal melalui Bank Indonesia di Jawa Tengah	107
Grafik 4.41 Perkembangan Pertumbuhan Kredit BPR di Jawa Tengah	100	Grafik 5.7 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal Berdasarkan Wilayah	107
Grafik 4.42 Pangsa Kredit BPR di Jawa Tengah	100	Grafik 5.8 Perkembangan Penarikan dan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar	107
Grafik 4.43 Pangsa Penyaluran Kredit BPR di Jawa Tengah	101	Grafik 5.9 Frekuensi dan Nominal Kas Keliling	107
Grafik 4.44 Perkembangan Pertumbuhan Kredit BPR di Jawa Tengah	101	Grafik 5.10 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Wilayah	108
Grafik 4.45 Perkembangan NPL BPR di Jawa Tengah	101	Grafik 5.11 Persentase Temuan Uang Palsu Berdasarkan Pecahan	108
Grafik 4.46 Perkembangan Rasio FDR BPR Jawa Tengah	101	Grafik 5.12 Transaksi Penukaran Valuta Asing	109
Grafik 4.47 Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM berdasarkan Tujuan	101	Grafik 5.13 Pangsa Valuta Asing yang ditukarkan melalui KUPVA Bukan Bank di Jawa Tengah	109
Grafik 4.48 Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM di Jawa Tengah	102	Grafik 5.14 Rasio Ketersediaan Layanan Keuangan di Jawa Tengah dibandingkan 1.000 km <sup>2</sup> Luas Wilayah	120
Grafik 4.49 Perkembangan Rasio NPL Kredit UMKM di Jawa Tengah	102	Grafik 6.1 Perkembangan NTP Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan dalam 5 Tahun Terakhir	114
Grafik 4.50 Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM Jawa Tengah	102	Grafik 6.2 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan dan	117
Grafik 4.51 Perkembangan Rasio NPL Kredit UMKM Jawa Tengah	102	Grafik 6.3 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan, Penghasilan, dan Kegiatan Usaha yang Akan Datang	117
Grafik 5.1 Perkembangan Rata-Rata Perputaran Kliring Harian di Jawa Tengah	103	Grafik 6.4 NTP dan PDRB Lapangan Usaha Pertanian	118
Grafik 5.2 Pertumbuhan Tahunan Rata-Rata Perputaran Kliring dan SBT SKDU	103	Grafik 6.5 NTP Jawa Tengah dan Komponen Penyusunnya	119
Grafik 5.3 Pangsa Volume Transaksi SKNBI Berdasarkan Daerah Pengiriman	106	Grafik 6.6 NTP Berdasarkan Subsektor di Jawa Tengah	119
Grafik 5.4 Pangsa Nominal Transaksi SKNBI Berdasarkan Daerah Pengiriman	106	Grafik 6.7 Indeks yang Diterima berdasarkan Subsektor	120
		Grafik 6.8 Indeks yang Dibayar berdasarkan Subsektor	120
		Grafik 6.9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah Tahun 2014-2019 (ribuan orang)	120

# Grafik



Grafik 6.10 Perkembangan IPM Jawa Tengah dan Nasional	122
Grafik 6.11 Perkembangan Koefisien Gini Jawa Tengah dan Nasional	124
Grafik 6.12 Perkembangan Koefisien Gini Berdasarkan Wilayah	124
Grafik 7.1 Proyeksi Inflasi Tahun 2019	131



LAPORAN PEREKONOMIAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
AGUSTUS 2019



# Tabel



Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Jawa (% , yoy)	09	Tabel 3.2 Tabel Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan	68
Tabel 1.2 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB menurut Pengeluaran (Rp Miliar)	11	Tabel 3.3 Tabel Inflasi Tahunan Kota Jawa Tengah	69
Tabel 1.3 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 menurut Pengeluaran (Rp Miliar)	11	Tabel 3.4 Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok	69
Tabel 1.4 Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah berdasarkan ADHK menurut Pengeluaran (% , YOY)	12	Tabel 3.5 Perkembangan Inflasi Triwulanan Berdasarkan Kelompok	69
Tabel 1.5 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB 2010 menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)	27	Tabel 4.1 Pengelompokan Tabungan Perseorangan Berdasarkan Nilainya	91
Tabel 1.6 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)	28	Tabel 4.2 Perkembangan Rasio Non-Performing Loan Kredit Rumah Tangga Jawa	92
Tabel 1.7 Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah berdasarkan ADHK menurut Lapangan Usaha (% , YOY)	28	Tabel 4.3 Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan di Jawa Tengah	96
Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi APBD Jawa Tengah 2019 (Rp Miliar)	57	Tabel 4.4 Pengelompokan DPK Berdasarkan Nilai	98
Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Triwulan II Tahun 2018 dan 2019	58	Tabel 4.5 Pengelompokan Kredit Berdasarkan Nilai	99
Tabel 2.3 Realisasi Belanja Triwulan II 2018 dan 2019	61	Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama (juta orang)	113
Tabel 2.4 Alokasi Anggaran APBN berdasarkan Fungsi	61	Tabel 6.2. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, (juta orang)	114
Tabel 2.5 Alokasi Anggaran APBN berdasarkan Jenis Belanja	61	Tabel 6.3. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Februari 2016 – Februari 2018 (juta orang)	114
Tabel 2.6 Realisasi APBN berdasarkan Fungsi pada Triwulan II 2018 dan 2019	62	Tabel 6.4. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja (juta orang)	116
Tabel 2.7 Realisasi APBN berdasarkan Jenis Belanja pada Triwulan II 2018 dan 2019	62	Tabel 6.5. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (juta orang) 4	116
Tabel 3.1 Tabel Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan	68	Tabel 6.6 Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)	120



# LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA TENGAH AGUSTUS 2019

Tabel 6.7 Garis Kemiskinan Menurut Daerah, 2011-2018 (Rupiah)	122
Tabel 6.8 Perbandingan IPM Provinsi di Kawasan Pulau Jawa	122
Tabel 6.9 IPM Jawa Tengah Menurut Komponen	123
Tabel 6.10 Perbandingan Koefisien Gini Provinsi Peers	124
Tabel 7.1 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penggunaan	128
Tabel 7.2 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha	130

## TABEL INDIKATOR EKONOMI PROVINSI JAWA TENGAH

## A. PDRB &amp; Inflasi

INDIKATOR	2017				2017	2018				2018	2019	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
<b>EKONOMI MAKRO REGIONAL *)</b>												
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (% , YOY)	5,31	5,17	5,15	5,40	5,26	5,37	5,43	5,21	5,28	5,32	5,14	5,62
PERTUMBUHAN BERDASARKAN SEKTOR												
- PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	10,28	-2,86	-0,65	0,84	1,66	0,69	4,30	3,26	2,13	2,63	1,96	5,18
- PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	6,70	7,77	2,06	4,56	5,19	1,85	5,69	2,17	0,24	2,45	4,19	3,14
- INDUSTRI PENGOLAHAN	3,74	5,04	4,23	4,29	4,33	4,77	4,35	3,98	4,31	4,35	3,61	3,64
- PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	4,05	5,52	7,61	3,81	5,22	4,11	5,16	5,85	6,25	5,36	6,21	4,81
- PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	7,19	6,10	6,91	5,88	6,51	7,11	5,76	4,05	2,74	4,88	2,58	5,35
- KONSTRUKSI	5,55	7,08	7,44	8,33	7,13	6,56	5,34	7,57	4,85	6,07	5,28	3,45
- PERDAGANGAN BESAR-ECERAN DAN REPARASI MOBIL-SEPEDA MOTOR	5,16	7,74	7,62	3,62	6,01	5,16	5,34	5,81	6,47	5,70	6,39	6,43
- TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	6,24	8,44	6,18	4,46	6,30	4,90	8,62	6,50	10,07	7,55	9,92	8,32
- PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	6,09	5,40	6,15	8,12	6,45	10,24	8,29	7,32	6,95	8,17	12,55	19,40
- INFORMASI DAN KOMUNIKASI	7,08	13,15	13,80	18,81	13,27	17,19	11,83	11,56	9,53	12,39	12,12	12,41
- JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	4,36	6,84	5,78	3,75	5,17	6,37	3,61	1,75	2,73	3,58	2,63	0,17
- REAL ESTATE	7,16	6,77	6,27	5,76	6,48	6,72	5,69	5,26	4,69	5,58	4,24	6,26
- JASA PERUSAHAAN	8,08	10,03	5,51	11,23	8,72	11,14	11,04	9,48	6,47	9,48	8,73	9,66
- ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	-0,83	-0,10	3,65	7,57	2,57	4,08	4,27	2,62	6,62	4,43	2,10	3,82
- JASA PENDIDIKAN	1,85	7,42	9,69	8,92	6,97	7,08	6,26	7,87	9,75	7,76	7,32	8,51
- JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	4,68	9,84	9,83	9,99	8,60	8,82	5,99	8,84	11,49	8,80	8,98	7,89
- JASA LAINNYA	6,18	9,92	9,88	9,85	8,98	9,22	9,93	8,92	9,71	9,45	9,65	9,99
PERTUMBUHAN BERDASARKAN PERMINTAAN												
- KONSUMSI RUMAH TANGGA	4,65	4,88	4,31	4,64	4,62	4,67	5,13	4,29	4,71	4,69	4,79	5,16
- KONSUMSI LNPR	3,24	6,19	3,94	4,33	4,43	4,62	6,71	9,20	9,87	7,62	12,41	12,89
- KONSUMSI PEMERINTAH	2,08	-5,40	6,92	6,33	3,07	5,11	2,44	1,77	3,17	2,98	6,04	5,56
- PMTB	5,61	7,41	9,39	7,48	7,50	6,60	8,48	9,69	5,95	7,68	6,57	4,14
- EKSPOR LUAR NEGERI	6,76	-1,88	39,12	15,17	13,54	13,69	15,31	12,53	7,12	12,02	3,45	-2,57
- IMPOR LUAR NEGERI	13,46	-11,37	12,92	25,22	9,58	18,51	45,75	47,81	21,73	32,61	6,12	-11,25
- NET EKSPOR ANTARDAERAH	19,28	-8,37	-13,13	26,71	0,60	18,92	53,02	46,07	137,59	48,66	5,74	-2,70
- PERUBAHAN INVENTORI	21,88	-11,15	-58,34	-59,42	4,97	0,26	1,84	181,17	153,84	5,92	1,22	-17,07
EKSPOR												
- NILAI EKSPOR NON MIGAS (USD JUTA)	1.717	1.673	1.889	1.908	7.186	1.975	1.903	2.153	2.036	8.068	2.109	1.951
- VOLUME EKSPOR NON MIGAS (RIBU ØN)	685	699	773	748	2.906	714	710	793	805	3.022	767	760
IMPOR												
- NILAI IMPOR NON MIGAS (USD JUTA)	1.500	1.572	1.659	2.158	6.889	2.022	2.311	2.585	2.733	9.652	2.421	2.236
- VOLUME IMPOR NON MIGAS (RIBU ØN)	1.153	1.310	1.169	1.371	5.003	1.179	1.242	1.443	1.577	5.441	1.357	1.261
INDEKS HARGA KONSUMEN												
PROVINSI JAWA TENGAH	126,65	128,35	128,12	129,34	129,34	130,94	131,85	131,69	132,98	132,98	133,32	135,16
KOTA PURWOKERTO	125,22	127,23	126,71	128,05	128,05	129,19	130,53	130,30	131,87	131,87	131,99	133,63
KOTA SURAKARTA	124,24	125,88	124,64	126,21	126,21	127,76	128,86	127,98	129,30	129,30	130,05	131,89
KOTA SEMARANG	126,35	127,85	128,07	129,13	129,13	130,71	131,45	131,57	132,70	132,70	132,95	134,87
KOTA TEGAL	123,94	126,23	126,19	127,43	127,43	128,62	130,17	129,95	131,35	131,35	131,44	133,53
KOTA KUDUS	134,15	136,05	135,51	136,67	136,67	138,90	139,55	139,44	140,92	140,92	141,29	142,75
KOTA CILACAP	130,59	132,67	132,12	133,45	133,45	135,58	136,35	136,12	137,73	137,73	138,27	139,93
LAJU INFLASI TAHUNAN (% , YOY)												
PROVINSI JAWA TENGAH	3,30	4,61	3,58	3,71	3,71	3,39	2,72	2,79	2,82	2,82	1,82	2,52
KOTA PURWOKERTO	3,22	4,84	4,02	3,91	3,91	3,17	2,59	2,83	2,98	2,98	2,17	2,37
KOTA SURAKARTA	2,83	4,11	2,64	3,10	3,10	2,83	2,37	2,68	2,45	2,45	1,79	2,35
KOTA SEMARANG	3,27	4,44	3,62	3,64	3,64	3,45	2,82	2,74	2,77	2,77	1,71	2,60
KOTA TEGAL	3,17	4,71	3,51	4,03	4,03	3,78	3,12	2,98	3,08	3,08	2,19	2,58
KOTA KUDUS	3,86	5,56	4,48	4,17	4,17	3,54	2,57	2,90	3,11	3,11	1,72	2,29
KOTA CILACAP	4,21	5,47	4,06	4,41	4,41	3,82	2,77	3,03	3,21	3,21	1,98	2,63

\*Mulai tahun 2014 perhitungan IHK menggunakan SBH 2012  
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

**B. Perbankan dan Sistem Pembayaran**

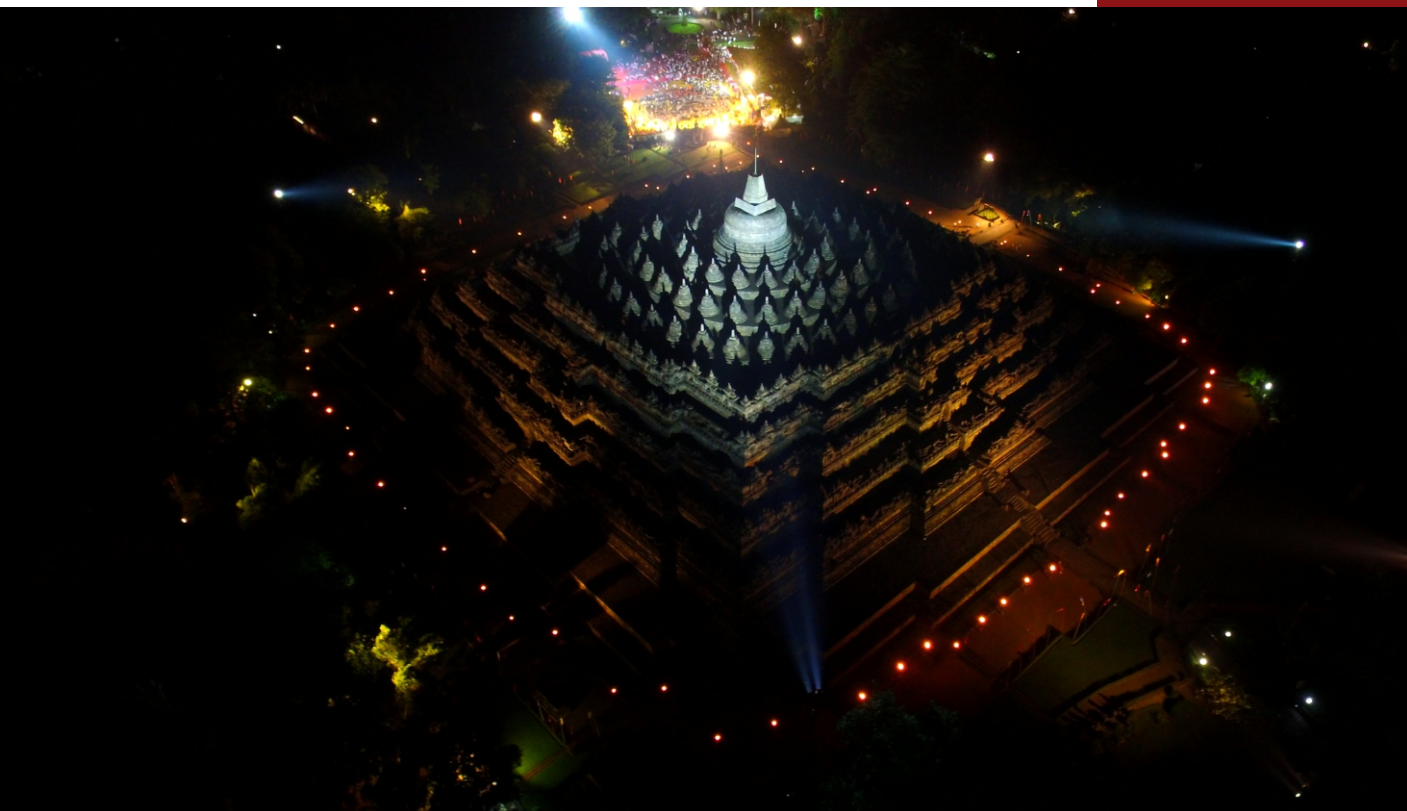
INDIKATOR	2017				2017	2018				2018	2019	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
<b>PERBANKAN **)</b>												
DANA PIHAK KETIGA (RP TRILIUN)	245,78	252,59	257,35	262,97	262,97	270,39	279,53	282,04	285,67	285,67	288,89	305,82
- GIRO	35,81	35,91	35,65	32,77	32,77	39,99	40,68	39,06	35,10	35,10	38,28	41,57
- TABUNGAN	119,59	125,19	128,37	138,37	138,37	135,66	142,07	144,28	152,72	152,72	148,23	154,72
- DEPOSITO	90,38	91,49	93,33	91,83	91,83	94,74	96,78	98,70	97,84	97,84	102,37	109,54
KREDIT (RP TRILIUN)	237,77	247,13	250,76	258,42	258,42	260,10	268,37	272,37	279,82	279,82	282,12	287,54
- MODAL KERJA	125,47	132,20	134,51	138,34	138,34	138,00	145,53	149,63	153,09	153,09	151,16	154,93
- KONSUMSI	40,23	40,71	40,93	41,83	41,83	42,50	43,31	41,60	43,45	43,45	47,05	47,82
- INVESTASI	72,08	74,21	75,33	78,26	78,26	79,59	79,53	81,14	83,28	83,28	83,91	84,79
LOAN TO DEPOSIT RATIO (%)	96,74	97,82	97,44	98,27	98,27	96,19	96,01	96,57	97,95	97,95	97,66	94,02
NPL GROSS (%)	3,06	3,23	3,00	2,22	2,22	2,43	2,43	2,59	2,45	2,45	2,48	2,38

\*\*Data Perbankan merupakan data bank umum yang ada di Jawa Tengah (Lokasi Bank Pelapor)

**C. Sistem Pembayaran**

INDIKATOR	2017				2017	2018				2018	2019	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
<b>SISTEM PEMBAYARAN</b>												
<b>TRANSAKSI KLIRING</b>												
- RATA-RATA HARIAN NOMINAL TRANSAKSI (RP MILIAR)	770	707	681	679	709	653	714	702	645	2.715	574	621
- RATA-RATA HARIAN VOLUME TRANSAKSI (LEMBAR)	18.555	18.814	17.340	17.732	18.110	17.035	18.382	17.601	16.074	69.092	14.214	15.172
<b>TRANSAKSI KAS (RP TRILIUN)</b>												
-INFLOW	18,38	13,91	29,38	14,71	76,39	20,97	24,38	24,77	17,73	87,85	21,90	28,54
-OUTFLOW	10,12	24,32	9,92	15,98	60,34	11,34	29,85	11,41	16,81	69,40	11,04	18,61





# RINGKASAN UMUM

## Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Pada triwulan II 2019, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah tercatat sebesar Rp339,8 triliun. Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan laporan terpantau tumbuh menguat menjadi 5,62% (yoy), dari triwulan I 2019 yang tercatat 5,12% (yoy). Capaian ini sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi triwulan II 2019 berada pada kisaran 5,3%-5,7%. Angka pertumbuhan ini berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan laporan (5,05%; yoy), namun masih berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Kawasan Jawa (5,68%; yoy).

Ditinjau dari sisi pengeluaran, percepatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II 2019 terutama bersumber dari menguatnya konsumsi rumah tangga dan lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) sejalan dengan peningkatan permintaan masyarakat sesuai dengan pola musiman saat periode Ramadan dan Idulfitri. Sementara itu, komponen permintaan domestik lainnya, yaitu konsumsi pemerintah dan investasi juga terpantau masih cukup kuat walaupun mengalami perlambatan. Lebih lanjut, kinerja ekspor luar negeri yang menurun menjadi penahan kinerja perekonomian Jawa Tengah untuk tumbuh lebih tinggi. Hal tersebut seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi global, termasuk negara mitra dagang utama Jawa Tengah. Sebagai komponen pengurang PDRB, penurunan impor luar negeri berpengaruh positif dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Meskipun penurunan impor luar negeri berdampak positif terhadap penguatan laju pertumbuhan, di sisi lain penurunan kinerja komponen ini turut berpengaruh terhadap tertahannya kinerja net ekspor antardaerah Jawa Tengah.

Ditinjau dari sisi lapangan usaha, peningkatan kinerja perekonomian ditopang oleh perbaikan kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang dipengaruhi oleh pergeseran masa panen. Lebih lanjut, akselerasi pertumbuhan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum turut mendorong laju perekonomian Jawa Tengah triwulan II 2019.



Namun demikian, kinerja lapangan usaha industri pengolahan tumbuh stagnan dibandingkan triwulan lalu. Sejalan dengan pertumbuhan industri pengolahan yang terbatas dan rendahnya impor barang konsumsi, kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terpantau mengalami perlambatan sehingga menjadi penahan laju perekonomian Jawa Tengah pada triwulan laporan.

### Keuangan Pemerintah

Postur pendapatan dalam APBD Provinsi Jawa Tengah 2019 ditargetkan meningkat terbatas menjadi Rp25,97 Triliun. Pada triwulan II 2019, realisasinya tercatat Rp12,69 Triliun, yang didorong oleh komponen Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah. Sementara, realisasi belanja tercatat sebesar Rp9,26 triliun, utamanya berasal dari meningkatnya belanja tidak langsung pada komponen belanja pegawai dan belanja hibah. Realisasi belanja ini digunakan untuk penyaluran PKH tahap II, dan kenaikan gaji dan pemberian THR untuk ASN.

Pagu APBN Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 adalah sebesar Rp52,15 Triliun, sedikit lebih rendah daripada tahun lalu. Pada triwulan laporan, realisasi belanja APBN tercatat Rp21,07 Triliun dan telah dialokasikan ke berbagai fungsi utama yang sejalan dengan prioritas capaian Jawa Tengah, seperti pengentasan kemiskinan dan akses terhadap pendidikan. Berdasarkan jenis belanjanya, realisasi belanja digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang. Ke depan, kinerja fiskal di Jawa Tengah dapat dioptimalkan antara lain melalui optimalisasi penerimaan pajak, sinkronisasi belanja antara pemerintah pusat dan daerah, perbaikan pola penyerapan, dan alokasi di sektor-sektor strategis.

### Perkembangan Inflasi Daerah

Pada triwulan II 2019, inflasi tahunan Provinsi Jawa Tengah secara lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2019. Berdasarkan disagregasi kelompoknya, peningkatan inflasi tahunan pada triwulan laporan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya tekanan inflasi tahunan pada kelompok bahan makanan serta kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau. Peningkatan inflasi tahunan pada kelompok bahan makanan terutama disebabkan oleh berkurangnya pasokan komoditas hortikultura pada masa paceklik. Selanjutnya dari sisi permintaan, tren peningkatan konsumsi masyarakat pada periode hari raya keagamaan nasional, yang jatuh bersamaan dengan masa paceklik hortikultura semakin mendorong tekanan harga pada kelompok bahan makanan. Peningkatan konsumsi masyarakat tersebut berlangsung bersamaan dengan masa paceklik tanaman hortikultura, semakin mendorong tekanan inflasi pada kelompok bahan makanan.

Pada triwulan III 2019, tekanan inflasi tahunan bahan makanan diperkirakan akan meningkat seiring dengan berlanjutnya penurunan pasokan kelompok bahan makanan, khususnya pada komoditas pangan dan hortikultura. Pulihnya aktivitas produksi pelaku usaha dan investasi masyarakat, akan mendorong tekanan harga komponen barang dan jasa pada kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar. Peningkatan inflasi tahunan Jawa Tengah tersebut diperkirakan akan terjaga di rentang bawah target sasaran inflasi nasional sebesar  $3,5 \pm 1\%$ .

### Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan, dan UMKM

Seiring dengan kinerja perekonomian yang tumbuh menguat, stabilitas keuangan Jawa Tengah pada triwulan II 2019 terjaga. Penyaluran kredit pada LU

perdagangan besar dan eceran, pertanian, dan konstruksi terus bertumbuh dan mendukung kontribusi LU dimaksud terhadap perekonomian Jawa Tengah. Sementara, penyaluran kredit pada LU industri pengolahan mencatatkan kontraksi, yang ditengarai relatif stabilnya aktifitas korporasi akibat faktor eksternal (eskalasi perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok). Indikator kinerja korporasi seperti profitabilitas, likuiditas, dan struktur pembiayaan terpantau masih sehat.

Kontribusi permintaan RT yang meningkat pada triwulan laporan turut mendorong pembiayaan RT bertumbuh. Kredit RT mayoritas disalurkan untuk pembiayaan KPR, multiguna, dan KKB, dengan risiko kredit masing-masing terjaga di bawah *threshold*. Selain itu, dari sisi pengembangan akses keuangan dan UMKM, proporsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan Jawa Tengah telah mencapai 41,46%, di atas ketentuan penyaluran kredit UMKM yang mewajibkan pangsa minimum di tahun 2018 adalah 20%.

### Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Perkembangan indikator sistem pembayaran di Jawa Tengah pada triwulan II 2019 meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Nilai transaksi melalui SKNBI masih melanjutkan tren kontraksi tetapi tidak sedalam pada triwulan I 2019. Pertumbuhan triwulanan laporan mengalami kontraksi 0,66% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya, yang mengalami kontraksi sebesar 11,34% (yoy).

Aliran uang di Jawa Tengah mencatatkan posisi *net inflow* sebesar Rp3,77 triliun seiring dengan kembali masuknya aliran uang ke perbankan setelah periode Lebaran. Transaksi menggunakan Uang Kertas Asing

(UKA) di KUPVA BB mengalami peningkatan dari sisi pembelian UKA secara triwulanan dan tahunan, seiring dengan meningkatnya transfer dana dari Luar Negeri ke Jawa Tengah. Penetrasi elektronifikasi pembayaran jalan tol selama periode Lebaran tetap terjaga di level 99%. Untuk memperluas implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dan meningkatkan efisiensi dan transparansi penggunaan dana BOS, telah dilakukan penambahan sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara non tunai di 15 Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah.

### Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah pada triwulan II 2019 relatif membaik, tercermin dari berkurangnya tingkat kemiskinan, peningkatan ketersediaan tenaga kerja, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta Nilai Tukar Petani (NTP). Jumlah penduduk usia kerja pada periode Februari 2019 meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sedangkan angka pengangguran mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya namun menurun apabila dibandingkan dengan periode Agustus 2018. Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan II 2019 menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan I 2019 dan lebih baik dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan, dengan perbaikan pada aspek pendidikan, kesehatan, maupun standar hidup.

### Prospek Perekonomian Daerah

Secara keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada 2019 diperkirakan mengalami perbaikan dibandingkan 2018, meski relatif terbatas. Berdasarkan sisi pengeluaran, akselerasi pertumbuhan diperkirakan berasal dari konsumsi RT, konsumsi LNPRT dan konsumsi pemerintah. Lebih lanjut, ekspor luar negeri diperkirakan tumbuh

melambat seiring dengan perkiraan volume perdagangan dunia yang menurun akibat pertumbuhan ekonomi global yang melandai dan risiko ketegangan hubungan dagang antarnegara. Pertumbuhan investasi juga diperkirakan melambat seiring dengan telah selesainya beberapa proyek strategis pemerintah pada akhir 2018. Ketidakpastian perekonomian global serta iklim politik dalam negeri menjelang dan pasca kegiatan pemilihan umum juga diperkirakan mendorong pelaku usaha mengambil sikap *wait and see* dalam melakukan investasi.

Dari sisi lapangan usaha, peningkatan pertumbuhan berasal dari lapangan usaha pertanian dan perdagangan, sedangkan kinerja industri pengolahan diperkirakan tumbuh melambat pada tahun 2019. Kinerja lapangan usaha pertanian diproyeksikan lebih tinggi pada tahun 2019 dibanding tahun 2018. Selanjutnya, sejalan dengan masih kuatnya permintaan domestik, permintaan terhadap produk Jawa Tengah diperkirakan mengalami peningkatan yang mendorong perbaikan kinerja lapangan usaha perdagangan. Sementara itu, kinerja lapangan usaha industri pengolahan diperkirakan tertahan pada tahun 2019 seiring dengan melemahnya permintaan ekspor. Lebih lanjut, penurunan impor luar negeri, khususnya kelompok bahan baku, dapat menjadi indikasi awal penurunan kapasitas maupun kinerja industri pengolahan.

Inflasi tahunan Jawa Tengah pada keseluruhan tahun 2019 diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Faktor utama yang diperkirakan mendorong peningkatan laju inflasi tahunan tersebut terutama berasal dari kondisi domestik. Penurunan kinerja pertanian sebagai dampak gangguan iklim El-Nino akan mendorong inflasi kelompok bahan makanan yang berdampak lanjutan pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau.

Lebih lanjut lagi, tekanan eksternal karena ketidakpastian kondisi ekonomi dan geopolitik di tingkat global, selanjutnya berisiko mendorong pelemahan nilai tukar Rupiah. Selanjutnya, rencana kebijakan fiskal Pemerintah pada komponen energi akan menambah tekanan inflasi pada kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah senantiasa berkoordinasi dalam menyusun rekomendasi kebijakan fiskal yang mendukung kestabilan perekonomian nasional.





## PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL

**Perekonomian Provinsi Jawa Tengah triwulan II 2019 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2019.**

- Ditinjau dari sisi pengeluaran, akselerasi pertumbuhan terutama bersumber dari penguatan kinerja konsumsi rumah tangga dan lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) sejalan dengan meningkatnya permintaan masyarakat saat periode Ramadan dan Idulfitri. Sementara itu, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor luar negeri masih tercatat tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan I 2019.
- Ditinjau dari sisi lapangan usaha, percepatan pertumbuhan bersumber dari penguatan kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta penyediaan akomodasi & makan minum. Namun demikian, kinerja dua lapangan usaha utama lainnya yaitu industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tercatat mengalami stagnansi dan perlambatan pertumbuhan.



## 1.1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL TRIWULAN II 2019<sup>1</sup>

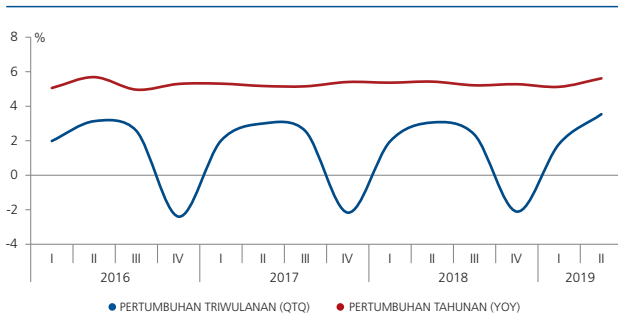
### Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada triwulan II 2019 tercatat sebesar 5,62% (yoy).

Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2019 sebesar 5,12% (yoy). Kinerja perekonomian Jawa Tengah tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat pada level 5,05% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan laju perekonomian Kawasan Jawa sebesar 5,68% (yoy). Capaian ini sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi triwulan II 2019 berada pada kisaran 5,3%-5,7% (yoy).

Perekonomian Jawa Tengah mencatatkan percepatan pertumbuhan pada triwulan laporan, berbeda halnya dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan kawasan Jawa yang terpantau stabil. Pada triwulan II 2019, tiga provinsi di kawasan Jawa tercatat tumbuh terakselerasi

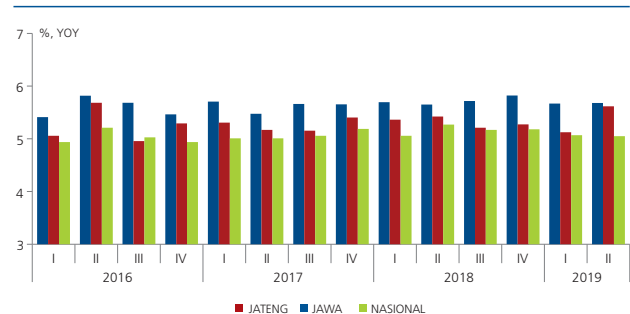
yaitu Jawa Timur (5,72%), Jawa Barat (5,68%), dan Jawa Tengah (5,62%). Sementara tiga provinsi lainnya terpantau tumbuh melambat, yaitu DKI Jakarta (5,71%), DI Yogyakarta (6,80%), dan Banten (5,35%). Jika dicermati lebih jauh, provinsi yang mencatatkan peningkatan pertumbuhan merupakan provinsi yang menjadi daerah tujuan kegiatan mudik dalam rangka perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Pada triwulan II 2019, perekonomian Provinsi Jawa Tengah menyumbang 8,57% terhadap perekonomian Nasional, atau 14,37% terhadap perekonomian kawasan Jawa. Nilai ini tidak banyak berubah dibandingkan periode sebelumnya. Dengan sumbangan tersebut, Jawa Tengah menjadi provinsi penyumbang keempat terbesar dalam perekonomian nasional maupun kawasan Jawa, setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Perekonomian kawasan Jawa secara dominan masih disumbang oleh Provinsi



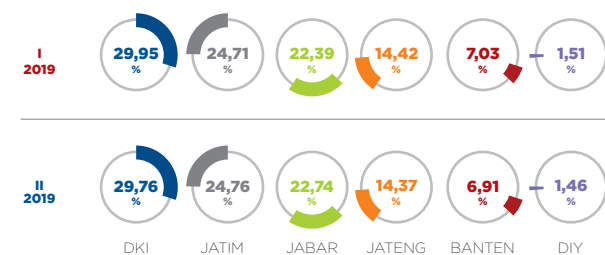
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa, dan Nasional



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.3 Struktur Perekonomian Kawasan Jawa berdasarkan Provinsi

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Jawa (% yoy)

PROVINSI	TW I 2019	TW II 2019
DKI JAKARTA	6,25	5,71
BANTEN	5,44	5,35
JABAR	5,40	5,68
JATENG	5,12	5,62
DIY	7,51	6,80
JATIM	5,55	5,72
JAWA	5,67	5,68

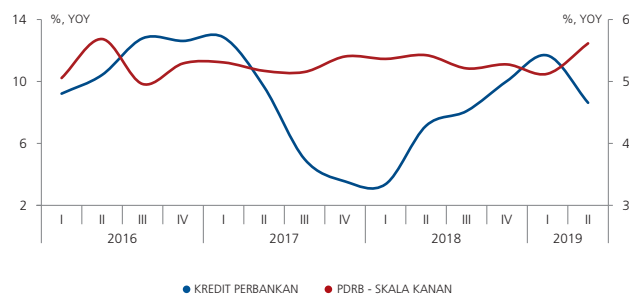
Sumber: BPS, diolah

1. Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah diambil dari Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Triwulan II 2019 dengan menggunakan tahun dasar 2010 berbasis SNA 2008 yang dikeluarkan BPS Provinsi Jawa Tengah. Apabila terdapat perbedaan angka pertumbuhan tahunan yang tertera pada BRS periode saat ini dengan perhitungan ADHK rilis periode ini dengan periode sebelumnya, yang menjadi acuan dalam penulisan Laporan Perekonomian Provinsi adalah angka PDRB ADHK berdasarkan BRS pada saat periode laporan. Hal ini dimungkinkan mengingat besaran PDRB tahun 2019, 2018, dan 2017 masih bersifat sementara.

DKI Jakarta dan Jawa Timur dengan pangsa dari kedua daerah ini mencapai lebih dari 50%.

Kegiatan ekonomi dapat tercermin dari beberapa sarana pendukungnya, seperti aktivitas sistem pembayaran nontunai yang terpantau membaik, meskipun masih berkontraksi. Pada triwulan laporan, aktivitas sistem pembayaran nontunai menunjukkan peningkatan, tercermin dari nilai rata-rata perputaran kliring harian<sup>2</sup> yang tumbuh -11,43% (yoy) atau tidak sedalam kontraksi pada triwulan I 2019 yang tumbuh -13,54% (yoy). Sementara itu, pengelolaan uang rupiah dan pertumbuhan penyaluran kredit perbankan menunjukkan perlambatan. Aliran keluar (*outflow*) uang kartal melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Jawa Tengah tercatat kontraksi lebih dalam menjadi -37,65% (yoy), lebih dalam dibanding kontraksi -2,62% (yoy) pada triwulan I 2019. Meskipun aktivitas ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II 2019 mengalami percepatan, kebutuhan akan pembiayaan terpantau tumbuh melambat. Hal tersebut tercermin dari penyaluran kredit perbankan yang tumbuh lebih rendah pada periode tersebut. Pada triwulan laporan, pertumbuhan kredit perbankan yang disalurkan di Jawa Tengah tercatat 8,63% (yoy)<sup>3</sup>, melambat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 11,68% (yoy).

Ditinjau dari sisi pengeluaran, percepatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II

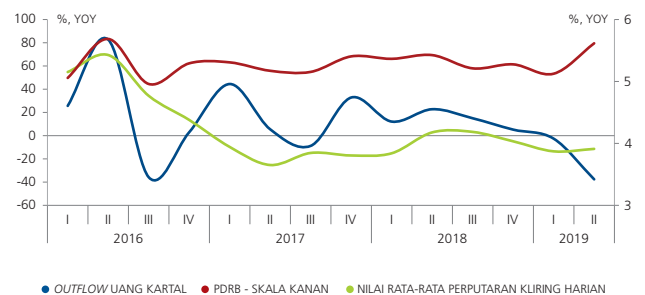


Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

**Grafik 1.4** Pertumbuhan Tahunan Kredit Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi

2019 terutama bersumber dari penguatan konsumsi rumah tangga dan lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRRT) sejalan dengan peningkatan permintaan masyarakat sesuai dengan pola musiman saat periode Ramadan dan Idulfitri. Sementara itu, komponen permintaan domestik lainnya, yaitu konsumsi pemerintah dan investasi juga terpantau masih cukup kuat walaupun mengalami perlambatan. Lebih lanjut, kinerja ekspor luar negeri yang menurun menjadi penahan kinerja perekonomian Jawa Tengah untuk tumbuh lebih tinggi. Hal tersebut seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi global, termasuk negara mitra dagang utama Jawa Tengah.

Ditinjau dari sisi lapangan usaha, peningkatan kinerja perekonomian ditopang oleh perbaikan kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang dipengaruhi oleh pergeseran masa panen. Lebih lanjut, akselerasi pertumbuhan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum turut mendorong laju perekonomian Jawa Tengah triwulan II 2019. Namun demikian, kinerja lapangan usaha industri pengolahan tumbuh stagnan dibandingkan triwulan lalu. Sejalan dengan stagnansi pertumbuhan industri pengolahan dan rendahnya impor barang konsumsi, kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terpantau mengalami perlambatan sehingga menjadi penahan laju perekonomian Jawa Tengah pada triwulan laporan.



Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

**Grafik 1.5** Pertumbuhan Tahunan *Outflow* Uang Kartal, Rata-Rata Perputaran Kliring Harian, dan Pertumbuhan Ekonomi

2. Rata-rata nilai transaksi per hari dari kliring debit penyerahan dan kliring kredit setelah dikurangi kliring pengembalian di Jawa Tengah selama periode laporan

3. Pertumbuhan kredit pada Bab I menggunakan lokasi proyek Jawa Tengah, yang berarti kredit yang disalurkan oleh bank se-Indonesia ke debitur atau proyek di Jawa Tengah.

### 1.1.1. Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran

Berdasarkan sisi pengeluaran, perekonomian Jawa Tengah pada triwulan II 2019 masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan pangsa 60,66%. Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi juga memberikan kontribusi signifikan, yaitu sebesar 32,34%. Lebih lanjut, pangsa ekspor luar negeri sebesar 8,66%, pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 6,74%, dan net ekspor antardaerah sebesar 3,53%. Pangsa impor luar negeri sebagai elemen pengurang dalam perekonomian Jawa Tengah, masih berkontribusi cukup besar meskipun menunjukkan penurunan, yaitu sebesar 14,63%. Komposisi ini tidak banyak berubah dibandingkan periode sebelumnya.

Penguatan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada periode laporan terutama didorong oleh akselerasi kinerja konsumsi rumah tangga seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat dalam rangka perayaan HBKN. Dengan penguatan ini,

kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami peningkatan. Selanjutnya, impor luar negeri yang menjadi komponen pengurang PDRB terpantau tumbuh negatif, sehingga memberikan pengaruh positif dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Sementara itu, komponen permintaan domestik lainnya yaitu pertumbuhan konsumsi pemerintah dan investasi terpantau masih cukup kuat, meskipun lebih rendah dibanding triwulan I 2019. Kinerja investasi yang merupakan komponen pengeluaran dengan pangsa terbesar kedua mencatatkan perlambatan pada periode laporan, sehingga menahan laju perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi. Lebih lanjut, ekspor luar negeri juga tercatat tumbuh lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya. Pelemahan ekspor tersebut seiring dengan penguatan tekanan eksternal akibat berlanjutnya perlambatan pertumbuhan ekonomi

Tabel 1.2 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB menurut Pengeluaran (Rp Miliar)

KOMPONEN PENGELUARAN	2017*			2017*	2018**				2018**	2019**	
	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
KONSUMSI RUMAH TANGGA	177.431	181.152	183.066	714.363	185.982	190.990	194.437	197.126	768.534	199.632	206.128
KONSUMSI LNPRT	3.329	3.284	3.378	13.168	3.418	3.630	3.651	3.793	14.492	3.940	4.179
KONSUMSI PEMERINTAH	20.361	23.064	36.830	94.262	15.384	21.384	23.508	38.437	98.712	16.466	22.901
INVESTASI	89.288	94.089	98.594	366.766	93.577	101.074	108.660	110.438	413.749	105.188	109.897
EKSPOR LUAR NEGERI	24.646	27.790	28.720	106.463	29.350	29.350	33.290	32.326	124.316	31.613	29.412
IMPOR LUAR NEGERI	35.241	38.988	48.188	160.855	47.989	56.169	66.100	64.701	234.958	51.434	49.697
NET EKSPOR ANTARDAERAH	5.572	9.482	1.238	28.605	18.034	19.272	22.490	8.361	68.156	14.566	11.979
PERUBAHAN INVENTORI	6.229	2.458	(6.416)	9.628	7.433	6.472	7.131	(5.337)	15.699	7.926	4.992
<b>P D R B</b>	<b>291.616</b>	<b>302.332</b>	<b>297.224</b>	<b>1.172.400</b>	<b>305.190</b>	<b>316.003</b>	<b>327.066</b>	<b>320.442</b>	<b>1.268.701</b>	<b>327.896</b>	<b>339.791</b>

\*Angka Sementara \*\*Angka Sangat Sementara  
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Tabel 1.3 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 menurut Pengeluaran (Rp Miliar)

KOMPONEN PENGELUARAN	2017*			2017*	2018**				2018**	2019**	
	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
KONSUMSI RUMAH TANGGA	132.218	134.651	134.843	531.584	135.931	138.997	140.425	141.189	556.541	142.435	146.169
KONSUMSI LNPRT	2.242	2.200	2.257	8.875	2.278	2.392	2.402	2.479	9.551	2.560	2.700
KONSUMSI PEMERINTAH	12.733	14.249	23.303	59.554	9.743	13.043	14.501	24.043	61.329	10.299	13.767
INVESTASI	64.784	67.888	70.240	264.716	65.883	70.280	74.464	74.418	285.045	70.442	73.187
EKSPOR LUAR NEGERI	17.626	19.795	20.100	75.671	20.635	20.325	22.276	21.532	84.767	21.347	19.803
IMPOR LUAR NEGERI	23.121	25.511	30.743	104.677	29.986	33.699	37.707	37.424	138.817	31.824	29.909
NET EKSPOR ANTARDAERAH	13.591	14.749	5.271	50.075	19.580	20.796	21.544	12.523	74.443	20.463	20.234
PERUBAHAN INVENTORI	3.383	1.136	(1.080)	7.953	4.525	3.446	3.195	(2.743)	8.423	4.580	2.857
<b>P D R B</b>	<b>223.455</b>	<b>229.157</b>	<b>224.190</b>	<b>893.750</b>	<b>228.588</b>	<b>235.578</b>	<b>241.099</b>	<b>236.018</b>	<b>941.283</b>	<b>240.303</b>	<b>248.808</b>

\*Angka Sementara \*\*Angka Sangat Sementara  
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Tabel 1.4 Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah berdasarkan ADHK menurut Pengeluaran (% , YOY)

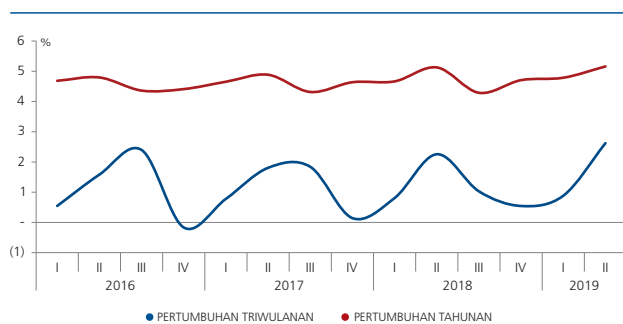
KOMPONEN PENGELUARAN	2017*			2017*	2018**				2018**	2019**	
	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
KONSUMSI RUMAH TANGGA	4,88	4,31	4,64	4,62	4,67	5,13	4,29	4,71	4,69	4,79	5,16
KONSUMSI LNPRT	6,19	3,94	4,33	4,43	4,62	6,71	9,20	9,87	7,62	12,41	12,89
KONSUMSI PEMERINTAH	(5,40)	6,92	6,33	3,07	5,11	2,44	1,77	3,17	2,98	5,71	5,56
INVESTASI	7,41	9,39	7,48	7,50	6,60	8,48	9,69	5,95	7,68	6,92	4,14
EKSPOR LUAR NEGERI	(1,88)	39,12	15,17	13,54	13,69	15,31	12,53	7,12	12,02	3,45	(2,57)
IMPOR LUAR NEGERI	(11,37)	12,92	25,22	9,58	18,51	45,75	47,81	21,73	32,61	6,13	(11,25)
NET EKSPOR ANTARDAERAH	(8,37)	(13,13)	26,71	0,60	18,92	53,02	46,07	137,59	48,66	4,51	(2,70)
PERUBAHAN INVENTORI	(11,15)	(58,34)	(59,42)	4,97	0,26	1,84	181,17		5,92		
<b>P D R B</b>	<b>5,17</b>	<b>5,15</b>	<b>5,40</b>	<b>5,26</b>	<b>5,37</b>	<b>5,43</b>	<b>5,21</b>	<b>5,28</b>	<b>5,32</b>	<b>5,12</b>	<b>5,62</b>

\*Angka Sementara \*\*Angka Sangat Sementara  
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

global dan pelemahan volume perdagangan dunia. Selanjutnya, meskipun penurunan impor luar negeri berdampak positif terhadap penguatan laju pertumbuhan, penurunan kinerja impor luar negeri khususnya berupa migas, di sisi lain berpengaruh terhadap kinerja net ekspor antardaerah Jawa Tengah yang tertahan. Hal ini mengingat berkurangnya bahan baku minyak menyebabkan penurunan kinerja industri pengilangan minyak di Jawa Tengah, sehingga perdagangan komoditas ini ke daerah lain juga mengalami penurunan.

### 1.1.1.1. Pengeluaran Konsumsi

Secara keseluruhan, pengeluaran konsumsi tetap kuat dan menjadi penopang laju perekonomian Jawa Tengah pada triwulan II 2019. Pengeluaran konsumsi mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi pada triwulan laporan. Akselerasi pertumbuhan pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya didorong oleh konsumsi swasta, yaitu komponen konsumsi rumah tangga dan konsumsi LNPRT.



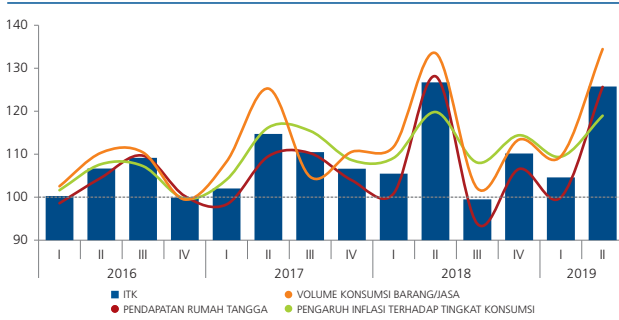
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.6 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga

Sementara komponen konsumsi pemerintah tercatat tumbuh melambat dibanding triwulan I 2019.

**Konsumsi rumah tangga sebagai komponen pengeluaran dengan pangsa terbesar tumbuh 5,16% (yoy) pada triwulan II 2019**, meningkat signifikan dibandingkan triwulan I 2019 yang sebesar 4,79% (yoy). Penguatan pengeluaran konsumsi rumah tangga terjadi pada seluruh subkomponen pengeluaran yang terkait dengan momen Ramadan dan Idulfitri yang terjadi di periode laporan. Jawa Tengah merupakan salah satu daerah tujuan utama kegiatan mudik, sehingga konsumsi masyarakat pada periode laporan meningkat cukup signifikan. Lebih lanjut, adanya tambahan pengasialan serta capaian inflasi yang rendah dan stabil mendorong terjaganya ekspektasi, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Pangsa konsumsi rumah tangga yang mencapai 60% dari total PDRB, menyebabkan penguatan kinerja konsumsi rumah tangga yang cukup tinggi dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara keseluruhan pada triwulan laporan.

Akselerasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga tersebut juga terkonfirmasi dari hasil Survei Tendensi Konsumen yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan survei tersebut, kondisi ekonomi rumah tangga di Jawa Tengah mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan tingkat optimisme konsumen yang semakin kuat dibanding



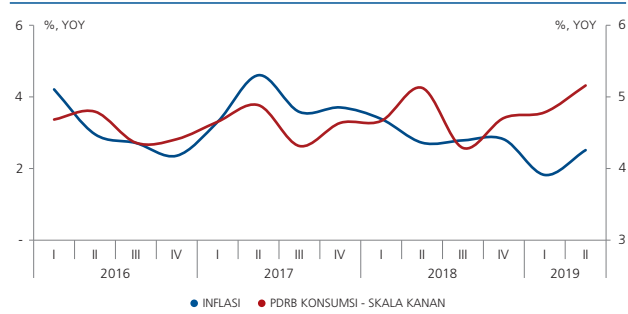
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

**Grafik 1.7** Indeks Tendensi Konsumen

triwulan I 2019. Perkembangan tersebut ditunjukkan oleh nilai Indeks Tendensi Konsumen (ITK) triwulan II 2019 yang berada di atas level 100, yakni sebesar 125,73. Optimisme terhadap perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga tersebut lebih tinggi dibanding nilai ITK triwulan sebelumnya yang tercatat 104,59.

Meningkatnya kondisi ekonomi rumah tangga terutama didorong oleh peningkatan persepsi terhadap pendapatan rumah tangga, tercermin dari indeks pendapatan saat ini yang di atas level 100, yaitu sebesar 125,66. Nilai indeks ini berbalik arah dari triwulan lalu yang cenderung pesimis dengan indeks 99,97. Peningkatan ini dikarenakan rumah tangga memperoleh tambahan pendapatan pada periode laporan, yaitu berupa tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja, gaji ke-14 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), serta peningkatan keuntungan yang diperoleh pelaku usaha seiring bertambahnya volume penjualan sektor riil saat periode Ramadan dan Idulfitri. Adanya tambahan pendapatan tersebut mampu mendorong peningkatan konsumsi masyarakat pada periode laporan.

Hasil survei menunjukkan adanya peningkatan volume konsumsi barang dan jasa dibanding triwulan I 2019. Hal ini tercermin dari indeks volume konsumsi barang/jasa triwulan II 2019 sebesar 134,46, lebih tinggi dari indeks triwulan sebelumnya (109,50). Peningkatan konsumsi masyarakat tidak hanya terbatas pada konsumsi makanan, namun juga barang/jasa non-



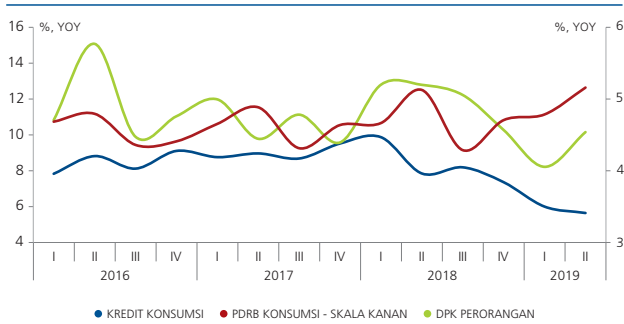
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

**Grafik 1.8** Perkembangan Inflasi dan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga

makanan. Konsumsi non-makanan yang turut mendorong peningkatan volume konsumsi barang/jasa terutama adalah konsumsi pakaian, diikuti oleh jasa transportasi dan telekomunikasi. Kondisi ini mengafirmasi tren musiman yang menunjukkan peningkatan konsumsi masyarakat pada periode hari raya keagamaan nasional serta periode libur sekolah.

Lebih lanjut, faktor kestabilan harga mendukung peningkatan kinerja konsumsi masyarakat. Pada triwulan II 2019, Jawa Tengah mencatatkan inflasi sebesar 2,52% (yoy) atau lebih rendah dibanding historis rata-rata inflasi triwulan II pada tiga tahun terakhir (2016-2018) sebesar 3,43% (yoy) dan masih berada di bawah rentang sasaran inflasi tahun 2019 sebesar 3,5%±1%. Inflasi yang relatif kecil tidak mempengaruhi rumah tangga dalam melakukan kegiatan konsumsi dengan nilai indeks sebesar 118,96.

Sementara itu, sumber pendanaan kegiatan konsumsi yang berasal dari kredit perbankan menunjukkan perlambatan pertumbuhan. Penyaluran kredit konsumsi di Jawa Tengah oleh perbankan tumbuh 5,64% (yoy); melambat dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 6% (yoy). Berdasarkan jenis kredit, melemahnya penyaluran kredit konsumsi terutama dipengaruhi oleh Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB) dan kredit multiguna lainnya. Kinerja penyaluran KKB melambat menjadi tumbuh 7,85% (yoy), sedangkan penyaluran kredit multiguna lainnya melemah menjadi 2,91% (yoy).



Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

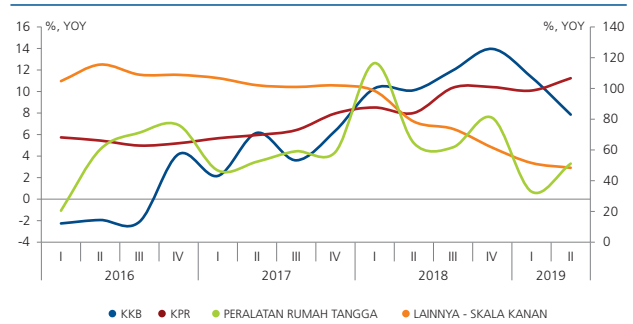
**Grafik 1.9 Perkembangan Kredit Konsumsi, DPK Perorangan, dan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga**

Sementara itu, kinerja penyaluran Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) masih menunjukkan penguatan menjadi tumbuh 11,24% (yoy).

Lebih lanjut, simpanan rumah tangga di perbankan Jawa Tengah pada triwulan laporan tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2019. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) oleh golongan nasabah perorangan yang tumbuh 10,16% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya (8,22%; yoy). Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung lebih bersikap hati-hati dengan meningkatkan simpanan di bank dan tidak membelanjakan seluruh pendapatannya untuk kegiatan konsumsi.

**Konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) pada triwulan II 2019 tumbuh 12,89% (yoy)**, kembali meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan I 2019 yang tercatat 12,41% (yoy). Capaian ini jauh lebih tinggi dibanding historis rata-rata pertumbuhan konsumsi LNPRT triwulan II pada lima tahun terakhir (2014-2018) sebesar 5,20% (yoy). Percepatan pertumbuhan pada triwulan laporan terutama didorong oleh peningkatan belanja lembaga keagamaan dan kegiatan sosial pada periode Ramadan dan Idulfitri.

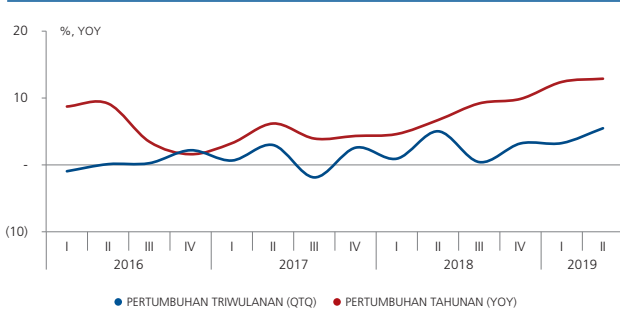
Selain itu, peningkatan pertumbuhan pada triwulan laporan juga dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas



**Grafik 1.10 Perkembangan Kredit Konsumsi berdasarkan Jenis Konsumsi**

lembaga nonprofit berupa organisasi masyarakat dan partai politik seiring dengan penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019. Kinerja konsumsi LNPRT terus berlanjut sejak masa kampanye pada triwulan lalu, dengan intensitas yang semakin meningkat menjelang akhir masa kampanye pada 13 April 2019. Lebih lanjut, kegiatan Pemilihan Legislatif dan Presiden yang diselenggarakan secara serentak pada 17 April 2019, diperkirakan turut mendorong kenaikan aktivitas ormas dan partai politik pada triwulan II 2019. Pada pelaksanaan Pemilu 2019, terdapat peningkatan jumlah calon legislatif (caleg) dibandingkan dalam Pemilu 2014 di Jawa Tengah, baik di tingkat DPR dan DPD RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota. Jumlah caleg DPR RI bertambah dari 908 orang menjadi 1.046 orang; calon anggota DPD RI bertambah dari 32 orang menjadi 40 orang; dan caleg di tingkat DPRD Provinsi bertambah dari 1.033 orang menjadi 1.374 orang.

Komponen ini hanya menyumbang 1,23% dari total perekonomian Jawa Tengah pada triwulan II 2019, sehingga berlanjutnya pertumbuhan komponen ini tidak memberikan dampak signifikan secara langsung. Namun demikian, perbaikan kinerja komponen ini dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap perekonomian.



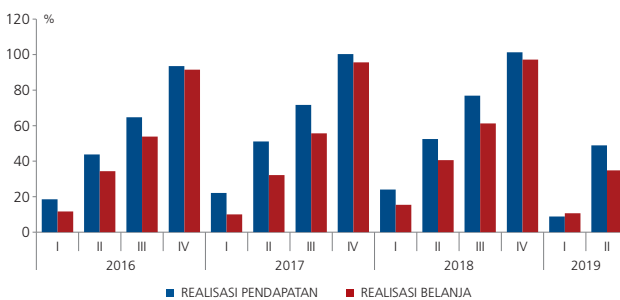
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.11 Pertumbuhan Konsumsi LNPRT

**Berbeda dengan sisi swasta, pertumbuhan konsumsi pemerintah menunjukkan perlambatan yang relatif terbatas pada triwulan II 2019.**

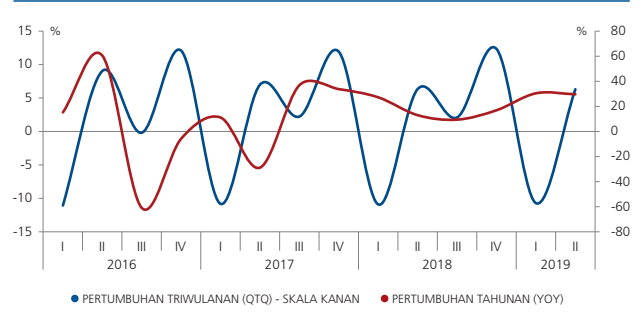
Konsumsi pemerintah tumbuh 5,56% (yoy), sedikit lebih rendah dibanding triwulan I 2019 yang tumbuh 5,71% (yoy). Namun, jika dibandingkan rata-rata pertumbuhan konsumsi pemerintah triwulan II selama tahun 2014-2018 (0,01%; yoy), pertumbuhan konsumsi pemerintah pada triwulan II 2019 tergolong relatif tinggi.

Pada triwulan II 2019, pengeluaran konsumsi pemerintah terutama ditopang oleh realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Jawa Tengah, melalui program kerja lembaga-lembaga vertikal Pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun demikian, volume belanja Pemerintah pada triwulan II 2019 ini diperkirakan tidak sekuat intensitas belanja yang telah dilakukan di triwulan I 2019 karena hanya realisasi residu belanja barang dan jasa penyelenggaraan pemilu.



Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.13 Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

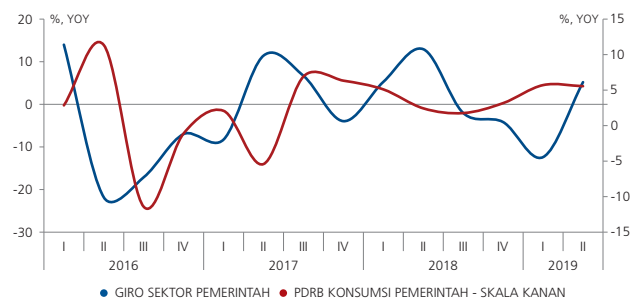


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.12 Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah

Realisasi belanja pemerintah yang belum optimal tercermin dari simpanan giro pemerintah yang terdapat di perbankan Jawa Tengah yang tumbuh lebih tinggi. Pada triwulan II 2019, simpanan giro pemerintah di perbankan Jawa Tengah tercatat tumbuh lebih tinggi, yaitu 5,20% (yoy), dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh negatif sebesar -12,38% (yoy). Peningkatan jumlah dana pemerintah yang berada di perbankan mengindikasikan masih rendahnya belanja pemerintah pada periode laporan.

Pada triwulan II 2019, realisasi belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tercatat 34,76% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah, lebih rendah dibanding realisasi pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar 40,57%. Hal tersebut merupakan akibat realisasi pendapatan daerah yang tidak sebaik tahun lalu. Penurunan realisasi belanja APBD tersebut disebabkan oleh realisasi belanja barang dan jasa, serta belanja pegawai pada kategori belanja tidak langsung



Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.14 Pertumbuhan Giro Pemerintah dan PDRB Konsumsi Pemerintah

yang belum optimal. Selain itu, realisasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial juga menurun dibanding periode yang sama tahun lalu.

Seperti halnya konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah relatif tidak memberikan sumbangan besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, komponen pengeluaran ini memberikan dampak secara tidak langsung yang dapat memicu pertumbuhan konsumsi rumah tangga menjadi lebih tinggi. Sebagai contoh adalah pembayaran gaji, hibah, dan bantuan sosial pada konsumsi pemerintah. Kegiatan tersebut dapat memberikan pendapatan tambahan bagi rumah tangga dan membantu daya beli masyarakat yang terlibat sehingga berpotensi mendorong pengeluaran konsumsi rumah tangga. Selain itu, belanja konsumsi barang pemerintah juga berpotensi mendorong kinerja UMKM dan korporasi setempat.

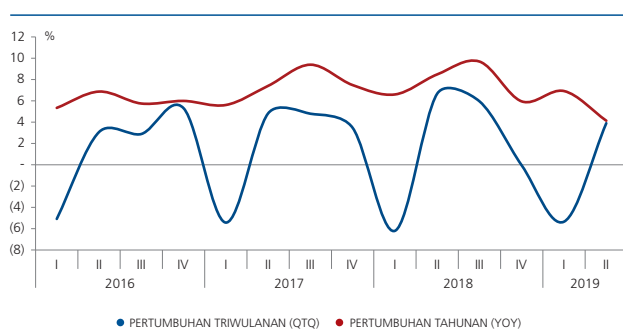
### 1.1.1.2. Pengeluaran Investasi

**Pada triwulan II 2019, investasi yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 4,14% (yoy), melambat dibanding triwulan lalu yang tumbuh 6,92% (yoy).** Kinerja investasi pada triwulan laporan tergolong relatif rendah karena pertumbuhannya lebih rendah dibanding rata-rata pertumbuhan investasi triwulan II selama lima tahun terakhir (2014-2018) yang sebesar 6,47%. Pelemahan PMTB diindikasikan bersumber dari melambatnya kinerja investasi baik

bangunan maupun nonbangunan. Perlambatan kinerja investasi diperkirakan terjadi seiring dengan berakhirnya tahun pembangunan infrastruktur yang dimulai sejak 2017. Hal tersebut ditunjukkan dengan penyelesaian pembangunan proyek infrastruktur pemerintah bernilai besar seperti Tol Trans Jawa.

Melambatnya pertumbuhan investasi pada triwulan laporan juga dipengaruhi oleh investasi nonbangunan berupa pembelian barang modal. Hal ini tercermin dari melemahnya pertumbuhan impor barang modal. Pada triwulan laporan, impor barang modal tercatat tumbuh 14,79% (yoy), melemah cukup signifikan dibanding pertumbuhan di triwulan I 2019 yang mencapai 84,53% (yoy). Impor barang modal yang menunjukkan perlambatan signifikan pada triwulan laporan khususnya berupa mesin dan peralatan mekanik, yang meliputi mesin pembangkit listrik, mesin industri dan perlengkapannya, mesin kelistrikan, serta peralatan telekomunikasi.

Pelemahan volume impor mesin-mesin di atas diperkirakan seiring dengan *progress* pembangunan pembangkit listrik di Jawa Tengah yang telah memasuki tahap akhir. Pembangunan pembangkit listrik Cilacap telah selesai dan diresmikan pada Februari 2019. Sementara, proyek pembangkit listrik lainnya di Jawa Tengah yaitu Central Java Power Plant (CJPP)/PLTU Batang saat ini telah memasuki tahapan konstruksi akhir dengan *progress* di atas 70%. Pembangunan PLTU Batang merupakan salah satu proyek investasi prioritas (PIP) nasional, dengan nilai investasi mencapai Rp56,70 triliun dan mencakup *Engineering, Procurement, and Construction* (EPC). Proyek ini ditargetkan akan beroperasi secara komersial pada 2020 dengan kapasitas 2x1000 MW. Sampai dengan akhir triwulan II 2019, *progress* pembangunan PLTU Batang telah mencapai 78%. Investasi pembelian mesin dan peralatan diperkirakan melambat seiring



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.15 Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto

dengan banyaknya pembelian mesin yang telah dilakukan pada triwulan IV 2018 dan triwulan I 2019. Proyek ini rencananya akan diuji coba pada April 2019 untuk Unit I dan September 2019 untuk Unit II.

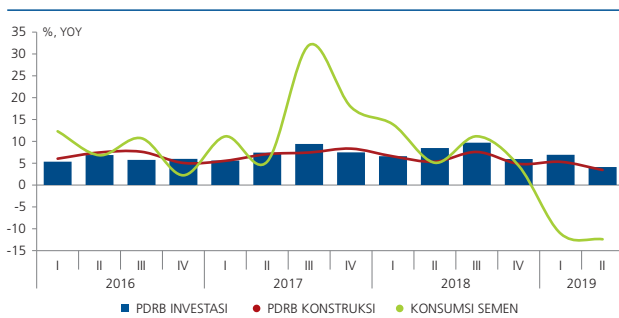
Lebih lanjut, berdasarkan hasil FGD pertumbuhan investasi bangunan menunjukkan perlambatan seiring dengan telah diselesaikannya beberapa proyek infrastruktur strategis pemerintah di Jawa Tengah. Beberapa proyek infrastruktur pemerintah yang bernilai besar telah selesai pada akhir tahun 2018 atau memasuki tahap finalisasi pada triwulan laporan seperti Tol Trans Jawa, pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang, pembangkit listrik Cilacap, serta Bendungan Gondang dan Logung. Hal ini terkonfirmasi oleh perlambatan realisasi belanja modal dalam APBD maupun APBN di Provinsi Jawa Tengah pada triwulan II 2019. Realisasi belanja modal di Jawa Tengah yang bersumber dari APBN mencapai 20,87%, sedangkan realisasi belanja pemerintah provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari APBD Provinsi pada triwulan laporan baru mencapai 19,58% dari total anggaran.

Pertumbuhan investasi bangunan yang tergolong rendah pada triwulan laporan juga tercermin dari data penjualan semen di Jawa Tengah yang mengalami kontraksi -12,41% (yoy), lebih dalam dibanding triwulan I 2019 yang tercatat tumbuh negatif sebesar -11,11% (yoy). Meskipun kinerja investasi melemah pada triwulan laporan, pemerintah tetap berkomitmen

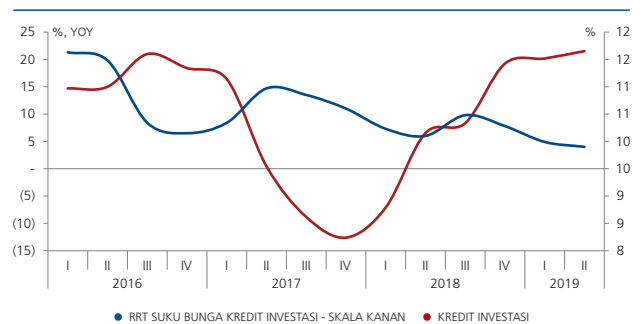
tinggi dalam pembangunan infrastruktur strategis, khususnya yang terkait dengan peningkatan konektivitas. Dalam jangka pendek, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur konektivitas sementara ini masih mendorong efisiensi lapangan usaha pertanian serta perdagangan.

Pembangunan beberapa proyek infrastruktur yang mendukung konektivitas tengah berlangsung, antara lain pembangunan *double track* rel kereta api Jawa selatan, kereta api akses Bandara Adi Sumarmo, Bandara Jenderal Soedirman, jalan tol Semarang-Demak, serta jalan tol Yogyakarta-Bawen. Terdapat 26 proyek strategis nasional (PSN) dan proyek investasi prioritas di Jawa Tengah, dengan 8 proyek di antaranya telah selesai dibangun pada akhir tahun 2018 hingga awal tahun 2019. Adapun *progress* pembangunan proyek lainnya bervariasi, mulai dari tahap penyiapan lelang, dalam proses/transaksi lelang, hingga tahap konstruksi. Penyelesaian proyek infrastruktur diyakini dapat semakin meningkatkan konektivitas Jawa Tengah sehingga berdampak positif dalam menarik minat investasi swasta di Jawa Tengah.

Meskipun kinerja investasi mengalami perlambatan, kebutuhan pembiayaan untuk kegiatan investasi masih tergolong tinggi pada triwulan II 2019. Pertumbuhan kredit yang disalurkan bank umum untuk kegiatan investasi di Jawa Tengah mengalami kenaikan menjadi 21,52% (yoy), lebih tinggi dari tumbuh 20,17% (yoy)



Grafik 1.16 Pertumbuhan PDRB Investasi, PDRB Konstruksi, dan Konsumsi Semen



Grafik 1.17 Pertumbuhan Kredit Investasi dan Suku Bunga Kredit Investasi

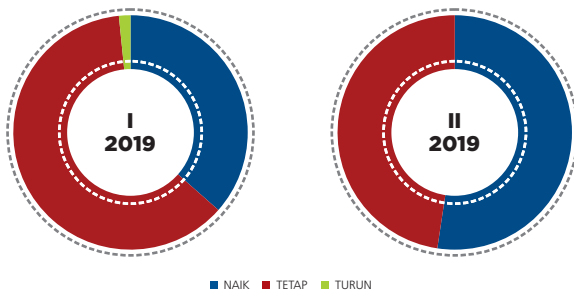
pada triwulan I 2019. Lebih lanjut, rata-rata tertimbang suku bunga kredit investasi relatif stabil dari 9,99% menjadi 9,90% pada periode laporan.

Sementara itu dari sisi swasta, pandangan dan keputusan investasi oleh para pelaku usaha pada periode laporan diperkirakan masih menunggu (*wait and see*) terhadap hasil pelaksanaan Pemilu 2019 serta kebijakan-kebijakan Pemerintah terpilih periode 2019-2024 yang diperkirakan akan tersusun dan diimplementasikan pada awal tahun 2020. Hal tersebut tercermin dari hasil kegiatan *liaison* yang dilakukan Bank Indonesia pada triwulan laporan. Nilai *likert scale* (LS) realisasi investasi triwulan II 2019 yang sebesar 0,81 menunjukkan pertumbuhan kinerja investasi relatif terbatas.

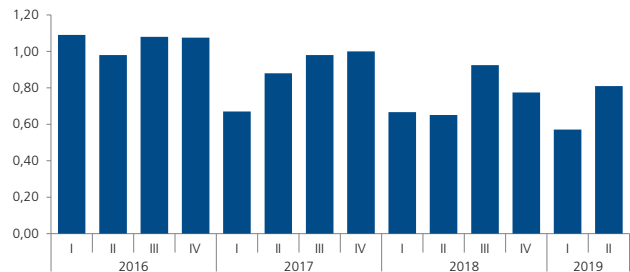
Dari hasil kegiatan *liaison*, pelaku usaha yang menyatakan terdapat peningkatan kegiatan investasi adalah sejumlah 52,38% dari total responden, sedangkan responden yang mengkonfirmasi kegiatan

investasi pada triwulan berjalan relatif tetap sebanyak 47,62%. Beberapa pelaku usaha di sektor industri pengolahan masih melakukan investasi pembangunan pabrik yang merupakan proyek *multiyears*, serta akan menambah mesin produksi. Namun demikian, sebagian pelaku usaha lainnya mengkonfirmasi tidak melakukan investasi bernilai besar pada triwulan laporan atau hanya melakukan investasi yang bersifat rutin, meliputi pemeliharaan dan peremajaan mesin rutin, peremajaan sarana prasarana, serta penggantian ataupun perbaikan peralatan operasional.

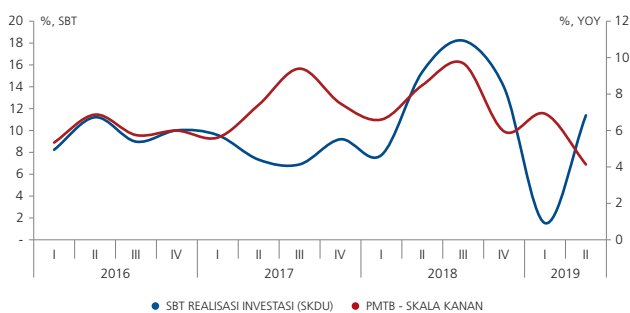
Ditinjau berdasarkan asal penanaman modal, kinerja investasi triwulan laporan diindikasikan tumbuh melambat pada investasi yang berasal dari pihak asing. Sementara itu, investasi dalam negeri menunjukkan kontraksi yang lebih dalam pada triwulan II 2019. Pada periode laporan, Penanaman Modal Asing (PMA) di Jawa Tengah terpantau sebesar USD711,10 juta; tumbuh melambat menjadi 40,45% (yoy), lebih rendah dari triwulan I 2019 yang tumbuh 72,62% (yoy).



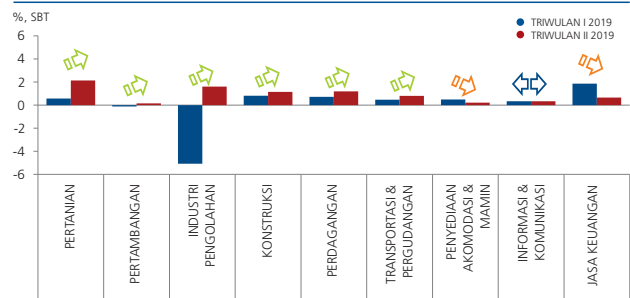
Grafik 1.18 Perkembangan Investasi Pelaku Usaha (Hasil *Liaison*)



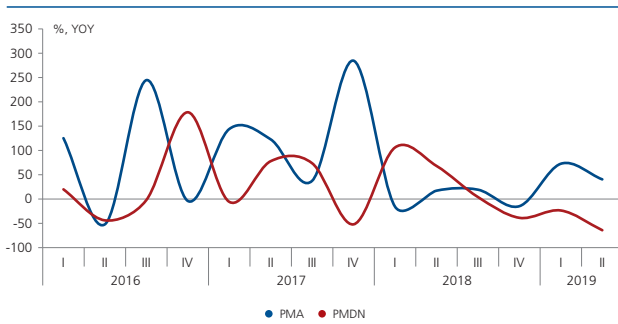
Grafik 1.19 Likert Scale Investasi (Hasil *Liaison*)



Grafik 1.20 Perkembangan SBT Realisasi Investasi (SKDU) dan Pertumbuhan PDRB Investasi



Grafik 1.21 Perkembangan SBT Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha (SKDU)



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, diolah

**Grafik 1.22 Realisasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri**

Perlambatan PMA yang terbesar terutama berasal dari Korea Selatan, Singapura, Belanda, dan Hongkong, yang merupakan negara-negara dengan pangsa PMA terbesar di Jawa Tengah. PMA terpantau masih meningkat terutama yang berasal dari negara Jepang, Tiongkok, dan Taiwan. Sementara itu, nilai penanaman modal dalam negeri pada triwulan laporan sebesar Rp1,70 triliun. Pada triwulan ini, penanaman modal dalam negeri menunjukkan penurunan menjadi -64,18% (yoy), berkontraksi lebih dalam dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh negatif -23,54% (yoy).

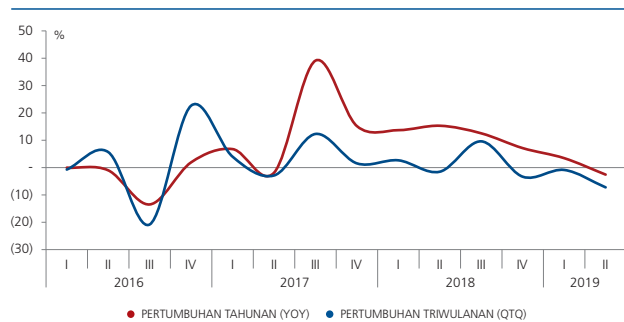
### 1.1.1.3 Ekspor dan Impor Luar Negeri

#### 1.1.1.3.1 Ekspor Luar Negeri

**Pada triwulan II 2019, kinerja ekspor luar negeri mencatatkan pertumbuhan negatif sebesar -2,57% (yoy).** Kinerja ekspor luar negeri berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang masih tercatat tumbuh positif sebesar 3,45% (yoy) dan menunjukkan tren yang terus menurun sejak pertengahan tahun 2018. Kinerja ekspor triwulan laporan tercatat menurun jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun lalu yang mencapai 15,31% (yoy), serta lebih rendah dari historis rata-rata pertumbuhan triwulan II selama tahun 2014-2018 (6,24%). Kinerja ekspor luar negeri yang mengalami kontraksi pada triwulan laporan menjadi penahan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah untuk tumbuh lebih tinggi.

Tren kinerja ekspor luar negeri yang terus menurun utamanya dipengaruhi oleh tekanan eksternal yang semakin menguat. Ketegangan hubungan dagang antarnegara khususnya Amerika Serikat dan Tiongkok serta sejumlah risiko geopolitik yang terus berlanjut, semakin menekan volume perdagangan dunia dan pertumbuhan ekonomi global, termasuk negara tujuan ekspor utama Jawa Tengah seperti Amerika Serikat. Sebagai negara tujuan ekspor utama Jawa Tengah, perekonomian Amerika Serikat (AS) yang memegang pangsa ekspor ±33% diperkirakan tumbuh melambat akibat penurunan ekspor dan juga investasi nonresidensial. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama Jawa Tengah lainnya seperti Eropa, Jepang, dan Tiongkok juga lebih rendah dipengaruhi penurunan kinerja sektor eksternal serta permintaan domestik. Kondisi eksternal tersebut selanjutnya berpotensi menahan pertumbuhan volume ekspor Jawa Tengah.

Ekspor luar negeri Jawa Tengah didominasi oleh ekspor komoditas tekstil dan produk tekstil atau TPT dengan pangsa pada triwulan laporan mencapai 46,29%, serta kayu dan barang dari kayu dengan pangsa 18,85%. Selain kedua komoditas tersebut, ekspor bahan makanan, ekspor permesinan dan alat transportasi, serta ekspor kimia juga turut berperan walaupun dengan pangsa masing-masing yang berada di bawah 10%. Komposisi ini relatif persisten selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan jenis komoditas, hampir seluruh komoditas ekspor unggulan Jawa Tengah mencatatkan perlambatan pertumbuhan pada triwulan laporan, kecuali komoditas permesinan dan alat transportasi yang masih tumbuh meningkat. Komoditas ekspor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penurunan pertumbuhan ekspor Jawa Tengah yaitu komoditas TPT, diikuti oleh bahan makanan, barang kimia, serta komoditas kayu dan barang dari kayu.

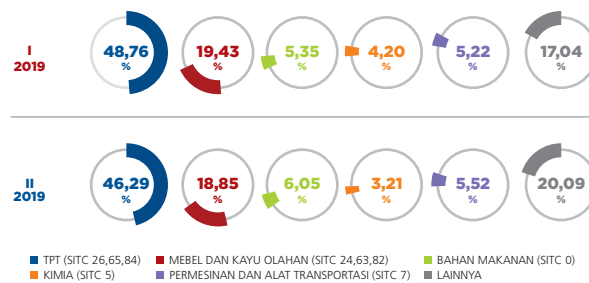


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

**Grafik 1.23** Pertumbuhan PDRB Ekspor Luar Negeri

Sebagai komoditas ekspor dengan nilai pangsa terbesar di Jawa Tengah, pertumbuhan ekspor TPT masih terpantau tumbuh positif, namun kembali melanjutkan tren pertumbuhan yang melandai sejak triwulan akhir 2017. Pada triwulan II 2019, ekspor TPT tercatat tumbuh 0,36% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya (5,52%; yoy). Perlambatan tersebut terutama berasal dari melemahnya ekspor pakaian jadi, serta produk tekstil berupa benang dan kain. Ekspor garmen atau pakaian jadi yang memiliki pangsa terbesar dalam ekspor TPT, mencatatkan perlambatan menjadi tumbuh 6,40% (yoy); dari triwulan I 2019 yang tercatat 11,15% (yoy). Ekspor komoditas pakaian jadi secara konsisten masih mencatatkan pertumbuhan positif selama hampir lima tahun terakhir, walaupun saat ini berada dalam tren pertumbuhan yang melambat, khususnya sejak triwulan akhir 2018. Lebih lanjut, ekspor komoditas benang dan kain juga menunjukkan kontraksi yang semakin dalam yaitu menjadi tumbuh -14,08% (yoy) pada triwulan II 2019; dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan kontraksi -6,38% (yoy).

Perlambatan ekspor komoditas pakaian jadi terutama disebabkan oleh melambatnya ekspor ke pasar ekspor utama Jawa Tengah yaitu Amerika Serikat dan Eropa. Pangsa ekspor garmen ke kedua kawasan tersebut mencapai 72% dari total ekspor pakaian jadi dari Jawa Tengah. Selain itu, perlambatan ekspor komoditas ini juga terjadi untuk negara tujuan Tiongkok dan Korea



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

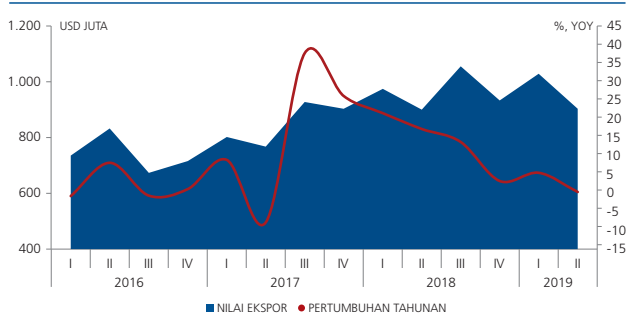
**Grafik 1.24** Komposisi Ekspor Luar Negeri Nonmigas Berdasarkan Komoditas

Selatan. Sementara itu, ekspor garmen ke Jepang yang merupakan negara tujuan dengan pangsa terbesar ketiga (11%) masih tercatat tumbuh lebih tinggi.

Selanjutnya, ekspor produk tekstil berupa benang dan kain menunjukkan kontraksi yang lebih dalam pada pasar ekspor utama Jawa Tengah, khususnya untuk negara tujuan Afrika, Eropa, India, dan ASEAN (pangsa  $\pm 38\%$ ). Sementara itu, ekspor benang dan kain ke Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang (pangsa  $\pm 27\%$ ) masih tercatat meningkat di triwulan laporan.

Hasil *liaison* Bank Indonesia menunjukkan bahwa penurunan ekspor benang dipengaruhi oleh melimpahnya pasokan benang produksi Tiongkok yang tidak terjual di pasar Amerika Serikat sebagai dampak perang dagang antara Tiongkok-Amerika Serikat. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi global yang melambat menyebabkan permintaan terhadap produk pakaian jadi cenderung melemah. Akan tetapi, beberapa pelaku usaha di Jawa Tengah tetap optimis mampu memanfaatkan peluang dari perang dagang antara AS-Tiongkok, karena memberikan kesempatan bagi kontak untuk memperdalam pasarnya di AS, meskipun tetap perlu mewaspadaikan persaingan yang semakin ketat dengan Vietnam yang memiliki dukungan *supply chain* yang lebih efektif.

Daya saing industri tekstil sisi hulu (serat, benang, dan kain) sangat tergantung pada teknologi permesinan yang digunakan atau lebih bersifat padat modal. Oleh



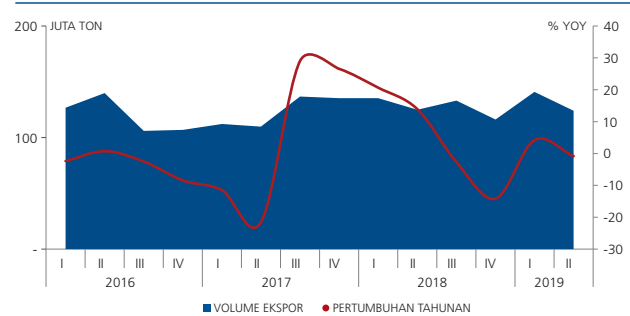
Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

**Grafik 1.25 Pertumbuhan Nilai Ekspor TPT**

karena itu, restrukturisasi/modernisasi teknologi mesin menjadi faktor penentu utama peningkatan daya saing. Sementara di sisi hilir, industri garmen/pakaian jadi merupakan industri yang bersifat padat karya sehingga biaya produksi dan harga jual lebih bergantung pada upah tenaga kerja.

Komoditas kayu dan barang dari kayu, termasuk furnitur, yang merupakan komoditas ekspor dengan pangsa terbesar kedua dari Jawa Tengah menunjukkan penurunan yang semakin dalam pada triwulan II 2019. Secara nilai, ekspor komoditas tersebut mencatatkan kontraksi sebesar -6% (yoy), lebih rendah dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar -3,69% (yoy).

Perlambatan pertumbuhan terutama terjadi pada ekspor subkomoditas olahan kayu dan furnitur/mebel, sedangkan ekspor kayu sedikit meningkat. Secara nilai, ekspor komoditas olahan kayu yang memiliki pangsa terbesar (46%) mencatatkan kontraksi lebih dalam pada triwulan laporan menjadi -14,10% (yoy); dari triwulan I 2019 sebesar -10,58% (yoy). Selanjutnya, ekspor komoditas mebel yang memegang pangsa terbesar kedua (42%) juga menunjukkan perlambatan, meskipun masih tumbuh positif, yaitu menjadi 4,16% (yoy) pada triwulan II 2019; lebih rendah dari triwulan sebelumnya (4,77%; yoy). Kinerja ekspor mebel tetap mencatatkan pertumbuhan positif secara berturut-turut dalam delapan triwulan terakhir, meskipun saat ini menunjukkan tren pertumbuhan yang semakin rendah.



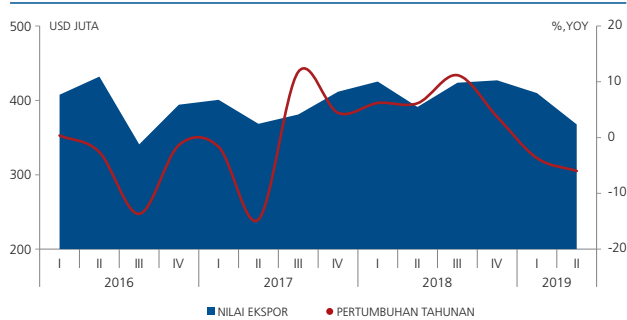
Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

**Grafik 1.26 Pertumbuhan Volume Ekspor TPT**

Ditinjau lebih jauh, ekspor komoditas kayu, olahan kayu, serta mebel terutama ditujukan untuk negara-negara di kawasan Eropa (24,38%); Amerika Serikat (23,5%); Tiongkok (11,25%); Jepang (9,64%); ASEAN (7,1%); serta Korea Selatan (4,67%). Pada triwulan II 2019, perlambatan ekspor komoditas ini terutama terjadi untuk negara tujuan Korea Selatan, Eropa, Amerika Serikat, serta Jepang; sedangkan ekspor ke Tiongkok dan ASEAN masih menunjukkan perbaikan.

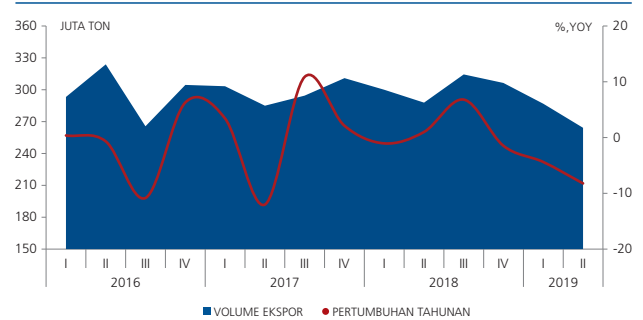
Berdasarkan hasil *liaison*, semakin ketatnya persaingan menjadi salah satu tantangan ekspor komoditas kayu dan barang dari kayu, khususnya dengan Vietnam dan Tiongkok yang memiliki kapasitas produksi masal. Kedua negara tersebut mampu menawarkan produk dengan harga yang lebih murah, karena memperoleh dukungan pemerintah, seperti dalam aspek UMK, energi, regulasi, bahan baku, maupun pembiayaan. Selain itu, industri ini juga menghadapi tantangan terkait faktor input produksi seperti ketersediaan tenaga kerja terampil, pemenuhan bahan baku, dan aspek regulasi.

Secara keseluruhan, mitra dagang utama Jawa Tengah untuk ekspor nonmigas masih belum mengalami perubahan signifikan dibandingkan periode sebelumnya, yaitu Amerika Serikat dan Eropa, dengan pangsa masing-masing 33,01% dan 17,22%. Setelah kedua mitra tersebut, ekspor dengan negara-negara tujuan ke Asia juga memegang peran cukup besar, yaitu Jepang (11,61%), Tiongkok (8,36%), dan ASEAN



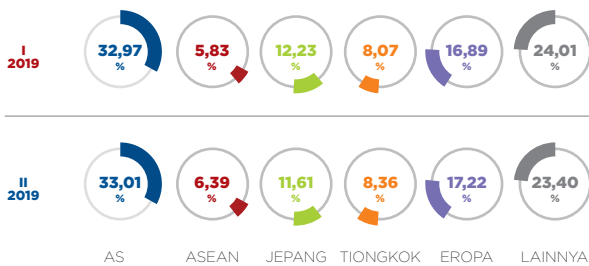
Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.27 Pertumbuhan Nilai Ekspor Kayu



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.28 Pertumbuhan Volume Ekspor Kayu

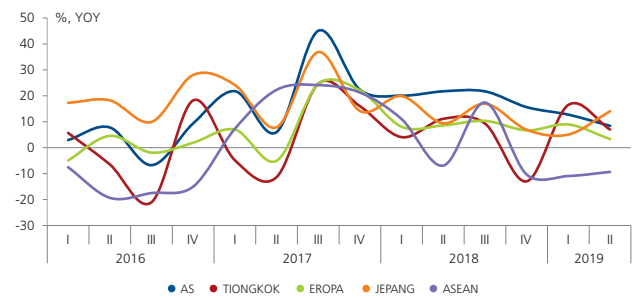


Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.29 Struktur Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan

(6,39%). Pada triwulan laporan, perlambatan kinerja ekspor terjadi pada negara mitra dagang utama Jawa Tengah yaitu Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok. Sementara, ekspor ke negara Jepang dan ASEAN mengalami penguatan pada triwulan II 2019.

Ekspor nonmigas ke Amerika Serikat yang merupakan negara tujuan dengan pangsa terbesar, berada dalam tren perlambatan dan mencatatkan pertumbuhan terendah dalam kurun tujuh triwulan terakhir. Pada triwulan II 2019, ekspor ke Amerika Serikat tercatat tumbuh 8,42% (yoy), melambat setelah periode sebelumnya hampir selalu menunjukkan pertumbuhan dua digit, yang terakhir dicatatkan pada triwulan I 2019 sebesar 12,73% (yoy). Pertumbuhan ekspor nonmigas ke Eropa juga tumbuh melambat menjadi 3,29% (yoy); dari triwulan I 2019 yang tumbuh 8,95% (yoy). Selanjutnya, ekspor nonmigas ke Tiongkok juga terpantau tumbuh lebih rendah menjadi 7,02% (yoy), melambat dibanding triwulan lalu sebesar



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.30 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Berdasarkan Negara Tujuan

16,49% (yoy). Namun demikian, ekspor nonmigas Jawa Tengah ke Jepang dan negara-negara di kawasan ASEAN masih menunjukkan perbaikan dengan tumbuh masing-masing sebesar 14,07% (yoy) dan -9,34% (yoy), meningkat dari triwulan I 2019 sebesar 5,07% (yoy) dan -10,91% (yoy).

### 1.1.1.3.2. Impor Luar Negeri

Sejalan dengan ekspor luar negeri, kinerja impor luar negeri Jawa Tengah juga menunjukkan penurunan pada triwulan II 2019. Pada periode laporan, impor luar negeri Jawa Tengah tercatat tumbuh negatif sebesar -11,25% (yoy), berbalik arah dibanding triwulan sebelumnya yang masih tercatat tumbuh positif sebesar 6,13% (yoy). Kontraksi impor luar negeri pada triwulan II 2019 juga menjadi yang terendah dalam kurun tujuh triwulan terakhir, serta lebih rendah dari historis rata-rata pertumbuhan impor luar negeri triwulan II selama lima tahun terakhir (2014-2018) yang sebesar 3,49% (yoy).

Sebagai komponen pengurang PDRB, penurunan impor luar negeri berpengaruh positif dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Meskipun penurunan impor luar negeri berdampak positif terhadap penguatan laju pertumbuhan, di sisi lain penurunan kinerja komponen ini turut berpengaruh terhadap tertahannya kinerja net ekspor antardaerah Jawa Tengah seiring pengurangan kegiatan produksi industri pengilangan minyak. Namun demikian, kontribusi penurunan impor luar negeri memberikan dampak yang lebih besar terhadap penguatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan laporan.

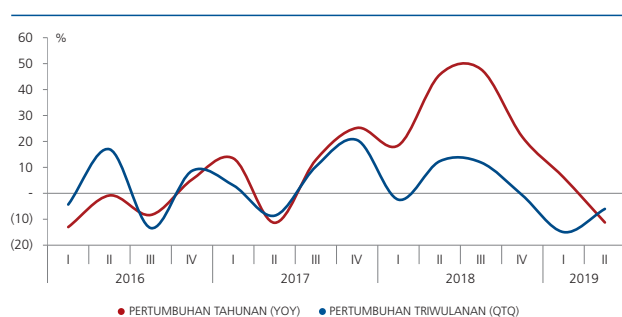
Dari rilis data ekspor impor Badan Pusat Statistik (BPS), penurunan impor luar negeri pada triwulan II 2019 terutama berasal dari kontraksi pada impor migas, sedangkan impor komoditas nonmigas menunjukkan perlambatan yang cukup signifikan meskipun masih tumbuh positif. Impor migas Jawa Tengah pada triwulan laporan mencatatkan pangsa sebesar 31,43% dari total impor Jawa Tengah, sedangkan pangsa impor komoditas nonmigas yaitu 72,36%.

Impor luar negeri Jawa Tengah untuk komoditas migas mengalami kontraksi yang semakin dalam secara nominal pada triwulan II 2019. Impor migas tercatat kontraksi -33,18% (yoy) pada periode laporan, lebih dalam dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh negatif sebesar -32,48% (yoy). Penurunan impor migas

ini ditengarai terpengaruh oleh kebijakan pembatasan impor yang dimulai sejak akhir tahun 2018, dalam rangka upaya perbaikan *current account deficit*.

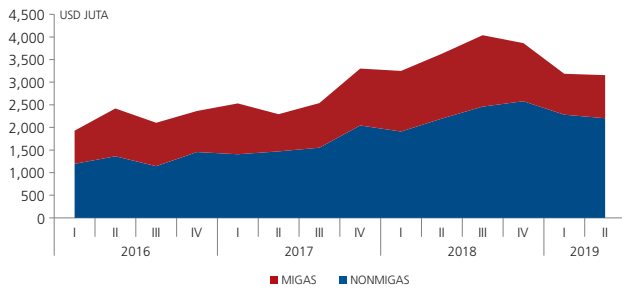
Impor komoditas migas memiliki peran signifikan terhadap total impor Jawa Tengah dan kinerja industri pengilangan migas sebagai subsektor industri terbesar ketiga di Jawa Tengah. Hal tersebut dikarenakan industri pengilangan minyak di Cilacap merupakan salah satu kilang minyak terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi 348.000 barel/hari, sehingga memiliki peran sentral dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku nasional. Unit pengolahan ini bernilai strategis karena memasok 33,3% kebutuhan BBM nasional, atau 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Pembatasan impor migas berdampak terhadap berkurangnya bahan baku industri pengilangan migas di Jawa Tengah, sehingga ekspor migas Jateng ke daerah lain di Indonesia juga diperkirakan menurun. Hal ini selanjutnya menjadi salah satu penyebab tertahannya kinerja net ekspor antardaerah Jawa Tengah.

Berdasarkan sisi harga, turunnya harga minyak dunia juga dapat menyebabkan pertumbuhan impor migas secara nominal mengalami penurunan. Pada triwulan II 2019, rata-rata harga minyak mentah global berada pada level USD59,89 per barel (WTI), atau lebih rendah dibandingkan rata-rata harga pada triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar USD67,97 per barel. Meskipun secara tahunan lebih rendah, harga minyak mentah global pada triwulan laporan menunjukkan peningkatan, setelah sebelumnya selalu berada dalam tren menurun hingga awal triwulan I 2019 yang mencapai level USD54,87 per barel. Seiring dengan harga minyak dunia yang lebih rendah, impor luar negeri Jawa Tengah untuk komoditas migas juga menunjukkan penurunan secara nominal.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Grafik 1.31 Pertumbuhan PDRB Impor Luar Negeri

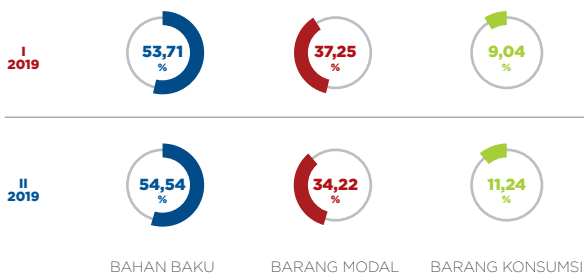


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

**Grafik 1.32 Perkembangan Impor Jawa Tengah**

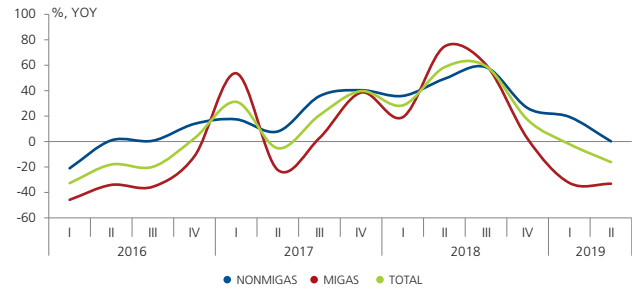
Meskipun belum sampai mencatatkan kontraksi, impor komoditas nonmigas mengalami perlambatan yang cukup signifikan pada triwulan laporan, sehingga menahan laju pertumbuhan impor luar negeri secara keseluruhan. Pada triwulan II 2019, impor nonmigas Jawa Tengah tercatat tumbuh 0,19% (yoy), jauh lebih rendah dibanding triwulan I 2019 yang tumbuh 19,42% (yoy). Impor komoditas nonmigas Jawa Tengah ditujukan untuk kegiatan produktif, yaitu bahan baku dengan pangsa mencapai 54,54% dari total impor nonmigas Jawa Tengah, dan impor barang modal dengan pangsa 34,22%. Sementara itu, impor barang konsumsi memiliki pangsa 11,24%. Komposisi ini tidak banyak berubah dari periode sebelumnya, meskipun terdapat peningkatan pangsa impor barang modal menjadi lebih tinggi dibanding rata-rata pangsa historis triwulan II tahun 2016-2018 (23,63%).

Secara nilai, melambatnya pertumbuhan impor nonmigas triwulan laporan terutama didorong oleh penurunan impor bahan baku dan melambatnya impor



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

**Grafik 1.34 Struktur Impor Nonmigas Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Pengeluaran**

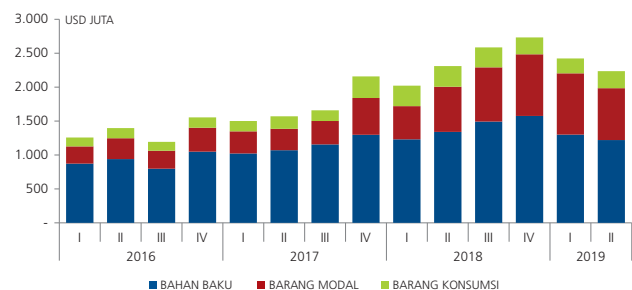


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

**Grafik 1.33 Pertumbuhan Impor Migas dan Nonmigas Jawa Tengah**

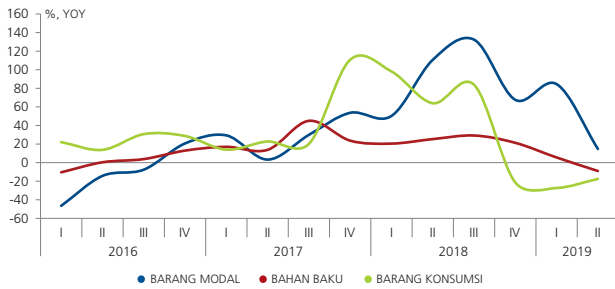
barang modal, sedangkan impor barang konsumsi terpantau meningkat meski masih kontraksi. Kelompok bahan baku yang memiliki pangsa terbesar dari total impor luar negeri menunjukkan penurunan. Impor bahan baku tercatat menurun menjadi tumbuh negatif sebesar -9,01% (yoy) pada triwulan laporan, dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,55% (yoy). Penurunan impor secara signifikan khususnya pada kelompok ini dapat menjadi indikasi awal penurunan kapasitas maupun kegiatan produksi industri pengolahan yang memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian.

Impor bahan baku terutama mencatatkan penurunan untuk komoditas barang mentah dan setengah jadi untuk industri sehingga mengalami kontraksi, seperti produk kimia; produk tekstil (serat, benang, dan kain); logam; kertas; serta kayu mentah. Sementara itu, perlambatan pertumbuhan juga terjadi pada komoditas bahan makanan-minuman mentah maupun setengah jadi untuk keperluan industri. Jika ditelusuri



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

**Grafik 1.35 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Pengeluaran**

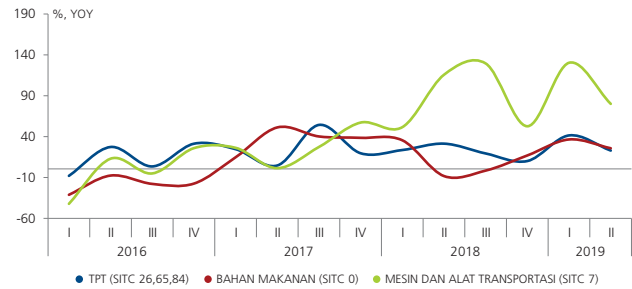


Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

**Grafik 1.36 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan**

lebih lanjut, impor bahan makanan yang mengalami perlambatan, antara lain berupa gula dan gula rafinasi; produk olahan susu dan telur; pakan ternak; buah dan sayuran; serta tembakau; sedangkan pertumbuhan impor produk gandum dan olahannya; kopi, teh, kakao, dan rempah-rempah; serta ikan masih tercatat meningkat.

Selanjutnya, impor barang modal yang memiliki pangsa terbesar kedua juga meskipun masih tumbuh positif namun mengalami perlambatan. Pada triwulan II 2019, impor barang modal tercatat tumbuh 14,79% (yoy), jauh lebih rendah dibanding pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 84,53% (yoy). Perlambatan pertumbuhan impor tersebut terutama dalam bentuk barang modal selain perlengkapan transportasi. Hal tersebut juga tercermin dari melambatnya impor komoditas mesin dan alat transportasi yang tumbuh 7,60% (yoy) pada periode laporan, melambat signifikan dari pertumbuhan triwulan I 2019 (72,52%; yoy). Berdasarkan jenis

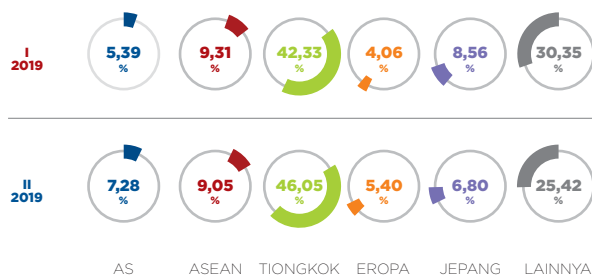


Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

**Grafik 1.37 Pertumbuhan Nilai Impor Berdasarkan Komoditas**

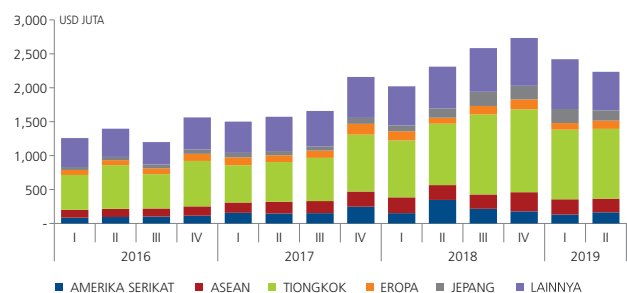
komoditas, impor permesinan yang melambat terutama berupa mesin pembangkit listrik, mesin industri dan perlengkapannya, mesin kelistrikan, serta peralatan telekomunikasi. Melemahnya impor barang modal ini sejalan dengan perlambatan kinerja investasi pada triwulan laporan, khususnya investasi nonbangunan. Hal tersebut seiring dengan progress pembangunan pembangkit listrik di Jawa Tengah yang telah memasuki tahap akhir, sehingga kegiatan impor permesinan tidak setinggi triwulan IV 2018 dan triwulan I 2019.

Sementara itu, impor barang konsumsi yang memiliki pangsa terkecil terhadap total impor Jawa Tengah, tercatat mengalami perbaikan meskipun masih dalam kondisi tumbuh negatif. Pada triwulan laporan, impor barang konsumsi tercatat kontraksi -17,52% (yoy), atau tidak sedalam triwulan I 2019 yang tumbuh -27,31% (yoy). Kontraksi impor barang konsumsi yang tidak sedalam triwulan sebelumnya dipengaruhi oleh peningkatan impor produk tidak tahan lama, semi-



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

**Grafik 1.38 Pangsa Negara Asal Impor Jawa Tengah**



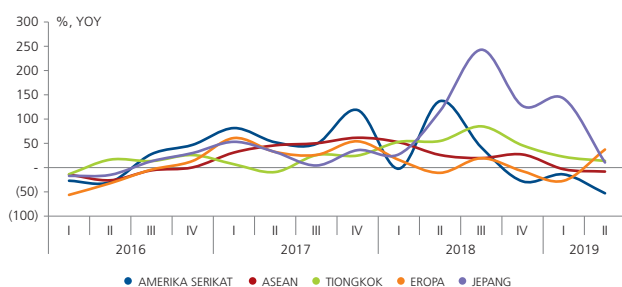
Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

**Grafik 1.39 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Negara Asal**

tahan lama, maupun tahan lama seperti komoditas pakaian jadi, alas kaki, dan mebel; serta impor bahan makanan-minuman mentah untuk konsumsi rumah tangga.

Namun demikian, pertumbuhan negatif impor barang konsumsi tersebut tergolong lebih rendah dibanding rata-rata pertumbuhan impor barang konsumsi triwulan II selama lima tahun terakhir (2014-2018) yang sebesar 17,55%. Kondisi ini diperkirakan pengaruh atas implementasi kebijakan pengendalian impor melalui kenaikan tarif pajak penghasilan (PPH) 22 impor atas 1.147 barang konsumsi yang telah diberlakukan sejak akhir tahun 2018. Adapun 1.147 komoditas barang konsumsi yang tarifnya naik terbagi dalam tiga kelompok, yaitu bahan jadi sebanyak 719 komoditas, barang konsumsi sebanyak 218 komoditas, dan barang mewah sebanyak 210 komoditas.

Secara keseluruhan, impor nonmigas Jawa Tengah terutama berasal dari Tiongkok dengan pangsa 46,05%. Selain Tiongkok, negara asal impor utama lainnya yaitu ASEAN (9,05%), Amerika Serikat (7,28%), Jepang (6,80%), dan Eropa (5,40%). Mitra dagang utama ini tidak banyak berubah sepanjang waktu. Pada periode laporan, turunnya pertumbuhan impor luar negeri terutama bersumber dari Jepang, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Sementara itu, impor dari kawasan Eropa mengalami peningkatan pada triwulan laporan.



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

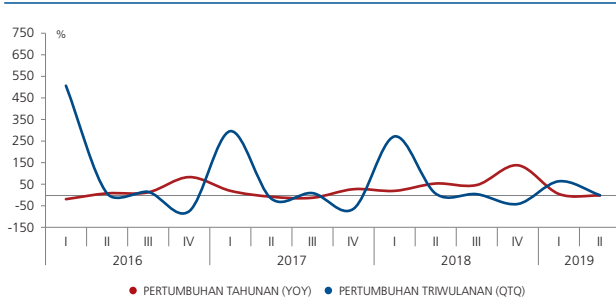
**Grafik 1.40 Pertumbuhan Impor Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Negara Asal**

#### 1.1.1.4. Net Ekspor Antardaerah

**Pada triwulan laporan net ekspor antardaerah tumbuh -2,70% (yoy), turun dibandingkan dengan triwulan I 2019 yang mengalami pertumbuhan 4,51% (yoy).** Penurunan tersebut diindikasikan berasal dari melemahnya ekspor antardaerah, di tengah pertumbuhan impor antardaerah yang diperkirakan cenderung meningkat. Kontraksi komponen ini menjadi salah satu penahan laju pertumbuhan ekonomi triwulan II 2019, berbalik arah dari triwulan sebelumnya di mana net ekspor antardaerah masih tercatat memberikan sumbangan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Pelemahan ekspor antardaerah diperkirakan dipengaruhi oleh kinerja subsektor industri pengilangan minyak yang relatif terbatas pada triwulan laporan. Kebijakan pengendalian impor migas berdampak terhadap berkurangnya bahan baku industri pengilangan migas, yang merupakan subsektor industri dengan pangsa terbesar ketiga di Jawa Tengah. Industri pengilangan minyak di Cilacap, Jawa Tengah merupakan salah satu kilang minyak terbesar di Indonesia yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku minyak (BBM) nasional. Akibat berkurangnya aktivitas produksi di industri tersebut berdampak pada penurunan output industri yang diekspor ke daerah lain. Dengan demikian, ekspor migas antardaerah yang berasal dari Jawa Tengah tercatat menurun.

Selanjutnya, ekspor komoditas nonmigas Jawa Tengah ke daerah lain juga diindikasikan melambat sejalan dengan kinerja lapangan usaha industri pengolahan secara umum yang relatif stagnan. Pengiriman barang hasil produksi industri pengolahan ke luar provinsi berkurang. Pertumbuhan ekonomi yang melandai di beberapa provinsi, termasuk provinsi tetangga seperti DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten; ditengarai



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

**Grafik 1.41 Pertumbuhan PDRB Net Ekspor Antardaerah**

turut mendorong perlambatan melalui lemahnya permintaan atas produk Jawa Tengah. Namun demikian, penguatan kinerja lapangan usaha pertanian pada triwulan laporan berdampak terhadap meningkatnya ekspor komoditas bahan makanan ke luar provinsi, sehingga mampu menahan perlambatan ekspor antardaerah lebih dalam.

Sementara itu, impor antardaerah Jawa Tengah diindikasikan mengalami peningkatan pada triwulan laporan. Peningkatan impor antardaerah didorong oleh akselerasi permintaan konsumsi rumah tangga seiring dengan momen perayaan hari raya keagamaan. Permintaan dari dalam provinsi sendiri menunjukkan penguatan yang relatif signifikan, diindikasikan oleh akselerasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga Jawa

Tengah dari 4,79% (yoy) menjadi 5,16% (yoy) pada triwulan II 2019. Akan tetapi di sisi lain, permintaan tersebut tidak sepenuhnya dapat dipenuhi dari Jawa Tengah mengingat kinerja dan kapasitas industri pengolahan yang masih stagnan. Dengan demikian, kebutuhan barang hasil produksi dipenuhi dari daerah lain, sehingga mendorong peningkatan impor antardaerah.

**1.1.2. Perkembangan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha Perekonomian Jawa Tengah masih bersumber dari tiga lapangan usaha utama**, yaitu industri pengolahan (34,11%); pertanian, kehutanan, dan perikanan (13,91%); serta perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor (13,71%). Komposisi ini tidak banyak mengalami perubahan dari periode sebelumnya.

Akselerasi pertumbuhan pada triwulan laporan utamanya didorong oleh perbaikan kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang dipengaruhi oleh pergeseran masa panen. Lebih lanjut, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, serta informasi dan komunikasi yang tumbuh signifikan pada triwulan laporan turut menjadi

**Tabel 1.5 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHB 2010 menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)**

LAPANGAN USAHA	2018**				2018**	2019**	
	I	II	III	IV		I	II
A PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	44.335	44.779	50.842	38.120	178.076	45.810	47.274
B PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	7.801	8.311	8.304	8.487	32.903	8.438	8.709
C INDUSTRI PENGOLAHAN	105.405	109.560	110.345	112.406	437.715	112.197	115.891
D PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	298	298	307	321	1.225	312	313
E PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	185	186	186	187	744	194	201
F KONSTRUKSI	31.759	33.028	35.365	36.001	136.154	34.940	35.463
G PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	41.049	42.817	43.521	43.991	171.377	44.524	46.581
H TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	9.301	9.903	9.976	10.414	39.593	10.421	11.030
I PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	9.739	9.775	9.861	10.132	39.507	11.036	11.738
J INFORMASI DAN KOMUNIKASI	10.498	10.816	11.085	11.564	43.964	11.997	12.293
K JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	9.179	9.326	9.384	9.599	37.488	9.636	9.541
L REAL ESTATE	5.272	5.312	5.393	5.474	21.450	5.582	5.721
M.N JASA PERUSAHAAN	1.209	1.280	1.243	1.289	5.022	1.355	1.439
O ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	8.336	8.758	8.554	9.292	34.940	8.519	9.320
P JASA PENDIDIKAN	13.366	14.037	14.712	14.927	57.041	14.673	15.663
Q JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	2.674	2.766	2.860	3.002	11.301	2.947	3.017
R.S.T.U JASA LAINNYA	4.785	5.052	5.127	5.237	20.201	5.318	5.596
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>305.190</b>	<b>316.003</b>	<b>327.066</b>	<b>320.442</b>	<b>1.268.701</b>	<b>327.896</b>	<b>339.791</b>

\*Angka Sementara \*\*Angka Sangat Sementara  
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Tabel 1.6 PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar)

LAPANGAN USAHA	2018**				2018**	2019**	
	I	II	III	IV		I	II
A PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	30.418	31.012	34.265	25.675	121.370	30.699	32.620
B PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	5.023	5.296	5.219	5.335	20.873	5.322	5.462
C INDUSTRI PENGOLAHAN	78.528	81.004	80.798	81.874	322.204	81.388	83.949
D PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	246	253	259	270	1.029	262	265
E PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	164	165	165	166	659	168	173
F KONSTRUKSI	23.353	24.069	25.451	25.521	98.394	24.594	24.899
G PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	32.876	34.235	34.646	34.916	136.673	35.112	36.437
H TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	7.615	8.049	8.079	8.378	32.121	8.373	8.719
I PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	7.584	7.598	7.646	7.840	30.667	8.539	9.072
J INFORMASI DAN KOMUNIKASI	10.989	11.210	11.429	11.874	45.501	12.324	12.601
K JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	6.343	6.410	6.385	6.497	25.636	6.510	6.421
L REAL ESTATE	4.396	4.416	4.463	4.522	17.798	4.584	4.692
M,N JASA PERUSAHAAN	882	920	890	918	3.609	959	1.009
O ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	5.851	5.976	5.966	6.545	24.338	5.975	6.204
P JASA PENDIDIKAN	8.573	8.973	9.335	9.406	36.286	9.203	9.736
Q JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	1.946	2.009	2.070	2.163	8.188	2.122	2.167
R,S,T,U JASA LAINNYA	3.800	3.985	4.035	4.118	15.937	4.168	4.383
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>228.588</b>	<b>235.578</b>	<b>241.099</b>	<b>236.018</b>	<b>941.283</b>	<b>240.303</b>	<b>248.808</b>

Tabel 1.7 Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah berdasarkan ADHK menurut Lapangan Usaha (% , YOY)

LAPANGAN USAHA	2018**				2018**	2019**	
	I	II	III	IV		I	II
A PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	0,69	4,30	3,26	2,13	2,63	0,93	5,18
B PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	1,85	5,69	2,17	0,24	2,45	5,94	3,14
C INDUSTRI PENGOLAHAN	4,77	4,35	3,98	4,31	4,35	3,64	3,64
D PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	4,11	5,16	5,85	6,25	5,36	6,21	4,81
E PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	7,11	5,76	4,05	2,74	4,88	2,61	5,35
F KONSTRUKSI	6,56	5,34	7,57	4,85	6,07	5,31	3,45
G PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	5,16	5,34	5,81	6,47	5,70	6,80	6,43
H TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	4,90	8,62	6,50	10,07	7,55	9,95	8,32
I PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	10,24	8,29	7,32	6,95	8,17	12,59	19,40
J INFORMASI DAN KOMUNIKASI	17,19	11,83	11,56	9,53	12,39	12,15	12,41
K JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	6,37	3,61	1,75	2,73	3,58	2,64	0,17
L REAL ESTATE	6,72	5,69	5,26	4,69	5,58	4,27	6,26
M,N JASA PERUSAHAAN	11,14	11,04	9,48	6,47	9,48	8,76	9,66
O ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	4,08	4,27	2,62	6,62	4,43	2,13	3,82
P JASA PENDIDIKAN	7,08	6,26	7,87	9,75	7,76	7,35	8,51
Q JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	8,82	5,99	8,84	11,49	8,80	9,01	7,89
R,S,T,U JASA LAINNYA	9,22	9,93	8,92	9,71	9,45	9,68	9,99
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>5,37</b>	<b>5,43</b>	<b>5,21</b>	<b>5,28</b>	<b>5,32</b>	<b>5,12</b>	<b>5,62</b>

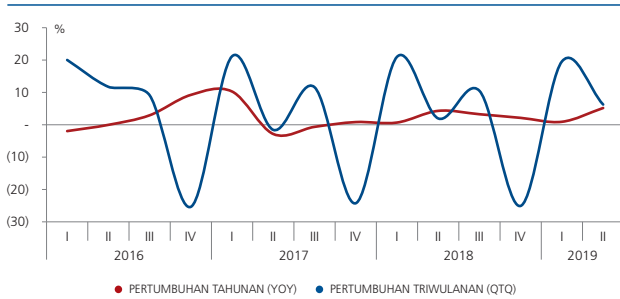
\*Angka Sementara \*\*Angka Sangat Sementara  
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

pendorong laju pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, kinerja lapangan usaha industri pengolahan yang tumbuh stagnan serta melambatnya pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor, menjadi penahan laju perekonomian Jawa Tengah pada triwulan II 2019.

**1.1.2.1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**  
Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 5,18% (yoy), meningkat

signifikan dari triwulan I 2019 yang tercatat tumbuh 0,93% (yoy). Pertumbuhan pada triwulan laporan ini jauh lebih tinggi dibanding rata-rata historis pertumbuhan triwulan II selama lima tahun terakhir (2014-2018) sebesar 1,12% (yoy). Penguatan kinerja lapangan usaha pertanian pada triwulan laporan terutama bersumber dari subsektor tanaman pangan. Berdasarkan hasil FGD<sup>4</sup>, peningkatan pertumbuhan pada triwulan II 2019 disebabkan oleh pergeseran masa panen komoditas tanaman pangan dari yang

4. FGD dengan pokok bahasan berupa pendalaman pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dilakukan dengan pihak BPS Provinsi Jawa Tengah pada 5 Agustus 2019

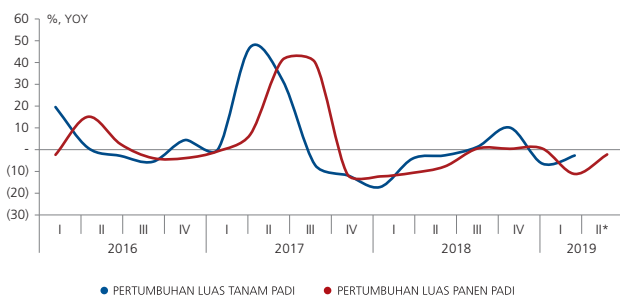


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

**Grafik 1.42 Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**

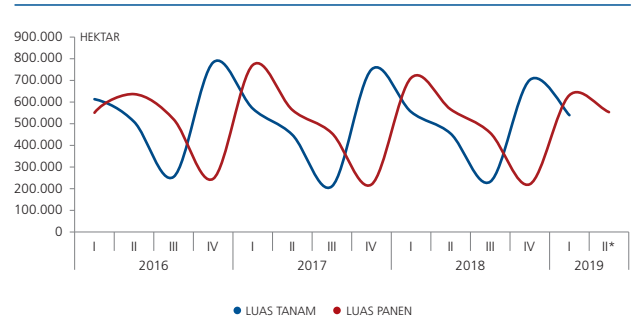
seharusnya selesai pada Maret 2019, namun pada periode ini bergeser hingga awal triwulan II (April 2019). Lebih lanjut, subsektor perkebunan khususnya kelompok tanaman semusim juga turut mendorong perbaikan kinerja lapangan usaha perhatian, kehutanan, dan perikanan.

Hasil monitoring Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa keterlambatan hadirnya musim hujan tahun 2018 menyebabkan mundurnya awal musim tanam padi periode akhir tahun (MT III 2018). Hal tersebut tentu berdampak pada pergeseran mundur musim panen padi menjadi akhir triwulan I 2019 hingga awal triwulan II 2019. Pada April 2019 masih terdapat sisa panen padi yang mendorong kinerja lapangan usaha pertanian tumbuh menguat pada triwulan laporan. Beberapa daerah sentra pertanian padi seperti Sragen, Sukoharjo, Boyolali, Demak, Grobogan, Pemalang, Brebes, Kab. Tegal, Banyumas, dan Cilacap mengalami panen raya pada Februari s.d. April 2019.



Sumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah, diolah

**Grafik 1.44 Pertumbuhan Luas Tanam dan Luas Panen Padi di Jawa Tengah**

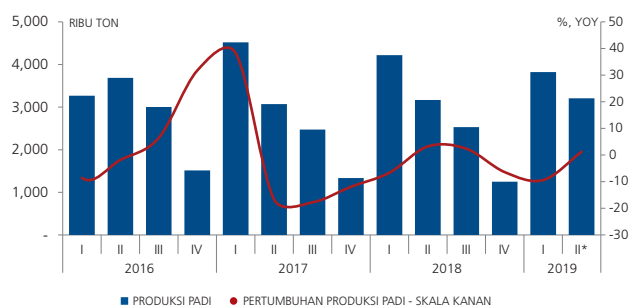


Sumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah

**Grafik 1.43 Perkembangan Luas Tanam dan Panen Padi di Jawa Tengah**

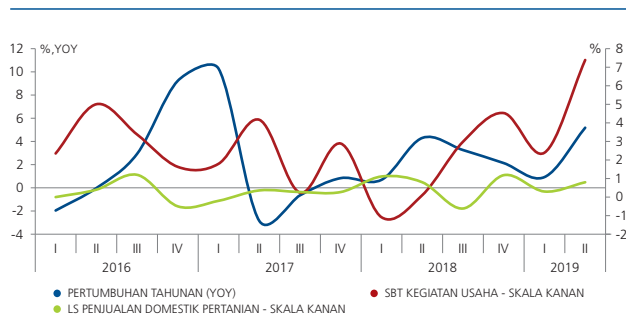
Pada triwulan laporan, hasil panen komoditas padi yang merupakan komoditas pertanian utama Jawa Tengah mengalami peningkatan pertumbuhan. Luas panen padi pada triwulan II 2019 diperkirakan mencapai 553,5 ribu hektar, atau tumbuh -2,24% (yoy), lebih baik dibanding pertumbuhan luas panen triwulan I 2019 sebesar -11,21% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, produksi padi pada triwulan II 2019 diperkirakan mencapai 3,21 juta ton GKG, tumbuh 1,24% (yoy), lebih tinggi dibanding perkiraan produksi triwulan I 2019 yang kontraksi sebesar -9,40% (yoy).

Terjaganya tingkat produksi ini juga terkonfirmasi dari harga beras di pasar konsumen yang terus menurun dalam lima bulan terakhir sejak memasuki musim panen di bulan Maret, meskipun penurunan ini relatif mundur dari pola musiman (Februari-Maret). Penurunan harga komoditas beras mencapai puncaknya pada April 2019 sehingga komoditas ini menjadi kontributor utama deflasi pada periode tersebut. Selanjutnya penurunan harga mereda pada



Sumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah, diolah

**Grafik 1.45 Perkembangan Hasil Panen Padi di Jawa Tengah**



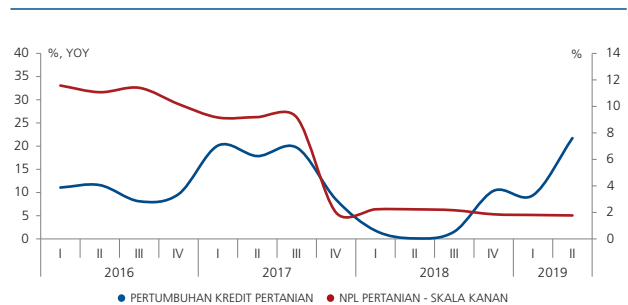
Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

**Grafik 1.46 Perkembangan SBT Realisasi Kegiatan Usaha (SKDU), Likert Scale Penjualan Domestik, dan Pertumbuhan PDRB Pertanian**

Juni 2019, yang mengindikasikan penurunan pasokan secara gradual di sentra produksi setelah puncak masa panen sepanjang April 2019.

Perkembangan di lapangan usaha ini juga terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia, yang menunjukkan adanya penguatan kegiatan usaha di sektor pertanian. Dari hasil SKDU, kegiatan usaha di sektor pertanian tercatat meningkat dari 2,39% pada triwulan I 2019 menjadi 7,39% pada periode laporan. Lebih lanjut, hasil SKDU menunjukkan adanya peningkatan kapasitas produksi di sektor pertanian dari 75,98% menjadi 80,54% pada triwulan II 2019. Peningkatan kapasitas produksi terjadi pada hampir seluruh subsektor, kecuali subsektor peternakan. Peningkatan kapasitas produksi terbesar terutama didorong oleh subsektor perikanan (83,33%), diikuti tanaman perkebunan (82,09%), tanaman bahan makanan (79,11%), dan tanaman hortikultura (65,71%).

Hasil kegiatan *liaison* Bank Indonesia triwulan II 2019 juga menunjukkan bahwa kinerja produksi dan penjualan lapangan usaha pertanian pada triwulan II 2019 mengalami peningkatan, tercermin dari *likert scale* (LS) 0,80; lebih tinggi dari triwulan I 2019 (LS 0,30). Peningkatan penjualan terjadi untuk subkategori perkebunan dan perikanan. Permintaan cabai mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya pada momentum bulan



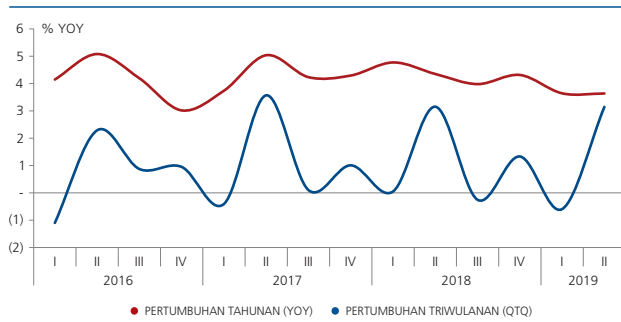
**Grafik 1.47 Pertumbuhan dan NPL Kredit Pertanian**

Ramadan. Namun demikian, terdapat beberapa pelaku usaha di subsektor pertanian tanaman pangan yang mengkonfirmasi penurunan penjualan. Akibat mundurnya awal musim hujan pada akhir 2018 menyebabkan awal proses tanam tidak dapat dilakukan secara serentak. Hal ini menyebabkan peningkatan serangan hama tikus dan gangguan gulma yang berdampak pada penurunan produktivitas lahan. Lebih lanjut, penurunan kinerja terjadi pada pelaku usaha di subsektor peternakan unggas karena risiko penyebaran virus penyakit unggas meningkat saat curah hujan tinggi.

Sejalan dengan perbaikan kinerja sektor pertanian, penyaluran kredit perbankan ke sektor pertanian juga tercatat tumbuh lebih tinggi. Pada triwulan laporan, penyaluran kredit ke sektor pertanian Jawa Tengah tumbuh 21,74% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya (9,42%; yoy); yang didorong oleh meningkatnya penyaluran kredit modal kerja dan investasi.

### 1.1.2.2. Industri Pengolahan

Sebagai lapangan usaha yang memiliki pangsa terbesar dalam perekonomian Jawa Tengah, **kinerja lapangan usaha industri pengolahan pada triwulan laporan relatif stagnan sehingga menahan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah untuk tumbuh lebih tinggi**. Pada triwulan II 2019, kinerja industri pengolahan tercatat tumbuh 3,64% (yoy) atau



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

**Grafik 1.48 Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan**

stabil dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan triwulan laporan lebih rendah jika dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu sebesar 4,35% (yoy). Kinerja triwulan ini juga jauh lebih rendah dari historis rata-rata pertumbuhan triwulan II selama tahun 2014-2018 (4,87%). Berdasarkan hasil FGD, tertahannya kinerja industri pengolahan sangat dipengaruhi oleh pelemahan permintaan ekspor luar negeri seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Selain itu, kinerja industri pengolahan juga belum optimal sebagai pengaruh perilaku *wait and see* para pelaku usaha terkait dengan keputusan hasil Pemilu 2019.

Kinerja ekspor luar negeri terpantau menurun hingga mencatatkan kontraksi pada triwulan laporan. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh pelemahan volume perdagangan dunia yang diakibatkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi global serta eskalasi ketegangan hubungan dagang antarnegara dan sejumlah risiko geopolitik.

Meningkatnya permintaan saat momen Ramadan dan Lebaran juga belum secara optimal mendorong aktivitas *building stock* yang biasanya mampu mendorong kinerja lapangan usaha industri pengolahan. Kinerja yang belum optimal ini juga ditengarai akibat para pelaku industri pengolahan yang bersikap *wait and see* terhadap keputusan hasil Pemilu

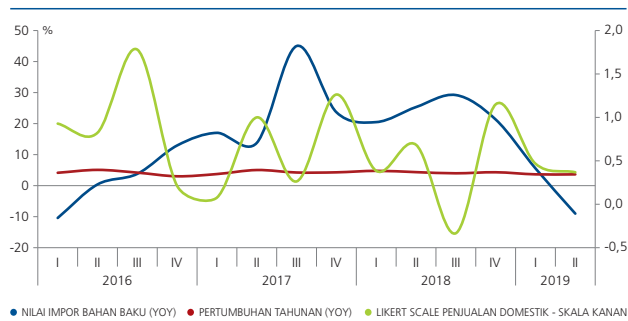
2019 serta kebijakan-kebijakan Pemerintah terpilih periode 2019-2024. Selain itu, berkurangnya hari kerja efektif seiring dengan libur cuti bersama hari raya keagamaan juga dapat berpengaruh terhadap berkurangnya produksi dan aktivitas jasa logistik di periode tersebut. Kinerja industri pengolahan yang tertahan tersebut juga terkonfirmasi dari indikator penjualan listrik untuk segmen industri. Pada triwulan II 2019, penjualan listrik segmen industri tumbuh 0,62% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan I 2019 (4,53% yoy).

Lebih lanjut, penurunan permintaan impor luar negeri khususnya kelompok bahan baku dapat menjadi indikasi awal berkurangnya kapasitas maupun aktivitas produksi industri pengolahan yang memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian. Impor bahan baku tercatat menurun dari 5,55% (yoy) pada triwulan I 2019 menjadi berkontraksi -9,01% (yoy) pada triwulan laporan. Penurunan impor bahan baku terjadi pada beberapa komoditas yang digunakan sebagai input industri pengolahan, seperti produk tekstil (serat, benang, dan kain); bahan kimia; logam; serta bahan makanan untuk industri (gula dan gula rafinasi; produk olahan susu dan telur; dan pakan ternak). Lebih lanjut, penurunan impor juga terpantau pada komoditas migas yang berdampak terhadap berkurangnya bahan baku industri pengilangan minyak. Mengingat subsektor industri tersebut secara historis memiliki pangsa terbesar ketiga di lapangan usaha industri pengolahan Jawa Tengah, maka penurunan aktivitas produksi tersebut berdampak pada tertahannya kinerja industri pengolahan di triwulan laporan.

Perkembangan tersebut juga sejalan dengan hasil kegiatan *liaison* yang dilakukan Bank Indonesia pada periode laporan. Pertumbuhan terbatas pada penjualan domestik dan ekspor pelaku usaha di sektor industri pengolahan ditunjukkan oleh nilai *likert scale* penjualan

domestik sebesar 0,37, lebih rendah dibanding LS 0,47 pada triwulan I 2019. Pelaku usaha di subsektor industri tekstil dan pengolahan kayu mengkonfirmasi bahwa terbatasnya permintaan domestik tersebut sebagai dampak dari kondisi politik di dalam negeri terkait pelaksanaan Pemilu 2019 sehingga konsumen dan pelaku usaha memilih untuk bersikap *wait and see*.

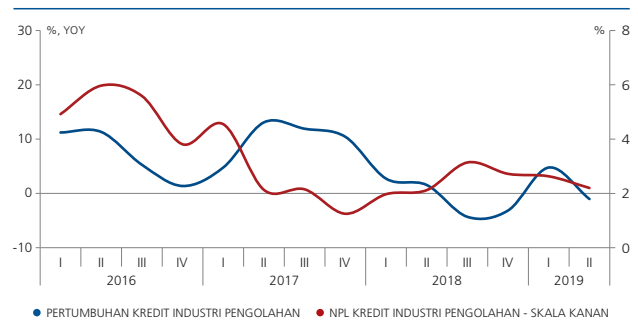
Pertumbuhan penjualan ekspor juga terpantau relatif terbatas, tercermin dari LS 0,63. Beberapa pelaku usaha di industri tekstil dan bulu mata mengkonfirmasi bahwa melambatnya pertumbuhan ekonomi global mulai dirasakan berpengaruh terhadap permintaan industri ini. Lebih lanjut, faktor persaingan global yang semakin kompetitif khususnya dengan Tiongkok dan Vietnam, juga turut berdampak terhadap terbatasnya permintaan ekspor. Namun demikian, pelaku usaha di beberapa subsektor lain masih mengkonfirmasi peningkatan penjualan ekspor, seperti di industri pengolahan ikan, mebel, alas kaki, dan jamu tradisional seiring dengan adanya penambahan pasar baru serta pemanfaatan peluang dari perang dagang AS-Tiongkok. Potensi ekspor untuk penjualan produk mebel masih cukup besar. Namun, pelaku usaha dihadapkan pada beberapa tantangan, antara lain: (i) sulitnya mencari tenaga kerja khususnya tenaga kerja muda dengan *skill* tinggi; (ii) biaya produksi yang terus meningkat sehingga daya saing produk menurun; serta (iii) faktor teknologi dan regulasi.



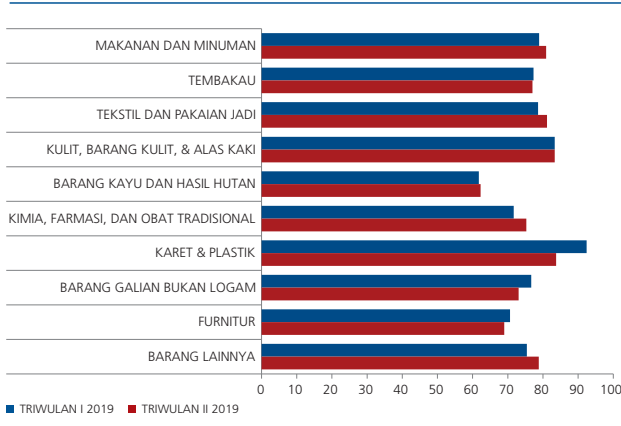
Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah  
**Grafik 1.49 Likert Scale Penjualan Domestik, Nilai Impor Bahan Baku, dan Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan**

Sejalan dengan pertumbuhan industri pengolahan yang relatif terbatas, pembiayaan perbankan kepada lapangan usaha ini tercatat menurun. Penyaluran kredit kepada sektor industri pengolahan di Jawa Tengah mengalami kontraksi, berbalik arah dari triwulan lalu yang masih tumbuh positif. Penyaluran kredit perbankan ke lapangan usaha ini menurun menjadi tumbuh -1,04% (yoy); berbalik arah dari triwulan I 2019 yang tumbuh 4,77% (yoy). Penurunan tersebut dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan penyaluran kredit modal kerja maupun kredit investasi. Sementara itu, kualitas kredit masih menunjukkan perbaikan. Pada triwulan II 2019, penyaluran kredit di industri pengolahan mencatatkan rasio *Non Performing Loan* (NPL) 2,20%; membaik dari rasio NPL triwulan sebelumnya sebesar 2,63%.

Sementara itu, indikator *Prompt Manufacturing Index* (PMI) dari hasil SKDU Bank Indonesia mengindikasikan bahwa kapasitas usaha sektor industri pengolahan pada triwulan II 2019 masih relatif baik, yang tercermin dari realisasi PMI sebesar 58,51%. Hasil SKDU Bank Indonesia triwulan II 2019 menunjukkan bahwa penurunan kapasitas produksi terjadi di beberapa subsektor, yaitu industri karet dan plastik; barang galian bukan logam; furnitur; dan industri pengolahan tembakau. Sementara itu, hasil survei ini juga menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas produksi terpakai masih dicatatkan oleh beberapa subsektor



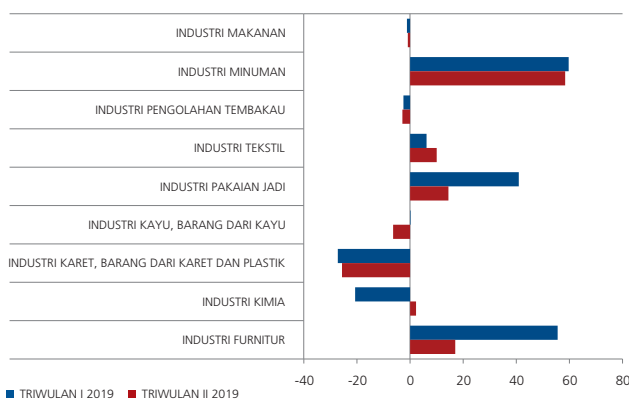
**Grafik 1.50 Pertumbuhan dan NPL Kredit Industri Pengolahan**



**Grafik 1.51 Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai Subsektor Industri Pengolahan (SKDU)**

industri, di antaranya yaitu industri tekstil dan pakaian jadi; makanan dan minuman; serta kimia, farmasi dan obat tradisional.

Berdasarkan skala, perlambatan pertumbuhan terutama terjadi pada industri besar dan sedang, sedangkan industri mikro dan kecil masih tercatat menguat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan produksi industri manufaktur yang disurvei oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Hasil Survei Industri Manufaktur Besar dan Sedang menunjukkan bahwa produksi industri manufaktur besar dan sedang mengalami perlambatan menjadi tumbuh 0,17% (yoy)

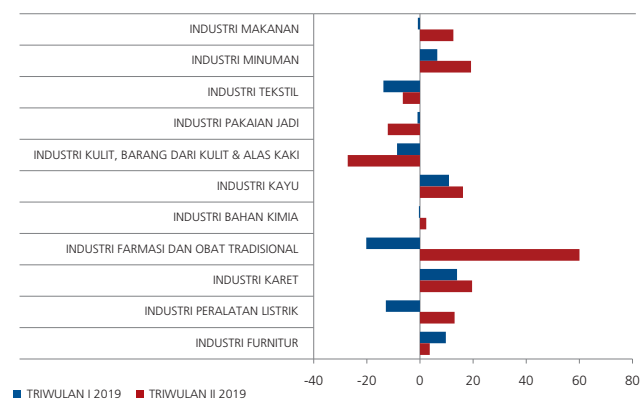


**Grafik 1.52 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang berdasarkan Sektor (% YOY)**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

pada triwulan II 2019, lebih rendah dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 0,56% (yoy). Perlambatan pertumbuhan produksi di industri besar dan sedang terjadi pada sebagian besar subsektor, terutama subsektor industri furnitur; pakaian jadi; kayu dan barang dari kayu; minuman; serta industri pengolahan tembakau. Sementara peningkatan pertumbuhan produksi masih terpantau di subsektor industri kimia; tekstil; dan makanan.

Sementara itu Survei Industri Mikro dan Kecil menunjukkan bahwa produksi industri mikro dan kecil masih mencatatkan perbaikan pertumbuhan, yaitu menjadi tumbuh 7,05% (yoy) pada triwulan II 2019, meningkat dari 5,62% (yoy) pada triwulan I 2019. Pada industri skala mikro dan kecil, penguatan pertumbuhan produksi yang paling besar terjadi di subsektor industri farmasi dan obat tradisional; diikuti dengan industri peralatan listrik; makanan; minuman; dan industri tekstil. Sementara itu, beberapa subsektor masih mencatatkan pertumbuhan yang melambat seperti di subsektor industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki; pakaian jadi; serta industri furnitur.



**Grafik 1.53 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil berdasarkan Sektor (% YOY)**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

### 1.1.2.3. Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor

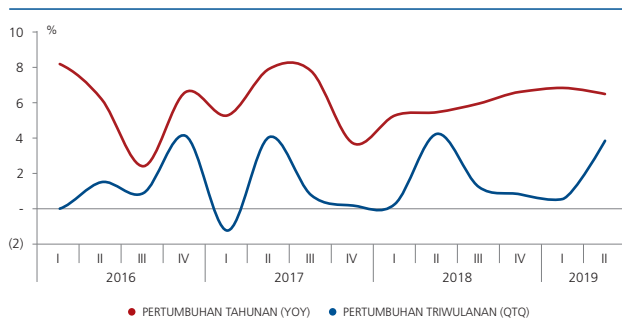
Pada triwulan laporan, lapangan usaha perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor tercatat tumbuh 6,43% (yoy), sedikit melambat dibandingkan triwulan I 2019 yang tumbuh 6,80% (yoy).

Sejalan dengan terbatasnya pertumbuhan industri pengolahan pada triwulan II 2019, kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran menunjukkan pertumbuhan yang melambat pada periode laporan. Sementara itu, perdagangan hasil produksi pertanian terindikasi meningkat, sehingga mampu menahan perlambatan pertumbuhan lapangan usaha ini lebih dalam. Perdagangan komoditas pertanian diperkirakan meningkat pada triwulan laporan, seiring dengan akselerasi kinerja lapangan usaha pertanian akibat pengaruh pergeseran masa panen komoditas tanaman pangan. Jawa Tengah merupakan salah satu daerah lumbung pertanian, sehingga perbaikan kinerja lapangan usaha ini diperkirakan turut menjaga permintaan daerah lain terhadap hasil produksi Jawa Tengah.

Hasil *liaison* yang dilakukan Bank Indonesia juga mengindikasikan pelemahan kinerja perdagangan pada periode laporan. Penjualan domestik pelaku usaha di lapangan usaha ini terpantau menurun, tercermin dari *likert scale* penjualan domestik triwulan

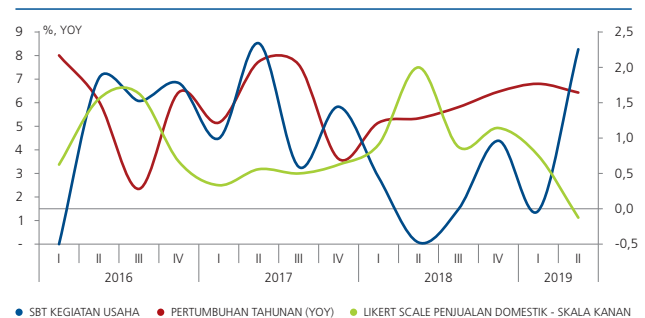
laporan sebesar -0,13, atau lebih rendah dari LS 0,75 pada triwulan I 2019. Penurunan penjualan terutama dikonfirmasi oleh pelaku usaha di subsektor perdagangan mobil. Pelemahan ini juga tercermin dari melambatnya pertumbuhan penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) menjadi tumbuh 7,85% (yoy) pada triwulan II 2019; lebih rendah dari 11,33% (yoy) pada triwulan I 2019. Secara historis, puncak penjualan biasanya jatuh pada periode menjelang Lebaran. Namun pada periode Lebaran tahun ini, tingkat penjualan cenderung lebih rendah. Hal ini diduga turut disebabkan oleh perilaku masyarakat yang cenderung *wait and see* terhadap keputusan hasil Pemilu 2019. Lebih lanjut, pelemahan penjualan subsektor perdagangan mobil juga dipengaruhi oleh semakin ketatnya persaingan industri otomotif seiring bertambahnya pemain baru. Selain itu, pasar mobil LCGC yang mulai jenuh dan cenderung menurun serta meningkatnya kehati-hatian perusahaan pembiayaan dalam memberikan persetujuan permohonan kredit turut mendukung pelemahan tersebut.

Sementara itu, hasil *liaison* menunjukkan bahwa kinerja penjualan di subsektor perdagangan besar dan eceran tergolong relatif baik. Peningkatan penjualan dikonfirmasi oleh pelaku usaha di subsektor tersebut seiring terjaganya permintaan masyarakat pada periode Ramadan dan Idulfitri. Peningkatan terutama



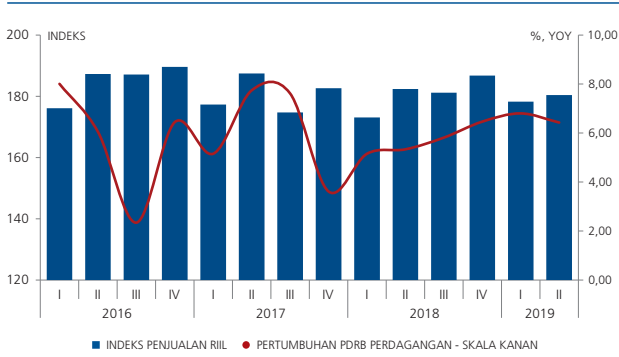
Grafik 1.54 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah



Grafik 1.55 SBT Kegiatan Usaha, Likert Scale Penjualan Domestik, Pertumbuhan PDRB Perdagangan

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Bank Indonesia, diolah



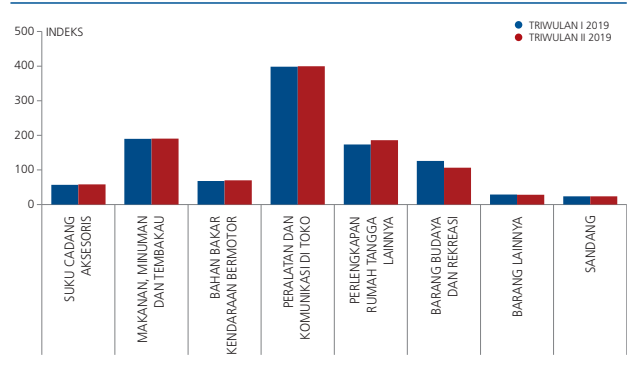
Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

**Grafik 1.56** Indeks Penjualan Riil (Hasil SPE) dan Pertumbuhan PDRB Perdagangan

terjadi pada kategori makanan, seperti biskuit dan sirup, serta kategori pakaian jadi seiring dengan tingginya permintaan dan terdapat program promo/diskon menjelang hari raya.

Indikator konsumsi listrik mengkonfirmasi perlambatan kinerja lapangan usaha perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor. Pada triwulan II 2019, konsumsi listrik untuk segmen bisnis tercatat tumbuh 6,36% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan triwulan I 2019 (9,45%; yoy). Penyaluran kredit ke lapangan usaha perdagangan besar dan eceran Jawa Tengah juga menunjukkan perlambatan. Pada triwulan II 2019, penyaluran kredit tercatat tumbuh 10,30% (yoy), melambat dibanding pertumbuhan triwulan I 2019 sebesar 12,95% (yoy). Pelemahan tersebut disebabkan oleh melambatnya penyaluran kredit investasi dan modal kerja.

Sementara itu, hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) menunjukkan indeks penjualan riil meningkat secara terbatas menjadi rata-rata triwulan II 2019 sebesar 180,4; dari rerata triwulan I 2019 sebesar 178,3. Hampir seluruh kelompok mencatatkan peningkatan penjualan, kecuali kelompok barang budaya dan rekreasi serta barang lainnya. Peningkatan penjualan yang paling tajam tercatat pada kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya. Sementara Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) menunjukkan Saldo



**Grafik 1.57** IPR Perdagangan Eceran berdasarkan Kelompok Komoditas

Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha sektor perdagangan pada triwulan II 2019 sebesar 8,27%; atau lebih tinggi dari SBT triwulan I 2019 sebesar 1,42%.

Selain menggunakan pendekatan *commodity flow* di mana kinerja perdagangan dipengaruhi oleh kinerja lapangan usaha pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan; kinerja perdagangan juga dapat diestimasi menggunakan pendekatan margin perdagangan, yang terdiri dari margin perdagangan untuk komoditas pertanian, industri pengolahan, pertambangan, maupun margin perdagangan untuk barang impor. Dengan demikian, penjumlahan margin perdagangan dari komoditas-komoditas tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja lapangan usaha perdagangan secara keseluruhan pada triwulan laporan.

Pada triwulan II 2019, margin perdagangan yang berasal dari barang impor diperkirakan relatif kecil seiring dengan impor barang konsumsi yang masih tercatat tumbuh negatif. Pada triwulan laporan, impor barang konsumsi masih tercatat kontraksi sebesar -17,52% (yoy), telah mengalami perbaikan dari triwulan I 2019 (-27,31%; yoy). Penurunan impor barang konsumsi akan menyebabkan margin perdagangan yang dihasilkan dari transaksi perdagangan barang impor relatif terbatas.

Margin perdagangan yang dihasilkan dari transaksi perdagangan impor barang konsumsi memiliki *multiplier economy* lebih tinggi, karena melibatkan lebih banyak pelaku ekonomi. Hal tersebut dikarenakan peredaran perdagangan komoditas ini telah melalui beberapa pelaku ekonomi sebelum akhirnya digunakan oleh konsumen akhir, sehingga menciptakan margin perdagangan yang lebih besar. Hal ini berbeda dengan impor barang modal yang langsung digunakan konsumen akhir untuk kegiatan investasi, atau impor bahan baku yang langsung digunakan untuk kegiatan produksi. Sebagai contoh, impor barang modal berupa mesin kelistrikan yang digunakan untuk pembangunan pembangkit listrik tidak memberikan banyak margin perdagangan, meskipun dari sisi nilai barang relatif besar. Hal tersebut dikarenakan barang modal tersebut diimpor langsung oleh konsumen akhir dan langsung digunakan untuk kegiatan investasi, sehingga margin perdagangan yang diciptakan dari transaksi tersebut relatif kecil.

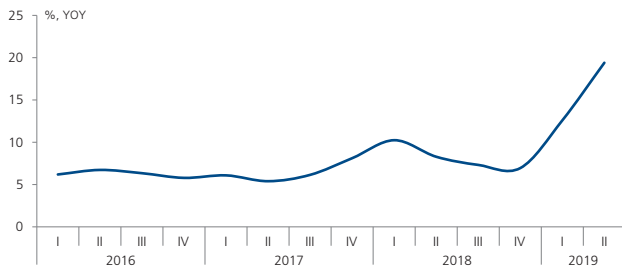
#### 1.1.2.4. Lapangan Usaha Lainnya

Selain ketiga lapangan usaha utama Jawa Tengah yang telah dijelaskan sebelumnya, seluruh lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan II 2019. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, serta informasi dan komunikasi.

Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh signifikan dan melanjutkan pertumbuhan *double digit* pada triwulan II 2019 menjadi 19,40% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 12,59% (yoy). Pertumbuhan pada periode ini juga merupakan yang tertinggi dibanding historis pertumbuhan triwulan II tahun 2014-2018 yang rata-ratanya sebesar 6,61%. Peningkatan pertumbuhan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum didorong oleh meningkatnya

permintaan masyarakat menjelang dan sesudah Lebaran. Selain menjadi daerah destinasi utama kegiatan mudik, Jawa Tengah juga menjadi pilihan lokasi transit bagi pemudik yang menggunakan jalur darat. Hal tersebut juga didorong oleh tren kenaikan harga tiket angkutan udara dan perbaikan konektivitas antardaerah dengan beroperasinya Tol Trans Jawa. Adanya jalur tol tersebut memberikan tambahan alternatif moda transportasi sehingga mendorong tingkat mobilisasi masyarakat. Peningkatan kinerja lapangan usaha ini juga dipengaruhi oleh tingginya aktivitas partai politik dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan Pemilu 2019. Dengan akselerasi pertumbuhan ini, sumbangan pertumbuhan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum meningkat signifikan dan turut mendorong laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan laporan.

Selanjutnya, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi kedua pada triwulan ini dicatatkan oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi. Lapangan usaha informasi dan komunikasi sejak triwulan II 2017 telah konsisten mencatatkan pertumbuhan *double digit*, meski pada triwulan IV 2018 melambat menjadi 9,53% (yoy). Namun demikian, pada triwulan II 2019 lapangan usaha ini kembali melanjutkan penguatan pertumbuhan menjadi 12,41% (yoy), meningkat dari triwulan I 2019 (12,15%; yoy). Capaian ini juga lebih tinggi dari rata-rata historis pertumbuhan triwulan II selama tahun 2014-2018 (10,81%). Pertumbuhan lapangan usaha informasi dan komunikasi yang kembali meningkat mengindikasikan kuatnya ketergantungan masyarakat terhadap teknologi informasi. Pada masa Pemilu, bulan Ramadan, dan Idulfitri, penggunaan internet mengalami peningkatan signifikan. Selama Pemilu 2019, *traffic data* beberapa penyedia jaringan telekomunikasi melonjak secara tajam pada kisaran 7%-24%. Secara umum

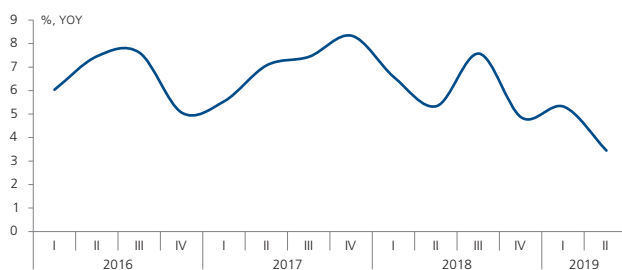


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

**Grafik 1.58 Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**

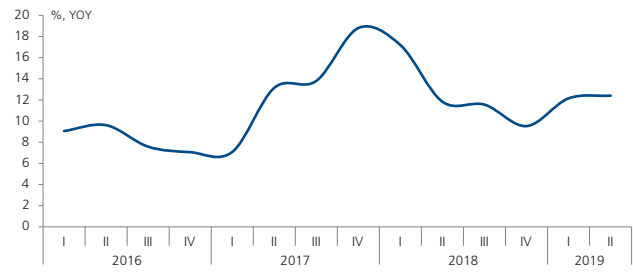
perkembangan teknologi yang diikuti dengan meningkatnya kesadaran teknologi mendorong penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan usaha semakin masif. Hal tersebut dapat terlihat dari maraknya perkembangan *e-commerce*, dan *start up company* yang berbasis teknologi informasi.

Sementara itu, lapangan usaha konstruksi yang merupakan lapangan usaha dengan pangsa terbesar keempat di Jawa Tengah mencatatkan pertumbuhan yang melambat pada triwulan II 2019. Pada periode laporan, lapangan usaha konstruksi tumbuh 3,45% (yoy) atau lebih lambat dibanding triwulan I 2019 yang tercatat tumbuh 5,31% (yoy). Pertumbuhan triwulan laporan juga lebih rendah dibanding historis rata-rata pertumbuhan triwulan II dalam kurun lima tahun terakhir (2014-2018) sebesar 5,87% (yoy). Deselerasi lapangan usaha konstruksi sejalan dengan melemahnya kinerja investasi, khususnya investasi bangunan. Hal ini tercermin dari data penjualan semen di Jawa Tengah yang mengalami kontraksi -12,41% (yoy), lebih dalam dibanding triwulan I 2019



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

**Grafik 1.60 Pertumbuhan PDRB Konstruksi**

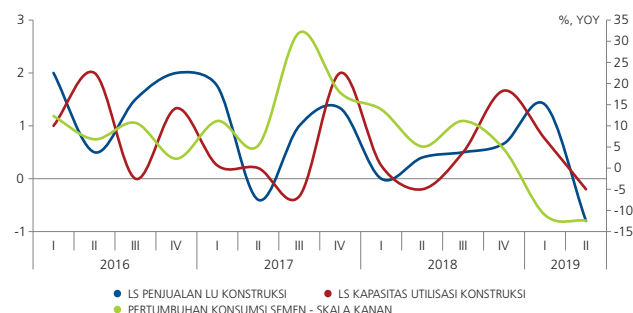


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

**Grafik 1.59 Pertumbuhan PDRB Informasi dan Komunikasi**

yang tercatat tumbuh negatif sebesar -11,11% (yoy).

Perlambatan pertumbuhan lapangan usaha konstruksi dikonfirmasi oleh hasil *liaison* Bank Indonesia. *Likert scale* penjualan domestik untuk sektor bangunan turun menjadi -0,80 pada triwulan II 2019, lebih rendah dibanding LS triwulan sebelumnya sebesar 1,40. Perlambatan tersebut antara lain terjadi pada pelaku usaha yang bergerak di bidang properti karena adanya sikap *wait and see* dari *potential buyer* rumah tapak terutama pada tipe menengah terhadap pengumuman hasil Pemilu 2019. Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) di Pasar Primer yang dilakukan Bank Indonesia juga mengkonfirmasi pelemahan kinerja lapangan usaha ini. Berdasarkan survei dimaksud, pembangunan properti residensial mengalami penurunan sebesar -24,46% (yoy) pada triwulan II 2019, berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 23,96% (yoy). Lebih lanjut, penjualan properti residensial juga mengalami penurunan pada periode laporan sebesar -36,74% (yoy) atau lebih dalam dibanding triwulan I 2019 (-20,81%; yoy).



Sumber: Kemenperin, Kemendag, Bank Indonesia, diolah

**Grafik 1.61 LS Penjualan, LS Kapasitas Utilisasi LU Konstruksi, dan Pertumbuhan Konsumsi Semen**

## 1.2. TRACKING PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL TRIWULAN III 2019

**Perekonomian Jawa Tengah diperkirakan tumbuh melambat pada triwulan III 2019 dibandingkan triwulan sebelumnya.** Perlambatan pertumbuhan terutama dipengaruhi oleh normalisasi permintaan masyarakat pasca Ramadan dan Idulfitri yang berlangsung pada triwulan lalu. Ditinjau dari sisi pengeluaran, perlambatan diperkirakan terjadi pada komponen konsumsi rumah tangga dan LNPRT sejalan dengan kembali normalnya belanja masyarakat pasca perayaan hari besar keagamaan serta berakhirnya pelaksanaan pemilu. Kinerja konsumsi pemerintah juga diperkirakan melambat pada triwulan III 2019 seiring dengan menurunnya belanja pegawai. Sementara itu, jumlah hari kerja yang lebih panjang pada triwulan III 2019 akan mendorong aktivitas penyelesaian proyek dan pengiriman barang kembali meningkat, sehingga mendorong akselerasi kinerja investasi dan ekspor luar negeri. Perbaikan kinerja ekspor luar negeri diperkirakan relatif terbatas seiring dengan menguatnya ketidakpastian perekonomian global.

Sementara berdasarkan sisi lapangan usaha, melambatnya kinerja lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan diperkirakan menahan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III 2019, sejalan dengan konsolidasi permintaan masyarakat pasca perayaan HBKN. Lebih lanjut, kinerja lapangan usaha pertanian juga diproyeksikan tumbuh melambat seiring telah berlalunya masa panen raya dan pada periode tersebut telah kembali memasuki masa tanam. Adapun risiko yang perlu diwaspadai karena berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi antara lain: (i) berlanjutnya ketegangan hubungan dagang AS dan Tiongkok serta sejumlah risiko geopolitik; (ii) pertumbuhan ekonomi global yang melambat, termasuk negara mitra dagang utama Jawa Tengah; serta (iii) turunnya volume perdagangan dan harga

komoditas global, termasuk harga minyak. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan III 2019 diproyeksikan berada di kisaran 5,2%-5,6% (yoy).

### 1.2.1. Tracking Perkembangan Ekonomi Triwulan III 2019 Sisi Pengeluaran

**Pada triwulan III 2019, laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan tertahan terutama disebabkan oleh perlambatan konsumsi,** khususnya konsumsi swasta yang terdiri dari konsumsi rumah tangga dan konsumsi LNPRT. Perlambatan konsumsi sejalan dengan normalisasi permintaan masyarakat pasca berakhirnya perayaan HBKN dan penyelenggaraan rangkaian Pemilu 2019. Dengan pangsa lebih dari 60%, deselerasi pada komponen pengeluaran tersebut akan menahan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara keseluruhan.

**Pengeluaran konsumsi rumah tangga diperkirakan mengalami perlambatan pada triwulan III 2019.** Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan melambat seiring konsolidasi pengeluaran masyarakat pasca mencapai puncak saat Ramadan dan perayaan Idul Fitri, ditambah telah berakhirnya pelaksanaan Pemilu 2019. Hasil SKDU Bank Indonesia menunjukkan bahwa pelaku usaha memperkirakan kegiatan usaha di triwulan III 2019 tumbuh melambat, tercermin dari perkiraan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) triwulan III 2019 sebesar 33,19%, lebih rendah dari realisasi SBT triwulan II 2019 (37,90%).

Perlambatan konsumsi rumah tangga terindikasi dari hasil Survei Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia, di mana keyakinan konsumen yang tercermin dari rata-rata Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) triwulan III 2019 (s.d Agustus 2019) tercatat 137,18; lebih rendah dari

rata-rata IKK triwulan II 2019 (138,91). Meskipun menurun, nilai IKK yang masih berada di atas level 100 mencerminkan bahwa konsumen masih optimis terhadap kondisi ekonomi triwulan III 2019. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya dua indeks pembentuk IKK, yaitu indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE) dan indeks ekspektasi konsumen (IEK). Pada triwulan III 2019, IKE turun dari 126,71 menjadi 125,89, sedangkan IEK turun dari 151,11 menjadi 148,47. Melemahnya optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi triwulan III 2019 terutama disebabkan oleh pelemahan keyakinan atas penghasilan konsumen dan konsumsi barang-barang kebutuhan tahan lama.

Perlambatan konsumsi rumah tangga juga dikonfirmasi oleh pedagang eceran. Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil Survei Penjualan Eceran (SPE), di mana omset penjualan yang tercermin dari indeks penjualan riil mengalami penurunan dari triwulan II 2019 sebesar 180,4 menjadi 175,8 pada triwulan III 2019 (rata-rata s.d Agustus 2019). Penurunan ini terjadi di hampir seluruh kategori komoditas, kecuali kelompok barang budaya dan rekreasi. Melambatnya kinerja konsumsi salah satunya ditunjukkan melalui indikator perkiraan konsumsi listrik segmen rumah tangga triwulan III 2019 (data s.d Juli 2019) yang menunjukkan perlambatan menjadi tumbuh 4% (yoy); lebih rendah dibanding triwulan II 2019 (6,35%; yoy).

Penyaluran kredit konsumsi juga menunjukkan perlambatan. Kredit konsumsi pada triwulan III 2019 (data Juli) tercatat tumbuh 5,23% (yoy); lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan II 2019 (5,64%; yoy). Perlambatan tersebut disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan kredit multiguna lainnya, sedangkan penyaluran kredit perlengkapan rumah tangga tumbuh menguat.

Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang masih menjadi pendorong konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2019, antara lain konsumsi pendidikan dalam rangka tahun ajaran baru sekolah; tambahan pendapatan berupa pencairan Gaji/Pensiun/Tunjangan ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan pada Juli 2019; serta penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) tahap III pada Juli 2019, yang diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan Semarang Great Sale (Semargres) 2019 yang berlangsung 28 Juni-28 Juli 2019 diperkirakan dapat menahan perlambatan lebih dalam. Semargres 2019 melibatkan 1.289 peserta yang terdiri dari pelaku usaha ritel hingga pedagang kaki lima dan pedagang di pasar tradisional, dengan target omset mencapai Rp250-300 miliar.

Lebih lanjut, penyelenggaraan beberapa *event* nasional dan internasional di Jawa Tengah sepanjang triwulan III 2019 diharapkan juga dapat mendorong pertumbuhan konsumsi, antara lain: Prambanan Jazz Festival, pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Kejuaraan Dunia MXGP, ASEAN School Games, Solo Batik Carnival, Dieng Culture Festival, Festival Cheng Ho, Konser Westlife The Twenty Tour Live in Borobudur and Sam Poo Kong Semarang, Solo International Performing Art, dan Festival Payung Indonesia.

Inflasi yang terkendali juga turut berperan dalam memelihara daya beli. Inflasi Jawa Tengah hingga Juli tergolong rendah dan terkendali (2,81%; yoy), sehingga diperkirakan akan mendorong terjaganya daya beli masyarakat. Pada triwulan III 2019, inflasi Jateng diperkirakan masih berada pada rentang sasaran 3,5%±1% serta lebih rendah dibanding historis inflasi triwulan III dalam lima tahun terakhir (2014-2018) sebesar 3,97%.

**Pertumbuhan konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) diperkirakan juga melambat pada triwulan III 2019**, seiring dengan berakhirnya bulan Ramadan dan perayaan Idulfitri. Selepas perayaan HBKN, belanja lembaga sosial keagamaan diperkirakan tidak setinggi periode sebelumnya. Lebih lanjut, selesainya rangkaian pelaksanaan pemilihan legislatif dan presiden pada triwulan II 2019 juga akan menahan aktivitas lembaga nonprofit, seperti ormas dan partai politik.

**Pada sisi pemerintah, konsumsi diperkirakan tumbuh lebih rendah pada triwulan III 2019 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.** Pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah diperkirakan melambat karena realisasi belanja pegawai tidak sebesar realisasi triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2019, terdapat pembayaran rapel kenaikan gaji pokok serta pembayaran THR bagi ASN dan pensiunan, sedangkan di triwulan III 2019 diperkirakan hanya dilakukan pembayaran gaji ke-13 (Juli). Komponen belanja pegawai merupakan komponen belanja dengan pangsa terbesar dalam APBD Jawa Tengah, sehingga realisasi komponen ini dapat berpengaruh terhadap kinerja konsumsi pemerintah. Selain itu, belanja barang juga diperkirakan terkonsolidasi seiring dengan berakhirnya rangkaian penyelenggaraan Pemilu 2019. Hingga Juli 2019, realisasi penyerapan anggaran mencapai 44,80% dari total anggaran Rp26,63 triliun. Angka realisasi tersebut lebih rendah dari target penyerapan anggaran sampai dengan bulan Juli yang sebesar 50,14%.<sup>5</sup>

Namun demikian, terdapat potensi peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah pada triwulan III 2019. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/proyek yang kembali normal seiring dengan bertambahnya jumlah hari kerja efektif pasca terdapat libur cuti bersama Idulfitri di triwulan sebelumnya. Hal tersebut

berpotensi mendorong realisasi penyerapan anggaran. Selain itu, konsumsi pemerintah juga diperkirakan semakin didorong dalam rangka mengejar target realisasi akhir tahun setelah memasuki semester II 2019. Penyelenggaraan beberapa event nasional dan internasional di Jawa Tengah sepanjang triwulan III 2019 juga berpotensi mendorong realisasi belanja barang dan jasa.

Secara keseluruhan tahun, anggaran pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (TA) 2019 ditetapkan sebesar Rp25,8 triliun atau meningkat 5,23% dari APBD-P 2018. Sementara itu, anggaran belanja dalam APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 ditetapkan sebesar Rp26,46 triliun atau meningkat 4,32% dari APBD-P 2018.

**Selanjutnya, kinerja investasi diperkirakan mengalami perbaikan pada triwulan III 2019.** Iklim politik dalam negeri diperkirakan mulai stabil pasca selesainya penyelenggaraan pemilu, sehingga diharapkan pelaku usaha memperoleh kepastian usaha dan tidak lagi bersikap *wait and see*. Seiring dengan kondisi tersebut, pelaku usaha diperkirakan mengoptimalkan kinerja usaha dan investasi pasca penyelenggaraan pemilu di paruh kedua tahun 2019. Lebih lanjut, normalisasi jumlah hari kerja yang lebih panjang pada triwulan III 2019 akan mendorong peningkatan aktivitas penyelesaian proyek infrastruktur dalam rangka mengejar target realisasi akhir tahun. Hasil SKDU Bank Indonesia menunjukkan bahwa SBT perkiraan investasi triwulan III 2019 sebesar 13,73%, lebih tinggi dari realisasi SBT triwulan II 2019 (11,38%).

Lebih lanjut, beberapa proyek yang direncanakan dimulai sejak awal 2019 namun pengerjaannya mundur, diperkirakan sudah mulai berjalan pada triwulan III 2019, antara lain: Tol Semarang-Demak

5. Realisasi penyerapan anggaran berdasarkan informasi dari Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)

(tahap pelelangan); Tol Bawen-Yogya (tahap penetapan trase jalan tol); Bandara Jenderal Soedirman (konstruksi baru dimulai April 2019, target selesai 2020); termasuk beberapa rencana investasi swasta besar seperti proyek RDMP Pertamina Cilacap.

Selain itu, beberapa proyek investasi *multiyears* masih akan berjalan di periode ini sehingga menopang kinerja investasi Jawa Tengah, antara lain: pembangunan PLTU Batang (tahap konstruksi akhir); pembangunan terminal baru Bandara Adi Soemarmo Solo (realisasi 82% pada Mei 2019, target operasi Agustus 2019); pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Adi Soemarmo (realisasi 79% pada Mei 2019, target operasi September 2019); pembangunan SPAM Semarang Barat; renovasi Stadion Manahan Solo (realisasi 70%, target selesai akhir Oktober 2019); serta KRL Solo-Yogyakarta. Sementara dari sisi swasta, beberapa proyek investasi *multiyears* yang masih menjadi pendorong kegiatan investasi Jawa Tengah antara lain pembangunan pabrik semen di Wonogiri; pembangunan RS dan hotel berbintang baru di Kota Surakarta; dan pengembangan kawasan wisata Borobudur oleh PT Badan Otorita Borobudur (BOB).

Hasil *liaison* triwulan III 2019 (per 21 Agustus 2019) menunjukkan bahwa investasi di triwulan ini mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, meskipun masih terbatas. Pelaku usaha di sektor industri pengolahan melakukan investasi cukup besar berupa pembangunan pabrik yang merupakan proyek *multiyears*, serta melakukan pembelian mesin produksi. Sementara kegiatan investasi yang dilakukan beberapa pelaku usaha di sektor lainnya antara lain berupa pembangunan gudang, pembelian lahan, dan pembangunan kandang. Pelaku usaha diperkirakan tidak lagi menahan kegiatan investasi setelah memperoleh kepastian terkait keputusan hasil Pemilu 2019 serta

memperoleh arah kebijakan Pemerintah terpilih periode 2019-2024.

Namun demikian, penyaluran kredit investasi di Jawa Tengah pada triwulan III 2019 (data Juli) menunjukkan perlambatan menjadi tumbuh 21,39% (yoy); lebih rendah dibanding pertumbuhan penyaluran kredit investasi triwulan II 2019 sebesar 21,52% (yoy). Lebih lanjut, hingga Juli 2019, realisasi penyerapan anggaran progres fisik baru mencapai 48,73%. Angka realisasi progres fisik tersebut sedikit lebih rendah dari target penyerapan anggaran fisik sampai dengan bulan Juli yang sebesar 50,14%.

### **Pertumbuhan ekspor luar negeri pada triwulan III 2019 diperkirakan mengalami perbaikan,**

meskipun relatif terbatas. Kinerja ekspor akan tumbuh lebih tinggi pada triwulan III 2019 untuk memenuhi *backlog* permintaan dari triwulan II. Normalisasi jumlah hari kerja akan mendorong kegiatan produksi sektor industri dan pengiriman barang kembali meningkat pada triwulan III seiring aktivitas jasa logistik yang kembali normal. Dengan demikian mampu mendukung peningkatan pertumbuhan ekspor luar negeri.

Namun demikian, pertumbuhan penjualan ekspor tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global. Beberapa risiko eksternal yang dapat menahan kinerja ekspor Jawa Tengah di antaranya pemulihan ekonomi global yang lebih rendah dari prakiraan, termasuk negara tujuan ekspor utama Jateng seperti AS, Eropa, dan Tiongkok (pangsa ekspor masing-masing sebesar  $\pm 33\%$ ,  $17\%$ , dan  $8\%$ ), serta eskalasi perang dagang AS-Tiongkok dan sejumlah risiko geopolitik. Hal tersebut selanjutnya berpotensi mendorong perlambatan volume perdagangan dunia dan harga komoditas yang dapat berpengaruh terhadap kinerja ekspor Jawa Tengah.

Ketatnya tekanan kompetisi dengan Vietnam masih harus diantisipasi sebagai faktor penahan pertumbuhan ekspor komoditas unggulan Jawa Tengah, seperti tekstil dan produk tekstil serta barang kayu.

**Sejalan dengan peningkatan ekspor luar negeri, impor luar negeri pada triwulan III 2019 diperkirakan tumbuh sedikit meningkat dari triwulan sebelumnya.** Lebih lanjut, terdapat potensi kenaikan impor yang berasal dari impor migas, terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan kilang minyak di Cilacap. Kegiatan impor migas yang turun pada triwulan I dan II 2019 diperkirakan kembali meningkat seiring dengan berkurangnya persediaan, serta aktivitas industri pengilangan minyak di Cilacap yang kembali normal. Impor migas cukup signifikan terhadap impor luar negeri Jateng, mengingat komponen migas memegang pangsa  $\pm 30\%$  dari total impor Jawa Tengah, yang ditujukan untuk memenuhi industri pengilangan minyak dalam rangka pemenuhan kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Selanjutnya, kinerja investasi diperkirakan mengalami perbaikan dalam rangka mengejar target realisasi akhir tahun, sehingga akan mendorong permintaan terhadap impor barang modal pada triwulan III 2019. Sebagai komponen pengurang PDRB, peningkatan impor luar negeri dapat menahan kinerja ekonomi secara keseluruhan tumbuh lebih tinggi.

### 1.2.2. *Tracking* Perkembangan Ekonomi Triwulan III 2019 Sisi Lapangan Usaha

**Dari sisi lapangan usaha, ekonomi Jawa Tengah masih ditopang oleh lapangan usaha industri pengolahan; pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.** Kinerja lapangan usaha perdagangan diprediksi tumbuh melambat seiring dengan normalisasi permintaan domestik pasca

Ramadan dan Idulfitri. Sementara itu, industri pengolahan dengan pangsa terbesar, di atas 30%, diprediksi akan tumbuh terbatas dan turut menahan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara keseluruhan. Lebih lanjut, kinerja lapangan usaha pertanian juga diproyeksi tumbuh melambat seiring telah berlalunya masa panen raya dan pada periode ini kembali memasuki masa tanam. Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), optimisme pelaku usaha terhadap perkembangan kegiatan usaha secara umum menunjukkan penurunan, yang tercermin dari SBT perkiraan kegiatan usaha triwulan III 2019 yang tercatat 33,19%, lebih rendah dibandingkan SBT realisasi kegiatan usaha pada triwulan II 2019 (37,90%).

**Kinerja lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan pada triwulan III 2019 diperkirakan mengalami perlambatan pertumbuhan,** sejalan dengan normalisasi permintaan domestik pada triwulan II 2019. Ketegangan hubungan dagang AS-Tiongkok dan sejumlah risiko geopolitik yang berlanjut, serta melandainya pertumbuhan ekonomi global secara nyata menurunkan volume perdagangan dunia dan memperlambat pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara termasuk mitra dagang utama Jateng (AS, Eropa, Tiongkok, Jepang). Hal tersebut berdampak pada terbatasnya permintaan dunia dan turunnya harga komoditas, sehingga berpotensi menyebabkan penurunan kinerja ekspor luar negeri Jawa Tengah. Hal tersebut dapat menjadi penahan kinerja lapangan usaha industri pengolahan di triwulan laporan.

Hasil SKDU menunjukkan bahwa perkiraan SBT kegiatan usaha di sektor industri pengolahan pada triwulan III 2019 masih relatif baik menjadi 7,97%, sedikit meningkat dibanding realisasi SBT 7,74% di triwulan II 2019. Perkiraan *Prompt Manufacturing Index (PMI)* hasil SKDU memperkirakan usaha sektor

industri pengolahan pada triwulan III 2019 mengalami sedikit kenaikan menjadi sebesar 58,77%; dari realisasi triwulan II 2019 sebesar 58,51%. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh perkiraan peningkatan jumlah karyawan.

Sementara itu, penyaluran kredit perbankan ke sektor ini masih menunjukkan indikasi perbaikan meskipun masih tercatat kontraksi, yaitu menjadi -0,60% (yoy) pada triwulan III 2019 (data Juli), atau tidak sedalam kontraksi -1,04% (yoy) pada triwulan II 2019. Hal ini disebabkan oleh perbaikan penyaluran kredit modal kerja. Indikator penjualan listrik segmen industri terpantau tumbuh lebih tinggi menjadi sebesar 2,35% (yoy) pada triwulan III 2019 (data Juli), meningkat dibanding triwulan II 2019 (0,62%; yoy).

Hasil *liaison* triwulan III 2019 (per 21 Agustus 2019) mengindikasikan bahwa kinerja penjualan industri pengolahan mengalami perbaikan secara terbatas, tercermin dari LS penjualan domestik 1,09 dan LS penjualan ekspor yang turun menjadi 0,10. Peningkatan penjualan dikonfirmasi oleh pelaku usaha yang memproduksi sarung dan kain serta produk makanan-minuman. Namun demikian, terdapat pelaku usaha di industri tekstil yang mengalami penurunan penjualan, disebabkan oleh sikap *wait and see* konsumen dan pelaku usaha terkait pengumuman hasil Pemilu di triwulan II 2019 dan kebijakan Pemerintah terpilih periode 2019-2024.

Ditinjau dari sisi domestik, penurunan penjualan turut terjadi pada produk tekstil (benang), utamanya karena harga benang yang anjlok akibat *oversupply* benang di pasaran. Sementara di sisi ekspor, beberapa pelaku usaha di sektor industri pengolahan mengkonfirmasi adanya penurunan penjualan, yaitu di subsektor industri tekstil, mebel rotan dan kerajinan tangan, serta furnitur. Penjualan ekspor kontak *liaison* di industri tekstil menurun akibat adanya fluktuasi nilai tukar

rupiah sepanjang tahun 2019, persaingan global yang semakin ketat, dan tingginya biaya impor.

### **Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor juga diproyeksikan tumbuh melambat pada triwulan III 2019.**

Perlambatan tersebut sejalan dengan permintaan domestik yang terkonsolidasi pasca perayaan hari besar keagamaan, sejalan dengan perlambatan kinerja industri. Perlambatan ini juga dipengaruhi oleh berkurangnya perdagangan hasil panen komoditas pertanian, khususnya padi, pasca berakhirnya masa panen raya di triwulan II 2019. Pada periode tersebut, diperkirakan juga sedang berlangsung musim tanam yang baru.

Hasil SKDU menunjukkan bahwa pelaku usaha memperkirakan kegiatan usaha perdagangan besar dan eceran mengalami perlambatan pada triwulan III 2019. Hal ini tercermin dari perkiraan SBT triwulan III 2019 sebesar 2,92%, lebih rendah dari realisasi SBT triwulan II 2019 (8,27%). Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia berupa indikator Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mencerminkan adanya pelemahan optimisme rumah tangga yaitu menjadi 137,18 pada triwulan III 2019 (s.d Agustus 2019); lebih rendah dari rata-rata IKK triwulan II 2019 (138,91). Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya dua indeks pembentuk IKK, yaitu indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE) dan indeks ekspektasi konsumen (IEK).

Perlambatan lapangan usaha ini juga dikonfirmasi oleh pedagang eceran. Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil Survei Penjualan Eceran (SPE), di mana omset penjualan yang tercermin dari indeks penjualan riil mengalami penurunan dari triwulan II 2019 sebesar 180,4; menjadi 175,8 pada triwulan III 2019 (rata-rata s.d Agustus 2019). Penurunan ini terjadi di hampir seluruh kategori komoditas, kecuali kelompok barang budaya dan rekreasi.

Namun demikian, terdapat beberapa kegiatan sepanjang triwulan III 2019 yang berpotensi menahan perlambatan kinerja perdagangan besar dan eceran, di antaranya yaitu kegiatan tahun ajaran baru sekolah, penyelenggaraan Semarang Great Sale 2019, serta penunjukan Jawa Tengah sebagai tuan rumah beberapa *event* nasional dan internasional. Penyaluran kredit ke sektor perdagangan besar dan eceran di Jawa Tengah masih tercatat membaik, dari tumbuh 10,30% (yoy) pada triwulan II 2019 menjadi tumbuh 10,67% (yoy) di triwulan III 2019 (data Juli), yang disebabkan membaiknya penyaluran kredit modal kerja dan investasi. Indikator konsumsi listrik untuk segmen bisnis masih tercatat tumbuh lebih tinggi sebesar 6,52% (yoy) pada triwulan III 2019 (data Juli), sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan II 2019 (6,36%; yoy). Selanjutnya, daya beli masyarakat yang tetap kuat seiring dengan terkendalinya tingkat inflasi serta meningkatnya konektivitas antarwilayah diyakini dapat menahan pelemahan kinerja sektor perdagangan.

**Selanjutnya, pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan diprediksi juga mengalami perlambatan pada triwulan III 2019.** Seperti halnya musim panen triwulan I 2019 yang mundur menjadi berlangsung hingga April 2019, awal musim tanam periode selanjutnya juga diperkirakan jatuh lebih lambat atau mundur. Dengan demikian, pada triwulan III 2019 masa tanam diperkirakan masih akan berlangsung dan berpotensi menurunkan tingkat pasokan.

Berdasarkan informasi BMKG, awal musim kemarau untuk sebagian besar daerah di Jawa Tengah diperkirakan jatuh lebih lambat (mundur). Awal musim kemarau untuk sebagian besar daerah di Jawa Tengah diprakirakan terjadi pada Mei 2019. Selanjutnya, hasil monitoring BMKG pada Agustus 2019 memprediksi terjadi fenomena El Nino (kategori lemah), dengan

curah hujan pada kategori di bawah normal pada periode Juli-Oktober 2019. Fenomena El Nino yang bersamaan dengan musim kemarau diperkirakan menyebabkan musim kemarau 2019 lebih kering daripada tahun 2018, sehingga dampak kekeringan lebih besar dibanding musim kemarau 2018. Kemarau tahun 2019 diprediksi panjang dan kering dengan puncak kemarau terjadi di bulan Agustus.

Musim kemarau berpotensi berpengaruh terhadap penurunan produktivitas tanaman padi dan hortikultura. Lebih lanjut, musim kemarau menyebabkan lahan pertanian di beberapa daerah terancam puso karena minimnya pasokan air, atau terancam tidak bisa ditanam (bera) untuk musim tanam selanjutnya, seperti di daerah Sukoharjo dan Sragen.

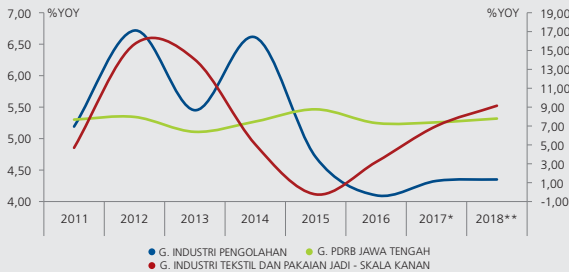
Hasil SKDU triwulan II 2019 menunjukkan bahwa perkiraan SBT kegiatan usaha untuk sektor pertanian pada triwulan III 2019 sebesar 6,41% atau lebih rendah dari realisasi SBT kegiatan usaha di triwulan II 2019 sebesar 7,39%. Hal ini mengindikasikan kegiatan usaha pertanian mengalami perlambatan pada triwulan III 2019. Lebih lanjut, penyaluran kredit perbankan ke sektor pertanian pada triwulan III 2019 (data Juli) tumbuh melambat menjadi 21,59% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan II 2019 (21,74%; yoy), yang disebabkan oleh melambatnya penyaluran kredit modal kerja.

Namun demikian, berdasarkan hasil kegiatan *liaison*, penjualan di lapangan usaha pertanian masih meningkat secara terbatas, tercermin dari LS 1. Peningkatan ini terutama dikonfirmasi oleh kontak *liaison* di bidang peternakan ayam, padi organik, dan buah-buahan. Namun demikian, penurunan penjualan dialami oleh pelaku usaha yang bergerak di bidang perkebunan cengkeh, terutama karena rendahnya harga di pasar.

## PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI GARMEN JAWA TENGAH

### SUPLEMEN I

#### Kondisi dan Perkembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil



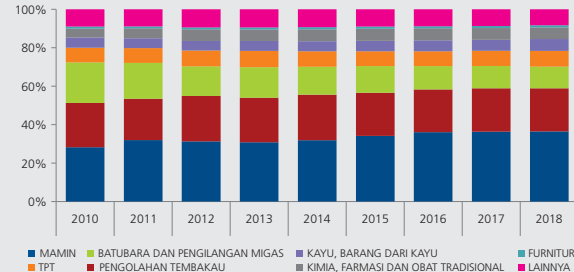
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

**Grafik 1** Laju Pertumbuhan PDRB, Industri Pengolahan, dan Industri Tekstil & Pakaian Jadi

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) memegang peranan penting terhadap perekonomian Jawa Tengah karena memiliki pangsa terbesar keempat terhadap PDRB industri pengolahan. Subsektor industri ini menyumbang 8,2% terhadap PDRB industri pengolahan Jawa Tengah, setelah industri makanan dan minuman; pengolahan tembakau; dan industri batu bara & pengilangan migas. Pertumbuhan industri TPT menunjukkan tren yang cenderung melambat sejak tahun 2012, meskipun memasuki tahun 2016 mulai mengalami perbaikan.

Ditinjau dari sisi ekspor, subsektor ini juga menjadi salah satu industri yang konsisten menyumbang surplus perdagangan atau net ekspor Jawa Tengah. Ekspor komoditas TPT memberikan sumbangan terbesar terhadap total ekspor Jawa Tengah, dengan pangsa mencapai 48%. Pertumbuhan ekspor komoditas ini juga berada di atas pertumbuhan ekspor secara keseluruhan dalam tiga tahun terakhir.

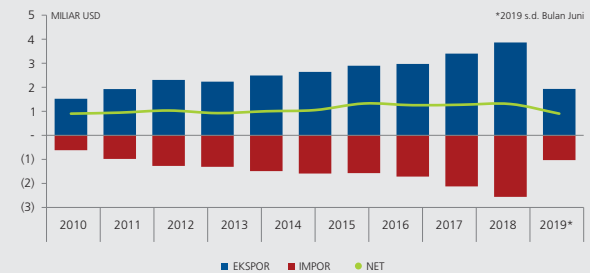
Berdasarkan jenis produk, ekspor TPT Jawa Tengah didominasi oleh produk pakaian jadi/garmen



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

**Grafik 2** Struktur Industri Pengolahan di Jawa Tengah

dengan pangsa mencapai 73%, diikuti komoditas benang (22%) dan kain (5%). Menilik aspek daya saing yang dicerminkan melalui *Revealed Symmetric Comparative Advantage* (RSCA) dan Trade Balance Index (TBI), komoditas garmen juga tergolong memiliki daya saing yang tinggi, tercermin dalam kuadran A (Grafik 4). Komoditas yang tergabung dalam kuadran A menunjukkan adanya keunggulan komparatif untuk ekspor komoditas garmen, karena memiliki keunggulan dalam hal spesialisasi perdagangan dibanding negara lain dan mencatatkan surplus. Sementara produk tekstil (benang dan kain) menunjukkan penurunan daya saing dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, sehingga pada 2017 tercatat berada di kuadran B.



Sumber: Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

**Grafik 3** Perkembangan Ekspor dan Impor Komoditas TPT Jawa Tengah

## SUPLEMEN I

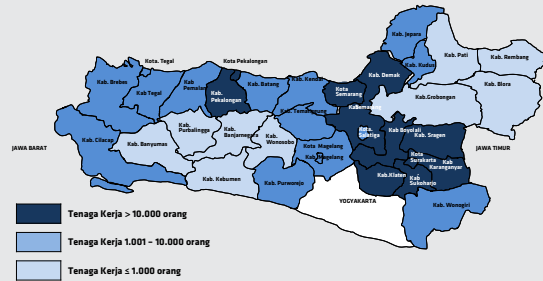


Sumber: Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, UN Comtrade, diolah

Grafik 4 Daya Saing Ekspor Jawa Tengah (RSCA dan TBI)

Secara spasial, industri TPT terutama terkonsentrasi di Jawa Barat dan Jawa Tengah, baik dari sisi jumlah perusahaan maupun serapan tenaga kerja. Selain itu, ekspor TPT Jawa Tengah memiliki pangsa terbesar kedua terhadap ekspor TPT nasional (28,2%), setelah provinsi Jawa Barat yang mencatatkan pangsa 47,8%. Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang menjadi tulang punggung industri garmen nasional. Industri ini di Jawa Tengah sendiri, utamanya terkonsentrasi di kawasan Semarang, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, serta Pekalongan.

Melihat peran penting industri TPT khususnya garmen, terhadap perekonomian Jawa Tengah, penguatan kapabilitas industri ini perlu terus didorong untuk meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian, terutama ekspor. Namun demikian, dalam upaya penguatan tersebut terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh industri garmen Jawa Tengah. Secara garis besar tantangan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu aspek faktor produksi, aspek pengaturan dan kelembagaan, serta aspek promosi dan kerja sama perdagangan.



Sumber: BPS, diolah

Gambar 1 Sebaran Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Jawa Tengah

### Faktor Produksi

Aspek faktor produksi yang signifikan berpengaruh terhadap daya saing ekspor garmen terutama adalah aspek Sumber Daya Manusia (SDM), baik berupa tingkat upah maupun keterbatasan ketersediaan tenaga kerja terampil. Jika dibandingkan dengan negara pesaing utama yaitu Vietnam, tingkat upah tenaga kerja di Indonesia saat ini cenderung lebih tinggi, yang berada pada kisaran USD111-279 per bulan. Sementara tingkat upah tenaga kerja di Vietnam saat ini pada kisaran USD160-180 per bulan. Tingkat upah tenaga kerja di Jawa Tengah relatif kompetitif dibanding provinsi lain di Indonesia. Namun, kurangnya informasi kepada calon investor, khususnya yang bersifat PMA, dapat menyebabkan persepsi terhadap tingkat upah pekerja di Jawa Tengah sama halnya dengan provinsi-provinsi basis industri lainnya, yang tergolong tinggi. Penetapan upah menjadi salah satu hal krusial, mengingat pangsa biaya tenaga kerja mencapai 28% dari total biaya produksi.

Masih terkait aspek tenaga kerja, tantangan lain yang dihadapi industri garmen yaitu terbatasnya jumlah tenaga kerja terampil sesuai dengan

## SUPLEMEN I

kebutuhan industri. Program peningkatan kompetensi pada umumnya telah dilakukan oleh pelaku industri, namun dilakukan secara mandiri sehingga dari sisi kuantitas masih belum mencukupi. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan program *link and match* kurikulum pendidikan vokasi (SMK) dengan kebutuhan industri, sehingga SDM yang dihasilkan dapat langsung siap kerja. Lebih lanjut, diperlukan juga upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja ahli secara berkelanjutan, antara lain melalui pendirian sekolah vokasi. Salah satu contoh yang dapat direplikasi yaitu pendirian Akademi Komunitas Industri TPT di Surakarta, sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM di industri TPT.

Tantangan lain yang dihadapi industri garmen yaitu belum optimalnya dukungan industri hulu terhadap industri hilir, sehingga ketergantungan bahan baku impor semakin meningkat. Sementara itu, perkembangan tren *fast fashion* menuntut peningkatan efisiensi dan efektivitas *supply chain* industri garmen. Perkembangan tren tersebut menuntut lead time/delivery time lebih pendek; biaya produksi lebih rendah; demikian pula dengan persediaan. Permintaan dengan lead time semakin pendek seringkali sulit dipenuhi karena ketergantungan bahan baku yang sebagian besar masih dipenuhi dari impor. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis *supply-demand* TPT melalui pemetaan seluruh pelaku industri TPT di Indonesia dalam rangka penguatan *linkage* dari industri hulu ke hilir. Selain itu, investasi di industri hulu juga perlu didorong agar penggunaan bahan baku dalam

negeri dapat semakin ditingkatkan. Selain permasalahan di atas, keterbatasan kapasitas infrastruktur berupa infrastruktur logistik (pelabuhan) dan infrastruktur energi juga perlu mendapat perhatian dalam rangka penguatan daya saing industri manufaktur Jawa Tengah, termasuk industri garmen.

### Pengaturan dan Kelembagaan

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, salah satu aspek pengaturan yang krusial bagi daya saing industri garmen yaitu kebijakan terkait pengupahan. Tingkat kenaikan upah per tahun di Indonesia relatif lebih cepat dibanding Vietnam, namun sayangnya belum diikuti dengan peningkatan produktivitas dan kompetensi yang sebanding. Kebijakan penetapan upah menjadi faktor penting dalam industri ini, mengingat karakteristik industri garmen sebagai industri padat karya. Untuk itu, diperlukan implementasi kebijakan pengupahan secara konsisten, agar dapat memberikan kepastian bagi pelaku industri dan calon investor. Penetapan upah akan berpengaruh langsung terhadap biaya produksi, sehingga implementasi kebijakan pengupahan yang konsisten dapat mendorong peningkatan biaya produksi menjadi lebih terukur.

Lebih lanjut, ketentuan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 memberikan ruang bagi tingginya tingkat *turnover* tenaga kerja. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha sekaligus kontraproduktif terhadap kegiatan industri, karena

## SUPLEMEN I

proses *knowledge building* juga memerlukan waktu. Aspek pengaturan dan kelembagaan lain yang perlu mendapat perhatian dalam rangka penguatan daya saing industri manufaktur, antara lain: sinkronisasi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya terkait Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan perencanaan infrastruktur; serta perlunya standardisasi dan peningkatan sertifikasi pendidikan vokasi untuk pendidikan non-generik (furnitur, TPT, dan kimia).

Salah satu dukungan pemerintah dalam meningkatkan produktivitas industri adalah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 2019 terkait Insentif Super *Tax Deduction*. Insentif ini diberikan dalam rangka memperkuat kualitas SDM dan inovasi Indonesia, serta mendorong pengembangan industri padat karya berorientasi ekspor. Rencana pemberian insentif ini diharapkan dapat memberikan stimulus positif bagi pelaku usaha. Namun, ketentuan pelaksanaan dari PP tersebut hingga saat ini masih dalam tahap penyusunan. Selain percepatan penyusunan ketentuan pelaksanaan, diperlukan juga sosialisasi insentif kepada pelaku industri terkait pemanfaatan fasilitas insentif ini.

### Promosi dan Kerja Sama Perdagangan

Sementara itu, dari sisi akses pasar, ekspor pakaian jadi Jawa Tengah terutama ditujukan ke pasar Amerika Serikat (53,7%), Eropa (18,5%), serta Jepang (10,6%). Portofolio pasar ekspor garmen Jawa Tengah relatif sama dengan portofolio ekspor

garmen Indonesia pada umumnya, yang menghadapi tantangan persaingan yang makin ketat dengan Vietnam. Saat ini, Vietnam mampu meningkatkan secara signifikan ekspor garmennya ke kawasan Amerika Utara, Asia Timur, serta Eropa yang merupakan tujuan utama ekspor Indonesia.

Faktor penting yang menjadi pendorong peningkatan ekspor garmen Vietnam yaitu efektivitas sejumlah perjanjian dagang penting, antara lain perjanjian perdagangan bilateral Vietnam-AS. Perjanjian Vietnam-EU CEPA juga saat ini telah ditandatangani dan dalam proses ratifikasi, setelah melalui masa negosiasi selama 7 tahun (2012-2019). Vietnam menjadi negara kedua di ASEAN yang melakukan kerja sama dengan Uni Eropa setelah Singapura. Sementara Indonesia baru memulai penajakan negosiasi perjanjian dengan Uni Eropa pada 2016 dan saat ini baru dalam tahap perundingan ke-8. Saat ini bea masuk atau tarif impor yang dikenakan terhadap produk garmen Vietnam cenderung lebih rendah di beberapa negara pasar garmen utama seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Korea Selatan (Tabel 1). Oleh karena itu, negosiasi Indonesia-Uni Eropa (IEU) CEPA perlu didorong agar produk garmen Indonesia

**Tabel 1 Perbandingan Tarif Impor Produk Garmen terhadap Indonesia dan Vietnam**

NEGARA TUJUAN	INDONESIA	VIETNAM
Uni Eropa	11,3% - 11,7%	9,0% - 9,3%
Amerika Serikat	10,9% - 13,1%	10,8% - 12,7%
Korea Selatan	0,7% - 1,5%	0,7% - 1,4%
Australia	5,1% - 5,8%	5,2% - 5,7%
Kanada	15,4% - 16,9%	15,5% - 16,9%
Mesir	28,4% - 29%	29,1% - 30,0%
Pakistan	23,6% - 24,6%	23,9% - 25,0%

Sumber: *World Integrated Trade Solution, World Bank*, diolah

■ Bea masuk/tarif impor lebih rendah

## SUPLEMEN I

mampu bersaing dengan produk Vietnam yang telah lebih dulu meratifikasi EU-Vietnam CEPA. Hal ini mengingat Uni Eropa merupakan negara tujuan ekspor kedua untuk produk garmen.

Terkait dengan *linkage* terhadap *global value chain* (GVC), Indonesia menempati urutan ke-6 dalam jaring produksi 24 *global brand* Garmen dan Alas Kaki. Posisi Indonesia masih ada di bawah Tiongkok, India, Turki, Vietnam, serta Bangladesh. Untuk itu, diperlukan penguatan promosi perdagangan guna meningkatkan porsi Indonesia dalam jaringan *brand* global.

### Promosi dan Kerja Sama Perdagangan

Berdasarkan sejumlah tantangan di atas, berikut rekomendasi untuk mendorong peningkatan daya saing ekspor produk garmen Jawa Tengah:

1. Mendukung penyusunan kajian bersama (*joint research*) untuk perumusan strategi pengembangan industri manufaktur, termasuk terkait pemetaan seluruh pelaku industri TPT di Indonesia dalam rangka penguatan *linkage* dari industri hulu ke hilir; serta integrasi pembangunan antarkawasan sesuai dengan keterkaitan produk TPT.
2. Mendukung peningkatan iklim investasi melalui sistem perizinan: implementasi OSS versi 1.1.
3. Mendukung harmonisasi regulasi dan program kebijakan untuk peningkatan produktivitas industri, meliputi penerbitan ketentuan pelaksanaan *super tax deduction*.
4. Mendukung promosi perdagangan dan investasi industri manufaktur, melalui fasilitasi negosiasi kuota ekspor dengan *global brand*; serta percepatan ratifikasi IA CEPA dan negosiasi IEU CEPA.

**SUPLEMEN II****STUDI KASUS:  
PERKEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI JAWA TENGAH****Rencana Jangka Panjang Pengembangan Industri Nasional.**

Industri pengolahan menjadi salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional. Pemerintah telah menyusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
2. Pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. Penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
4. Menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);
5. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri kecil dan industri menengah;
6. Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
7. Pembangunan sarana dan prasarana Industri;
8. Pembangunan industri hijau;
9. Pembangunan industri strategis;
10. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
11. Peningkatan kerjasama internasional bidang industri.

Dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam rangka memudahkan sinergi dan koordinasi dalam pembangunan industri di daerah, maka secara administratif wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan Industri (WPI). Wilayah Pengembangan Industri ditentukan berdasarkan keterkaitan ke belakang (backward) dan keterkaitan ke depan (forward) sumberdaya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan industri.

Sesuai dengan amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka selanjutnya perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, pembangunan Kawasan Industri dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

## SUPLEMEN II

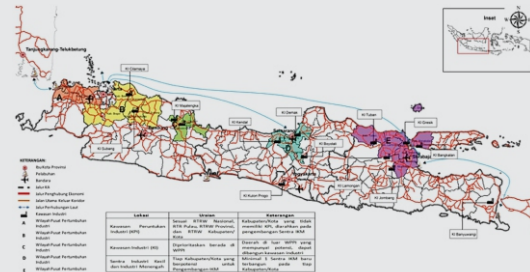
**Tabel 1 Penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri di Kawasan Jawa**

Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPi)	Provinsi
Cilegon-Serang-Tangerang	Banten
Bogor-Bekasi-Purwakarta-Subang-Karawang	Jawa Barat
Cirebon-Indramayu-Majalengka	Jawa Barat
Kendal-Semarang-Demak	Jawa Tengah
Tuban-Lamongan-Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Bangkalan	Jawa Timur

Penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri tersebut bertujuan untuk mendorong efisiensi logistik dan rantai proses baik untuk kelompok industri yang sama (pohon industri, hulu-hilir) maupun untuk industri yang berbeda (silang pohon industri). Beberapa tujuan lain bagi pelaku-pelaku industri dalam membentuk aglomerasi dalam kawasan industri, di antaranya adalah (i) ketersediaan dan pengembangan tenaga kerja, (ii) kemudahan pemasok yang pindah ke klaster, dan (iii) tingginya tingkat inovasi dan pembentukan modal dikarenakan persaingan yang ketat diantara pelaku yang sejenis usaha sama. Contoh kasus di seluruh dunia menunjukkan bahwa tujuan utama klusterisasi industri dalam Kawasan Industri adalah mendukung pengurangan biaya transportasi dan tingkat layanan transportasi yang superior (Sheffi, 2012).

### Kawasan Industri di Jawa Tengah.

Pengembangan kawasan industri di tingkat nasional didukung oleh Pemerintah melalui beberapa insentif yang diatur dalam PP No 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri. Para pelaku usaha memperoleh keuntungan apabila melakukan investasi dalam Kawasan Industri, di antaranya:

**Gambar 1 Penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri di Kawasan Jawa**

1. Memperoleh kepastian lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan mendapatkan kavling industri sesuai ukuran yang diperlukan dengan bukti kepemilikan hak atas tanah (HGB).
2. Efisiensi biaya konstruksi untuk membangun infrastruktur dan fasilitas industri.
3. Kemudahan Kajian studi AMDAL lebih sederhana (hanya Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) dan pengecualian Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN).
4. Kemudahan proses pengurusan Ijin Bangunan melalui pengelola Kawasan Industri.
5. Melalui program “Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi” (KLIK) dari BKPM, investor dapat langsung membangun pabrik sementara perizinan di daerah diproses secara paralel.
6. Kawasan Industri dimungkinkan untuk memperoleh fasilitas perpajakan & insentif daerah serta penetapan sebagai Objek Vital Nasional.

## SUPLEMEN II

Karakteristik lokasi Kawasan Industri di Jawa Tengah relatif seragam dengan Kawasan Industri lainnya di kawasan Jawa, yaitu terletak di kawasan pesisir pantai yang didukung oleh sarana infrastruktur konektivitas jalan dan pelabuhan. Hal ini menunjukkan aspek ketersediaan infrastruktur konektivitas menjadi aspek utama yang menjadi prioritas bagi para pelaku usaha/industri.

Secara keseluruhan, kawasan industri di Jawa Tengah telah teroptimalisasi dengan baik. Namun demikian tantangan pengembangan dan perluasan kawasan industri di Jawa Tengah terhambat oleh penyiapan infrastruktur utama berupa swasta energi, konektivitas, air dan limbah yang sangat dibutuhkan oleh jenis industri padat modal dan padat teknologi.

Tabel 2 Kawasan Industri di Jawa Tengah

Lokasi	Deskripsi	Tantangan
1. Kawasan Industri Cilacap, Kabupaten Cilacap.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luas lahan 143 Ha (okupansi penuh, tidak ditawarkan).</li> <li>Infrastruktur fisik (listrik, energi, air, telekomunikasi) telah tersedia.</li> </ul>	
2. Jawa Tengah Land Industrial Park Sayung, Kabupaten Demak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luas lahan 300 Ha (5% terjual namun tenant belum mulai konstruksi).</li> <li>Memiliki fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK).</li> <li>Memiliki konsep one integrated Cyber - Techno – Eco yang mendukung efisiensi operasional dan pengolahan limbah bagi industri.</li> <li>Infrastruktur fisik terpenuhi (listrik, energi, air, telekomunikasi; pengelolaan limbah).</li> <li>Keunggulan akses transportasi dan logistik: Pelabuhan Tj. Emas (15 km); Bandara Ahmad Yani (25 km); stasiun KA Tawang (20 km).</li> <li>Pengembangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tahap 1: 110 Ha (target selesai 2020) – commercial area, warehouse dan industrial plot.</li> <li>Tahap 2: 120 Ha (target selesai 2025)</li> <li>Tahap 3: 70 Ha (target selesai 2030)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalur utama dari/menjuju Kota Semarang (Jl. Raya Kaligawe) relatif mengalami gangguan kemacetan, sehingga menjadi salah satu faktor inefisiensi logistik bagi pelaku usaha.</li> <li>Rencana Tol Semarang-Demak belum terealisasi (tahap tender).</li> <li>Infrastruktur jaringan air ke JIPS masih bermasalah karena belum adanya realisasi pembangunan jaringan dari PDAM setempat.</li> </ul>

**SUPLEMEN II**

Lokasi	Deskripsi	Tantangan
<p>3. Kawasan Industri Kendal, Kabupaten Kendal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas lahan 2.200 Ha (3,6% terisi).</li> <li>• Memiliki fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK).</li> <li>• Usulan fasilitas:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status: kawasan berikat, sedang dalam proses pengajuan menjadi KEK</li> <li>- Tol Trans Jawa Interchange, Kendal Sea Port, Double Track Kereta ( dalam tahap pengusulan).</li> <li>- Suplai air baku dengan kapasitas 24.000 CMD.</li> <li>- Pengolahan limbah cair dengan kapasitas 20.000 CMD.</li> <li>- Supply listrik 600 MVA.</li> <li>- Jaringan telekomunikasi: fiber optic, private lease line, IDD.</li> </ul> </li> <li>• Didukung oleh sekolah vokasi Politeknik Furnitur (milik Kemenperin RI).</li> <li>• Pengembangan:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahap 1: Pengembangan 1.000 Ha</li> <li>- Tahap 2: Perencanaan 1.200 Ha</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebutuhan air bersih untuk operasional industri pada tahap I diperkirakan sebesar 24.000 m<sup>3</sup> per hari, namun sumber air bersih yang handal terletak relatif jauh, yaitu berjarak 10 km. Jaringan ketersediaan air baku ke KI Kendal belum siap (Bendung Karet dan Waduk Bodri belum selesai dibangun).</li> <li>• Jaringan pipa gas belum tersambung hingga area Kendal.</li> <li>• Pelabuhan Kendal saat ini berfungsi terbatas sebagai pelabuhan penumpang. Rencana pembangunan Pelabuhan Kendal sebagai container port (Kendal Smart Port) terkendala kesepakatan pihak yang akan melakukan investasi dan pengelolaan.</li> </ul>
<p>4. Tanjung Emas Export Processing Zone, Kota Semarang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas lahan 30 Ha (90% terutilisasi sewa).</li> <li>• Berstatus kawasan berikat.</li> <li>• Lahan hanya untuk disewakan (leased)</li> <li>• Infrastruktur fisik (listrik, energi, air, telekomunikasi; pengelolaan limbah) telah tersedia.</li> <li>• Keunggulan transportasi, berlokasi sangat dekat dengan Bandara Ahmad Yani (6 km); Tj. Mas (300 m); stasiun KA Tawang (1 km).</li> </ul>	
<p>5. Bukit Semarang Baru Industrial Park, Kota Semarang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas lahan 112 Ha (tingkat okupansi 94.6%).</li> <li>• Infrastruktur fisik (listrik, energi, air, telekomunikasi; pengelolaan limbah) telah tersedia.</li> <li>• Memiliki fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Pemerintah Kota terkait Pembatasan jam operasional truk logistik yang melalui kota Semarang mengurangi efisiensi logistik.</li> </ul>

## SUPLEMEN II

Lokasi	Deskripsi	Tantangan
6. Candi Industrial Estate	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luas lahan 750 Ha (tingkat okupansi 90%)</li> <li>Infrastruktur fisik (listrik, energi, air, telekomunikasi; pengelolaan limbah) telah tersedia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum memiliki fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK).</li> <li>Fasilitas air baku dari PDAM relatif terkendala pada keandalan/kesinambungan suplai.</li> <li>Harga lahan relatif mahal.</li> <li>Perizinan pengurusan tanah/bangunan (UKL/UPL, IMB, SLF) memakan waktu lama</li> <li>Prosedur pengurusan KITE rumit, dan jangka waktu restitusi relatif lama.</li> </ul>
7. Kawasan Industri Wijayakusuma, Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luas lahan 250 Ha (tingkat okupansi 70%).</li> <li>Menyediakan lahan dan bangunan pabrik siap pakai.</li> <li>Infrastruktur fisik (listrik, energi, air, telekomunikasi; pengelolaan limbah) telah tersedia.</li> <li>Dekat dengan Bandara Ahmad Yani (7 km); stasiun KA Tawang (12 km)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keandalan pasokan air baku masih rendah dikarenakan sering terjadi gangguan.</li> <li>Perizinan pengurusan tanah/bangunan (UKL/UPL, IMB, SLF) memakan waktu cukup lama.</li> </ul>
8. Kawasan Industri Terboyo, Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luas lahan 401 Ha (tingkat okupansi 100%).</li> <li>Infrastruktur fisik (listrik, energi, air, telekomunikasi; pengelolaan limbah) telah tersedia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lokasi bertempat di pesisir pantai, sehingga rawan terdampak rob air laut.</li> </ul>
9. Lingkungan Industri Kecil, Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luas lahan 100 Ha (tingkat okupansi 100%).</li> <li>Infrastruktur fisik (listrik, energi, air, telekomunikasi; pengelolaan limbah) telah tersedia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lokasi bertempat di pesisir pantai, sehingga rawan terdampak rob air laut.</li> </ul>



## KEUANGAN PEMERINTAH

**Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah di tahun 2019 mengalami peningkatan, yang masih ditopang oleh penerimaan komponen pajak daerah. Peningkatan belanja daerah yang tidak setinggi pendapatan menyebabkan APBD Jawa Tengah diperkirakan surplus pada tahun ini.**

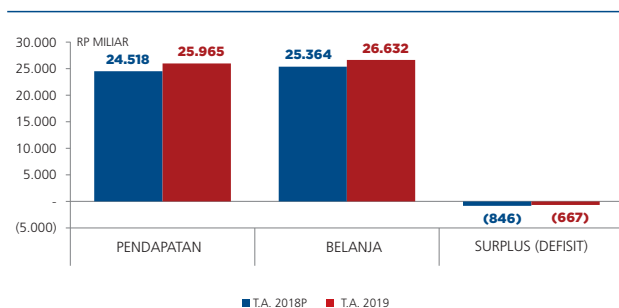
- Pendorong utama realisasi pendapatan Jawa Tengah pada triwulan laporan berasal dari komponen Dana Perimbangan (pangsa 50,53% dari pendapatan) dan Pendapatan Asli Daerah (pangsa 49,13% dari pendapatan). Dengan perkembangan ini, derajat otonomi fiskal Jawa Tengah sedikit menurun dibandingkan triwulan lalu.
- Peningkatan realisasi belanja utamanya berasal dari meningkatnya belanja tidak langsung pada komponen belanja pegawai dan belanja hibah, dikarenakan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tahap II, dan kenaikan gaji dan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Alokasi pagu APBN Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 di berbagai fungsi utama telah sejalan dengan prioritas capaian Jawa Tengah, seperti pengentasan kemiskinan dan akses terhadap pendidikan.
- Ke depan, kinerja fiskal di Jawa Tengah dapat dioptimalkan antara lain melalui optimalisasi penerimaan pajak, sinkronisasi belanja antara pemerintah pusat dan daerah, perbaikan pola penyerapan, dan alokasi di sektor-sektor strategis.



## 2.1. GAMBARAN UMUM APBD 2019

Sesuai keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah perihal APBD Jawa Tengah 2019, pendapatan daerah Jawa Tengah pada tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp25,97 triliun (atau bertumbuh relatif terbatas sebesar 5,3% dari APBD-P 2018). Peningkatan pendapatan utamanya bersumber dari peningkatan target Pajak Daerah, seiring dengan upaya Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Jawa Tengah untuk menggenjot penerimaan PAD antara lain melalui (1) optimalisasi pemungutan pajak saat ini melalui pemanfaatan teknologi (*monitoring online* penerimaan pajak, perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan); (2) peningkatan basis Wajib Pajak (WP) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); (3) peningkatan pelayanan kepada WP dengan 212 titik pelayanan pembayaran pajak. Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) juga melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. Selain itu, peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga menjadi sumber peningkatan anggaran pendapatan tahun ini. Hal ini sejalan dengan penganggaran dana yang diarahkan untuk penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan kebutuhan dana tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

**Belanja daerah dianggarkan meningkat 5,00%, dari Rp25,36 triliun menjadi Rp26,63 triliun.**



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jawa Tengah

Grafik 2.1 APBD Provinsi Jawa Tengah T.A. 2018 dan T.A. 2019

Prioritas belanja APBD 2019 ditujukan pada penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sektor pendidikan. Dengan perkembangan demikian, defisit anggaran mencatatkan penurunan menjadi sebesar Rp667 miliar pada tahun 2019, dibandingkan defisit Rp846 miliar pada 2018. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dianggarkan Rp686,74 miliar, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20 miliar, pembiayaan netto sebesar Rp666,75 miliar, serta sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (Silpa) nihil.

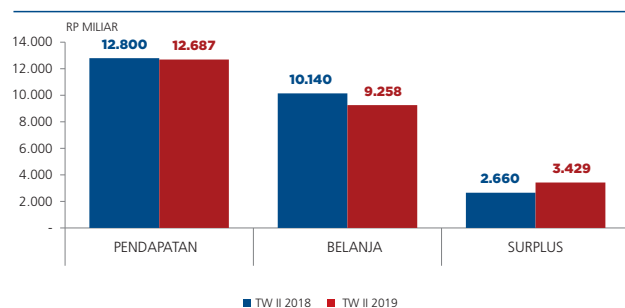
## 2.2. REALISASI APBD TRIWULAN II 2019

Realisasi pendapatan tercatat di komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan capaian 44,17%. Komponen Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya masing-masing mencatatkan realisasi 54,48% dan 50,00%. Sementara, realisasi belanja didorong oleh realisasi belanja tidak langsung sebesar 38,33%. Dengan realisasi pendapatan yang meningkat lebih tinggi daripada peningkatan realisasi

Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi APBD Jawa Tengah 2019 (Rp Miliar)

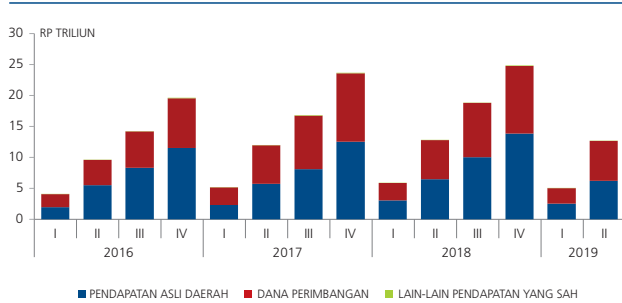
URAIAN	REALISASI TW II 2019	% REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>	<b>12.687</b>	<b>48,86%</b>
PAD	6.233	44,17%
DANA PERIMBANGAN	6.411	54,48%
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	43	50,00%
<b>BELANJA</b>	<b>9.258</b>	<b>34,76%</b>
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.209	38,33%
BELANJA LANGSUNG	2.049	26,18%
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>3.429</b>	

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, diolah



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jawa Tengah

Grafik 2.2 Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Triwulan II 2018 dan 2019



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jawa Tengah

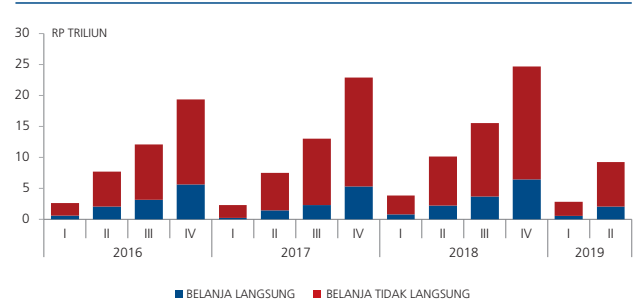
**Grafik 2.3 Realisasi Pendapatan Daerah**

belanja, **realisasi APBD Jawa Tengah pada triwulan II 2019 mencatatkan surplus yang relatif tinggi sebesar Rp2,23 Triliun.**

### 2.2.1. Realisasi Pendapatan Triwulan II 2019

Realisasi pendapatan Provinsi Jawa Tengah pada triwulan II 2019 adalah Rp6,23 Triliun atau secara persentase terealisasi sebesar 48,86% dari target. Persentase ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun lalu (52,43%). Realisasi pendapatan utamanya dikontribusikan oleh komponen dana perimbangan (50,53% dari pendapatan); dan komponen PAD (49,13% dari pendapatan).

**Realisasi Dana Perimbangan (Daper) pada triwulan laporan sebesar 54,48% dari APBD menjadi salah satu penyangga kinerja pendapatan Jawa Tengah pada triwulan laporan.** Berdasarkan komponen, realisasi Dana Perimbangan terutama berasal dari Dana Alokasi Khusus/DAK (pangsa 50,85% dari realisasi Daper pada triwulan laporan), diikuti oleh Dana Alokasi Umum/DAU (pangsa 42,59%), dan Dana Bagi Hasil/DBH (pangsa 6,57%). Apabila dibandingkan triwulan yang sama di tahun lalu, nominal pendapatan komponen DAU dan DAK cukup stabil, menjadi masing-masing Rp2,21 triliun dan Rp3,88 triliun. Pola realisasi komponen DAK memang relatif sama karena dana tersebut diarahkan untuk penyaluran BOS dan kebutuhan biaya tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah/PNSD,



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jawa Tengah

**Grafik 2.4 Realisasi Belanja Daerah**

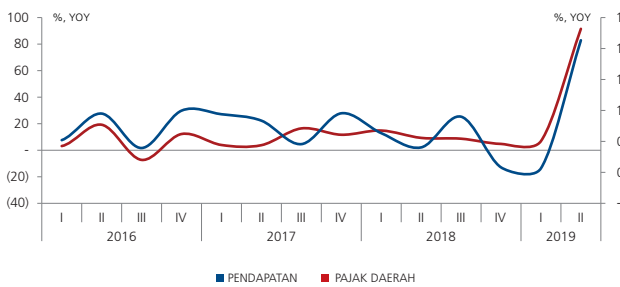
seiring dengan pelimpahan kewenangan pendidikan tingkat menengah atas kepada provinsi. Meski lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu, pendapatan DBH terealisasi Rp326 Miliar, seiring dengan adanya pembagian laba dari perusahaan daerah. Lebih lanjut, realisasi komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tercatat sebesar Rp31 miliar atau terealisasi sebesar 50% karena pencairan dana insentif daerah sudah mulai digenjut sejak triwulan I 2019.

**Selanjutnya, realisasi PAD tercatat 48,86% dari APBD, yang disumbang oleh pajak daerah yang menyumbang Rp5,48 Triliun atau 87,92% dari total pendapatan pada triwulan laporan.** Berdasarkan perannya terhadap total Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) masih menjadi pemasukan utama pajak daerah, dengan peran masing-masing sekitar 35% dan 30% di setiap tahun.

**Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Triwulan II Tahun 2018 dan 2019**

KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH	TW II 2019
<b>PENDAPATAN</b>	<b>48,86%</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>44,17%</b>
PAJAK DAERAH	46,79%
RETRIBUSI DAERAH	39,68%
HSL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	95,91%
LAIN-LAIN PAD YG SAH	11,99%
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>54,48%</b>
DANA BAGI HSL PJK/BUKAN PJK	41,48%
DANA ALOKASI UMUM	58,34%
DANA ALOKASI DANA KHUSUS	53,88%
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>50,00%</b>
HIBAH	50,00%
DANA PENY. DAN OTONOMI KHUSUS	
DANA INSENTIF DAERAH	50,00%
PENDAPATAN LAINNYA	

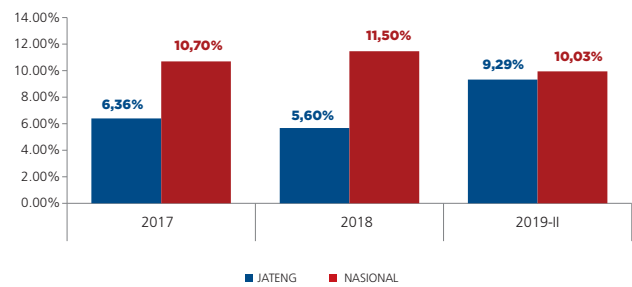
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jawa Tengah



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jawa Tengah

**Grafik 2.5 Pertumbuhan Tahunan Pajak Daerah dan Pendapatan Jawa Tengah**

Selanjutnya, sebagai salah satu sentra industri tembakau terbesar di Indonesia, Pajak Rokok turut menyumbang 15% dari pajak daerah, diikuti 15% dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Sebagaimana digambarkan pada Grafik 2.5, pergerakan pertumbuhan pendapatan Jawa Tengah sejalan dengan pergerakan pertumbuhan pendapatan pajak daerah. Realisasi pajak daerah yang cukup tinggi pada triwulan laporan sejalan dengan upaya bersama instansi terkait, antara lain: i) intensifikasi pungutan pajak daerah dan redistribusi daerah; ii) peningkatan layanan pembayaran pajak menjadi 212 titik; iii) pemanfaatan teknologi antara lain aplikasi E-Samsat Sakpole; iv) memberikan insentif melalui pelaksanaan Gebyar Hadiah Samsat (undian untuk WP yang membayar PKB); v) penagihan pajak *door to door*, razia gabungan yang khususnya ditujukan kepada 3,5 juta WP kendaraan bermotor yang belum membayar pajak di tahun-tahun sebelumnya; serta (vi) memperkuat penindakan untuk produsen dan produk rokok ilegal. Penerimaan pajak yang cukup tinggi pada triwulan



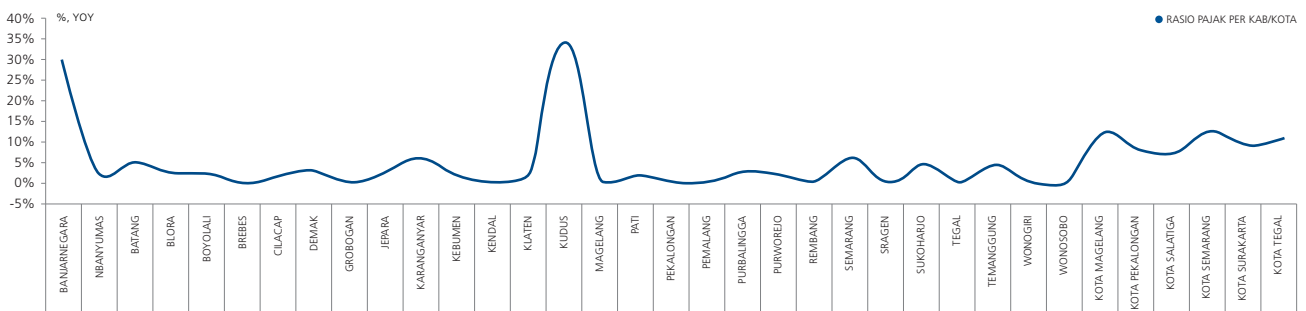
Sumber: DIPB Karwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah

**Grafik 2.6 Tax Ratio Jawa Tengah dibandingkan Nasional**

laporan juga menyebabkan *tax ratio* Jawa Tengah mencapai 9,29%; lebih tinggi dibandingkan 2017 dan 2018 yang masing-masing 6,36% dan 5,60%.

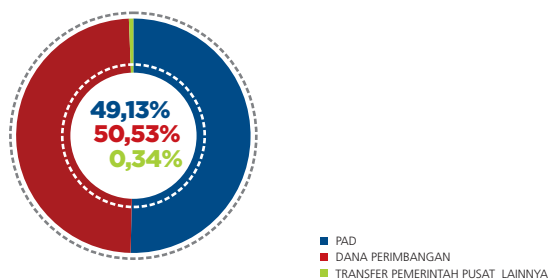
Selain pajak, persentase realisasi komponen PAD lain seperti lain-lain PAD yang sah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga mengalami peningkatan.

Secara spasial, rasio pajak per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang cukup signifikan tinggi adalah Kudus dan Banjarnegara. Sebagai kota yang dijuluki kota kretek, jumlah pabrik rokok di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Kudus mencapai 89 pabrik rokok. Upaya KPPBC Kudus untuk meningkatkan cukai rokok antara lain penindakan terhadap peredaran rokok yang tidak dilekati pita cukai, sehingga konsumsi dan juga produksi rokok legal bisa meningkat yang pada gilirannya mampu meningkatkan penerimaan cukai.



Sumber: DIPB Karwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah

**Grafik 2.7 Rasio Pajak per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah**



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jawa Tengah

**Grafik 2.8 Kontribusi Pos Pendapatan Daerah Triwulan II 2019**

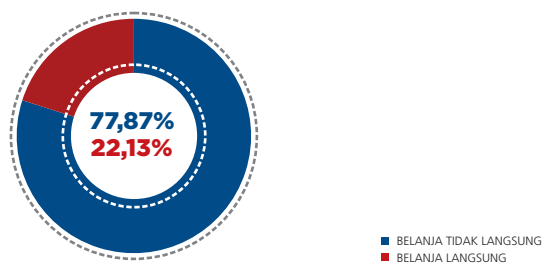
Sedangkan, melanjutkan prestasi PAD yang lebih tinggi dari target pada tahun 2018, Banjarnegara juga mencatatkan *tax ratio* yang cukup tinggi, yang didorong oleh PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Adapun, salah satu hal yang turut mempengaruhi tingginya *tax ratio* di Banjarnegara adalah ukuran pendapatan daerah yang relatif kecil, dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain.

Melihat perkembangan realisasi Daper dan PAD tersebut, Derajat Otonomi Fiskal (DOF) tercatat 49,13% di triwulan II 2019, atau lebih rendah dibandingkan triwulan lalu sebesar 50,38%. Hal ini mengindikasikan menurunnya kemandirian fiskal Pemprov Jateng, karena walaupun PAD tumbuh cukup tinggi, dana perimbangan memegang kontribusi yang lebih signifikan pada realisasi pendapatan Jawa Tengah pada triwulan laporan.

### 2.2.2. Realisasi Belanja Triwulan II 2019

**Realisasi belanja Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar Rp9,26 triliun atau 34,76% dari total anggaran belanja 2019 sebesar Rp26,63 triliun.**

Realisasi ini relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi triwulan II 2019 sebesar 40,57%, meskipun lebih tinggi dari rerata 5 tahun sebesar 31,01%. Realisasi belanja terutama didorong oleh komponen belanja tidak langsung. Dari total realisasi belanja tidak langsung pada triwulan laporan, belanja hibah menyumbang 29,49%, diikuti belanja pegawai

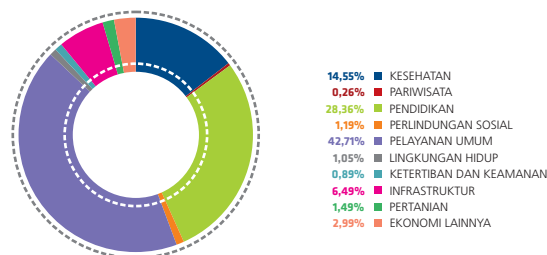


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jawa Tengah

**Grafik 2.9 Kontribusi Pos Belanja Daerah Triwulan II 2019**

dengan pangsa 25,66% dan belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dengan pangsa 21,75%. Adapun, peningkatan realisasi belanja hibah dikarenakan dimulainya penyaluran bansos PKH tahap II pada bulan April 2019. Sedangkan, kenaikan gaji pokok ASN 5% pada 2019 yang semula dimulai pada Januari 2019, akhirnya dicairkan pada April, sehingga kenaikan gaji bulan Januari-Maret dibayarkan sekaligus atau dirapel pada April. Kemudian, di samping pembayaran rapel kenaikan gaji pokok, pada triwulan II 2019 juga telah dilakukan pembayaran THR kepada ASN dan pensiunan sehingga mendorong peningkatan belanja pegawai periode ini.

Meski lebih rendah dari periode yang sama pada tahun lalu, belanja langsung utamanya ditujukan untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp1,34 Triliun. Peningkatan ini sejalan dengan kebutuhan Kementerian/Lembaga di level pusat yang meningkat di triwulan laporan. Sementara, realisasi belanja pegawai



Sumber: DJPB Karwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah

**Grafik 2.10 Penggunaan Belanja APBD Jawa Tengah 2019**

Tabel 2.3 Realisasi Belanja Triwulan II 2018 dan 2019

KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH	TW II 2019
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>38,33%</b>
BELANJA PEGAWAI	38,61%
BELANJA HIBAH	50,39%
BELANJA BANTUAN SOSIAL	18,75%
BLNJ BAGI HASIL KPD KAB/KOTA	39,45%
BLNJ BANT.KEU. KPD KAB/KOTA	3,84%
BELANJA TDK TERDUGA	4,35%
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>26,18%</b>
BELANJA PEGAWAI	33,74%
BELANJA BARANG DAN JASA	28,23%
BELANJA MODAL	19,59%
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>34,76%</b>

Sumber: DJPB Kanwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran APBN berdasarkan Jenis Belanja

BERDASARKAN JENIS BELANJA	2018P		2019	
	PAGU (Rp M)	PANGSA	PAGU (Rp M)	PANGSA
BELANJA PEGAWAI	14.991	28,48%	14.035	28,38%
BELANJA BARANG	16.206	30,79%	16.069	30,09%
BELANJA MODAL	11.335	21,53%	10.347	17,82%
BELANJA BANTUAN SOSIAL	45	0,09%	75	0,15%
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	3.326	6,32%	3.734	15,99%
DANA DESA	6.735	12,80%	7.889	7,57%
<b>TOTAL</b>	<b>52.637</b>		<b>52.149</b>	

Sumber: DJPB Kanwil Jawa Tengah Kemenkeu

dan realisasi belanja modal pada triwulan laporan belum terealisasi optimal, masing-masing Rp251 Milyar dan Rp456 Milyar. Padahal, realisasi belanja modal ini bersifat produktif dan banyak digunakan untuk mendukung program prioritas Jawa Tengah, salah satunya adalah pengadaan jalan, irigasi, dan jaringan untuk peningkatan konektivitas.

Secara garis besar, pangsa belanja APBD dan APBN Jawa Tengah 2019 relatif mirip; ditujukan untuk pelayanan umum (42,7%), pendidikan (28,4%), dan kesehatan (14,6%).

### 2.3. STRUKTUR APBN PROVINSI JAWA TENGAH 2019

Secara keseluruhan, APBN Provinsi Jawa Tengah tercatat Rp52,15 Triliun, yang akan dianggarkan untuk 3 (tiga) fungsi utama yaitu pelayanan umum (pangsa 28,7%), ekonomi (20,9%), dan pendidikan (20,2%). Hal ini sejalan dengan tema kebijakan fiskal 2019 yaitu "Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan SDM" dan fokus kebijakan fiskal 2019,

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran APBN berdasarkan Jenis Fungsi

BERDASARKAN FUNGSI	2018P		2019	
	PAGU (Rp M)	PANGSA	PAGU (Rp M)	PANGSA
PELAYANAN UMUM	13,791	26,2%	14.977	28,7%
EKONOMI	12,851	24,4%	10.912	20,9%
PENDIDIKAN	10,076	19,1%	10.556	20,2%
KETERTIBAN DAN KEAMANAN	5,588	10,6%	5.371	10,3%
PERTAHANAN	3,616	6,9%	3.586	6,9%
KESEHATAN	3,536	6,7%	3.034	5,8%
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	1,389	2,6%	1.713	3,3%
LINGKUNGAN HIDUP	896	1,7%	1.107	2,1%
AGAMA	763	1,4%	745	1,4%
PERLINDUNGAN SOSIAL	117	0,2%	113	0,2%
PARIWISATA DAN BUDAYA	15	0,0%	35	0,1%
<b>TOTAL</b>	<b>52,637</b>		<b>52.149</b>	

Sumber: DJPB Kanwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah

yaitu (1) menjaga kesehatan fiskal agar lebih produktif, efisien, berdaya tahan dan *sustainable*; dan (2) mendorong iklim investasi, melalui simplifikasi dan kemudahan investasi dan ekspor, peningkatan kualitas layanan publik, dan pemberian insentif fiskal untuk mendorong investasi dan ekspor.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2023 menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 7,48%. Beberapa program utama pengentasan kemiskinan tersebut antara lain:

#### - *Basic Life Access*

- Perluasan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) menjadi sebesar 565 ribu siswa SD dan 800 ribu siswa SMA/SMK/MA/SLB.
- Perluasan Bantuan Beasiswa Siswa Miskin kepada 10 ribu siswa miskin bekerja sama dengan BUMD dan pelaku dunia usaha
- Pendirian 15 Sekolah Menengah Kejuruan dengan skema *boarding school* di Kabupaten-kabupaten sasaran.
- Peningkatan penyaluran Jaminan Kesehatan Daerah dari sebesar 849 ribu pada tahun 2018 menjadi 910 ribu pada 2020.
- Perluasan program Rumah Sehat Layak Huni menjadi sebesar 7.809 desa dan 769 kelurahan pada tahun 2020.

- Penyambungan murah listrik baru murah sebanyak 15.000 rumah tangga, bekerja sama dengan PT PLN dan pelaku dunia usaha.

#### - Sustainable Livelihood

- Perluasan jaminan kredit usaha rakyat kepada lapangan usaha perikanan dan perkebunan, bekerja sama dengan Perbankan dan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jawa Tengah.
- Program pembinaan 1000 wirausaha muda, melalui Dinas Koperasi & UMKM Jawa Tengah.
- Pemberian bantuan hukum kepada 500 BUMDes yang akan naik tingkat usaha.
- Peningkatan kemandirian ekonomi ibu Rumah Tangga, melalui pembinaan 12 ribu Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) serta pilot project bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- Penyaluran Dana Desa untuk Provinsi Jateng yang meningkat menjadi Rp7,8 triliun di 2019, dibandingkan Rp6,7 triliun di 2017. Dana itu akan dialokasikan kepada 7.809 desa dimana setiap desa akan mendapatkan Rp998 juta.
- Satu Dinas Satu Desa Miskin yang diprioritaskan di 745 desa binaan di 14 kabupaten.

Secara keseluruhan, realisasi APBN triwulan II 2019 mencapai Rp21,07 triliun (40,40% dari pagu APBN 2019). Ditinjau berdasarkan fungsi, realisasi belanja APBN 2019 mengikuti pola historis, yang didominasi oleh belanja pada fungsi pelayanan umum, pendidikan, dan ekonomi.

Sedangkan, berdasarkan jenis belanja, realisasi APBN triwulan II 2019 masih banyak digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang. Sementara, mengikuti pola historis, pencairan dana desa dari alokasi APBN sudah tersalurkan hampir 60%.

**Tabel 2.6 Realisasi APBN berdasarkan Fungsi pada Triwulan II 2018 dan 2019**

BERDASARKAN FUNGSI	2018 - II	PANGSA THD PAGU (%)	2019 - II	PANGSA THD PAGU (%)
PELAYANAN UMUM	5.233	52,96%	7.303	48,76%
PERTAHANAN	1.591	55,84%	2.019	56,30%
KETERTIBAN DAN KEAMANAN	2.545	49,20%	2.749	51,18%
EKONOMI	3.543	21,43%	2.754	25,24%
LINGKUNGAN HIDUP	292	50,36%	451	40,74%
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	268	23,48%	326	19,03%
KESEHATAN	1.170	33,20%	1.174	38,69%
PARIWISATA DAN BUDAYA	1	61,21%	9	25,71%
AGAMA	303	46,55%	355	47,66%
PENDIDIKAN	3.675	38,60%	3.890	36,85%
PERLINDUNGAN SOSIAL	38	33,20%	39	34,44%
<b>TOTAL</b>	<b>18.659</b>	<b>40,03%</b>	<b>21.069</b>	<b>40,40%</b>

Sumber: DJPB Karwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah

**Tabel 2.7 Realisasi APBN berdasarkan Jenis Belanja pada Triwulan II 2018 dan 2019**

BERDASARKAN JENIS BELANJA	2018 - II	PANGSA THD PAGU (%)	2019 - II	PANGSA THD PAGU (%)
BELANJA PEGAWAI	6.620	44,16%	7.090	50,52%
BELANJA BARANG	4.780	29,49%	6.761	42,07%
BELANJA MODAL	2.842	25,07%	2.159	20,87%
BELANJA BANTUAN SOSIAL	13	27,83%	19	25,48%
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	366	11,01%	313	8,38%
DANA DESA	4.038	59,96%	4.727	59,92%
<b>TOTAL</b>	<b>18.658</b>	<b>35,45%</b>	<b>21.069</b>	<b>40,40%</b>

Sumber: DJPB Karwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah

## 2.4. POTENSI OPTIMALISASI KINERJA FISKAL DI JAWA TENGAH

Berdasarkan hasil evaluasi Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dalam Kajian Fiskal Regional, serta hasil asesmen Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, ke depan optimalisasi kinerja fiskal dapat dilakukan antara lain, melalui:

1. Optimalisasi penerimaan pajak. Secara historis, rasio penerimaan pajak Jawa Tengah hanya mencapai 7%, kecuali triwulan II 2019 yang mencapai 9%. Capaian ini masih jauh dibawah rasio pajak nasional sebesar 11%.
2. Sinkronisasi belanja antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa.
3. Perbaikan pola penyerapan yang tidak menumpuk di akhir tahun anggaran (akhir tahun realisasi dapat mencapai 40%)

4. Optimalisasi prioritas belanja pemerintah daerah yang mendukung potensi sektor-sektor ekonomi yang dapat mempercepat tujuan pembangunan dan memiliki nilai *multiplier* tinggi terhadap perekonomian. Saat ini, pangsa APBN masih didominasi belanja pelayanan umum sebesar 28,7%. Tambahan anggaran ke sektor-sektor pendukung yang memiliki nilai tambah dan potensi tambahan pendapatan dalam jangka pendek (*quick win*) seperti pariwisata juga dapat dipertimbangkan untuk dilakukan. Beberapa contoh usulan alokasi belanja sektoral yang dapat meningkatkan produktivitas perekonomian, antara lain:
  - a. Belanja Bidang Pelayanan Publik dan Birokrasi: membangun sistem pelayanan publik dan birokrasi yang lebih efektif.
  - b. Belanja Bidang Infrastruktur: peningkatan produktivitas masyarakat misalnya dengan menghubungkan antara daerah penghasil komoditas dengan pusat perekonomian.
  - c. Belanja Bidang Kesehatan: berfokus pada kemudahan prosedur pemberian pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kesehatan.
  - d. Belanja Bidang Pendidikan: peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
  - e. Belanja Bidang Pertanian: perbaikan distribusi produk-produk pertanian dan peningkatan nilai tambah.
  - f. Belanja Bidang Kesehatan dan Penanggulangan Kemiskinan: alokasi belanja tidak hanya untuk peningkatan daya beli namun juga untuk mendorong kegiatan produktif.





## PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

**Inflasi tahunan Provinsi Jawa Tengah pada triwulan II 2019 lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2019.**

- Berdasarkan disagregasi kelompok, peningkatan inflasi tahunan Jawa Tengah terutama berasal dari kelompok bahan makanan serta kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Sesuai dengan pola historis, permintaan masyarakat terhadap barang konsumsi pada kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, serta kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan, akan meningkat tinggi pada periode hari raya keagamaan nasional yang berlangsung pada akhir triwulan II 2019.
- Dari sisi penawaran, penurunan pasokan domestik mendorong peningkatan tekanan inflasi pada kelompok bahan makanan. Selanjutnya, tekanan harga pada subkelompok transportasi juga mendorong Pemerintah mengeluarkan kebijakan antisipatif untuk meredam risiko peningkatan harga yang lebih tinggi.



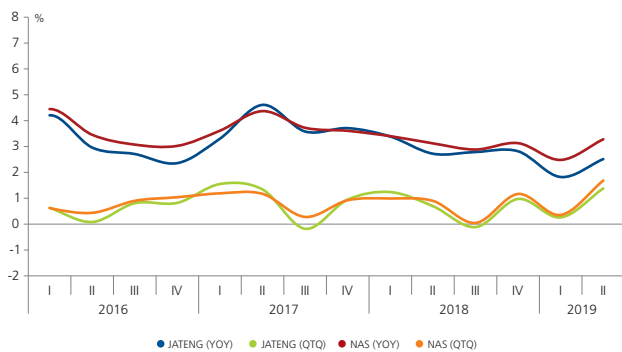
### 3.1. INFLASI SECARA UMUM

Inflasi Provinsi Jawa Tengah pada triwulan II 2019 tercatat sebesar 2,52% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,82% (yoy). Namun demikian, capaian inflasi tahunan tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan II pada tahun 2018 yang tercatat sebesar 2,72% (yoy). Sesuai dengan pola historis, secara triwulanan Jawa Tengah mengalami inflasi sebesar 1,38% (qtq), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2019 yang mencatatkan inflasi sebesar 0,26% (qtq).

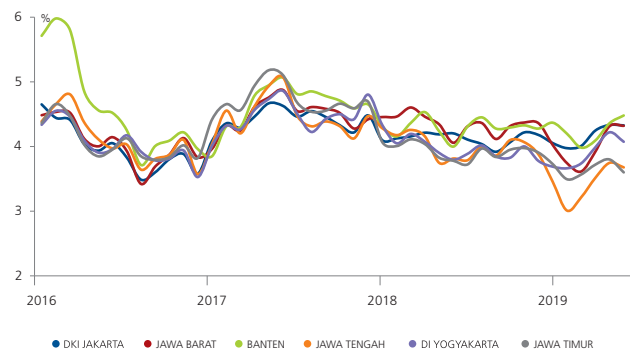
Walaupun mencatatkan peningkatan, laju inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan laporan masih tercatat lebih rendah dibanding dengan inflasi nasional yang sebesar 3,28% (yoy), serta lebih rendah dibandingkan inflasi kawasan Jawa yang sebesar 3,21% (yoy). Peningkatan inflasi tahunan Jawa Tengah

tersebut juga sejalan tren peningkatan tekanan harga yang berlangsung di tingkat nasional maupun di kawasan Jawa secara khususnya. Dengan perkembangan tersebut, Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah dengan inflasi terendah kedua di kawasan Jawa pada triwulan laporan.

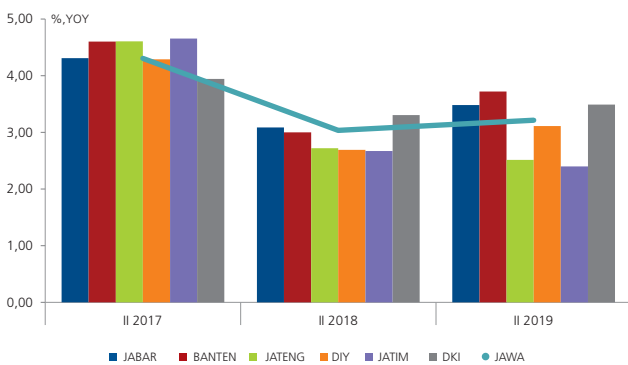
Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulanan di Jawa Tengah pada triwulan II 2019 menunjukkan intensitas peningkatan tekanan harga pada bulan Juni 2019 yang lebih besar dibandingkan provinsi lain di kawasan Jawa. Penurunan tekanan harga tersebut sesuai dengan pola historis, di mana permintaan masyarakat meningkat kuat menjelang puncak konsumsi pada periode hari raya keagamaan yang berlangsung pada akhir triwulan II 2019.



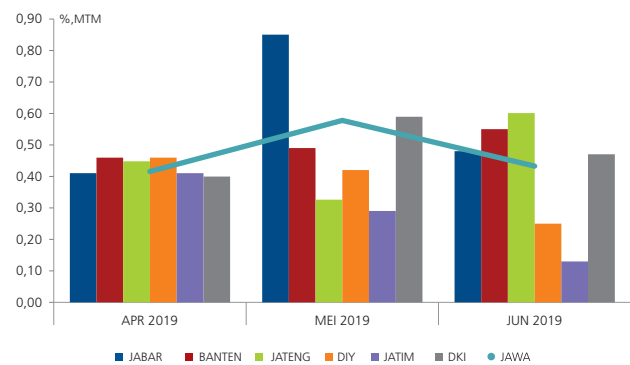
**Grafik 3.1 Perkembangan Inflasi Jawa Tengah dan Nasional**  
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah



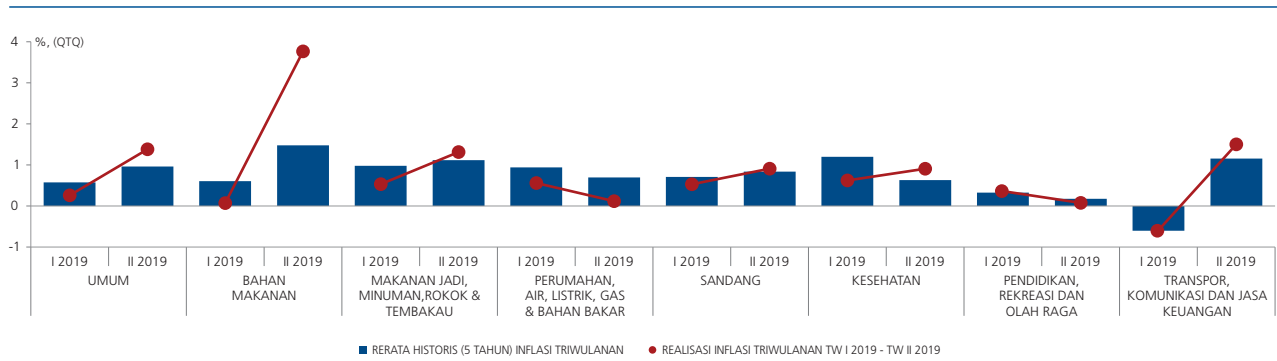
**Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi di Kawasan Jawa**  
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah



**Grafik 3.3 Inflasi Tahunan Provinsi di Jawa**  
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah



**Grafik 3.4 Inflasi Bulanan Provinsi di Jawa**  
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.5 Perbandingan Inflasi Triwulanan Berdasarkan Kelompok

Tabel 3.1 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan

APRIL		MEI		JUNI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
BAWANG MERAH	0.18%	CABAI MERAH	0.07%	CABAI MERAH	0.12%
BAWANG PUTIH	0.16%	DAGING AYAM RAS	0.04%	ANGKUTAN ANTAR KOTA	0.09%
TELUR AYAM RAS	0.04%	ANGKUTAN ANTAR KOTA	0.02%	BAWANG MERAH	0.04%
ANGKUTAN UDARA	0.04%	CABAI HIJAU	0.02%	KELAPA	0.03%
APEL	0.02%	GULA PASIR	0.02%	PETAJ	0.02%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Tabel 3.2 Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan

APRIL		MEI		JUNI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
BERAS	-0.08%	BAWANG MERAH	-0.12%	BAWANG PUTIH	-0.12%
TARIP LISTRIK	-0.03%	BERAS	-0.05%	TELUR AYAM RAS	-0.02%
PISANG	-0.02%	BAWANG PUTIH	-0.01%	BERAS	-0.01%
CABAI RAWIT	-0.02%	KANGKUNG	-0.01%	NANGKA MUDA	-0.01%
JERUK	-0.02%	PEPAYA	-0.01%	MUJAIR	-0.01%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Peningkatan tekanan inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan laporan khususnya disumbangkan oleh kelompok bahan makanan serta kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau. Peningkatan tekanan harga triwulanan pada kedua kelompok tersebut sejalan dengan pola historis yang mengindikasikan peningkatan permintaan secara gradual, menjelang periode hari raya keagamaan nasional. Lebih lanjut, tren peningkatan tekanan inflasi kelompok bahan makanan pada triwulan II 2019 ini juga terhitung lebih tinggi dibandingkan rerata historis tahun 2015-2018. Peningkatan tekanan harga yang lebih tinggi pada kelompok bahan makanan tersebut disumbangkan oleh penurunan pasokan tanaman pangan dan hortikultura, baik yang berasal dari produksi domestik maupun pasokan beras dari impor.

Inflasi tahunan pada triwulan laporan terpantau sebesar 2,52 (yoy), atau mengalami penurunan dibandingkan triwulan I 2019 yang tercatat sebesar 1,82% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi pada triwulan laporan juga berlangsung pada seluruh kota pantauan di Jawa Tengah dengan intensitas yang bervariasi. Peningkatan tekanan harga terbesar berlangsung di kota Semarang yang mencatatkan peningkatan laju inflasi dari sebesar 1,71% (yoy) pada triwulan I 2019, menjadi sebesar 2,60% (yoy) pada triwulan laporan. Secara keseluruhan, perkembangan inflasi bulanan pada seluruh kota pantauan di Jawa Tengah sejalan dengan tren di kawasan Jawa maupun di tingkat nasional, khususnya pada periode Juni 2019, saat seluruh kota pantauan di Jawa Tengah mencatatkan peningkatan tekanan inflasi.

**Tabel 3.3. Inflasi Tahunan Kota di Provinsi Jawa Tengah**

NO.	KOTA	INFLASI II 2018 (%,YOY)	INFLASI I 2019 (%,YOY)	INFLASI II 2019 (%,YOY)
1.	CILACAP	2.77	1.98	2.63
2.	PURWOKERTO	2.59	2.17	2.37
3.	KUDUS	2.57	1.72	2.29
4.	SURAKARTA	2.37	1.79	2.35
5.	SEMARANG	2.82	1.71	2.60
6.	TEGAL	3.12	2.19	2.58

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

### 3.2. INFLASI BERDASARKAN KELOMPOK

**Kelompok bahan makanan menjadi kontributor utama peningkatan laju inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan II 2019.** Peningkatan tahunan juga dicatatkan oleh kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, serta kelompok kesehatan. Dengan bobot konsumsi yang cukup besar, peningkatan tekanan inflasi kelompok bahan makanan memberikan andil yang besar terhadap peningkatan inflasi tahunan Jawa Tengah.

**Sementara itu, walaupun masih mencatatkan inflasi, kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan masih menjadi salah satu fakto penahan inflasi tahunan Jawa Tengah untuk**

**meningkat lebih tinggi pada triwulan II 2019.**

Dengan bobot konsumsi yang cukup besar, perlambatan tekanan inflasi kelompok tersebut menyebabkan inflasi melemah dibandingkan triwulan I 2019, yang kemudian diikuti oleh kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga. Sementara itu kelompok sandang dengan bobot konsumsi yang relatif kecil, belum berpengaruh signifikan meski telah mencatatkan penurunan inflasi tahunan pada periode laporan.

**Peningkatan tekanan inflasi tahunan tersebut juga tercermin pada perkembangan harga triwulanan.** Pada triwulan II 2019, indeks harga pada kelompok bahan makanan mencatatkan peningkatan harga triwulanan, dengan laju yang lebih tinggi dibandingkan rerata historis triwulan II sepanjang tahun 2014-2018. Demikian pula dengan kelompok bahan makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau yang merupakan produk turunan dari kelompok bahan makanan, mencatatkan peningkatan harga triwulanan yang lebih tinggi dibandingkan rerata historisnya.

**Tabel 3.4 Perkembangan Inflasi Tahunan Per Kelompok**

INFLASI KELOMPOK (%; YOY)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	II	II	II	II	II	I	II
<b>UMUM</b>	<b>7.26</b>	<b>6.15</b>	<b>2.96</b>	<b>4.61</b>	<b>2.72</b>	<b>1.82</b>	<b>2.52</b>
BAHAN MAKANAN	8.61	7.72	7.62	3.59	3.48	-0.35	3.30
MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU	7.79	6.21	5.00	2.36	3.18	3.02	3.32
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR	7.13	5.91	1.05	6.34	1.47	2.03	1.96
SANDANG	4.16	3.13	1.79	1.28	2.44	2.29	2.11
KESEHATAN	3.52	4.34	2.82	3.50	2.91	2.62	3.02
PENDIDIKAN, REKREASI & OLAHRAGA	2.91	6.04	4.43	2.87	4.19	1.97	1.66
TRANSPORTASI, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN	10.07	6.38	-2.71	8.45	2.47	2.37	1.77

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

**Tabel 3.5 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan**

INFLASI KELOMPOK (%; QTQ)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	II	II	II	II	II	I	II
<b>UMUM</b>	<b>0.85</b>	<b>1.30</b>	<b>0.08</b>	<b>1.34</b>	<b>0.69</b>	<b>0.26</b>	<b>1.38</b>
BAHAN MAKANAN	0.28	2.13	-0.12	1.51	0.10	0.07	3.77
MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU	0.80	1.51	1.33	0.41	1.01	0.53	1.31
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR	1.79	0.45	0.19	2.52	0.19	0.56	0.12
SANDANG	0.52	0.79	0.64	0.75	1.09	0.53	0.91
KESEHATAN	0.84	0.74	0.50	0.50	0.52	0.62	0.91
PENDIDIKAN, REKREASI & OLAHRAGA	0.28	0.12	0.13	0.17	0.39	0.36	0.08
TRANSPORTASI, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN	0.47	2.38	-1.75	1.54	2.10	-0.59	1.50

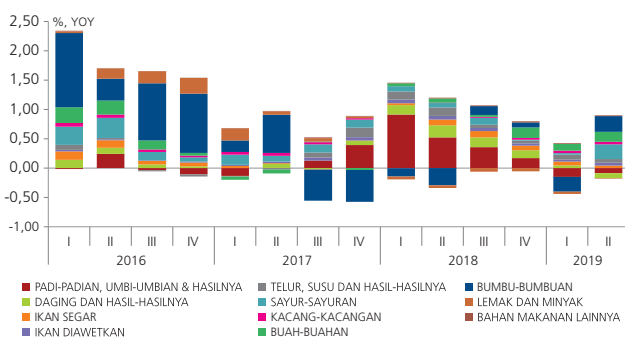
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

### 3.2.1. Kelompok Bahan Makanan

**Inflasi tahunan kelompok bahan makanan merupakan kontributor utama peningkatan inflasi tahunan Provinsi Jawa Tengah.** Inflasi kelompok bahan makanan pada triwulan II 2019 tercatat sebesar 3,30% (yoy), atau berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan deflasi sebesar 0,35% (yoy). Sepanjang bulan April-Juni 2019, peningkatan indeks harga bulanan kelompok bahan makanan tercatat cukup tinggi, yaitu sebesar 3,77% (qtq). Hal ini lebih tinggi dibandingkan perkembangan indeks harga bahan makanan pada tahun triwulan I tahun 2019 lalu yang mencatatkan inflasi tinggi mencapai 0,10% (qtq).

**Peningkatan inflasi tahunan kelompok bahan makanan tersebut terutama disumbang oleh berkurangnya pasokan komoditas hortikultura.** Peningkatan indeks harga secara bulanan subkelompok bumbu-bumbuan pada triwulan II 2019 terhitung lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018. Penurunan pasokan hortikultura yang berasal dari produksi domestik berlangsung lebih awal pada awal triwulan II 2019. Sementara itu, pasokan komoditas pangan utama yaitu beras terjaga cukup baik, ditunjang oleh puncak masa panen raya pada Februari-Maret 2019.

**Subkelompok bumbu-bumbuan menjadi kontributor utama peningkatan inflasi tahunan**



Grafik 3.6 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan – Kelompok Bahan Makanan

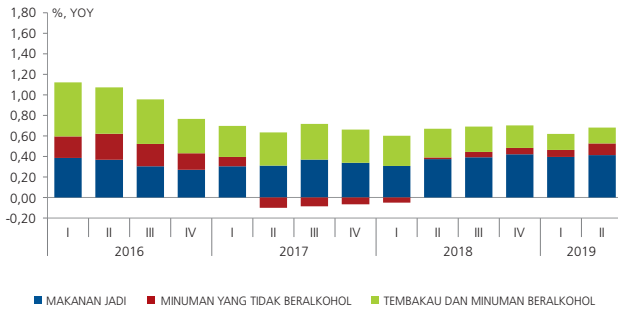
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

**Jawa Tengah pada kelompok bahan makanan.** Subkelompok ini mencatatkan peningkatan tekanan harga yang signifikan, dari sebelumnya mencatatkan deflasi sebesar 11,91% (yoy) pada triwulan lalu, berbalik arah menjadi inflasi yang tinggi sebesar 10,36% (yoy) pada triwulan II 2019. Beberapa komoditas utama hortikultura yang tergolong subkelompok-bumbuan mencatatkan peningkatan tinggi sepanjang triwulan II 2019.

**Komoditas aneka cabai yaitu cabai merah dan cabai rawit juga terpantau mengalami peningkatan harga secara bulanan yang terjadi lebih awal,** dan dengan intensitas yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018 lalu, sehingga memberikan andil yang cukup besar terhadap inflasi subkelompok bumbu-bumbuan. Pasokan impor hortikultura bawang putih yang relatif terlambat pada triwulan II 2019 ini juga turut mendorong tekanan inflasi subkelompok bumbu-bumbuan lebih tinggi. Sementara itu, pasokan komoditas pangan utama berupa beras yang terjaga karena berasal dari produksi domestik sehingga mampu menjaga tekanan inflasi kelompok bahan makanan. Perkembangan harga beras yang mencatatkan deflasi sebesar 2,59% (qtq) pada periode April-Juni 2019, mencerminkan kestabilan pasokan beras yang berasal dari masa panen raya pada periode Februari-Maret 2019.

### 3.2.2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau

Pada triwulan II 2019, indeks harga kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau mencatatkan peningkatan inflasi tahunan, dengan tercatat sebesar 3,32% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu yang tercatat sebesar 3,02% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi tahunan pada kelompok ini terutama disumbangkan oleh subkelompok minuman tidak



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

**Grafik 3.7 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan - Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau**

beralkohol serta subkelompok makanan jadi. Walaupun subkelompok makanan jadi tidak mengalami peningkatan yang signifikan, namun memiliki andil inflasi terbesar dibandingkan subkelompok lain, sehingga mencerminkan bobot konsumsi yang besar di Jawa Tengah.

**Subkelompok minuman tidak beralkohol menjadi kontributor peningkatan inflasi kelompok makanan jadi, dengan mencatatkan inflasi sebesar 3,50% (yoy) pada triwulan II 2019, lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu yang terpantau sebesar 2,16% (yoy).** Peningkatan tekanan inflasi pada subkelompok tersebut terutama didorong oleh peningkatan harga komoditas gula pasir serta komoditas air kemasan, sebagai dampak peningkatan permintaan pada hari raya keagamaan nasional. Inflasi komoditas gula pasir juga terutama disebabkan penurunan pasokan tebu sebagai bahan baku industri pengolahan.

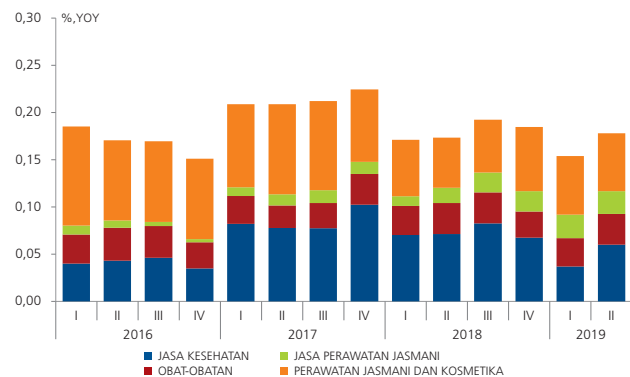
Perkembangan harga komoditas-komoditas utama pada subkelompok makanan jadi juga menunjukkan perkembangan yang relatif seragam. Peningkatan tekanan harga makanan jadi umumnya disumbangkan oleh komoditas makanan seperti, soto, pecel, serta nasi dengan lauk, yang berlangsung pada periode Mei-Juni 2019, mencerminkan peningkatan konsumsi masyarakat pada hari raya keagamaan nasional.

Sementara itu, beberapa komoditas makanan jadi dengan bahan baku terigu impor juga mencatatkan peningkatan inflasi, seperti komoditas mie, martabak, dan aneka roti.

### 3.2.3. Kelompok Kesehatan

**Kelompok kesehatan mencatatkan peningkatan inflasi pada triwulan laporan, dengan mencatatkan inflasi sebesar 3,02% (yoy), atau meningkat dari sebesar 2,62% (yoy) pada triwulan I 2019 lalu.** Peningkatan laju inflasi kelompok kesehatan tersebut didorong oleh peningkatan harga pada subkelompok jasa kesehatan dan subkelompok obat-obatan. Sementara itu indeks harga subkelompok jasa perawatan jasmani serta subkelompok perawatan dan kosmetik relatif stabil di sepanjang triwulan II 2019.

**Subkelompok Jasa kesehatan mencatatkan peningkatan laju inflasi tahunan dari sebesar 1,47% (yoy) pada triwulan I 2019, menjadi sebesar 2,38% (yoy) pada triwulan laporan.** Peningkatan laju inflasi tahunan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan tekanan inflasi subkelompok jasa kesehatan, khususnya pada komoditas jasa tarif rumah sakit yang mencatatkan peningkatan tarif sebesar 0,78% (mtm) pada periode April 2019. Penyesuaian harga yang dilakukan oleh para penyedia jasa rumah sakit tersebut merupakan langkah bisnis tahunan, yang



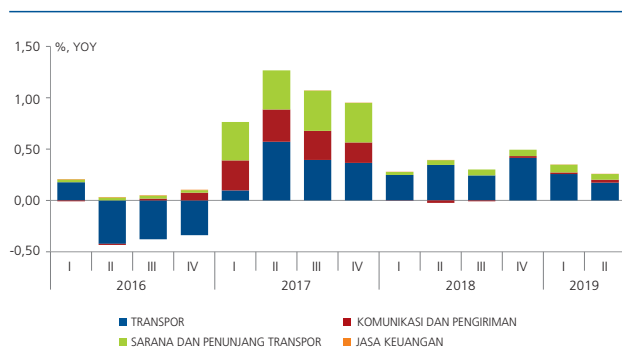
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

**Grafik 3.8 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan - Kelompok Kesehatan**

secara historis berlangsung pada periode awal tahun, yaitu Januari-Maret. Peningkatan tarif rumah sakit tersebut juga diikuti oleh subkelompok obat-obatan sebagai komoditas pelengkap, namun dengan intensitas yang lebih moderat dibandingkan subkelompok jasa kesehatan.

### 3.2.4. Kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

**Penurunan inflasi kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan memberikan andil yang besar terhadap pembentukan inflasi tahunan Jawa Tengah.** Dengan bobot yang cukup besar terhadap konsumsi masyarakat di Jawa Tengah, perkembangan indeks harga kelompok ini menjadi kontributor utama penahan laju inflasi umum tahunan Jawa Tengah pada triwulan II 2019. Selain memiliki bobot konsumsi yang cukup besar, indeks harga kelompok juga mencatatkan penurunan yang cukup signifikan sepanjang triwulan II 2019, terutama disebabkan oleh kebijakan fiskal Pemerintah Pusat. Inflasi harga komoditas dan jasa pada kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan mencatatkan penurunan dari sebesar 2,37% (yoy) pada triwulan I 2019 menjadi sebesar 1,77% (yoy) pada triwulan II 2019 ini.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

**Grafik 3.9 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan - Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan**

### Penurunan laju inflasi ini terutama disumbangkan oleh subkelompok transportasi, diikuti subkelompok sarana dan penunjang transportasi.

Secara teknikal, penurunan tekanan inflasi pada subkelompok transportasi lebih disebabkan oleh efek basis harga (*baseline effect*) yang lebih tinggi pada tahun 2018 lalu. Deflasi bulanan komoditas energi utama berupa bensin sepanjang periode Januari-Maret 2019 sebesar 2,98% (*point-to-point*), dipengaruhi penetapan harga jual bahan bakar yang diatur oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Realisasi deflasi bulanan tersebut berlawanan dengan tren peningkatan harga yang berlangsung pada periode Januari-April pada tahun 2018 lalu, sehingga menyebabkan inflasi tahunan yang lebih rendah pada triwulan II 2019.

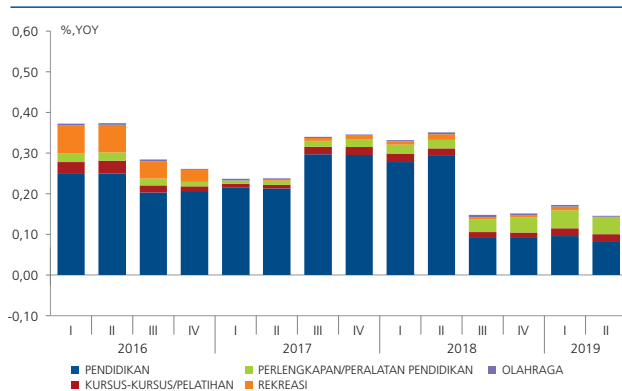
### Selanjutnya, tren harga musiman aneka komoditas jasa angkutan pada periode hari raya keagamaan nasional triwulan II 2019 ini, juga terhitung meningkat relatif moderat dibandingkan tahun 2018 lalu.

Tarif komoditas angkutan udara pada triwulan II 2019 terhitung mengalami inflasi sebesar 6,33%(yoy), mereda setelah meningkat tinggi pada triwulan I 2019 lalu sebesar 10,66%(yoy). Meredanya inflasi angkutan udara ini sejalan dengan Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 106 tahun 2019 pada 18 Mei 2019 lalu tentang Pengaturan Tarif Batas Atas dan Bawah Tiket Pesawat. Selanjutnya tren peningkatan harga musiman pada komoditas angkutan antar kota dan angkutan dalam kota juga relatif terjaga, dengan mencatatkan inflasi masing-masing sebesar 0,36% (yoy) dan 1,19% (yoy).

### 3.2.5. Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga

Perkembangan indeks harga kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga mencatatkan penurunan inflasi tahunan pada triwulan II 2019, dengan tercatat sebesar 1,66% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2019 yang tercatat sebesar 1,97% (yoy). Namun demikian, penurunan tekanan inflasi tahunan tersebut relatif tidak berdampak signifikan pada pembentukan inflasi tahunan provinsi Jawa Tengah. Penurunan tekanan inflasi kelompok ini terutama disumbangkan oleh kelompok pendidikan.

Secara keseluruhan, komoditas jasa kelompok pendidikan menunjukkan perkembangan yang beragam, dengan andil penurunan inflasi terbesar disumbangkan oleh komoditas jasa taman kanak-kanak yang mencatatkan penurunan tekanan inflasi tahunan dari sebesar 6,09% (yoy) pada triwulan I 2019, menjadi sebesar 3,10% (yoy) pada triwulan laporan. Sementara itu, sesuai dengan pola historisnya, komoditas jasa pendidikan lainnya seperti sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi tidak mengalami perubahan tarif sepanjang triwulan II 2019 ini, dan akan mengalami perubahan tarif pada triwulan III 2019, sejalan dengan mulainya periode awal tahun ajaran baru 2019-2020.



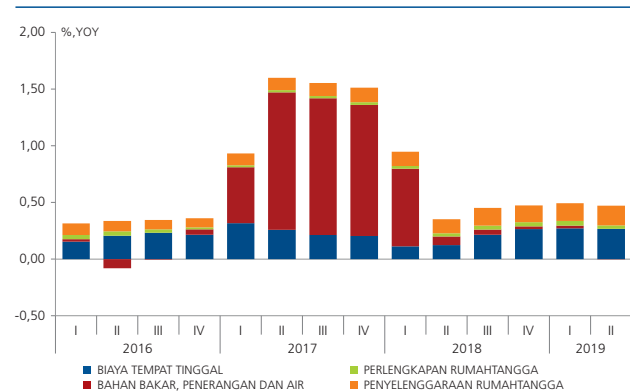
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.10 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan - Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga

### 3.2.6. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar

Berlawanan dengan perkembangan inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan laporan, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar juga menjadi salah satu penahan laju inflasi tahunan di Jawa Tengah. Inflasi harga barang dan jasa pada kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar mencatatkan perlambatan dari sebesar 2,03% (yoy) triwulan I 2019, menjadi sebesar 1,96% (yoy) pada triwulan laporan. Penurunan tekanan inflasi pada kelompok ini terutama disumbangkan subkelompok bahan bakar, penerangan, dan air.

Subkelompok bahan bakar, penerangan, dan air mencatatkan penurunan inflasi dari sebesar 0,37% (yoy) pada triwulan I 2019 lalu, menjadi deflasi sebesar 0,02 (yoy) pada triwulan laporan. Penurunan inflasi pada subkelompok ini terutama disumbangkan oleh komoditas tarif listrik yang terhitung deflasi sebesar 0,98% (yoy) pada triwulan II 2019 lalu, atau turun lebih dalam dibandingkan triwulan lalu yang tercatat deflasi sebesar 0,27% (yoy). Penurunan tarif listrik ini dinikmati oleh pelanggan rumah tangga pada golongan konsumen daya 900 VA melalui pemberian diskon Rp52/kWh pada 1 Maret 2019.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.11 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan - Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar

### 3.2.7. Kelompok Sandang

**Perkembangan inflasi tahunan kelompok sandang pada triwulan II 2019 relatif menurun dibandingkan triwulan lalu.** Namun demikian, penurunan inflasi kelompok ini berdampak minimal terhadap keseluruhan inflasi umum Jawa Tengah, dikarenakan bobot konsumsi yang rendah di Jawa Tengah. Inflasi kelompok sandang pada triwulan II 2019 tercatat sebesar 2,11% (yoy), menurun dibandingkan triwulan lalu yang tercatat sebesar 2,29% (yoy). Penurunan inflasi kelompok ini utamanya didorong oleh penurunan indeks harga barang-barang subkelompok sandang wanita yang mencatatkan penurunan inflasi dari sebesar 3,25% (yoy) pada triwulan lalu, menjadi sebesar 2,25% (yoy) pada triwulan II 2019.

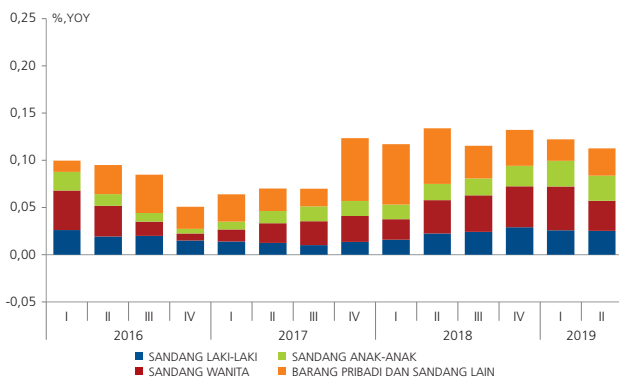
**Sementara itu, perkembangan indeks harga subkelompok sandang lainnya relatif stabil dan berdampak minimal terhadap inflasi tahunan Jawa Tengah.** Peningkatan harga musiman pada hari raya keagamaan pada komoditas-komoditas sandang wanita berlangsung relatif minimal pada periode triwulan II 2019. Tren harga pada komoditas blus, mukena, dan daster relatif stabil, berlawanan dengan tren perkembangan harga pada periode yang sama pada triwulan II 2018 lalu yang mencatatkan

peningkatan harga. Sementara itu, perkembangan harga emas perhiasan justru menunjukkan peningkatan tren inflasi bulanan sepanjang Mei-Juni 2019 sejalan dengan pola konsumsi dan investasi masyarakat Jawa Tengah.

### 3.3. INFLASI KOTA-KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

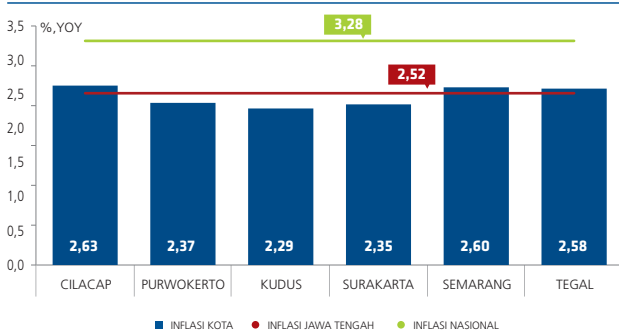
**Seluruh kota-kota pantauan inflasi yang disurvei oleh BPS di Jawa Tengah mencatatkan peningkatan inflasi tahunan pada triwulan laporan dibandingkan triwulan I 2019.** Peningkatan inflasi terbesar dicatatkan oleh Kota Semarang yang mencatatkan inflasi sebesar 2,60% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 1,71% (yoy). Sementara itu, perkembangan inflasi tahunan yang relatif stabil dicatatkan oleh Kota Purwokerto, yang mencatatkan inflasi sebesar 2,37% (yoy) pada triwulan laporan, meningkat dibandingkan capaian inflasi triwulan I 2019 lalu sebesar 2,17% (yoy).

**Kota Semarang sebagai kota pantauan inflasi dengan pangsa konsumsi terbesar menyumbang andil peningkatan inflasi terbesar, sebesar 0,46% (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan kota pantauan inflasi lainnya di Jawa Tengah.** Walaupun dengan peningkatan yang relatif moderat dibandingkan Kota Semarang, Kota Surakarta juga turut menjadi kontributor kedua peningkatan tekanan inflasi tahunan Provinsi Jawa Tengah, dengan menyumbang andil sebesar 0,10% (yoy). Dengan bobot konsumsi yang besar dan dominan terhadap pembentukan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Jawa Tengah, Kota Semarang dan Kota Surakarta mampu mendorong laju inflasi Jawa Tengah meningkat signifikan dibandingkan inflasi nasional.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

**Grafik 3.12 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan - Kelompok Sandang**



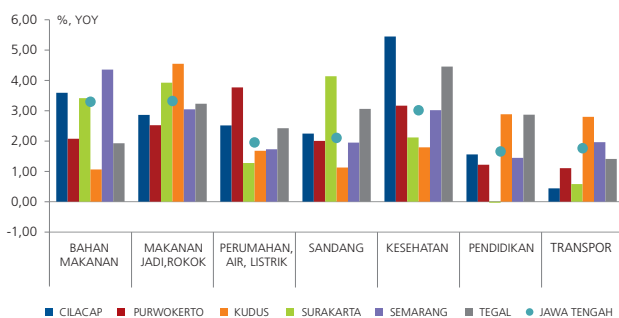
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

**Grafik 3.13 Inflasi Tahunan Triwulan I 2019 pada Seluruh Kota Pantauan di Jawa Tengah**

**Disparitas inflasi antarkota di Jawa Tengah pada triwulan laporan kembali menyempit pada triwulan II 2019 ini.** Pada triwulan I 2019, selisih tingkat inflasi antara kota yang memiliki inflasi tertinggi dan terendah tercatat sebesar 0,48%. Sementara pada triwulan II 2019, disparitas inflasi antar kota tersebut menurun menjadi sebesar 0,33%, dengan inflasi tertinggi terjadi di Kota Cilacap sebesar 2,63% (yoy), serta inflasi terendah berada di Kota Kudus sebesar 2,29% (yoy).

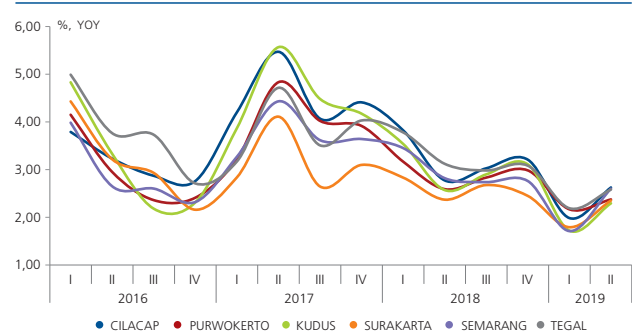
**Ditinjau berdasar kelompok, kota-kota pantauan inflasi di Jawa Tengah menunjukkan perkembangan inflasi kelompok yang beragam.**

Namun demikian, seluruh kota pantauan inflasi di Jawa Tengah mencatatkan peningkatan inflasi yang signifikan pada kelompok bahan makanan pada triwulan laporan. Pada triwulan II 2019, kelompok bahan makanan secara rata-rata terpantau mengalami



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

**Grafik 3.15 Inflasi Kota di Provinsi Jawa Tengah per Kelompok pada Tw II 2019**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

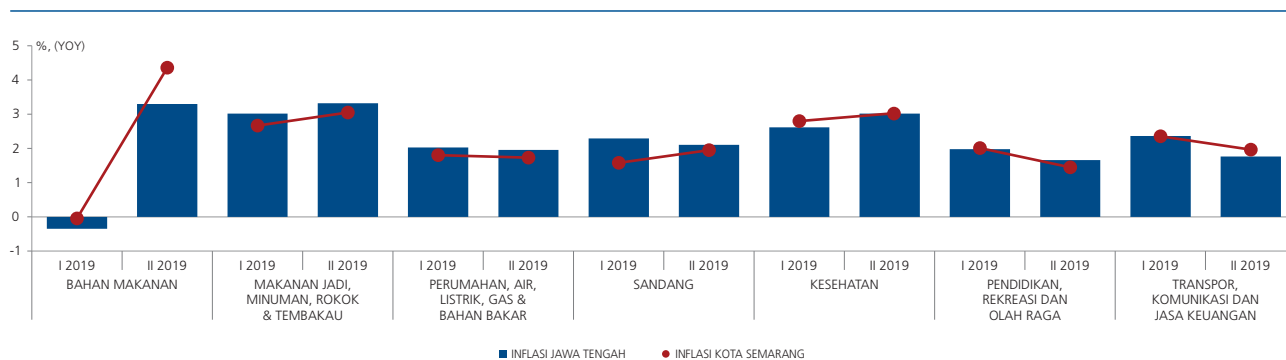
**Grafik 3.14 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Pantauan di Jawa Tengah**

penurunan laju inflasi sebesar 3,16% (yoy) pada seluruh kota pantauan. Hal ini didukung oleh fakta bahwa pasokan kelompok bahan makanan bagi seluruh kota pantauan berasal dari produksi pertanian dan peternakan domestik. Peningkatan rata-rata tekanan inflasi pada 6 (enam) kota pantauan inflasi di Jawa Tengah, juga tercatat pada kelompok kesehatan serta kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau.

### 3.3.1. Disagregasi Inflasi Kota Semarang

**Kota Semarang mencatatkan peningkatan inflasi tahunan pada triwulan laporan,** dengan tercatat sebesar 2,60% (yoy), meningkat dibandingkan realisasi pada triwulan I 2019 yang tercatat sebesar 1,71% (yoy). Dengan peningkatan inflasi tahunan tersebut, andil Kota Semarang terhadap peningkatan inflasi tahunan Provinsi Jawa Tengah masih menempati posisi tertinggi dibandingkan 5 (lima) kota pantauan inflasi lainnya di Jawa Tengah. Hal ini terutama disebabkan oleh pangsa konsumsi Kota Semarang yang terbesar, mencapai ±51% terhadap pembentukan Nilai Konsumsi (NK) Jawa Tengah.

**Sejalan dengan perkembangan indeks harga di 5 (lima) kota pantauan lainnya, kelompok bahan makanan menjadi kontributor utama penurunan inflasi tahunan kota Semarang.** Inflasi kelompok bahan makanan tercatat mengalami peningkatan



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.16 Perbandingan Inflasi Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok

signifikan dari deflasi sebesar 0,05% (yoy) pada triwulan I 2019, menjadi inflasi sebesar 4,36% (yoy) pada triwulan laporan. Peningkatan inflasi tahunan kelompok bahan makanan tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan penurunan inflasi kelompok yang sama di 5 (lima) kota pantauan inflasi lainnya di Jawa Tengah. Sejalan dengan fenomena yang berlangsung di tingkat provinsi, maupun kawasan Jawa secara keseluruhan, penurunan tekanan inflasi bahan makanan di Kota Semarang terutama disumbang oleh subkelompok bumbu-bumbuan serta subkelompok sayur-sayuran. Peningkatan tekanan inflasi tahunan subkelompok bumbu-bumbuan terutama disumbangkan oleh komoditas bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit.

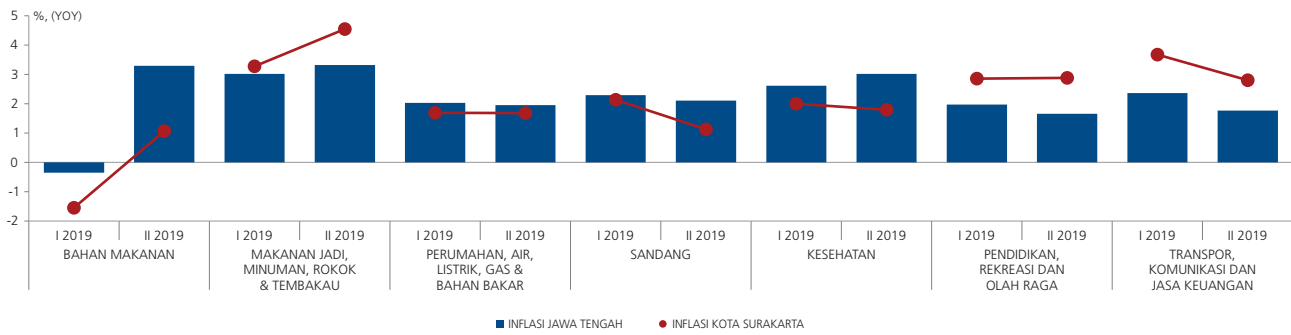
**Secara umum, inflasi tahunan kelompok-kelompok komoditas barang dan jasa di Kota Semarang, menunjukkan perkembangan yang seragam dengan kota pantauan inflasi lainnya di Jawa Tengah.** Anomali terpantau pada kelompok sandang yang justru menunjukkan peningkatan inflasi tahunan pada triwulan laporan, berlawanan dengan tren penurunan tekanan inflasi kelompok sandang di tingkat provinsi. Peningkatan tekanan inflasi tahunan pada kelompok sandang tersebut terutama disumbangkan oleh subkelompok sandang laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan kota pantauan inflasi lainnya, khususnya pada komoditas sarung katun serta

komoditas pendek batik yang meningkat tinggi pada periode Mei-Juni 2019, mencerminkan peningkatan yang tinggi pada periode hari raya keagamaan nasional.

### 3.3.2. Disagregasi Inflasi Kota Surakarta

**Selanjutnya, Kota Surakarta juga mencatatkan peningkatan inflasi tahunan pada periode triwulan II 2019 dibandingkan triwulan sebelumnya.** Pada triwulan II 2019, inflasi tahunan Kota Surakarta tercatat sebesar 2,35% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,79% (yoy). Kota Surakarta sebagai kota kontributor Nilai Konsumsi (NK) terbesar kedua di Jawa Tengah, mencatatkan perkembangan inflasi yang relatif seragam dengan karakteristik tren inflasi Jawa Tengah secara keseluruhan.

**Sejalan dengan perkembangan harga di Kota Semarang, tekanan harga kelompok bahan makanan juga menjadi kontributor utama penurunan inflasi tahunan di Kota Surakarta.** Indeks harga kelompok bahan makanan pada triwulan II 2019 tercatat mengalami inflasi sebesar 1,07% (yoy), berbalik arah dari deflasi pada triwulan lalu sebesar 1,55% (yoy). Namun demikian, tren peningkatan inflasi kelompok bahan makanan pada Kota Surakarta relatif terkendali dibandingkan Kota Semarang maupun 5 (lima) kota pantauan inflasi lainnya, khususnya pada



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.17 Perbandingan Inflasi Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok

subkelompok bumbu-bumbuan serta subkelompok sayur-sayuran. Sejalan dengan tren perkembangan harga di Kota Semarang maupun di tingkat Provinsi Jawa Tengah, subkelompok bumbu-bumbuan masih menjadi kontributor utama inflasi di Kota Surakarta.

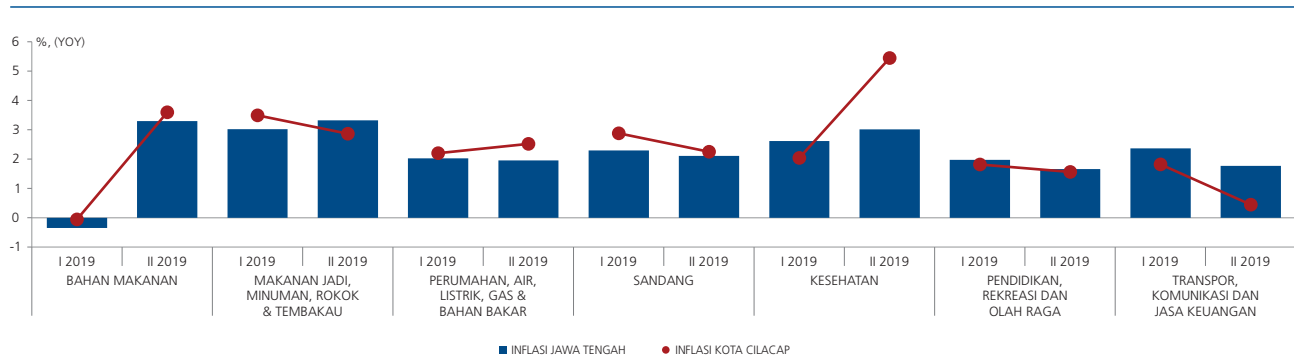
**Walaupun secara umum perkembangan indeks harga kelompok komoditas di Kota Surakarta relatif seragam dengan 5 (lima) kota pantauan lainnya.** Hal yang berbeda berlangsung pada kelompok kesehatan yang justru mengalami tren penurunan inflasi, berlawanan dengan tren peningkatan inflasi di Provinsi Jawa Tengah. Kelompok kesehatan terhitung mengalami penurunan inflasi dari sebesar 2,00% (yoy) pada triwulan lalu, menjadi sebesar 1,79% (yoy) pada triwulan I 2019. Penurunan inflasi tahunan tersebut terutama disumbangkan oleh subkelompok jasa perawatan jasmani serta subkelompok perawatan jasmani dan kosmetika.

### 3.3.3. Disagregasi Inflasi Kota Cilacap

**Kota Cilacap menjadi kota dengan inflasi tahunan terbesar di antara seluruh kota pantauan inflasi di Jawa Tengah pada triwulan II 2019.** Inflasi tahunan pada triwulan laporan ini tercatat sebesar 2,63% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2019 yang tercatat sebesar 1,98% (yoy). Sama halnya dengan perkembangan inflasi di Jawa Tengah, peningkatan inflasi tahunan Kota Cilacap pada triwulan laporan

didorong oleh kelompok bahan makanan yang mencatatkan inflasi sebesar 3,60% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2019 yang mencatatkan deflasi 0,06% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi subkelompok bumbu-bumbuan pada Kota Cilacap juga berlangsung lebih tinggi dibandingkan Kota Semarang dan Kota Surakarta, disebabkan oleh tertundanya pasokan impor bawang putih yang berasal pelabuhan-pelabuhan pintu impor yang terletak di kawasan pantai utara Jawa, khususnya pelabuhan Tanjung Priok maupun pelabuhan Tanjung Perak.

**Perkembangan indeks harga kelompok barang dan jasa di Kota Cilacap juga mengalami beberapa perbedaan dibandingkan dengan kota pantauan inflasi lainnya di Jawa Tengah.** Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau serta kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, tercatat mengalami tren inflasi yang berlawanan dengan tren yang berlangsung di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Penurunan tekanan inflasi tersebut berasal dari subkelompok makanan jadi yang tercatat mengalami penurunan tekanan harga, khususnya pada komoditas nasi dengan lauk dan komoditas soto. Selanjutnya, subkelompok perlengkapan rumah tangga, khususnya barang-barang elektronik menjadi kontributor utama peningkatan tekanan inflasi pada kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.18 Perbandingan Inflasi Kota Cilacap dan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok

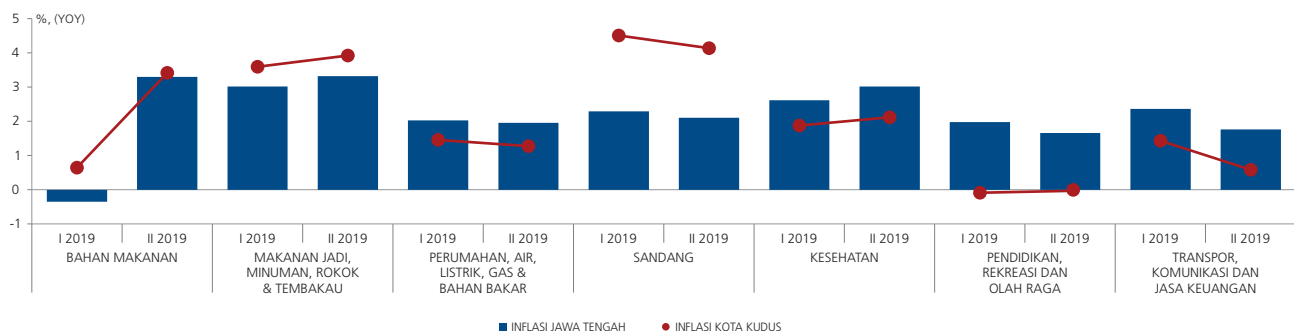
### 3.3.4. Disagregasi Inflasi Kota Kudus

Selanjutnya, Kota Kudus terpantau mengalami tekanan inflasi tahunan yang paling rendah dibandingkan kota pantauan lainnya di Jawa Tengah. Pada triwulan II 2019, inflasi tahunan Kota Kudus tercatat sebesar 2,29% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,79% (yoy). Kota Kudus sebagai kota kontributor Nilai Konsumsi (NK) terbesar ketiga di Jawa Tengah, mencatatkan perkembangan inflasi yang relatif seragam dengan karakteristik tren inflasi Jawa Tengah secara keseluruhan. Kelompok bahan makanan menjadi kontributor utama peningkatan tekanan inflasi tahunan di Kota Kudus, khususnya pada subkelompok bumbu-bumbuan. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah perkembangan harga subkelompok padi-padian, umbi-umbian, dan hasilnya, terutama pada komoditas padi yang sempat mencatatkan inflasi pada periode Mei 2019, menandakan tekanan permintaan masyarakat yang lebih kuat dibandingkan pasokannya.

Walaupun secara umum perkembangan indeks harga kelompok komoditas di Kota Kudus relatif seragam dengan 5 (lima) kota pantauan lainnya, tren berbeda terjadi pada kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga yang justru mengalami tren peningkatan inflasi, berlawanan dengan tren penurunan inflasi di Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, hal tersebut tidak terlalu berpengaruh banyak pada pembentukan inflasi tahunan Kota Kudus, disebabkan oleh bobot konsumsi dan tekanan inflasi kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga yang relatif kecil.

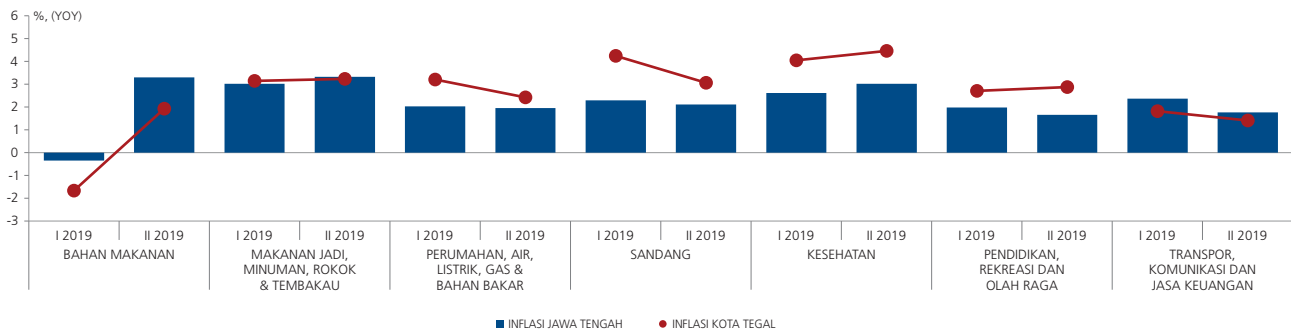
### 3.3.5. Disagregasi Inflasi Kota Tegal

Kota Tegal mencatatkan peningkatan inflasi tahunan pada triwulan laporan, dengan tercatat sebesar 2,58% (yoy), meningkat dibandingkan realisasi pada triwulan I 2019 yang tercatat sebesar 2,19% (yoy). Walaupun mengalami peningkatan inflasi tahunan,



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.19 Perbandingan Inflasi Kota Kudus dan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.20 Perbandingan Inflasi Kota Tegal dan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok

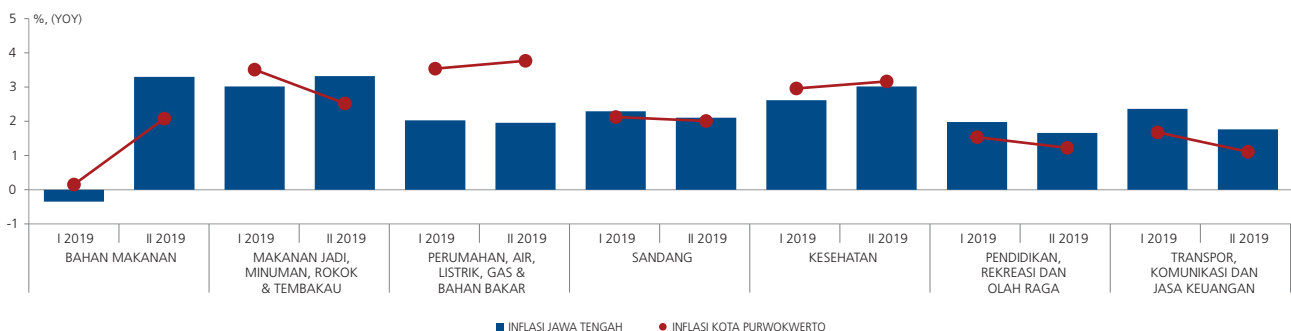
andil Kota Tegal terhadap peningkatan inflasi tahunan Provinsi Jawa Tengah relatif terbatas. Walaupun perkembangan indeks harga kelompok bahan makanan juga mengalami peningkatan, namun intensitas peningkatan inflasi pada subkelompok padi-padian, umbi-umbian, dan hasilnya terpantau lebih kuat dibandingkan kota pantauan inflasi lainnya, disebabkan tren deflasi komoditas beras yang berlangsung sejak Februari 2019, berakhir pada bulan Juni 2019.

**Secara umum, inflasi tahunan kelompok-kelompok komoditas barang dan jasa di Kota Tegal, menunjukkan perkembangan yang seragam dengan kota pantauan inflasi lainnya di Jawa Tengah.** Anomali terpantau pada kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga yang justru menunjukkan peningkatan inflasi tahunan pada triwulan laporan, berlawanan dengan tren penurunan tekanan inflasi di tingkat provinsi. Tingkat inflasi

kelompok tersebut juga lebih tinggi dibandingkan oleh realisasi inflasinya di tingkat Provinsi Jawa Tengah, dengan mencatatkan inflasi sebesar 2,71% (yoy) pada triwulan I 2019, dan sebesar 2,87% (yoy) pada triwulan laporan.

### 3.3.6. Disagregasi Inflasi Kota Purwokerto

**Kota Purwokerto menjadi kota pantauan dengan dengan peningkatan terendah inflasi tahunan pada triwulan laporan.** Inflasi tahunan pada triwulan laporan ini tercatat sebesar 2,37% (yoy), meningkat terbatas dibandingkan triwulan I 2019 yang tercatat sebesar 2,17% (yoy). Relatif stabilnya inflasi tahunan Kota Purwokerto pada triwulan II 2019 ini terutama disebabkan oleh laju peningkatan inflasi kelompok bahan makanan yang paling rendah dibandingkan kota pantauan lainnya. Inflasi tahunan kelompok bahan makanan di Kota Purwokerto pada triwulan laporan tercatat sebesar 2,08% (yoy), meningkat moderat dibandingkan triwulan I 2019 yang mencatatkan inflasi



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 3.21 Perbandingan Inflasi Kota Purwokerto dan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok

0,15% (yoy). Hal ini terutama disumbang oleh komoditas pangan utama beras, yang terus melanjutkan tren deflasi sepanjang triwulan laporan.

**Terbatasnya peningkatan inflasi tahunan Kota Purwokerto pada triwulan laporan juga didorong oleh perkembangan indeks harga kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau,** yang mengalami penurunan inflasi tahunan, berlawanan dengan tren peningkatannya yang berlangsung di tingkat provinsi. Tekanan inflasi tahunan pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau tercatat menurun dari sebesar 3,77% (yoy) pada triwulan I 2019 menjadi sebesar 2,01% (yoy) pada triwulan laporan.

### 3.4. TRACKING DAN PROYEKSI INFLASI

#### 3.4.1. Inflasi Juli 2019

**Inflasi bulanan Provinsi Jawa Tengah pada periode Juli 2019 menurun dibandingkan bulan Juni 2019.**

Provinsi Jawa Tengah mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,39% (mtm) pada periode Juli 2019, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi sebesar 0,60% (mtm). Tekanan harga pada Juli tahun ini juga terhitung lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi periode Juli dalam lima tahun terakhir yang tercatat sebesar 0,57% (mtm). Namun demikian penurunan inflasi bulanan tersebut relatif terbatas dibandingkan penurunan periode yang sama pada tahun 2018 lalu yang terpantau sebesar 0,10 (mtm) pada Juli 2018. Dengan perkembangan ini, inflasi tahunan Jawa Tengah tercatat sebesar 2,81% (yoy) pada bulan Juli 2019, meningkat dibandingkan bulan Juni 2019 yang tercatat sebesar 2,52% (yoy). Capaian tersebut juga relatif lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,32% (yoy).

**Kontributor utama peningkatan laju inflasi tahunan Jawa Tengah pada Juli 2019 adalah kelompok bahan makanan serta kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga.** Inflasi tahunan bahan makanan meningkat dari sebesar 3,30 % (yoy) pada bulan Juni 2019 menjadi sebesar 4,81% (yoy) pada bulan Juli 2019. Peningkatan inflasi pada kelompok bahan makanan terutama disebabkan akselerasi harga komoditas subkelompok bumbu-bumbuan serta subkelompok sayur-sayuran. Peningkatan harga yang signifikan dicatatkan oleh komoditas cabai merah dan cabai rawit yang mengalami penurunan pasokan produksi domestik akibat fenomena kemarau iklim El-Nino. Dengan perkembangan tersebut, inflasi kelompok bahan makanan berisiko meningkat tinggi sepanjang triwulan III 2019, hingga masa panen tanaman pangan dan hortikultura tiba pada bulan September 2019.

**Peningkatan inflasi tahunan juga terpantau pada kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga,** dengan mencatatkan inflasi sebesar 2,46% (yoy) pada Juli 2019, lebih tinggi dibandingkan bulan Juni 2019 yang tercatat 1,66 % (yoy). Peningkatan tekanan harga pada kelompok ini utamanya disumbang oleh subkelompok pendidikan yang mengalami peningkatan tarif pada periode tahun ajaran baru 2019-2020. Peningkatan tarif jasa-jasa pendidikan terpantau meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018 lalu, khususnya pada komoditas jasa perguruan tinggi, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah pertama.

#### 3.4.2. Inflasi Agustus 2019

**Tren penurunan inflasi bulanan Provinsi Jawa Tengah berlanjut pada bulan Agustus 2019.** Inflasi Agustus 2019 tercatat sebesar 0,33% (mtm), lebih rendah dibandingkan inflasi pada Juli 2019 yang

tercatat sebesar 0,39% (mtm). Penurunan tekanan inflasi pada Agustus 2019 yang terjadi pada Kelompok Bahan Makanan tersebut telah diperkirakan oleh Bank Indonesia. Dengan perkembangan ini, inflasi dari Januari hingga Agustus 2019 mencapai 2,38% (ytd), lebih rendah dibanding dengan inflasi nasional yang tercatat 2,48% (ytd).

**Penurunan tekanan inflasi di Jawa Tengah berlangsung pada beberapa kelompok kebutuhan barang dan jasa utama masyarakat, dengan andil penurunan terbesar dari kelompok bahan makanan yang mencatatkan inflasi sebesar 0,23% (mtm),** menurun signifikan dibanding inflasi Juli 2019 sebesar 1,21% (mtm). Selanjutnya, Kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau serta kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga juga turut menjadi kontributor utama penurunan tekanan inflasi. Sementara itu, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar justru mencatatkan peningkatan tekanan inflasi pada Agustus 2019.

**Kelompok bahan makanan menjadi pendorong utama penurunan tekanan inflasi di Jawa Tengah dengan penurunan yang signifikan.** Penurunan indeks harga pada kelompok ini terutama terjadi pada komoditas yang tergabung dalam subkelompok sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan. Penurunan inflasi yang terjadi pada subkelompok bumbu-bumbuan mengindasikan ekspektasi yang tetap terjaga meski produksi yang relatif terbatas akibat fenomena anomali iklim El-Nino. Di sisi lain, komoditas beras kembali mencatatkan inflasi pada Agustus 2019 ini yang disebabkan penurunan pasokan produksi sebelum masa panen raya berikutnya (September-Oktober 2019). Meskipun demikian, inflasi yang terjadi masih relatif terbatas dan tidak berdampak signifikan terhadap inflasi keseluruhan.

**Kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga juga mencatatkan penurunan tekanan inflasi, dari sebesar 0,84% (mtm) pada bulan lalu menjadi 0,73% (mtm) pada Agustus 2019.** Penurunan tekanan kelompok ini terjadi pada subkelompok pendidikan dimana proses administrasi tahun ajaran baru anak sekolah telah usai. Inflasi pada Agustus 2019 terutama terjadi pada komoditas jasa bimbingan belajar yang mengalami inflasi sebesar 2,28% (mtm). Kenaikan tersebut terjadi sejalan dengan tendensi para orang tua untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan anaknya melalui lembaga nonformal.

**Sementara itu, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar mengalami peningkatan tekanan inflasi** dari sebesar 0,08% (mtm) pada Juli 2019 lalu, menjadi 0,76% (mtm) pada Agustus 2019. Penyebab kenaikan inflasi pada kelompok tersebut adalah tarif air minum PAM (sejak kenaikan terakhir tahun 2009). Meningkatnya biaya operasional PDAM, mendorong penyesuaian tarif air minum PAM sehingga tercatat mengalami inflasi yang signifikan sebesar 19,24% (mtm). Selain itu, pada kelompok inflasi lainnya yaitu kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan, terdapat pula penyesuaian tarif parkir yang baru diberlakukan sejak Agustus 2019.

### 3.4.3. Tracking Inflasi Triwulan III 2019

Perkembangan inflasi bulanan Jawa Tengah menunjukkan penurunan sepanjang triwulan III 2019. Namun demikian, penurunan inflasi bulanan tersebut berlangsung lebih lambat dibandingkan perkiraan awal serta dibandingkan dengan tren historisnya selama 3 (tiga) tahun terakhir. **Dengan perkembangan tersebut, inflasi tahunan Jawa Tengah pada akhir triwulan III 2019 diperkirakan akan meningkat dibandingkan triwulan II 2019.** Peningkatan inflasi tahunan Jawa Tengah tersebut terutama didorong oleh

kelompok bahan makanan serta kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga.

**Inflasi tahunan kelompok bahan makanan Jawa Tengah pada triwulan III 2019 diperkirakan akan meningkat lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2019.** Kontributor utama peningkatan tekanan inflasi pada kelompok ini adalah subkelompok bumbu-bumbuan khususnya komoditas aneka cabai, yang mencatatkan persistensi inflasinya sejak Mei 2019 dengan intensitas dan durasi yang lebih besar dibandingkan rerata historisnya. Komoditas buah-buahan diperkirakan turut menyumbang peningkatan inflasi tahunan pada periode triwulan III 2019, dengan peningkatan harga yang relatif tinggi pada Mei-Juni 2019, didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat sepanjang periode hari raya keagamaan nasional.

**Selanjutnya, perkembangan terkini indeks harga konsumen pada kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga,** juga mencerminkan risiko capaian inflasi yang tinggi pada triwulan III 2019. Tekanan harga pada komoditas jasa-jasa pendidikan pada periode awal tahun ajaran baru 2019-2020, terpantau meningkat lebih tinggi dibandingkan rerata historis selama 3 (tiga) tahun terakhir. Komoditas jasa utama pendidikan formal pada seluruh strata, dari pendidikan Sekolah Dasar hingga pendidikan Sekolah Menengah Atas, mencatatkan peningkatan tarif pada periode tahun ajaran baru 2019-2020 yang jatuh di bulan Juli-Agustus 2019, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

### 3.5. PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

**Dalam rangka menjaga kestabilan harga dan pasokan bahan pangan strategis, TPID Provinsi Jawa Tengah** telah menyelenggarakan berbagai

kegiatan pada keseluruhan tahun 2019, antara lain sebagai berikut:

**1. Dalam rangka menjaga kestabilan harga dan pasokan bahan pangan strategis, TPID Provinsi Jawa Tengah** telah menyelenggarakan berbagai kegiatan sepanjang triwulan II 2019, yaitu:

#### a. Pandawa ke-1: Pemenuhan Ketersediaan Pasokan

- Pengawasan kecukupan BBM dan LPG bersubsidi untuk memastikan ketersediaan pasokan dengan harga yang wajar di sepanjang Ramadhan 2019.
- Inspeksi mendadak pada pasar tradisional dan gudang pasar tradisional untuk memastikan ketersediaan dan kelayakan pasokan bahan pokok makanan pada tanggal 20-23 Mei 2019.
- Forum komunikasi dengan petani cabai merah dan bawang merah tanggal 17 Mei 2019 untuk menggali informasi mengenai pasokan saat ini dan perkiraan ke depan, serta memetakan kendala di produksi yang harus segera ditangani.
- *Deep interview* dengan peternak ayam petelur dan pedagang yang akan dilakukan tanggal 17 Mei 2019 untuk menggali informasi mengenai pasokan saat ini dan perkiraan ke depan, serta memetakan kendala di produksi yang harus segera ditangani.

#### b. Pandawa ke-2: Pembentukan Harga Terjangkau

- Program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga oleh Bulog selama tahun 2019.
- Operasi Pasar komoditas strategis oleh Bulog dan Disperindah provinsi Jawa Tengah sepanjang bulan Juni-Juli 2019.
- Pasar Murah kerjasama BI Jateng dengan BMPD Jateng-Semarang tanggal 21 Mei 2019.

- Berbagai kegiatan Pasar Murah di seluruh Kabupaten/Kota se-Jateng selama Ramadhan 2019.
- Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

**c. Pandawa ke-3: Pendistribusian Pasokan yang Aman dan Lancar**

- Pengamanan distribusi bahan pokok dan barang strategis selama Ramadhan.
- Perluasan jaringan Toko Tani Indonesia, Toko Tani Indonesia Center dan Rumah Pangan Kita untuk menghadirkan pasokan bahan pangan strategis dengan harga terjangkau dengan memotong rantai distribusi dari petani ke konsumen akhir.

**d. Pandawa ke-4: Perluasan Akses Informasi**

- *Capacity Building* Sadar dan Kelola Inflasi melalui konsumsi yang tidak berlebihan kepada Ulama se-Kota Semarang tanggal 21 Mei 2019 dengan harapan agar para ulama dapat turut memberikan dakwah mengenai sadar dan kelola inflasi kepada masyarakat di Kota Semarang.
- Penyiaran Iklan Layanan Masyarakat “Bijak Belanja” dan Amanah Berdagang” di berbagai media sejak awal Ramadhan hingga H+7 Idul Fitri.
- *Talkshow* di berbagai media (TV dan radio) tanggal 15, 17, 21, 23 dan 28 Mei 2019.
- Optimalisasi pemanfaatan SIHATI Masyarakat.

**e. Pandawa ke-5: Protokol Manajemen Lonjakan Harga**

- Rapat Koordinasi Persiapan Ramadhan & Idul Fitri di tingkat Provinsi Jateng tanggal 10 Mei 2019.
- Berbagai Rapat Koordinasi Persiapan Ramadhan & Idul Fitri di tingkat Kabupaten/Kota se-Jateng sejak minggu I dan II Ramadhan 2019.
- Rapat Koordinasi Persiapan Ramadhan dengan lintas instansi – Sidak dan Rakor tanggal 21 Mei 2019.

- Optimalisasi Pemanfaatan SIHATI Mobile Application oleh para pejabat daerah
- Mendorong optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Ozon untuk memperpanjang masa simpan komoditas pangan dan hortikultura.





## **STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN, DAN UMKM**

**Seiring dengan kinerja perekonomian yang tumbuh meningkat pada triwulan laporan, stabilitas sistem keuangan Jawa Tengah terus terjaga.**

- Kinerja penyaluran kredit pada Lapangan Usaha (LU) utama Jawa Tengah menunjukkan kondisi beragam, sejalan dengan kontribusi LU dimaksud terhadap perekonomian. Kinerja penyaluran kredit masih menunjukkan pertumbuhan di LU pertanian, perdagangan, dan konstruksi. Sementara, penyaluran kredit di LU industri pengolahan mencatatkan kontraksi.
- Perbankan di Jawa Tengah secara umum masih mencatatkan pertumbuhan kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Ke depan, perbankan masih optimis akan peningkatan kinerja yang ditopang program pemerintah, pemanfaatan teknologi, dan kepastian perekonomian domestik.
- Pangsa penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Tengah konsisten terbesar terhadap tingkat nasional. Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan Jawa Tengah telah melebihi 40%, dengan kualitas kredit yang relatif terjaga. Awal Desember 2018, Jawa Tengah dikukuhkan sebagai pilot project nasional untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus peternakan rakyat.



## 4.1. PERKEMBANGAN STABILITAS KEUANGAN JAWA TENGAH

Stabilitas keuangan Jawa Tengah pada triwulan II 2019 terjaga, tercermin dari ketahanan dan kualitas kredit di sektor rumah tangga serta pertumbuhan penyaluran kredit di sektor utama perekonomian Jateng dan UMKM dengan kualitas kredit yang baik. Penyaluran kredit pada di LU perdagangan besar dan eceran, pertanian, dan konstruksi terus bertumbuh dan mendukung kontribusi LU dimaksud terhadap perekonomian Jawa Tengah. Sementara, penyaluran kredit pada LU industri pengolahan mencatatkan kontraksi. Hal ini ditengarai aktivitas korporasi yang relatif stabil karena faktor eksternal (eskalasi perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok). Selanjutnya, indikator kinerja korporasi seperti profitabilitas, likuiditas, dan struktur pembiayaan terpantau masih sehat.

Kontribusi permintaan RT yang meningkat pada triwulan laporan turut mendorong pembiayaan RT bertumbuh, meski tidak setinggi triwulan sebelumnya. Dari total kredit konsumsi yang disalurkan oleh perbankan, sebesar 30% disalurkan kepada RT untuk pembiayaan KPR, multiguna, dan KKB, dengan risiko masing-masing kredit terjaga di bawahbatas yang dipersyaratkan.

Berdasarkan lokasi proyek, kinerja penyaluran kredit perbankan di Jawa Tengah mencatatkan pertumbuhan yang lebih lambat (8,63%; yoy) dibandingkan triwulan lalu meski kinerja perekonomian relatif meningkat pada triwulan II 2019. Demikian pula berdasarkan lokasi bank, kinerja perbankan di Jawa Tengah triwulan II 2019 mencatatkan perlambatan pertumbuhan. Walaupun masih berada di bawah kisaran target Bank Indonesia, perbankan di Jawa Tengah masih optimis akan peningkatan kinerja ke depan, utamanya karena potensi penjualan dari program Indonesia Pintar, perluasan layanan berbasis teknologi, dan pola historis.

Berdasarkan aspek pengembangan akses keuangan dan UMKM, proporsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan Jawa Tengah telah mencapai 41,46%. Pangsa ini telah memenuhi ketentuan penyaluran kredit UMKM berdasarkan PBI No. 17/12/PBI/2015, yang mewajibkan pangsa minimum di tahun 2018 adalah 20%. Selama 3 tahun terakhir, kualitas kredit UMKM relatif terjaga karena berada di bawah batas syarat NPL sebesar 5%. Salah satu kredit yang disalurkan kepada UMKM adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jawa Tengah merupakan provinsi dengan tingkat penyaluran KUR tertinggi secara nasional dan dikukuhkan menjadi proyek percontohan KUR untuk peternakan rakyat.

### 4.1.1. Ketahanan Lapangan Usaha Jawa Tengah Triwulan II 2019

#### 4.1.1.1. Perkembangan Indikator Perbankan pada Lapangan Usaha Utama Jawa Tengah Triwulan II 2019

**Meski perekonomian tumbuh meningkat pada triwulan II 2019, penyaluran kredit perbankan di Jawa Tengah mengalami perlambatan dibandingkan triwulan I 2019.** Penyaluran kredit di Jawa Tengah<sup>5</sup> mencapai Rp 335,6 triliun, atau bertumbuh 8,63% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya (11,68%; yoy) dengan dominasi penyaluran ke lapangan usaha (LU) utama Jawa Tengah yaitu sektor perdagangan besar dan eceran (pangsa 29,1%); sektor industri pengolahan (pangsa 21,2%) dan sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (pangsa 3,0%). Komitmen perbankan untuk menyalurkan kredit secara berkualitas direfleksikan oleh nilai NPL yang relatif rendah di kisaran 2%-3% dalam 3 tahun terakhir. NPL pada triwulan laporan tercatat 2,41%, sedikit lebih rendah dari triwulan lalu (2,44%).

5. Indikator kinerja perbankan ditinjau berdasarkan lokasi proyek di Provinsi Jawa Tengah.

**Peningkatan kinerja perekonomian Jawa Tengah pada triwulan II 2019 didorong oleh akselerasi kinerja LU pertanian, kehutanan, dan perikanan. Seiring dengan hal tersebut, penyaluran kredit pada LU ini tumbuh tinggi (21,74%; yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya (9,42% ; yoy).** Hal ini sejalan dengan kebutuhan pembiayaan seiring dengan mundurnya masa panen raya, misal untuk komoditas padi, yang biasanya berakhir pada triwulan I 2019 menjadi hingga April (triwulan II) 2019. NPL kredit pada LU ini terjaga di level 1,77%.

**Sejalan dengan arah perekonomian LU perdagangan besar dan eceran yang tumbuh melambat pada triwulan laporan, kinerja kredit sektor dimaksud juga tumbuh lebih lambat, yaitu 10,30% (yoy) pada triwulan laporan, dibandingkan tumbuh 12,95% (yoy) pada triwulan sebelumnya.** Perlambatan penyaluran kredit juga diikuti dengan pemburukan kualitas kredit dengan capaian NPL

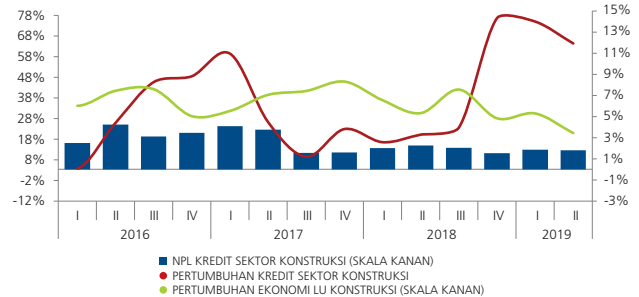
sebesar 4,06%. **Sementara, kredit sektor industri pengolahan mencatatkan kontraksi 1,04% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,77% (yoy).** Kontraksi ini ditengarai berkurangnya hari kerja efektif seiring dengan libur cuti bersama Lebaran yang mempengaruhi aktivitas produksi dan jasa logistik. Selain itu, permintaan ekspor luar negeri masih terbatas akibat pengaruh kondisi perekonomian global (perlambatan *World Trade Volume* seiring perkiraan melandainya pertumbuhan ekonomi global dan eskalasi perang dagang AS-Tiongkok).

**Sektor konstruksi masih mencatatkan pertumbuhan kredit yang tinggi, meski tidak setinggi triwulan lalu.** Penyaluran kredit ke sektor konstruksi konsisten tinggi dari tumbuh 76,63% (yoy) pada triwulan I 2019, hingga tumbuh 64,39% (yoy) di triwulan laporan. Hal ini terindikasi untuk memenuhi kebutuhan pembayaran vendor pasca penyelesaian



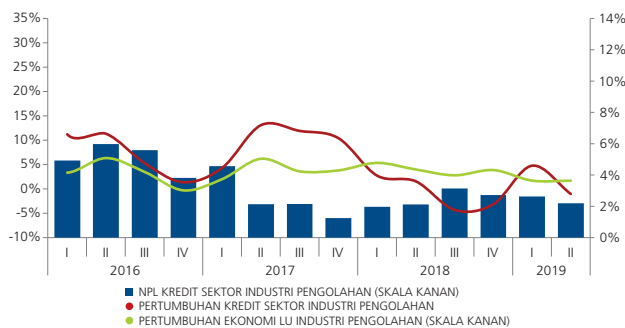
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Sektor Pertanian**



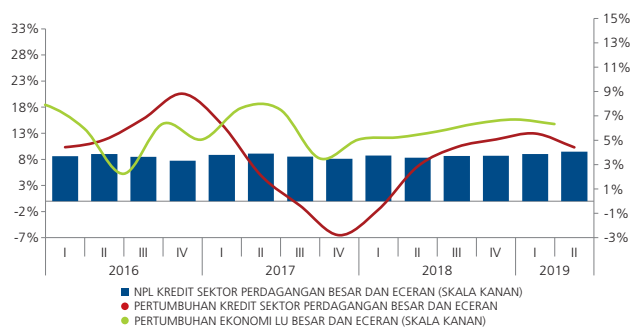
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Sektor Konstruksi**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, dan Risiko Sektor Industri Pengolahan**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kredit, serta Risiko Sektor Perdagangan Besar dan Eceran**

proyek infrastruktur di Jawa Tengah pada triwulan I 2019, antara lain Tol Trans Jawa, pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang, dan Bendungan Logung. Ke depan, kinerja penyaluran kredit pada LU ini diperkirakan masih tinggi, mengingat masih ada kebutuhan pembiayaan untuk proyek investasi *multi years* yang masih berjalan di tahun 2019, seperti proyek pembangkit listrik di Batang dan Jepara, pembangunan Bandara Wirasaba/Jenderal Soedirman, percepatan pembangunan terminal baru dan jalur Kereta Api di Bandara Adi Soemarmo, KRL Solo-Yogyakarta, dan berbagai proyek investasi swasta.

#### 4.1.2. Ketahanan Sektor Korporasi Jawa Tengah Pada Triwulan II 2019

Meningkatnya permintaan domestik, khususnya untuk memenuhi permintaan dalam rangka hari Ramadhan dan Idulfitri, menjadi salah satu pendorong kinerja korporasi pada triwulan laporan. Indikator *Prompt Manufacturing Index* (PMI) dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia juga mengindikasikan kapasitas usaha sektor industri pengolahan pada triwulan II 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar 58,51%; dari realisasi PMI triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 49,93%. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh pulihnya volume produksi, volume total pesanan, dan volume persediaan barang jadi.

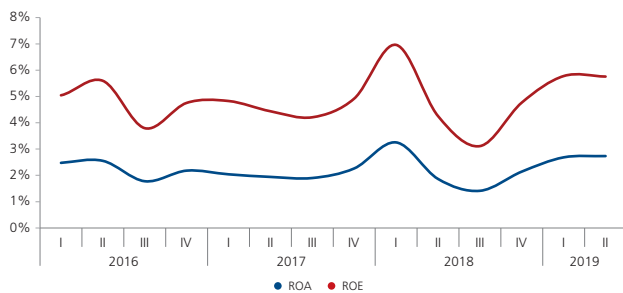
Sementara itu, masih berlanjutnya ketegangan ekonomi global dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi salah satu hal yang mempengaruhi kinerja sektor korporasi, khususnya dalam kegiatan ekspor-impor. Permintaan ekspor luar negeri yang melambat seiring dengan perlambatan World Trade Volume (WTV), serta semakin tingginya persaingan khususnya dengan produk Tiongkok, menjadi salah satu tantangan untuk meningkatkan kinerja korporasi. Hal ini sejalan dengan

penurunan kinerja ekspor barang nonmigas terhadap perekonomian Jawa Tengah pada triwulan laporan.

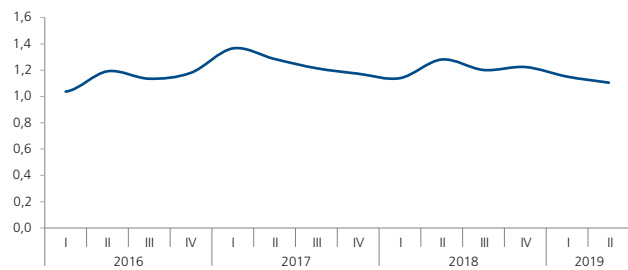
Kedua hal tersebut di atas berdampak pada kinerja penjualan dan profitabilitas yang relatif stabil, tercermin dari nilai *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). ROA korporasi tercatat 2,73% dari 2,69% pada triwulan lalu; sementara ROE tercatat 5,76% dari 5,78% pada triwulan lalu. Hal ini juga mengonfirmasi kontribusi LU industri pengolahan yang stabil terhadap perekonomian pada triwulan laporan.

Ke depan, tantangan dalam peningkatan kinerja korporasi adalah pergerakan harga komoditas bahan baku untuk industri dengan konten impor tinggi seperti tekstil dan produk tekstil dan barang kayu. Hasil *liaison* Bank Indonesia menunjukkan bahwa daya saing industri dipengaruhi berbagai faktor, seperti teknologi pesaing yang lebih inovatif dan efisien, kesulitan mencari tenaga kerja yang memiliki *skill* yang sesuai, hingga faktor regulasi.

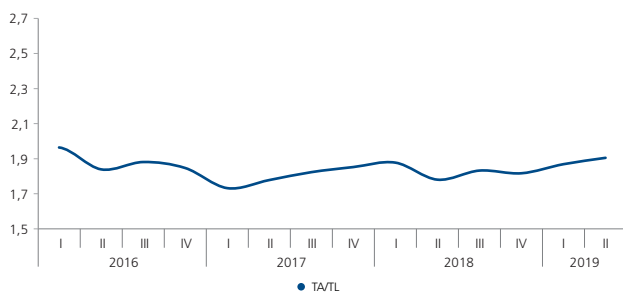
Selain itu, indikator yang perlu diperhatikan di korporasi adalah struktur pembiayaan korporasi (termasuk utang luar negeri). Rasio yang menunjukkan struktur pembiayaan korporasi, *Debt Equity Ratio* (DER), relatif stabil di 1,11 dibandingkan 1,15 pada triwulan lalu. Rasio ini mengindikasikan peran utang dan ekuitas dalam pembiayaan relatif seimbang. Adapun, risiko yang harus diwaspadai adalah ketidaksesuaian nilai tukar yaitu perbedaan nilai tukar antara pembiayaan (pembayaran pokok utang dan bunga) dengan penerimaan (hasil penjualan). Risiko ini dapat dimitigasi dengan kepatuhan dalam melaksanakan kegiatan lindung nilai (*hedging*) dan peningkatan daya tahan korporasi yang tercermin antara lain dari rasio likuiditas dan solvabilitas. Dalam triwulan laporan, *current ratio dan total assets/ total liabilities* terpantau stabil di 8,99 dan 1,90 yang



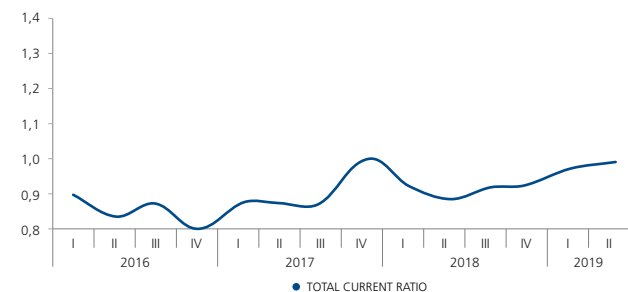
Sumber: LK korporasi dan Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.5 Perkembangan ROA, ROE Korporasi Jawa Tengah**

Sumber: LK korporasi dan Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.6 Perkembangan Debt to Equity Ratio Korporasi Jawa Tengah**

Sumber: LK korporasi dan Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.7 Perkembangan TA/TL Korporasi Jawa Tengah**

Sumber: LK korporasi dan Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.8 Perkembangan Current Ratio Korporasi Jawa Tengah**

mengindikasikan likuiditas perusahaan cukup sehat, khususnya untuk membayar kewajiban dalam jangka pendek.

### 4.1.3. Kerentanan Sektor Rumah Tangga Pada Triwulan II 2019

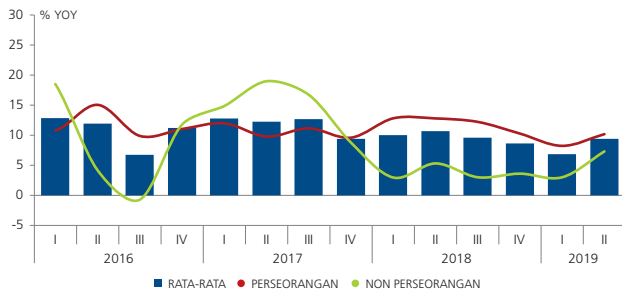
#### 4.1.3.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga

Rumah Tangga (RT) memegang peranan besar terhadap perekonomian dan sistem keuangan Jawa Tengah. Konsumsi RT menyumbang 60% dari total PDRB di Jawa Tengah. Ditinjau dari sisi perbankan, DPK RT menyumbang 73,5% dari total DPK; sementara kredit konsumsi RT menyumbang 29,11% dari total kredit yang disalurkan oleh perbankan di Jawa Tengah. Berdasarkan DPK, komposisi tabungan masih mendominasi (64,75% dari total DPK). Analisis lebih dalam mengindikasikan bahwa sekitar 0,02% deposit besar (dengan tabungan >Rp1M) menguasai 16,76% dari total DPK. Walaupun dalam beberapa triwulan ke belakang, tidak terlihat perubahan signifikan dari struktur kepemilikan tabungan, perbankan perlu

mewaspada dan terus memperluas basis depositnya. Sementara, kredit konsumsi masih menunjukkan pertumbuhan meski melambat menjadi sebesar 5,64% (yoy) dengan NPL yang terjaga pada 1,23%. Kredit konsumsi mayoritas masih disalurkan berupa kredit multiguna (pangsa 26,28%; NPL 1,91%); KPR (pangsa 25,31%; NPL 2,22%); dan kredit kendaraan bermotor (pangsa 12,23%; NPL 1,45%).

#### 4.1.3.2. Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga/ Perseorangan (DPK RT) di Perbankan

Dana Pihak Ketiga (DPK) di Jawa Tengah yang berhasil dihimpun pada triwulan II 2019 tercatat sebesar Rp305,8 Triliun, didominasi oleh DPK RT sebesar Rp224,7 Triliun (pangsa 73,5%). Pada triwulan laporan, DPK RT mengalami akselerasi pertumbuhan menjadi 10,18% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 8,23% (yoy). Hal ini sejalan dengan ekspektasi peningkatan perkiraan jumlah tabungan untuk periode triwulan II 2019 berdasarkan SK untuk masyarakat di Kota Semarang,

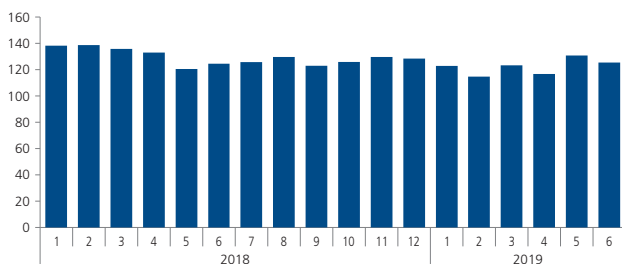


**Grafik 4.9 Perkembangan Pertumbuhan DPK, Perseorangan, dan Bukan Perseorangan Jawa Tengah**

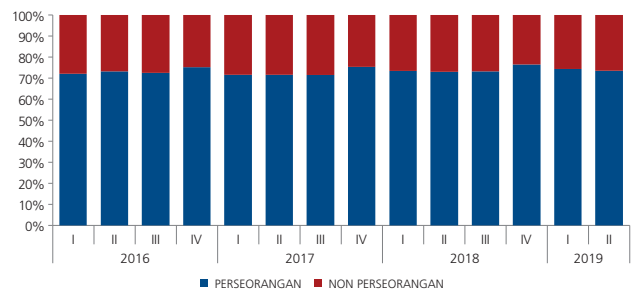
Solo, Purwokerto, dan Tegal. Perkiraan jumlah tabungan untuk periode triwulan II 2019 (Juni 2019) meningkat menjadi 125,4 atau lebih tinggi dibandingkan periode triwulan I 2019 (Maret 2019) yang sebesar 123,3.

**Komposisi DPK RT triwulan II 2019 masih didominasi oleh tabungan (64,75%), deposito (32,39%), dan giro (2,96%).** Pertumbuhan tabungan dan deposito tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu. Sedangkan, giro masih mencatatkan kontraksi, namun mengalami perbaikan dari triwulan lalu. Tingginya pangsa tabungan RT terhadap total DPK perbankan menunjukkan preferensi RT yang menginginkan likuiditas tinggi. Sementara itu, hal ini membuat perbankan terekspos risiko likuiditas, apabila terdapat penarikan dana RT sewaktu-waktu dalam jumlah besar.

Sejalan dengan pola historis, ditinjau berdasarkan kelompok nilai, ketergantungan perbankan Jawa



**Grafik 4.11 Perkembangan Ekspektasi Masyarakat terhadap Peningkatan Tabungan Berdasarkan Survei Konsumen**



**Grafik 4.10 Perkembangan Pangsa DPK, Perseorangan, dan Bukan Perseorangan Jawa Tengah**

Tengah terhadap deposito nilai besar perseorangan masih cukup tinggi. Tercatat pada triwulan II 2019, sebanyak 0,02% dari jumlah deposito perseorangan dengan nilai tabungan di atas Rp 1 Miliar menguasai 16,76% dari nilai keseluruhan tabungan perseorangan di Jawa Tengah.

**Tabel 4.1 Pengelompokan Tabungan Perseorangan Berdasarkan Nilainya**

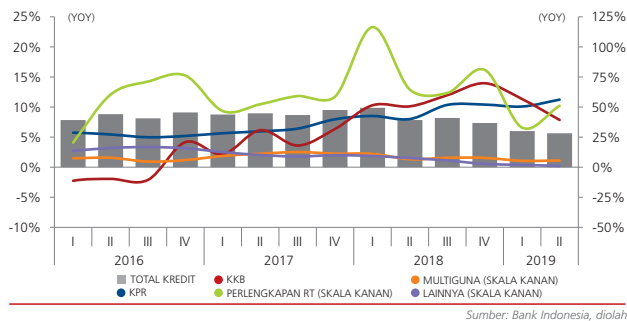
PENGELOMPOKAN TABUNGAN (RP)	PANGSA NOMINAL	PANGSA DEPOSAN
0-100 JUTA	48,28%	99,31%
100-500 JUTA	28,44%	0,62%
500 JUTA - 1M	6,51%	0,04%
>1M	16,76%	0,02%

Sumber: Bank Indonesia, diolah

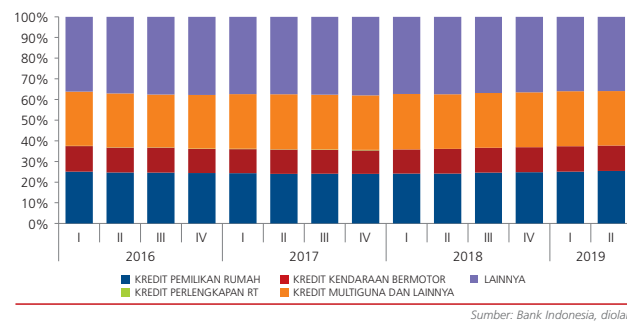
### 4.1.3.3. Kredit Perseorangan di Perbankan

**Walaupun pertumbuhan konsumsi RT pada PDRB Jawa Tengah mengalami peningkatan pada triwulan laporan (5,16%; yoy), penyaluran kredit Rumah Tangga (RT) pada triwulan laporan masih mencatatkan perlambatan pertumbuhan.** Pertumbuhan kredit RT pada triwulan II 2019 tercatat sebesar 5,64% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (6,00%; yoy).

**Kredit RT sebagian besar digunakan untuk membiayai multiguna, KPR, dan kredit kendaraan bermotor.** Berdasarkan andilnya, pertumbuhan kredit RT pada triwulan II 2019 ditopang oleh kelompok KPR dan multiguna. Dengan pangsa sebesar 25,31% serta pertumbuhan sebesar 11,24% (yoy) pada triwulan II 2019, KPR menjadi kontributor utama pertumbuhan kredit RT. Selanjutnya, kredit multiguna mendorong



Grafik 4.12 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah



Grafik 4.13 Perkembangan Pangsa Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah

Tabel 4.2 Perkembangan Rasio Non-Performing Loan Kredit Rumah Tangga Jawa Tengah

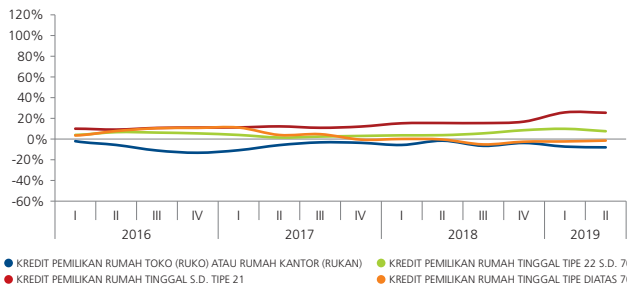
KATEGORI	2017				2018				2019	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
<b>KREDIT RUMAH TANGGA</b>	1,17%	1,21%	1,26%	1,09%	1,23%	1,26%	1,22%	1,06%	1,16%	1,23%
PEMILIKAN RUMAH TINGGAL S.D. TIPE 21	2,68%	2,80%	2,90%	2,64%	2,69%	3,02%	3,18%	2,78%	2,98%	3,59%
PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE 22 S.D. 70	1,70%	1,84%	1,80%	1,37%	1,46%	1,54%	1,51%	1,24%	1,37%	1,38%
PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 70	2,97%	3,05%	3,36%	2,89%	3,58%	2,76%	2,78%	2,53%	2,78%	2,68%
PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN S.D. TIPE 21	1,63%	4,25%	3,43%	9,56%	8,45%	8,81%	37,08%	17,78%	2,08%	0,70%
PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN TIPE 22 S.D. 70	2,43%	2,45%	2,87%	2,01%	1,89%	1,91%	1,89%	1,63%	2,13%	2,05%
PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN TIPE DIATAS 70	3,37%	3,36%	3,60%	2,23%	2,09%	1,81%	2,29%	0,82%	0,45%	1,65%
PEMILIKAN RUMAH TOKO (RUKO) ATAU RUMAH KANTOR (RUKAN)	4,59%	4,19%	3,36%	2,75%	3,17%	3,54%	3,48%	3,54%	3,44%	5,20%
PEMILIKAN MOBIL RODA EMPAT	0,75%	0,83%	1,13%	1,02%	0,98%	1,31%	1,25%	0,95%	1,17%	1,23%
PEMILIKAN SEPEDA BERMOTOR	1,92%	2,02%	1,73%	1,58%	1,86%	1,82%	1,75%	1,47%	1,43%	1,78%
PEMILIKAN TRUK DAN KENDARAAN RODA ENAM ATAU LEBIH	1,30%	1,36%	1,77%	2,55%	1,19%	2,65%	2,72%	1,48%	1,90%	3,57%
PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA	0,37%	1,71%	3,94%	2,54%	1,04%	1,26%	2,16%	2,57%	3,49%	3,32%
PEMILIKAN FURNITUR DAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1,09%	1,24%	0,84%	0,42%	0,28%	0,31%	0,50%	1,03%	1,21%	1,30%
PEMILIKAN TELEVISI, RADIO, DAN ALAT ELEKTRONIK	0,95%	1,79%	2,10%	1,46%	1,83%	1,96%	2,52%	2,57%	1,88%	1,92%
PEMILIKAN KOMPUTER DAN ALAT KOMUNIKASI	4,29%	2,97%	8,29%	3,45%	2,71%	4,39%	7,49%	7,26%	5,50%	4,05%
PEMILIKAN PERALATAN LAINNYA	0,85%	0,60%	0,68%	0,70%	0,50%	0,75%	0,98%	0,82%	0,61%	1,12%
KEPERLUAN MULTIGUNA	1,02%	1,03%	1,09%	1,01%	1,15%	1,20%	1,12%	0,96%	1,04%	1,03%
KEPERLUAN LAINNYA	0,51%	0,57%	0,57%	0,52%	0,61%	0,67%	0,59%	0,56%	0,60%	0,68%

Sumber: Bank Indonesia, diolah

peningkatan yang lebih tinggi pada kredit RT, dengan pangsa sebesar 26,28% dan pertumbuhan sebesar 5,56% (yoy). Adapun NPL pada KPR dan multiguna relatif rendah, masing-masing sebesar 2,22% dan 1,91%.

**Risiko kerentanan RT terpantau masih stabil rendah** dengan rasio NPL 1,23% pada triwulan laporan. Ditilik lebih lanjut berdasarkan jenis kredit, NPL tertinggi dicatatkan oleh kredit pemilikan rumah toko atau rumah kantor (NPL 5,20%) dan kredit pemilikan komputer dan alat komunikasi (NPL 4,05%). Namun, tingginya NPL pada komponen ini tidak signifikan mempengaruhi NPL secara keseluruhan karena pangasanya yang kecil, yaitu masing-masing sebesar 1,12% dan 0,11% dari total kredit konsumsi.

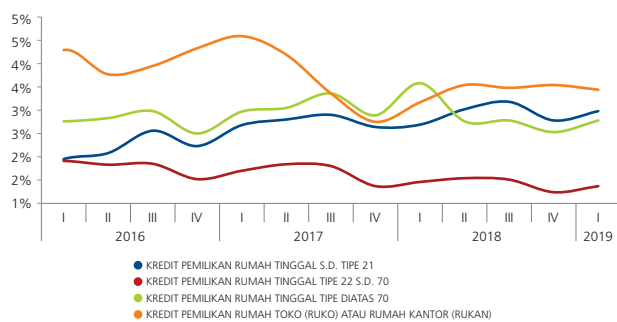
**Pada triwulan II 2019, kredit pemilikan rumah (KPR) tumbuh sebesar 11,24% (yoy)**, meningkat dibandingkan triwulan lalu (10,09%; yoy). Kontribusi pertumbuhan KPR utamanya disumbang oleh tipe rumah tinggal 22 sampai dengan 70 yang bertumbuh sebesar 25,41% (yoy) dengan pangsa 58,46%. Rumah tinggal tipe di atas 70 dengan pangsa 25,32%, masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,57% (yoy) walaupun tidak setinggi triwulan lalu. Sementara penyaluran kredit pada rumah tinggal sampai dengan tipe 21 masih melanjutkan tren kontraksi meski tidak sedalam triwulan sebelumnya. Kredit untuk rumah tipe ini terkontraksi sebesar 8,01% (yoy). Hal ini ditengarai akibat implementasi penetapan daftar harga maksimal rumah sejahtera tapak yang dapat dibeli dengan memanfaatkan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR)



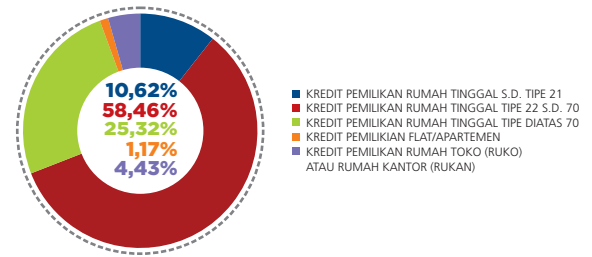
**Grafik 4.14 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah**

bersubsidi dari pemerintah yang baru dilakukan pada tanggal 18 Juni 2019. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 535 Tahun 2019 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak yang Diperoleh Melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi. Namun demikian masih bertumbuhnya pembiayaan KPR tersebut sejalan dengan hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) yang menunjukkan adanya peningkatan permintaan untuk properti residensial.

**Pada triwulan laporan, kredit kendaraan bermotor (KKB) bertumbuh sebesar 7,85% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan lalu (11,33%; yoy).** Penyaluran KKB mayoritas ditujukan untuk membiayai kepemilikan mobil roda empat (70,55%) dan sepeda bermotor (26,35%). Oleh sebab itu, perlambatan pertumbuhan kredit untuk mobil roda empat dari 8,59% (yoy) pada triwulan lalu menjadi 3,30% (yoy) pada triwulan laporan serta dan perlambatan kredit sepeda bermotor dari 17,10% (yoy)



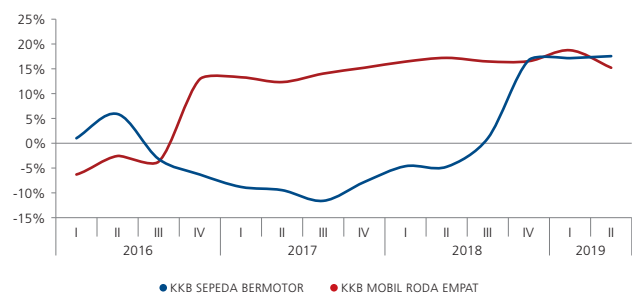
**Grafik 4.16 Perkembangan NPL Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah**



**Grafik 4.15 Pangsa Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah**

pada triwulan lalu menjadi 16,64% (yoy) pada triwulan laporan, menjadi penahan KKB untuk tumbuh lebih tinggi. Pertumbuhan KKB untuk kepemilikan kendaraan roda dua baru terjadi pada 1 tahun terakhir, setelah mengalami kontraksi sejak tahun 2014. Selain mempertimbangkan *base effect*, pertumbuhan kredit KKB terindikasi disebabkan semakin tingginya tingkat persaingan antara pelaku usaha pembiayaan alternatif dengan perbankan yang memiliki *multifinance*. Hasil liaison dengan salah satu pelaku usaha mengemukakan bahwa industri *multifinance* masih mengandalkan dana dari bank. Meski dampaknya belum terlihat, implementasi kebijakan OJK untuk melonggarkan uang muka hingga 0% untuk kendaraan disambut baik oleh perbankan dan diharapkan dapat mengakselerasi perkembangan KKB.

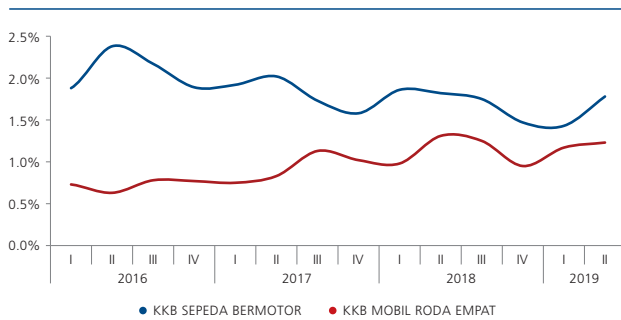
Sementara itu, kredit kepemilikan truk dan kendaraan bermotor roda enam atau lebih mencatatkan akselerasi pertumbuhan hingga 71,04% (yoy) pada triwulan ini. Namun, mengingat secara nominal nilainya relatif kecil,



**Grafik 4.17 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah**

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sumber: DIPB Karwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah



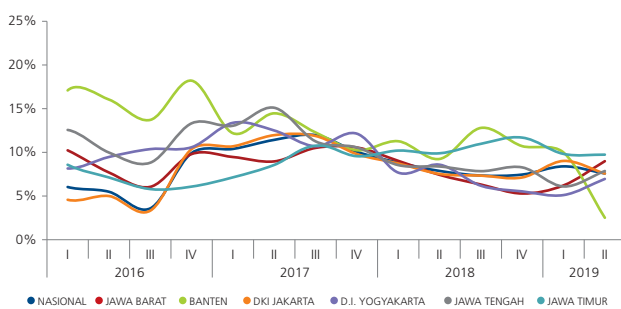
**Grafik 4.18 Perkembangan NPL Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah**

kinerja kredit ini tidak berdampak signifikan terhadap kinerja KKB perbankan di Jawa Tengah.

**Secara agregat, kualitas kredit kendaraan bermotor (KKB) pada triwulan II 2019 masih terjaga dengan NPL 1,45%.** Kualitas KKB yang cukup baik ini disumbang oleh NPL kredit kepemilikan mobil roda empat dan sepeda bermotor yang cukup rendah, masing-masing 1,23% dan 1,78%.

#### 4.2. KONDISI UMUM PERBANKAN<sup>6</sup> JAWA TENGAH

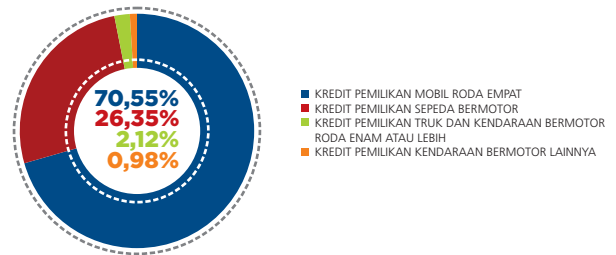
Pada triwulan II 2019, indikator perbankan di Jawa Tengah menunjukkan perkembangan yang beragam. Dibandingkan triwulan I 2019, pertumbuhan aset dan pertumbuhan DPK mencatatkan peningkatan pertumbuhan. Sementara, pertumbuhan kredit tercatat lebih rendah, walaupun disertai peningkatan kualitas kredit, sehingga *Loan to Deposit Ratio* (LDR) lebih rendah.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.20 Perkembangan Pertumbuhan Aset Perbankan di Pulau Jawa**

8. Indikator perbankan berdasarkan lokasi bank



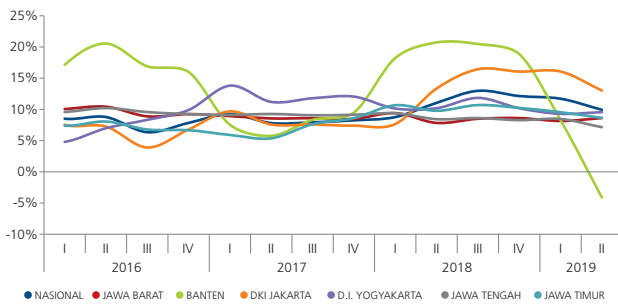
Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.19 Pangsa Kredit Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah**

**Aset perbankan Jawa Tengah tercatat sebesar Rp400,12 Triliun atau tumbuh sebesar 7,86% (yoy)** dan tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,09% (yoy). Adapun, pangsa aset perbankan Jawa Tengah terhadap nasional sebesar 3,91%. Secara spasial, peningkatan pertumbuhan aset Jawa Tengah merupakan yang kedua tertinggi setelah Jawa Barat. Sementara, nasional, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten mencatatkan perlambatan pertumbuhan aset.

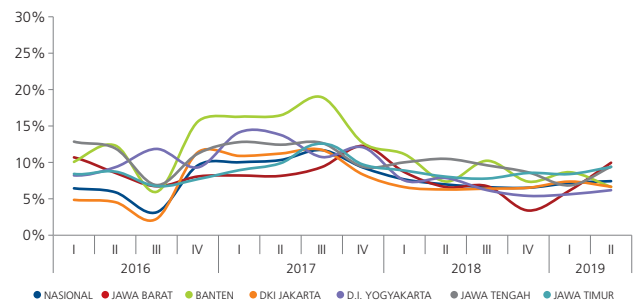
**Penyaluran kredit perbankan Jawa Tengah tercatat sebesar Rp287,54 Triliun (tumbuh 7,15%; yoy) atau melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,47% (yoy).** Secara spasial, tren perlambatan pertumbuhan kredit terjadi di seluruh provinsi Jawa, kecuali Jawa Barat. Secara historis, kinerja penyaluran kredit perbankan yang berlokasi di Jawa Tengah relatif stabil di kisaran 8%-9% dalam 2 (dua) tahun terakhir dan masih berada di bawah target penyaluran kredit yaitu sebesar 10%-12%. Dengan perkembangan tersebut, pangsa kredit perbankan Jawa Tengah terhadap nasional adalah sebesar 5,27%.

**Kinerja penghimpunan DPK perbankan Jawa Tengah pada triwulan II 2019 menunjukkan peningkatan pertumbuhan yang cukup tinggi dari 6,84% (yoy) pada triwulan lalu menjadi 9,41% (yoy) pada triwulan laporan.** DPK tercatat sebesar



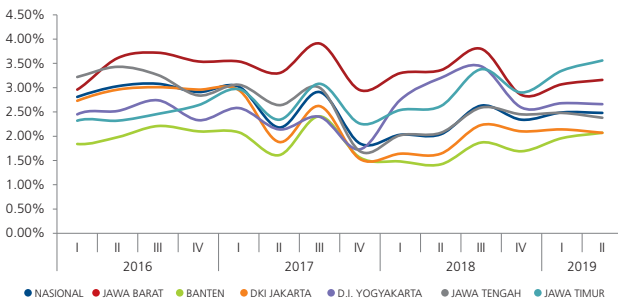
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.21 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Perbankan di Pulau Jawa



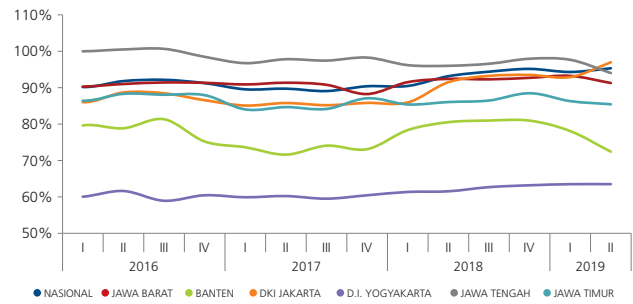
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.22 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankan di Jawa Tengah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.23 Perkembangan Rasio Non-Performing Loan (NPL) Kredit Perbankan Jawa Tengah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

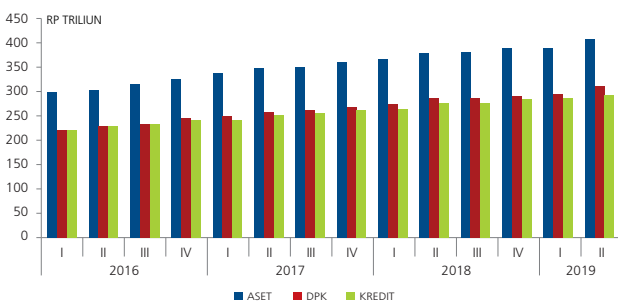
Grafik 4.24 Perkembangan Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) Perbankan Jawa Tengah

Rp 305,82 Triliun. Kinerja penghimpunan DPK yang relatif stabil di 9%-10% pada dua tahun terakhir antara lain disebabkan oleh pergeseran preferensi nasabah untuk menempatkan *idle fund* untuk kepentingan investasi. Hal ini semakin diperkuat dengan semakin banyaknya layanan berbasis teknologi untuk penempatan dan pengelolaan dana. Salah satu perbankan di Jawa Tengah berhasil meningkatkan kinerja penghimpunan DPK melalui pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi yang menyasar nasabah generasi milenial. Perbankan masih optimis dengan kinerja penghimpunan DPK, salah satunya melalui

program pemerintah Indonesia Pintar yang dianggap berpotensi meningkatkan tingkat penjualan ke depan, melalui penambahan jumlah rekening nasabah saat ini.

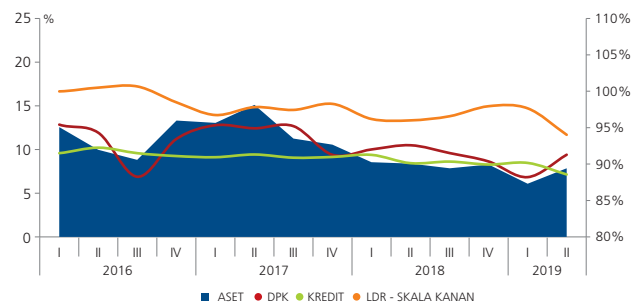
**Meski kinerja kredit yang mengalami perlambatan pertumbuhan, kualitas kredit perbankan Jawa Tengah semakin baik** dengan NPL 2,38% atau membaik dibandingkan triwulan lalu yang sebesar 2,48%.

Perlambatan pertumbuhan kredit yang dibarengi dengan peningkatan pertumbuhan DPK menyebabkan fungsi intermediasi perbankan yang dicerminkan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.25 Perkembangan Indikator Perbankan Jawa Tengah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.26 Perkembangan Pertumbuhan Indikator Perbankan Jawa Tengah

melalui LDR mengalami penurunan menjadi 94,02%. Hal ini sejalan dengan tren nasional dan regional Jawa yang masing-masing relatif tumbuh terbatas dan menurun.

#### 4.2.1. Perkembangan Bank Umum

##### 4.2.1.1. Perkembangan Jaringan Kantor Bank

**Jumlah jaringan kantor bank umum di Jawa Tengah pada triwulan II 2019 mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya.**

Pada triwulan laporan, jumlah kantor bank umum di Jawa Tengah tercatat sebesar 3.026 kantor atau meningkat dibanding triwulan I 2019 yang tercatat sebanyak 3.011 kantor. Belakangan, peningkatan jaringan kantor bank relatif terbatas didasari alasan efisiensi biaya operasional sekaligus mengoptimalkan agen Layanan Keuangan Digital (LKD). Peningkatan agen LKD bertujuan meningkatkan inklusi keuangan. Selain itu, pemberian layanan melalui aplikasi teknologi juga dapat menjadi salah satu potensi perluasan basis nasabah. Melalui berbagai fasilitas, diharapkan jumlah

masyarakat yang mengakses lembaga keuangan semakin meningkat. Namun, peningkatan jaringan kantor kas dan kantor cabang pembantu dianggap masih relevan, utamanya untuk meningkatkan ikatan dengan nasabah dan menjangkau nasabah yang belum melek teknologi dengan memberikan pelayanan tatap muka.

##### 4.2.1.2. Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

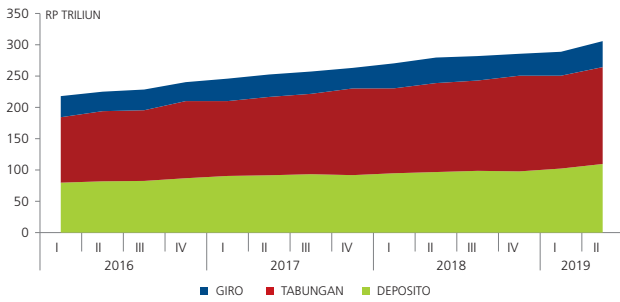
**Pertumbuhan DPK pada triwulan II 2019 menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya,** utamanya disebabkan oleh pertumbuhan pada komponen deposito (pangsa 35,82%), dan komponen giro (pangsa 13,59%) yang kembali mencatatkan pertumbuhan dari semula kontraksi pada triwulan lalu. Namun, perlambatan pertumbuhan pada komponen tabungan (pangsa terbesar DPK: 50,59%) menahan pertumbuhan DPK untuk meningkat lebih tinggi lagi.

**Tabel 4.3 Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan di Jawa Tengah**

KETERANGAN	2015	2016	2017	2018				2019	
				I	II	III	IV	I	II
<b>BANK KONVENSIONAL</b>									
JUMLAH BANK UMUM	54	55	52	52	53	53	53	53	52
JUMLAH BANK (KANTOR PUSAT)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>JUMLAH KANTOR BANK UMUM</b>	<b>3.143</b>	<b>3.133</b>	<b>3.000</b>	<b>2.988</b>	<b>3.067</b>	<b>3.054</b>	<b>3.034</b>	<b>3.011</b>	<b>3.026</b>
<b>JUMLAH KANTOR BANK UMUM MENURUT</b>									
<b>BANK PEMERINTAH</b>									
KANTOR PUSAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANTOR CABANG	77	86	89	89	89	89	89	89	89
KANTOR CABANG PEMBANTU <sup>9)</sup>	1.651	1.663	1.609	1.627	1.715	1.715	1.722	1.715	1.723
KANTOR KAS	209	221	232	243	239	239	226	222	228
<b>BANK PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>301</b>	<b>342</b>	<b>323</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>332</b>
KANTOR PUSAT	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KANTOR CABANG	41	45	45	43	43	43	43	43	43
KANTOR CABANG PEMBANTU	115	142	123	127	127	127	127	127	129
KANTOR KAS	144	154	154	156	156	156	156	156	159
<b>BANK SWASTA NASIONAL</b>	<b>895</b>	<b>811</b>	<b>737</b>	<b>692</b>	<b>687</b>	<b>674</b>	<b>660</b>	<b>648</b>	<b>646</b>
KANTOR PUSAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANTOR CABANG	145	140	145	146	146	147	146	136	145
KANTOR CABANG PEMBANTU	676	583	517	467	462	448	435	433	424
KANTOR KAS	74	88	75	79	79	79	79	79	77
<b>BANK ASING DAN BANK CAMPURAN</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>8</b>
KANTOR PUSAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANTOR CABANG	9	9	9	9	9	9	9	9	7
KANTOR CABANG PEMBANTU	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KANTOR KAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

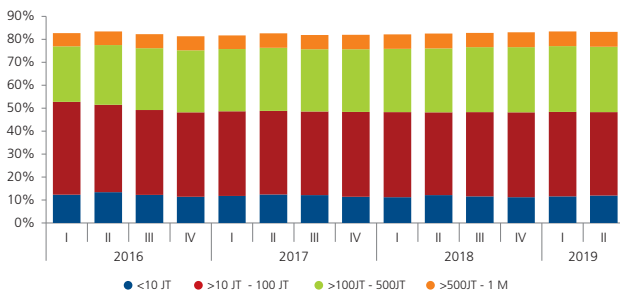
Sumber: Bank Indonesia, diolah

<sup>9)</sup>Termasuk BRI Unit



Sumber: Bank Indonesia, diolah

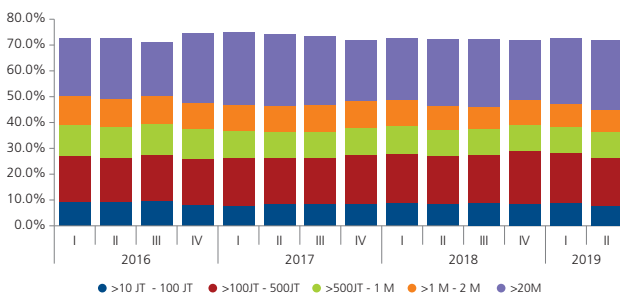
**Grafik 4.27 Perkembangan DPK Perbankan Umum Jawa Tengah**



Sumber: Bank Indonesia, diolah

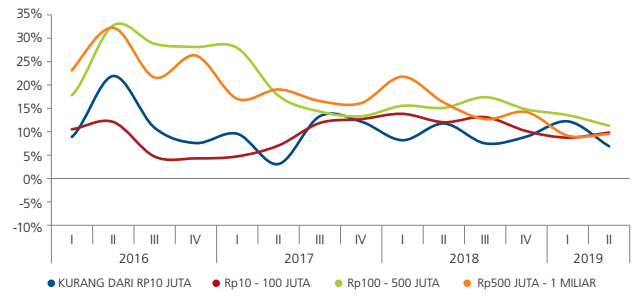
**Grafik 4.29 Perkembangan Pangsa Tabungan Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai**

Pada triwulan laporan, komponen tabungan tumbuh melambat sebesar 8,90% (yoy); dari 9,26% (yoy) pada triwulan I 2019. Komponen tabungan didominasi oleh pemilik nilai tabungan >Rp10-100 juta (pangsa 36,32%) dan pemilik nilai tabungan >Rp 100-500 juta (pangsa 28,44%). Pertumbuhan tabungan dengan nilai tabungan >Rp10-100 juta mencatatkan akselerasi pertumbuhan (9,82%; yoy), sementara tabungan dengan nilai tabungan >Rp100-500 juta mencatatkan perlambatan pertumbuhan (11,29%; yoy), sehingga menahan perkembangan komponen tabungan untuk meningkat lebih tinggi.



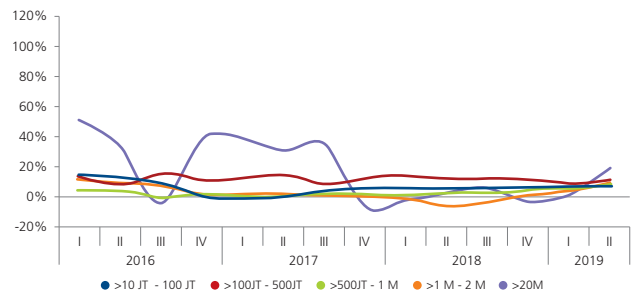
Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.31 Perkembangan Pangsa Deposito Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai**



Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.28 Perkembangan Pertumbuhan Tabungan Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai**

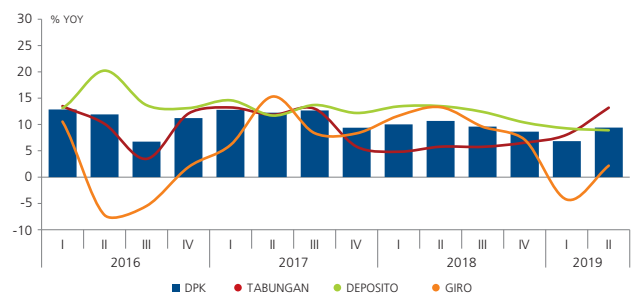


Sumber: D/JPB Karwil Jawa Tengah Kemenkeu, diolah

**Grafik 4.30 Perkembangan Pertumbuhan Deposito Perbankan di Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Nilai**

**Pertumbuhan deposito perbankan di Jawa Tengah pada triwulan II 2019 terpantau meningkat menjadi 11,29% (yoy) dari 8,06% (yoy) pada triwulan sebelumnya.** Komponen deposito didominasi oleh deposan dengan nilai deposito >Rp20M (pangsa 26,88%), deposan dengan nilai deposito >Rp 100-500 juta (pangsa 18,54%), dan deposan dengan nilai deposito >Rp2M-5M (pangsa 13,10%).

**Sementara, giro perbankan Jawa Tengah tumbuh terbatas sebesar 2,18% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 4,26% (yoy).** Hal



Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.32 Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankan Jawa Tengah**

Tabel 4.4 Pengelompokan DPK Berdasarkan Nilai

DPK	NOMINAL (RP MILIAR)	JUMLAH REKENING	PERSENTASE NOMINAL	PERSENTASE REKENING
0-100 JUTA	85.410	37.627.787	27,93%	98,97%
100-500 JUTA	69.193	336.605	22,63%	0,89%
500 JT - 1 M	22.457	30.041	7,34%	0,08%
>1 M	128.764	26.440	42,10%	0,07%
<b>TOTAL</b>	<b>305.824</b>	<b>38.020.873</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

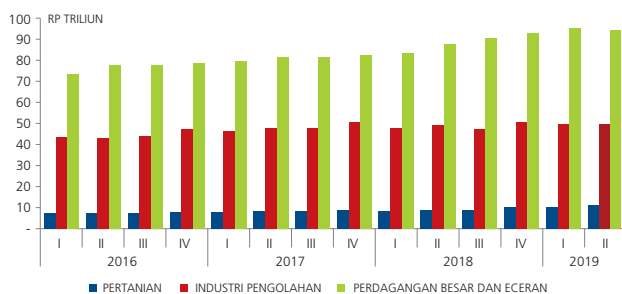
Sumber: Bank Indonesia, diolah

ini salah satunya ditengarai *base year effect*, di mana pertumbuhan giro cukup tinggi pada triwulan II 2018 (13,29%; yoy). Sejak triwulan I 2019, struktur pangsa giro mengalami sedikit pergeseran dibandingkan tahun lalu (triwulan IV 2018). Giro masih didominasi oleh deposito dengan nilai giro > Rp20M dan deposito dengan nilai giro > Rp2M-5M, namun pangasanya berubah dari masing-masing 29,1% dan 19,5% pada triwulan IV 2018 menjadi 44,0% dan 16,5% pada triwulan laporan.

**Ketergantungan perbankan Jawa Tengah terhadap deposito besar pada triwulan laporan masih cukup tinggi.** Dari hasil pengelompokan DPK berdasarkan nilai, terlihat bahwa rekening dengan nilai DPK di atas Rp 1 miliar hanya dimiliki oleh 0,07% penduduk di Jawa Tengah. Namun demikian, porsi kepemilikan tersebut memiliki pangsa sebesar 42,10% dari total DPK perbankan di Jawa Tengah.

#### 4.2.1.3. Penyaluran Kredit

**Kinerja kredit perbankan Jawa Tengah pada triwulan II 2019 masih mencatatkan pertumbuhan, walau melambat dibandingkan triwulan lalu.** Penyaluran kredit perbankan di Jawa



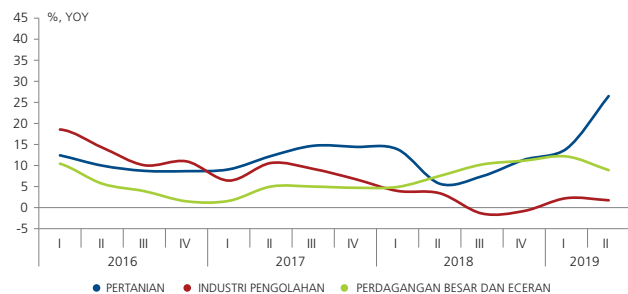
Grafik 4.33 Perkembangan Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Sektor

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Tengah pada triwulan II 2019 tercatat sebesar Rp287,54 Triliun atau tumbuh 7,15% (yoy), dibandingkan triwulan lalu yang tumbuh sebesar 8,47% (yoy).

Ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit perbankan Jawa Tengah masih fokus pada sektor ekonomi utama yaitu sektor perdagangan besar dan eceran dengan pangsa 32,74% dari total nilai kredit. Sektor utama lainnya yaitu industri pengolahan, memiliki pangsa kredit sebesar 17,18% diikuti oleh sektor pertanian yang memiliki pangsa 3,82%. Rasio penyaluran kredit pada sektor pertanian tersebut tergolong rendah dibandingkan dengan kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB Jawa Tengah pada triwulan II 2019. Hal ini menunjukkan pembiayaan pada lapangan usaha pertanian memiliki potensi untuk ditingkatkan.

**Apabila ditinjau berdasarkan penggunaan, penyaluran kredit perbankan Jawa Tengah pada triwulan II 2019 masih didominasi oleh kredit modal kerja dengan pangsa 53,88%.** Sementara itu, kredit konsumsi dan kredit investasi menempati urutan kedua dan ketiga dengan pangsa masing-masing sebesar 29,49% dan 16,63% dari total kredit perbankan Jawa Tengah. Oleh karena itu, perlambatan pertumbuhan kredit modal kerja (6,46%; yoy dari 9,54%; yoy pada triwulan lalu) menjadi salah satu penahan kinerja kredit untuk tumbuh tinggi. Sementara, kredit investasi dan kredit konsumsi mencatatkan pertumbuhan yang cukup tinggi, masing-masing menjadi 10,41% (yoy) dan 6,62% (yoy).



Grafik 4.34 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Perbankan Jawa Tengah Berdasarkan Sektor

Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Tabel 4.5 Pengelompokan Kredit Berdasarkan Nilai**

KREDIT	NOMINAL (RP MILIAR)	JUMLAH REKENING	PERSENTASE NOMINAL	PERSENTASE REKENING
0-100 JUTA	85.410	37.627.787	27,93%	98,97%
100-500 JUTA	69.193	336.605	22,63%	0,89%
500 JT - 1 M	22.457	30.041	7,34%	0,08%
>1 M	128.764	26.440	42,10%	0,07%
<b>TOTAL</b>	<b>305.824</b>	<b>38.020.873</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

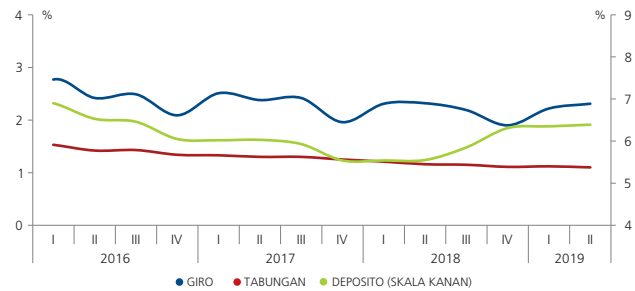
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Berdasarkan pengelompokan nilai, dapat terlihat bahwa persentase kredit di bawah Rp 500 juta memiliki pangsa sebesar 50,56% dari total kredit yang disalurkan di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa nominal penyaluran kredit skala kecil dan skala besar di Jawa Tengah relatif merata. Namun, ditinjau dari aspek sebaran jumlah debitur dan nominal kredit, penyaluran kredit di Jawa Tengah sebagian besar masih dikuasai oleh debitur dengan nominal kredit di atas Rp500 juta. Hal tersebut terlihat dari 1,03% debitur dengan realisasi kredit di atas Rp500 juta, memiliki pangsa nominal kredit hingga mencapai 49,44% dari keseluruhan nominal kredit Jawa Tengah. Berdasarkan data triwulan II 2019, mayoritas debitur kredit di atas Rp 1 Miliar merupakan golongan debitur sektor swasta non lembaga keuangan.

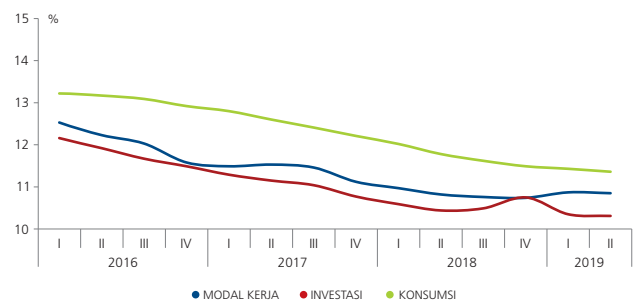
**4.2.1.4. Perkembangan Suku Bunga Bank Umum**  
**Pada triwulan II 2019, perkembangan suku bunga simpanan perbankan relatif meningkat.**

Suku bunga simpanan dalam bentuk giro dan deposito tercatat meningkat, masing-masing menjadi 2,31% dan 6,39%. Sementara, suku bunga tabungan tercatat relatif stabil pada 1,10%. Berdasarkan hasil FGD dengan perbankan di Jawa Tengah, perang suku bunga utamanya untuk dana mahal masih lazim terjadi, hal ini terjadi karena belum terdapat mekanisme yang mengatur *capping* suku bunga.

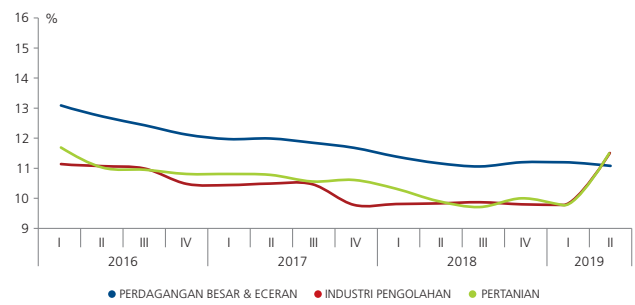
**Berbeda arah dengan suku bunga simpanan perbankan yang secara umum meningkat, suku bunga kredit pada triwulan II 2019 mencatatkan penurunan terbatas.** Suku bunga kredit modal kerja,



**Grafik 4.35 Perkembangan Suku Bunga Kredit Perbankan Jawa Tengah**  
Sumber: Bank Indonesia, diolah



**Grafik 4.36 Perkembangan Suku Bunga Kredit Perbankan Jawa Tengah**  
Sumber: Bank Indonesia, diolah

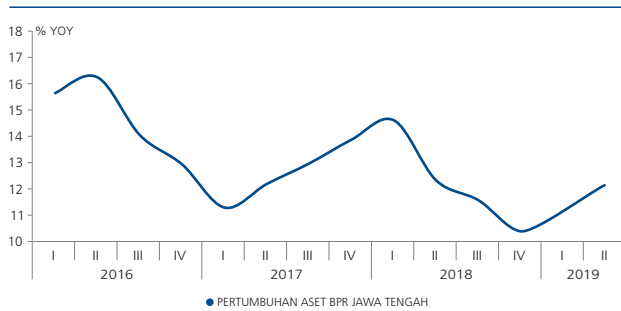


**Grafik 4.37 Perkembangan Suku Bunga Sektor Ekonomi Utama di Jawa Tengah**  
Sumber: Bank Indonesia, diolah

investasi, dan konsumsi masing-masing tercatat sebesar 10,85%; 10,31%; dan 11,36%.

Berdasarkan LU utama Jawa Tengah, penurunan suku bunga kredit hanya terjadi pada kredit LU perdagangan besar dan eceran yaitu dari 11,20% pada triwulan sebelumnya menjadi 11,08%. Sementara, suku bunga kredit LU pertanian dan industri pengolahan terpantau meningkat cukup signifikan, masing-masing menjadi 11,49% dan 11,52% dari semula 9,77% dan 9,78%.

### 4.3. PERKEMBANGAN KINERJA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PROVINSI JAWA TENGAH



Sumber: Bank Indonesia, diolah

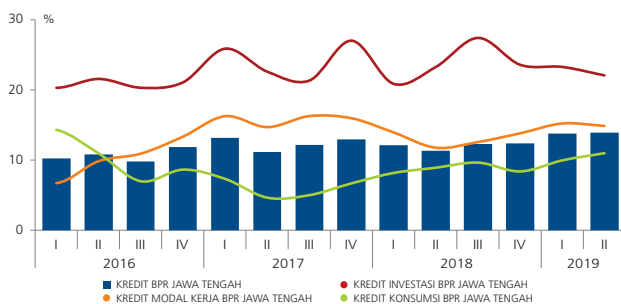
Grafik 4.38 Perkembangan Pertumbuhan Aset BPR di Jawa Tengah

Berbeda dengan kinerja perbankan secara umum, BPR di wilayah Provinsi Jawa Tengah mencatatkan peningkatan pertumbuhan di berbagai indikator kinerja, termasuk aset, DPK, dan kredit. Berdasarkan Laporan Profil Industri Perbankan yang dipublikasikan oleh OJK secara triwulanan, mayoritas (57%) aset BPR tersebar di Pulau Jawa (57%) dengan 23% diantaranya berada di Jawa Tengah. Pada triwulan laporan, aset BPR Jawa Tengah tercatat sebesar Rp 32,78 Triliun dan tumbuh 12,21% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu (11,14%; yoy).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.39 Perkembangan Pertumbuhan DPK BPR di Jawa Tengah

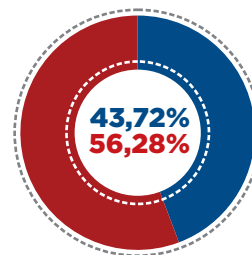


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.41 Perkembangan Pertumbuhan Kredit BPR di Jawa Tengah

DPK BPR Jawa Tengah tercatat Rp24,75 Triliun atau tumbuh 12,48% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu sebesar 11,82% (yoy). Berbeda dengan bank secara umum, DPK BPR didominasi oleh deposito (pangsa 55,74%), kemudian tabungan (pangsa 44,26%). Seluruh komponen DPK dimaksud mencatatkan pertumbuhan, meski pada komponen tabungan, pertumbuhannya tidak setinggi tahun lalu. Komponen deposito dan tabungan masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebesar 11,94% (yoy) dan 13,18% (yoy).

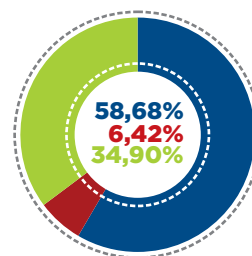
Sejalan dengan kinerja DPK, pertumbuhan kredit BPR Jawa Tengah pada triwulan II 2019 juga meningkat menjadi 13,91% (yoy), atau mencatatkan posisi Rp25,73 Triliun. Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit BPR Jawa Tengah pada triwulan II 2019 terutama ditopang oleh pertumbuhan kredit konsumsi (10,98%; yoy). Sementara, meski tidak setinggi triwulan lalu, kredit



■ PANGSA TABUNGAN BPR JAWA TENGAH  
■ PANGSA DEPOSITO BPR JAWA TENGAH

Sumber: Bank Indonesia, diolah

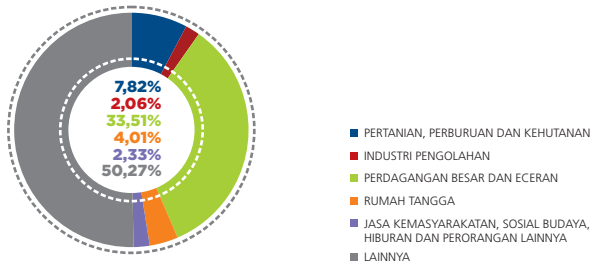
Grafik 4.40 Pangsa Dana Pihak Ketiga BPR di Jawa Tengah



■ KREDIT MODAL KERJA BPR JAWA TENGAH  
■ KREDIT INVESTASI BPR JAWA TENGAH  
■ KREDIT KONSUMSI BPR JAWA TENGAH

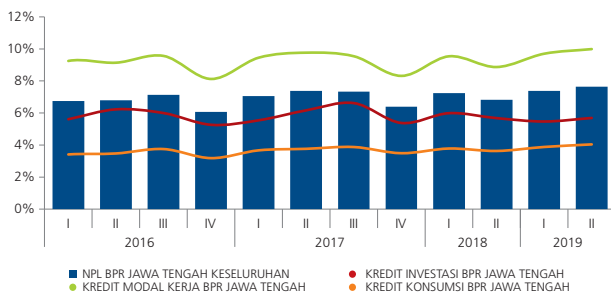
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.42 Pangsa Kredit BPR di Jawa Tengah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.43 Pangsa Penyaluran Kredit BPR di Jawa Tengah**



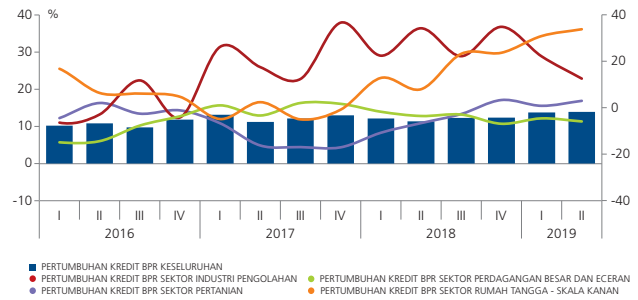
Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.45 Perkembangan NPL BPR di Jawa Tengah**

modal kerja dan kredit investasi juga mencatatkan pertumbuhan, masing-masing 14,86% (yoy) dan 22,07% (yoy).

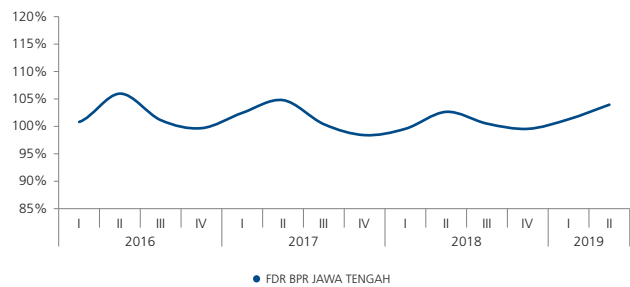
Tujuan penyaluran kredit BPR Jawa Tengah terkonsentrasi pada sektor perdagangan besar dan eceran (33,51%), kemudian merata dengan pangsa kecil ke berbagai sektor lain (50,27%), pertanian (7,82%), dan RT (4,01%). NPL sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor pertanian perlu menjadi perhatian karena relatif tinggi pada level 10,18% dan 9,77% pada triwulan laporan, sementara NPL RT sebesar 5,59%. Ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, pertumbuhan kredit terutama disumbang oleh sektor perdagangan besar dan eceran, rumah tangga, dan pertanian, dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 11,34% (yoy), 33,85% (yoy) dan 16,89% (yoy).

Kualitas kredit BPR di Jawa Tengah perlu terus diperhatikan karena NPLnya relatif tinggi mencapai 7,64%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Dengan perkembangan tersebut,



Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.44 Perkembangan Pertumbuhan Kredit BPR di Jawa Tengah**



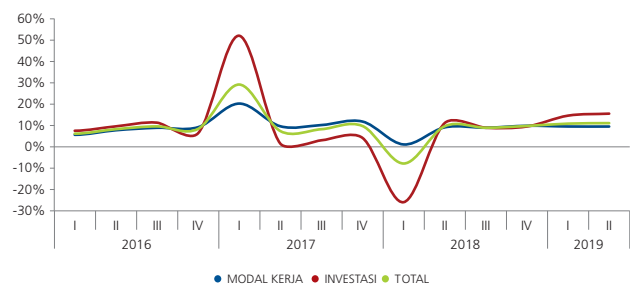
Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.46 Perkembangan Rasio FDR BPR Jawa Tengah**

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) BPR Jawa Tengah pada triwulan II 2019 tercatat sebesar 103,95%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 101,30%.

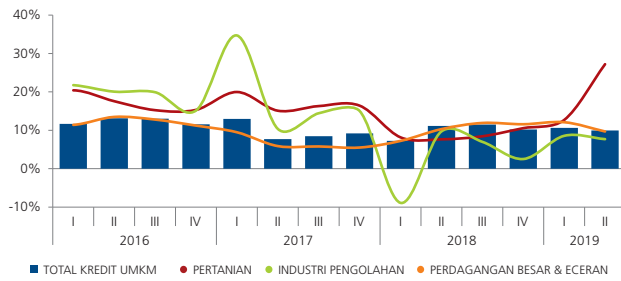
#### 4.4. PERKEMBANGAN KREDIT USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM)

**Upaya perbankan dalam peningkatan akses pembiayaan kepada UMKM di Jawa Tengah semakin baik. Pada triwulan laporan, sebesar 41,46% dari total kredit disalurkan kepada UMKM.** Meskipun demikian, pertumbuhan kredit UMKM di Provinsi Jawa Tengah pada triwulan II 2019



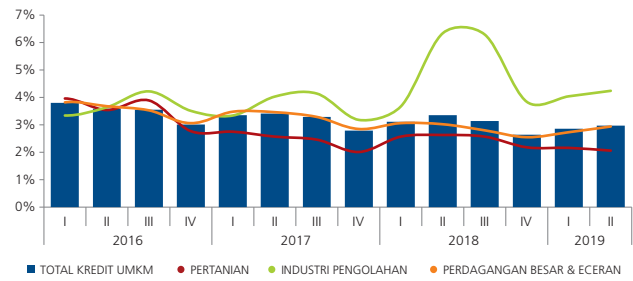
Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.47 Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM berdasarkan Tujuan**



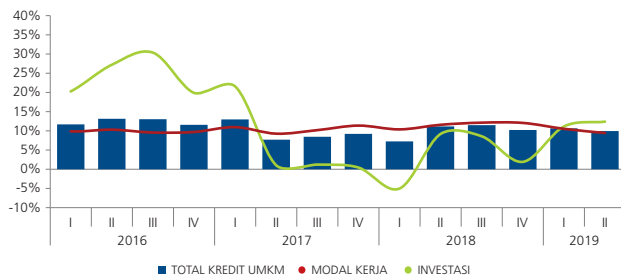
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.48 Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM di Jawa Tengah



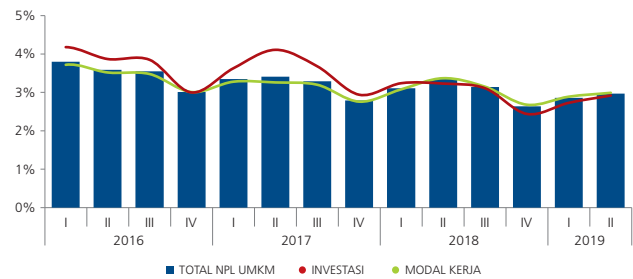
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.49 Perkembangan Rasio NPL Kredit UMKM di Jawa Tengah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.50 Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM Jawa Tengah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.51 Perkembangan Rasio NPL Kredit UMKM Jawa Tengah

tercatat sebesar 9,95% (yoy) atau menurun dibandingkan triwulan sebelumnya (10,64%; yoy). Jawa Tengah merupakan provinsi tertinggi dalam penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan data OJK, penyerapan KUR di Jateng selama 2018 tercatat sebesar Rp21,22 Triliun atau mencapai 17,63% dari total penyaluran KUR secara nasional yang mencapai Rp120,34 Triliun.

**Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan kredit UMKM Jawa Tengah ditopang oleh peningkatan pertumbuhan pada LU pertanian.** Selain itu, LU perdagangan besar dan eceran dan industri pengolahan juga masih mencatatkan pertumbuhan, meski tidak setinggi triwulan sebelumnya. Kredit UMKM sektor pertanian tercatat sebesar 22,22% (yoy); perdagangan besar dan eceran tumbuh 9,70% (yoy); dan industri pengolahan tercatat sebesar 7,70% (yoy). Penyaluran KUR Jawa Tengah terbesar saat ini masih didominasi sektor perdagangan besar. Ke depan, Pemerintah memprioritaskan

penyaluran KUR pada sektor pertanian, peternakan, dan kehutanan guna mendorong ketahanan pangan nasional. Salah satu wujud nyatanya adalah pengukuhan Jawa Tengah sebagai proyek percontohan peluncuran KUR Peternakan di Wonogiri, pada awal Desember 2018 yang lalu.

**Kualitas kredit UMKM pada triwulan II 2019 relatif stabil ditopang oleh kualitas kredit yang stabil di sektor utama.** Sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan besar masing-masing mencatatkan NPL sebesar 2,06%; 4,24%; dan 2,94%.



## **PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH**

**Perkembangan indikator sistem pembayaran di Jawa Tengah pada triwulan II 2019 meningkat, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.**

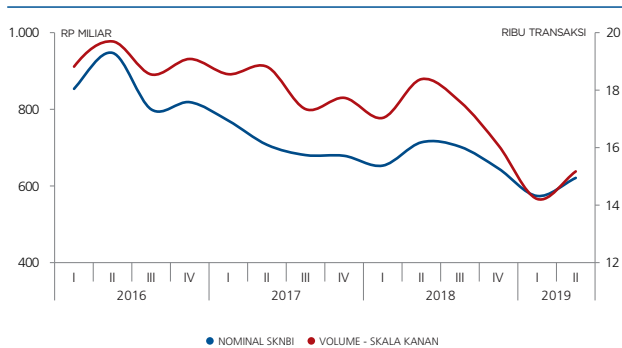
- Nilai transaksi SKNBI pada triwulan II 2019 tumbuh meski masih melanjutkan tren kontraksi. Transaksi SKNBI tercatat terkontraksi sebesar 0,66% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan pertumbuhan tahunan yang mengalami kontraksi sebesar 11,34% (yoy).
- Aliran uang di Jawa Tengah mencatatkan posisi net inflow sebesar Rp3,77 triliun seiring dengan kembali masuknya aliran uang ke perbankan setelah periode Lebaran.
- Penetrasi elektronifikasi pembayaran jalan tol selama periode Lebaran tetap terjaga di level 99%.



## 5.1. PERKEMBANGAN TRANSAKSI SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)

**Penyelesaian transaksi ritel di Jawa Tengah yang diproses melalui SKNBI pada triwulan II 2019 mengalami peningkatan, baik secara triwulanan maupun tahunan.** Nilai transaksi perputaran kliring pada triwulan II 2019 tercatat lebih rendah sebesar 0,66% (qtq) menjadi sebesar Rp34,78 triliun dari sebesar Rp35,01 triliun pada triwulan I 2019 yang mengalami kontraksi 13,90% (qtq). Dari sisi volume, perputaran kliring pada triwulan II laporan tercatat lebih rendah 2,01% (qtq) dibandingkan penyelesaian pada triwulan I 2019 sebesar 867.066 Data Keuangan Elektronik (DKE) yang mengalami kontraksi 14,38% (qtq). Pada triwulan II 2019, SKNBI memproses 849.659 DKE (2,48% pangsa volume kliring nasional), dengan nilai nominal mencapai Rp34,78triliun (3,96% pangsa nominal kliring nasional).

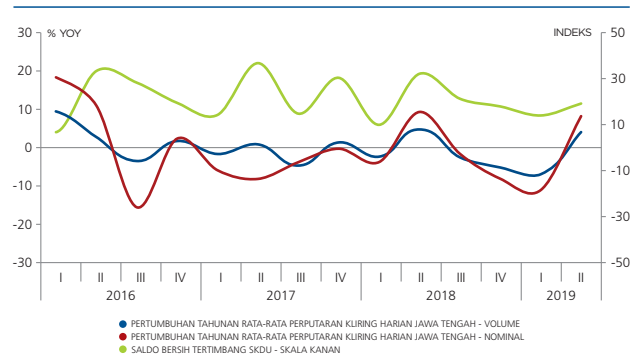
Secara tahunan, penyelesaian nilai transaksi kliring di Jawa Tengah pada triwulan II 2019 masih mencatatkan kontraksi sebesar 11,43% (yoy). Meskipun demikian, kontraksi tersebut tidak sedalam periode yang sama di tahun sebelumnya yang tercatat kontraksi sebesar 13,54% (yoy) dengan nilai Rp35,01 triliun. Dari sisi volume, perputaran kliring tercatat kontraksi sebesar 15,96% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang kontraksi sebesar 17,90% (yoy) dengan memproses 867.066 DKE.



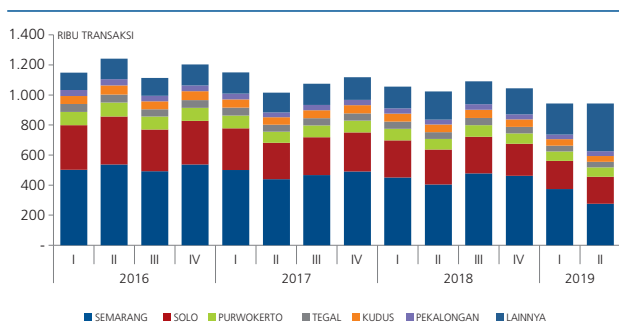
**Grafik 5.1** Perkembangan Rata-Rata Perputaran Kliring Harian di Jawa Tengah

Rata-rata harian transaksi kliring secara triwulanan tercatat mengalami peningkatan baik dari sisi nilai maupun volume transaksi. Perputaran kliring di Jawa Tengah memproses rata-rata 15.172 DKE per hari, atau lebih tinggi 6,74% (qtq) dibandingkan rata-rata harian pada triwulan sebelumnya yang memproses 14.214 DKE. Dari sisi nominal, nilai rata-rata harian perputaran kliring sebesar Rp621,02 miliar, tercatat lebih tinggi 8,21% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya yang memproses transaksi dengan nilai Rp573,90 miliar per hari. Peningkatan aktivitas kliring dalam triwulan II salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi terutama pada sektor perdagangan, hotel & restoran dan sektor industri pengolahan yang didorong oleh peningkatan permintaan domestik pada periode bulan Ramadhan dan Lebaran. Selain itu, peningkatan aktivitas kliring juga dipengaruhi oleh peningkatan transfer dana masyarakat melalui SKNBI. Sementara secara tahunan, apabila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, nominal dan volume rata-rata harian perputaran kliring adalah lebih rendah masing-masing sebesar 13,01% (yoy) dan 17,46% (yoy).

Terdapat 10 Koordinator Pertukaran Warkat Debit (KPWD) di Jawa Tengah, yaitu KPWD BI (Semarang, Solo, Purwokerto, dan Tegal) serta KPWD selain BI (Kudus, Magelang, Salatiga, Purworejo, Pekalongan,



**Grafik 5.2** Pertumbuhan Tahunan Rata-Rata Perputaran Kliring dan IPR SPE

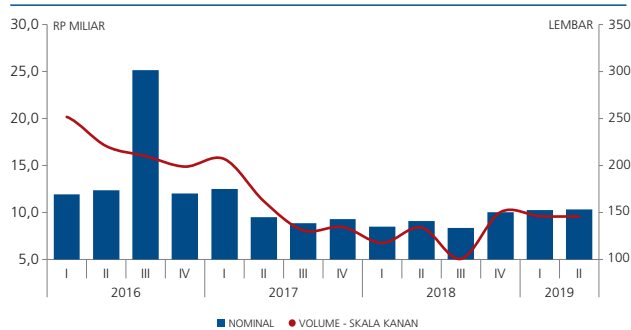


**Grafik 5.3 Pangsa Volume Transaksi SKNBI Berdasarkan Daerah Pengiriman**

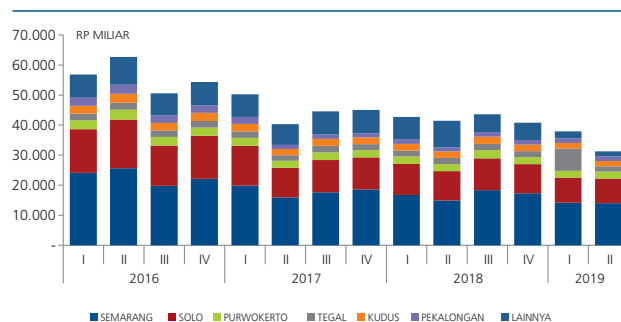
dan Cilacap). Pangsa volume transaksi KPWD selain BI pada periode Triwulan II 2019 adalah sebesar 18,55% dari jumlah seluruh transaksi kliring di Jawa Tengah atau memproses 126.318 DKE. Dari sisi nominal, pangsa nilai transaksi yang diproses oleh KPWD selain BI sebesar 17,67% dari seluruh transaksi kliring di Jawa Tengah atau mencapai nilai 5,63 triliun.

KPWD Kota Semarang mencatatkan transaksi kliring terbesar di Jawa Tengah dengan pangsa volume dan nominal kliring sebesar masing-masing 40,66% dan 43,98%. Kota selanjutnya yang memberikan sumbangan terbesar terhadap perputaran kliring Jawa Tengah adalah Kota Solo dengan pangsa volume dan nominal masing-masing sebesar 26,16% dan 25,67%, sedangkan kota-kota lain hanya memberikan kontribusi di bawah 10%.

**Transaksi kliring debit pengembalian dengan instrumen pembayaran berupa cek dan bilyet giro (BG) kosong mengalami penurunan dari sisi**



**Grafik 5.5 Perkembangan Rata-Rata Penarikan Cek dan Bilyet Giro Kosong Harian di Jawa Tengah**



**Grafik 5.4 Pangsa Nominal Transaksi SKNBI Berdasarkan Daerah Pengiriman**

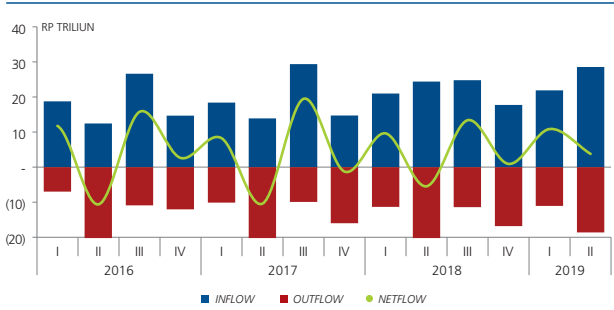
**volume, meskipun mengalami peningkatan dari sisi nominal.**

Rata-rata volume cek dan BG kosong yang dikliringkan per hari pada triwulan laporan menurun 0,23% (qtq) menjadi 146 lembar per hari dari triwulan sebelumnya sebesar 147 lembar per hari sementara rata-rata nilai penarikan cek dan BG kosong meningkat 1,59% (qtq) menjadi sebesar Rp6,30 miliar per hari pada triwulan laporan dibandingkan pada triwulan I 2019 sebesar Rp6,39 miliar per hari. Sementara itu, pertumbuhan tahunan volume dan nominal rata-rata harian penarikan cek dan BG kosong pada triwulan II 2019 juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 8,77% (yoy) dan 30,75% (yoy).

## 5.2. PERKEMBANGAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Aliran uang kartal melalui Bank Indonesia di Jawa Tengah pada triwulan II 2019 mencatatkan posisi *net inflow*. Peningkatan *net inflow* pada triwulan laporan tidak terlepas dari pola siklikal setelah periode Lebaran yang ditandai dengan kembali masuknya aliran uang ke perbankan sering dengan pola konsumsi masyarakat yang kembali normal.

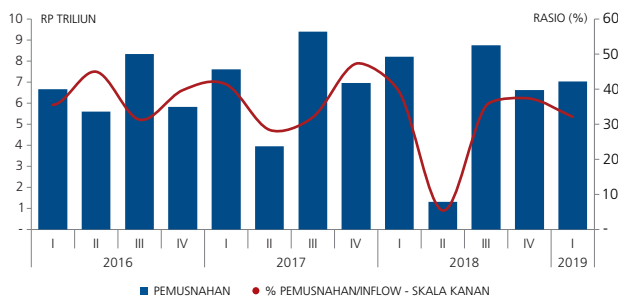
Posisi *net inflow* tercatat sebesar Rp3,77 triliun, mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami *net inflow* sebesar



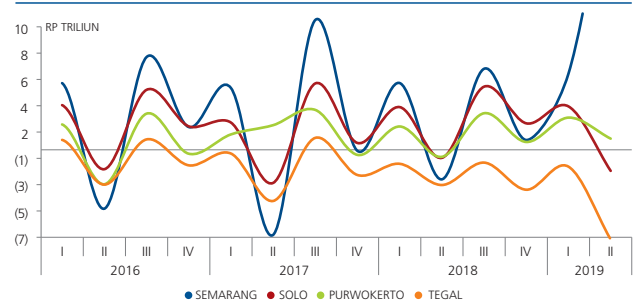
**Grafik 5.6 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal melalui Bank Indonesia di Jawa Tengah**

Rp10,85 triliun. Pada triwulan laporan, posisi aliran uang kartal dari perbankan dan masyarakat ke Bank Indonesia (*inflow*) meningkat 30,33% (qtq) menjadi sebesar Rp28,54 triliun dari triwulan sebelumnya sebesar Rp21,9 triliun. Pada periode yang sama, aliran uang kartal dari Bank Indonesia (*outflow*) juga mengalami peningkatan 68,52% (qtq) dari triwulan sebelumnya sebesar Rp11,04 triliun menjadi Rp18,61 triliun seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap uang kartal selama periode Ramadhan dan Lebaran.

Secara tahunan, *inflow* tercatat tumbuh 17,05% (yoy), lebih rendah dibandingkan *inflow* pada triwulan II 2018 yang tumbuh sebesar 75,28% (yoy). Posisi *outflow* pada triwulan II 2019 tercatat kontraksi sebesar 37,65% (yoy), berbalik arah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 22,74% (yoy). Posisi uang kartal pasca Lebaran cenderung berada pada posisi *net inflow*, sering dengan pola konsumsi masyarakat yang kembali



**Grafik 5.8 Perkembangan Penarikan dan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar**

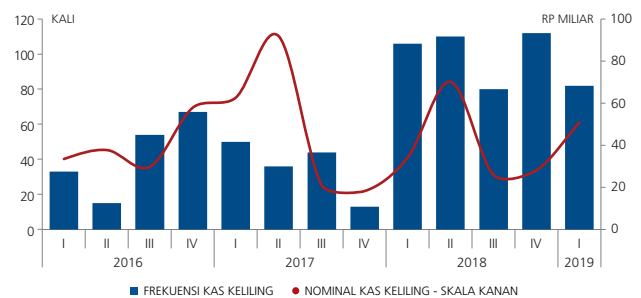


**Grafik 5.7 Perkembangan Pola Penarikan dan Setoran Uang Kartal Berdasarkan Wilayah**

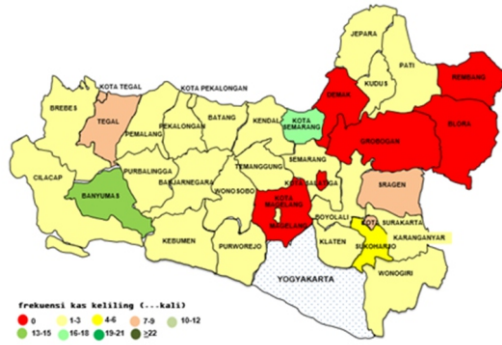
normal. Secara spasial, aliran uang kartal melalui Bank Indonesia di Semarang, Solo, dan Purwokerto mencatat *net inflow*. Sementara itu, posisi aliran kas melalui Bank Indonesia Tegal mencatat *net outflow*.

Bank Indonesia secara rutin melakukan kegiatan penarikan uang Rupiah yang tidak layak edar dari peredaran, pengolahan uang Rupiah, serta penggantian dengan uang rupiah layak edar, sebagai bentuk penerapan *clean money policy*. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan meningkatkan standar kualitas uang yang diedarkan ke masyarakat. Pemusnahan uang Rupiah tidak layak edar di Jawa Tengah pada triwulan laporan sebesar 21,85% dari *inflow*. Dari sisi nonimal, nilai pemusnahan uang Rupiah pada triwulan II 2019 mengalami penurunan sebesar 11,32% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Bank Indonesia juga melakukan layanan kas yang dilaksanakan di dalam kantor maupun di luar kantor. Layanan kas bagi masyarakat di kantor Bank Indonesia



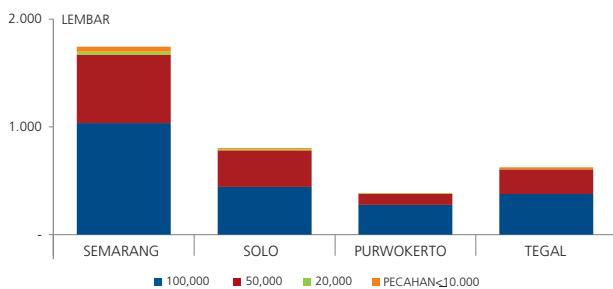
**Grafik 5.9 Frekuensi dan Nominal Kas Keliling**



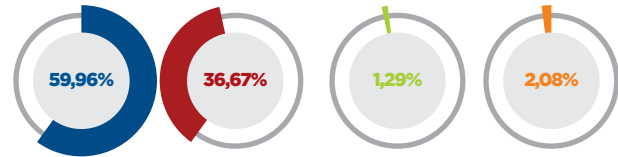
Gambar 5.1 Peta Jangkauan Layanan Kas Keliling di Jawa Tengah

dibuka untuk melayani penukaran uang rusak, uang cacat, serta uang yang sudah dicabut dari peredaran. Sementara layanan kas di luar kantor diwujudkan dengan program kas keliling. Kegiatan kas keliling tersebut secara rutin dilaksanakan di dalam kota kedudukan BI hingga menjangkau daerah terpencil. Kas keliling dapat melayani penukaran uang ke pecahan yang lebih kecil serta uang layak edar. Pada triwulan II 2019, kantor BI di Jawa Tengah melakukan kegiatan kas keliling sebanyak 103 kali, mengalami peningkatan 25,61% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya sebanyak 82 kali. Selama kegiatan kas keliling di triwulan pelaporan, masyarakat menukarkan uang Rupiah sebesar Rp48,68 miliar, menurun 4,27% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp50,84 miliar.

Jumlah uang yang diragukan keasliannya di Jawa Tengah pada triwulan II 2019 sebanyak 3.556 lembar. Jumlah ini mengalami penurunan 9,68% (yoy)



Grafik 5.10 Temuan Uang Palsu Berdasarkan Wilayah



■ 100.000 ■ 50.000 ■ 20.000 ■ PECAHAN  $\leq 10.000$

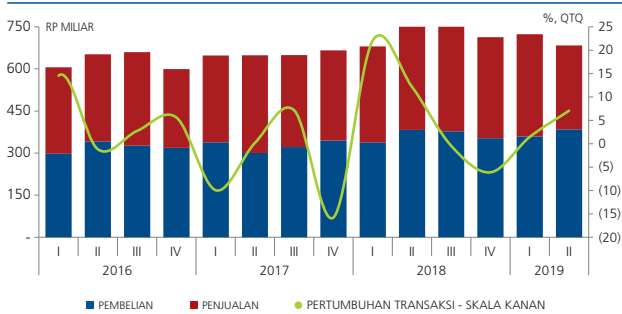
Grafik 5.11 Persentase Temuan Uang Palsu Berdasarkan Pecahan

dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan temuan uang yang diragukan keasliannya sebanyak 3.937 lembar. Apabila dibedakan menurut pecahannya, pecahan yang paling banyak dipalsukan adalah Rp100.000 sebanyak 2.132 lembar (59,38%), diikuti oleh pecahan Rp50.000 sebanyak 1.304 lembar (36,67%). Sedangkan pecahan lainnya memiliki pangsa masing-masing pecahan kurang dari 2%.

Apabila dibedakan berdasarkan daerah, uang yang diragukan keasliannya paling banyak ditemukan di Semarang sebanyak 1.743 lembar (49,02%). Sementara pangsa penemuan uang palsu di kota lain adalah Solo sebanyak 802 lembar (22,55%), Purwokerto sebanyak 387 lembar (10,88%), dan Tegal sebanyak 624 lembar (17,55%). Penemuan uang yang diragukan keasliannya tersebut antara lain berasal dari klarifikasi perbankan ke BI, setoran masyarakat melalui loket penukaran, hasil setoran bank (0,69%), serta klarifikasi masyarakat ke BI.

### 5.3. PERKEMBANGAN TRANSAKSI PENUKARAN VALUTA ASING

Transaksi menggunakan Uang Kertas Asing (UKA) di KUPVA BB mengalami peningkatan secara triwulanan maupun tahunan, seiring dengan meningkatnya transfer dana dari Luar Negeri ke Jawa Tengah. Nilai transaksi penukaran valuta asing

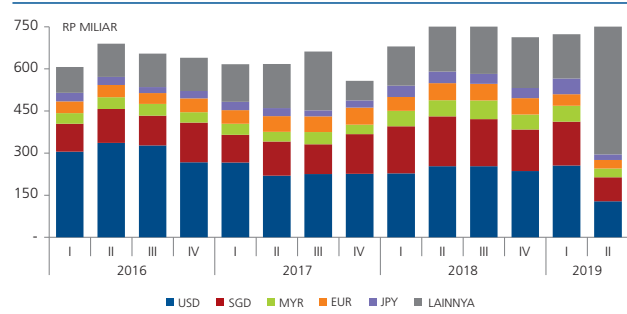


**Grafik 5.12 Transaksi Penukaran Valuta Asing dan Kunjungan Wisatawan Asing di Jawa Tengah**

melalui KUPVA BB berizin di Jawa Tengah pada triwulan II 2019 mencapai Rp774,63 miliar, lebih tinggi 7,06% (qtq) dibandingkan nilai transaksi triwulan sebelumnya sebesar Rp723,52 miliar. Apabila dibedakan berdasarkan jenis transaksi, transaksi pembelian valuta asing melalui KUPVA Bukan Bank mencapai Rp384,59 miliar, meningkat 7,09% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp359,13 miliar. Sementara itu, transaksi penjualan tercatat mengalami penurunan sebesar 17,93% (qtq) menjadi Rp299,04 miliar.

Sejalan dengan pertumbuhan triwulanan, pertumbuhan tahunan transaksi penukaran valuta asing juga tercatat lebih tinggi 1,53% (yoy). Pertumbuhan tahunan transaksi pembelian mengalami peningkatan sebesar 0,60% (yoy) sementara transaksi penjualan mengalami penurunan sebesar 21,45% (yoy). Berdasarkan mata uang yang diperdagangkan, Dolar Amerika Serikat (USD) masih mendominasi transaksi pada triwulan II 2019 dengan pangsa sebesar 16,61%, yang diikuti oleh Dolar Singapura (SGD) sebesar 11,02%, Ringgit Malaysia (MYR) sebesar 3,99%, Euro (EUR) sebesar 3,94%, dan Yen Jepang (JPY) sebesar 2,58%. Sementara transaksi mata uang lainnya untuk 44 jenis valuta asing memiliki pangsa 16,86%.

Penyelenggaraan KUPVA BB berizin diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pasar keuangan terutama pasar valuta asing domestik. Kegiatan Usaha



**Grafik 5.13 Pangsa Valuta Asing yang ditukarkan melalui KUPVA Bukan Bank di Jawa Tengah**

Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) yang memiliki izin dari Bank Indonesia di Jawa Tengah terdapat sejumlah 45 penyelenggara. Berdasar jumlah tersebut, 26 KUPVA (57,78%) terdapat di wilayah kerja KPwBI Provinsi Jawa Tengah, 10 KUPVA BB (22,22%) terdapat di wilayah kerja KPwBI Solo, 6 KUPVA BB (13,33%) terdapat di wilayah kerja KPwBI Purwokerto, dan 3 KUPVA BB (6,67%) terdapat di wilayah kerja KPwBI Tegal.

## 5.4. PERKEMBANGAN ELEKTRONIFIKASI DAN KEUANGAN INKLUSIF

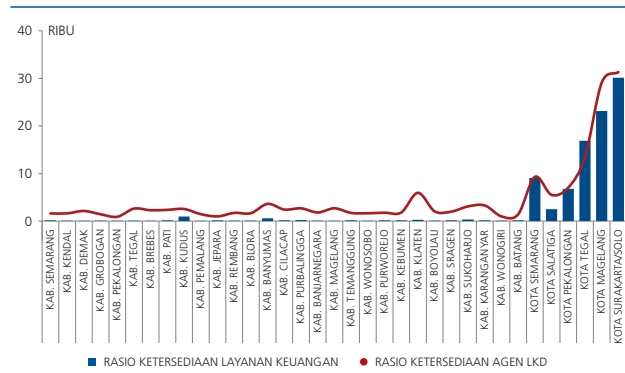
**Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang sistem pembayaran terus mendorong penerapan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) melalui penggunaan instrumen nontunai (elektronifikasi), antara lain pada sektor Pemda, destinasi wisata, sektor transportasi, pembayaran tol, penyaluran bantuan sosial, serta penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).**

**Penetrasi elektronifikasi pembayaran jalan tol selama periode Lebaran tetap terjaga sebesar 99%.** Dengan terintegrasinya pembayaran tol Trans Jawa, kelancaran di titik pembayaran serta ketersediaan layanan isi ulang/top up di sepanjang jalur tol Trans Jawa menjadi faktor penentu kelancaran pelaksanaan elektronifikasi tol, terutama di periode Lebaran karena peningkatan volume kendaraan. Adanya koordinasi yang baik antara KPwBI di wilayah

Jawa yang dilewati oleh jalan tol dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) serta perbankan, kesiapan infrastruktur, ketersediaan uang elektronik dan penyiapan layanan top di dalam ruas tol telah dapat mengantisipasi lonjakan volume selama periode Lebaran.

Dalam hal elektronifikasi bantuan sosial, **BI melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait untuk memastikan kelancaran penyaluran bantuan sosial, baik berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).** Selain itu, BI dibantu Bank penyalur bansos juga melakukan edukasi kepada KPM untuk meningkatkan pemahaman KPM mengenai cara penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Penyaluran PKH tahap II 2019 dilakukan kepada lebih dari 1,5 juta KPM, sementara itu penyaluran BPNT tahap V 2019 dilakukan kepada lebih dari 2,4 juta KPM. Penyaluran bansos nontunai bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan prinsip 6T (tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi) serta meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan.

**Perluasan penyaluran BOS secara nontunai dilakukan di 131 sekolah di 12 Kabupaten /Kota di wilayah Jawa Tengah.** Setelah uji coba proyek percontohan (*pilot project*) BOS secara nontunai yang dilakukan di Kota Semarang berjalan baik, BI bersama Kemendikbud telah menetapkan sekolah perluasan penerima BOS secara non tunai. Perluasan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penyaluran BOS serta meningkatkan transparansi penggunaan BOS melalui penggunaan aplikasi Sistem Informasi Bantuan Operasional Sekolah (SIBOS) yang memungkinkan instansi terkait untuk melakukan pengawasan secara online.



**Grafik 5.14 Rasio Ketersediaan Layanan Keuangan di Jawa Tengah dibandingkan 1.000 km<sup>2</sup> Luas Wilayah**

**BI bekerjasama dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melakukan mapping Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah Jawa Tengah.**

Kegiatan pemetan PMI di wilayah Jawa Tengah antara lain dilakukan untuk memperoleh gambaran mekanisme pengiriman uang serta penyelenggara jasa pengiriman uang yang digunakan oleh PMI. Dalam periode laporan, BI bekerjasama dengan perbankan dan BNP2TKI melakukan edukasi kepada calon PMI yang akan berangkat ke luar negeri untuk memberikan edukasi mengenai kegiatan pengiriman uang secara nontunai serta memberikan pemahaman risiko penggunaan lembaga pengiriman uang ilegal.

Apabila ditinjau dari luas wilayah, rasio ketersediaan layanan keuangan dibandingkan 1.000 km<sup>2</sup> luas wilayah di masing-masing kabupaten/kota Jawa Tengah, daerah yang memiliki ketersediaan layanan keuangan tertinggi dibandingkan luas wilayah adalah Kota Solo. Sementara daerah yang memiliki nilai rasio terendah adalah Kabupaten Pekalongan. Aspek ini perlu menjadi perhatian bagi pemangku kebijakan dan industri keuangan agar dapat meningkatkan jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil.



## KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

**Kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah pada triwulan II 2019 relatif membaik, tercermin dari berkurangnya persentase kemiskinan, peningkatan ketersediaan tenaga kerja, dan peningkatan IPM serta NTP.**

- Jumlah penduduk usia kerja pada periode Februari 2019 meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Demikian pula dengan angka pengangguran yang turut mengalami peningkatan. Namun apabila dibandingkan dengan periode Agustus 2018 angka pengangguran periode laporan mengalami penurunan.
- Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan II 2019 menunjukkan peningkatan dari triwulan I 2019 dan juga dari triwulan yang sama tahun 2018.
- Angka kemiskinan Jawa Tengah pada Maret 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
- Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Jawa Tengah pada Maret 2019 menunjukkan perbaikan dibandingkan Maret 2018.



## 6.1. KETENAGAKERJAAN

**Jumlah penduduk usia kerja di Jawa Tengah pada periode Februari 2019 meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018.** Indikator ini mencerminkan potensi ketersediaan tenaga kerja. Pada Februari 2019 jumlah penduduk usia kerja Jawa Tengah sebesar 26,48 juta orang, atau sedikit meningkat 1,07% (yoy) dibandingkan dengan Februari 2018 yang berjumlah 26,2 juta orang. Kondisi ini mencerminkan potensi tenaga kerja di Jawa Tengah dalam hal kuantitas penduduk usia produktif.

**Jumlah penduduk usia produktif yang menjadi angkatan kerja juga mengalami sedikit peningkatan pada triwulan laporan.** Jumlah angkatan kerja meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu dari 18,23 juta orang menjadi sebanyak 18,59 juta orang atau tumbuh 1,97% (yoy). Peningkatan pertumbuhan angkatan kerja ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja pada Agustus 2018 yang hanya tumbuh sebesar 0,28% (yoy) maupun pertumbuhan angkatan kerja pada Februari 2018 yang tumbuh 0,16% (yoy). Jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah memiliki porsi sebesar 13,65% dari total angkatan kerja di tingkat nasional yang sebanyak 136,18 juta orang.

**Penduduk yang bekerja pada Februari 2019 sebanyak 17,81 juta orang atau 95,80% dari total angkatan kerja.** Jumlah pekerja ini tumbuh 2% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 17,46 juta orang. Sementara itu, sebesar 4,20% atau 0,78 juta orang angkatan kerja tergolong dalam kategori pengangguran. Persentase ini relatif lebih baik dibandingkan dengan kondisi di tingkat nasional, di mana 94,99% angkatan kerja tergolong bekerja dan 5% merupakan pengangguran.

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada periode laporan juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu.** TPAK merupakan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Pada triwulan laporan, TPAK tercatat sebesar 70,21%, atau naik dibandingkan Agustus 2018 yang tercatat sebesar 68,56%. Kondisi TPAK Jawa Tengah ini lebih tinggi dari tingkat nasional yang tercatat sebesar 69,32%.

**Struktur tenaga kerja pada lapangan usaha di Jawa Tengah secara umum tidak mengalami perubahan yang signifikan.** Sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah. Meskipun demikian, sektor ini mengalami

**Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama (juta orang)**

INDIKATOR	2016		2017		2018		2019
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB
ANGKATAN KERJA	17,91	17,31	18,20	18,01	18,23	18,06	18,59
BEKERJA	17,16	16,51	17,44	17,19	17,46	17,25	17,81
PENGANGGURAN	0,75	0,80	0,76	0,82	0,77	0,81	0,78
BUKAN ANGKATAN KERJA	7,72	8,47	7,72	8,05	7,97	8,28	7,89
PENDUDUK USIA KERJA	25,63	25,78	25,92	26,06	26,2	26,34	26,48
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) %	69,89	67,15	70,20	69,11	69,58	68,56	70,21
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) %	4,20	4,63	4,15	4,57	4,23	4,51	4,22
PEKERJA TIDAK PENUH	4,97	4,22	4,73	4,34	4,90	4,67	5,03
SETENGAH PENGANGGUR	1,23	1,02	1,03	1,10	1,06	0,90	1,06
PARUH WAKTU	3,74	3,20	3,69	3,24	3,84	3,77	3,97

Sumber : BPS Jawa Tengah

9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah rasio jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja

Tabel 6.2. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, (juta orang)

SEKTOR EKONOMI	2016		2017		2018		2019
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB
PERTANIAN	5,16	5,07	4,97	4,32	4,76	4,2	4,67
INDUSTRI	3,22	3,25	3,74	3,68	3,75	3,76	3,95
KONSTRUKSI	1,28	1,43	1,25	1,49	1,23	1,51	1,28
PERDAGANGAN	4,11	3,71	3,2	3,18	3,26	3,22	3,35
TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI	0,55	0,55	0,5	0,56	0,53	0,57	0,53
KEUANGAN	0,3	0,3	0,25	0,23	0,22	0,24	0,21
LAINNYA*	2,54	2,2	3,53	3,73	3,71	3,75	3,82
<b>TOTAL</b>	<b>17,16</b>	<b>16,51</b>	<b>17,44</b>	<b>17,19</b>	<b>17,46</b>	<b>17,25</b>	<b>17,81</b>

\* Lapangan pekerjaan utama lainnya terdiri dari sektor Pertambangan, Listrik, Gas dan Air, Transportasi, Pergudangandan Komunikasi, Lembaga Keuangan, Real Estate dan Usaha Persewaan  
Sumber : BPS Jawa Tengah

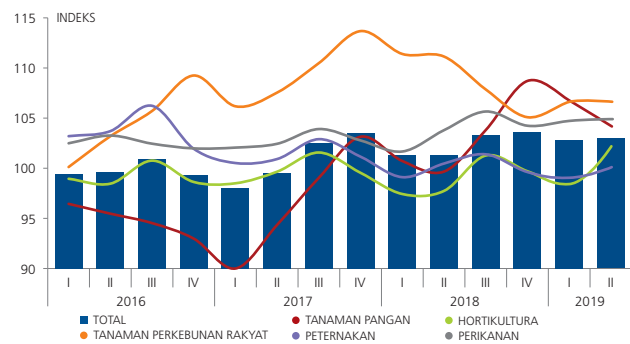
penurunan jumlah pekerja dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Pada Februari 2019, lapangan usaha pertanian menyerap tenaga kerja sebanyak 4,67 juta orang atau 26,22% dari total penduduk yang bekerja di Jawa Tengah. Angka ini menurun dibandingkan Februari 2018 yang mencatatkan tenaga kerja di sektor ini sebanyak 4,76 juta orang atau 27,26% dari total penduduk bekerja.

**Jumlah penduduk yang bekerja di lapangan usaha pertanian pada periode Februari 2019 mengalami penurunan sebesar 90 ribu orang atau -1,89% (yoy) dibandingkan Februari 2018.** Tren penurunan tenaga kerja pertanian ini telah berlangsung selama 1 (satu) dekade terakhir baik secara nasional maupun di kawasan Jawa. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan tersebut antara lain adanya pergeseran musim panen raya, alih fungsi lahan, pertumbuhan sektor industri yang mendorong peralihan profesi, tingginya kesenjangan kesejahteraan pedesaan dan perkotaan, serta rendahnya insentif untuk bekerja di lapangan pertanian dibandingkan lapangan usaha lain khususnya jasa dan industri.

**Imbal hasil lapangan usaha pertanian dicerminkan oleh Nilai Tukar Petani (NTP). Angka NTP yang relatif rendah menjadi faktor pendorong utama pekerja beralih ke lapangan usaha lain dengan tingkat pendapatan yang lebih baik.** Indikator NTP pada triwulan II 2019 menunjukkan sedikit kenaikan setelah pada triwulan sebelumnya

pertumbuhannya relatif mengalami penurunan. Hal ini ditengarai **merupakan pengaruh siklus musim panen di Jawa Tengah sehingga tingkat kesejahteraan petani di Jawa Tengah mengalami perbaikan.** Tren NTP ini mengalami arah yang berbalik sejak triwulan III 2018 sampai dengan triwulan II 2019 di mana secara umum NTP selalu mencatatkan indeks di atas angka 100. Kenaikan NTP pada triwulan II 2019 disumbang oleh kenaikan hampir seluruh subsektor yaitu hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan sedangkan subsektor tanaman pangan mengalami penurunan.

**Sementara itu, jumlah tenaga kerja di lapangan usaha industri pengolahan menempati posisi kedua dengan menyerap 3,95 juta orang atau 22,18% dari penduduk yang bekerja di Jawa Tengah.** Jumlah pekerja lapangan usaha industri pengolahan ini tumbuh 5,33% (yoy). Adapun lapangan usaha perdagangan menempati posisi ketiga sebesar



Grafik 6.1 Perkembangan NTP Subsektor Hortikultura, Peternakan, dan Perikanan dalam 4 Tahun Terakhir  
Sumber: BPS Jawa Tengah

3,35 juta orang atau menyerap 18,81% penduduk yang bekerja di Jawa Tengah. Lapangan usaha perdagangan mengalami peningkatan pertumbuhan jumlah pekerja sebesar 2,76% (yoy). Peningkatan jumlah pekerja di lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan usaha pertanian yang mengalami penurunan jumlah pekerja. Hal ini sekaligus mengkonfirmasi fenomena relokasi sejumlah perusahaan manufaktur ke Jawa Tengah maupun adanya ekspansi perusahaan di lapangan usaha industri pengolahan yang mendorong peralihan tenaga kerja, dari yang semula bekerja di lapangan usaha pertanian beralih ke lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan.

**Apabila ditinjau dari status pekerjaan utama, pada Februari 2019 tenaga kerja dominan di Jawa Tengah adalah kelompok orang yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai.** Jumlah kelompok orang yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai mencapai 6,48 juta orang, meningkat dibandingkan dengan Agustus 2018 yang tercatat sebesar 6,12 juta orang atau pada periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar 6,36 juta orang. Apabila jumlah kelompok tersebut ditambahkan dengan kelompok berusaha dibantu buruh tetap, maka akan membentuk proksi kelompok pekerja sektor formal. Pada Februari 2019 ini, jumlah pekerja sektor formal Jawa Tengah sebanyak 7,08 juta orang atau 39,75% dari jumlah penduduk yang bekerja. Jumlah

pekerja sektor formal tersebut meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebanyak 6,99 juta orang. Sementara itu, jumlah pekerja di sektor informal juga turut mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah maupun proporsi terhadap total penduduk bekerja di Jawa Tengah. Pada Februari 2019, pekerja informal tercatat sebanyak 10,73 juta orang atau 60,25% dari jumlah penduduk bekerja, mengalami peningkatan dibandingkan dengan Februari 2018 yang tercatat sebanyak 10,47 juta orang (59,97%).

**Jumlah pekerja waktu penuh Jawa Tengah pada Februari 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.** Jumlah kelompok pekerja ini tercatat sebanyak 12,77 juta orang atau mengalami peningkatan sebesar 1,71% (yoy) dibandingkan Februari 2018 yang tercatat sebanyak 12,56 juta orang. Kondisi ini ditengarai pengaruh pergeseran musim panen raya yang berdampak terhadap berkurangnya jam kerja tenaga kerja di sektor pertanian. Namun demikian, rasio utilisasi yang tinggi tercermin dari rasio pekerja berwaktu penuh (*full time worker*)<sup>8</sup> sebesar 71,70% terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah.

**Sementara itu, jumlah pekerja berwaktu tidak penuh juga mengalami kenaikan, yaitu dari 4,90 juta orang pada periode Februari 2018 menjadi 5,03 juta orang pada periode laporan.** Dengan peningkatan kuantitas tersebut, proporsi pekerja

**Tabel 6.3. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan (juta orang)**

STATUS PEKERJAAN UTAMA	2016		2017		2018		2019
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB
BERUSAHA SENDIRI	2,86	2,63	3,07	3,30	3,21	3,21	3,35
BERUSAHA DIBANTU BURUH TIDAK TETAP	3,35	3,09	3,23	2,77	3,00	2,96	3,16
BERUSAHA DIBANTU BURUH TETAP	0,54	0,50	0,59	0,51	0,63	0,62	0,60
BURUH/KARYAWAN/PEGAWAI	5,89	5,75	6,05	6,32	6,35	6,12	6,48
PEKERJA BEBAS DI PERTANIAN	0,85	0,86	0,92	0,83	0,72	0,73	0,69
PEKERJA BEBAS DI NON PERTANIAN	1,34	1,43	1,14	1,56	1,23	1,51	1,15
PEKERJA TAK DIBAYAR	2,32	2,25	2,43	1,90	2,32	2,11	2,38
<b>TOTAL</b>	<b>17,15</b>	<b>16,51</b>	<b>17,44</b>	<b>17,19</b>	<b>17,46</b>	<b>17,25</b>	<b>17,81</b>

Sumber : BPS Jawa Tengah

8. Pekerja berwaktu penuh (*full time worker*) yaitu penduduk yang bekerja pada kelompok 35 jam ke atas per minggu.

**Tabel 6.4. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja (juta orang)**

PENDUDUK YANG BEKERJA	2016		2017		2018		2019
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB
PEKERJA TIDAK PENUH	4,97	4,22	4,73	4,34	4,90	4,67	5,03
SETENGAH PENGANGGUR	1,23	1,02	1,03	1,10	1,07	0,90	1,06
PEKERJA PARUH WAKTU	3,74	3,2	3,69	3,24	3,84	3,77	3,97
PEKERJA PENUH	12,19	12,29	12,71	12,85	12,56	12,57	12,77
<b>TOTAL</b>	<b>17,16</b>	<b>16,51</b>	<b>17,44</b>	<b>17,19</b>	<b>17,46</b>	<b>17,25</b>	<b>17,81</b>

Sumber : BPS Jawa Tengah

berwaktu tidak penuh terhadap tenaga kerja di Jawa Tengah juga mengalami peningkatan dari sebesar 27,07% pada Februari 2018 menjadi 28,24% pada Februari 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja utamanya berupa lapangan usaha sementara yang bersifat musiman.

**Peningkatan kuantitas tenaga kerja di Jawa Tengah relatif turut diimbangi oleh peningkatan kualitas.** Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menetapkan Prioritas Nasional Pembangunan Pendidikan yang menargetkan tingkat pendidikan penduduk usia di atas 15 tahun adalah 8,8 tahun atau setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dengan demikian, penetapan standar indikator kualitas tenaga kerja mengacu pada target Pembangunan Pendidikan tersebut, yaitu tingkat pendidikan SMP.

**Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Tengah dengan tingkat pendidikan SMP ke atas pada Februari 2019 tercatat mencapai 52,27% dari jumlah tenaga kerja atau sebanyak 9,31 juta orang,** meningkat sebesar 3,79% (yoy) dibandingkan Februari 2018 yang tercatat sebanyak 8,97 juta orang.

Peningkatan kualitas pendidikan tenaga kerja di Jawa Tengah tersebut utamanya disumbang oleh pertumbuhan tenaga kerja terampil dari tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas/Umum (SMA/SMU) yang tercatat sebesar 2,15 juta orang atau meningkat 10,26% (yoy) dibandingkan Februari 2018 lalu. Perbaikan kualitas dan kuantitas tenaga terampil ini diharapkan dapat memenuhi permintaan tenaga kerja di industri pengolahan, mengingat sejak 2015 terjadi tren relokasi usaha dari Jawa Barat dan Banten menuju Jawa Tengah.

**Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah pada Agustus 2018 tercatat sebanyak 8,50 juta orang** atau sedikit meningkat dibandingkan Februari 2018 yang tercatat sebanyak 8,49 juta orang. Namun secara proporsi mengalami penurunan dari sekitar 48,6% terhadap jumlah tenaga kerja pada Februari 2018 menjadi 47,7 % pada Februari 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan jumlah tenaga kerja dengan keterampilan rendah di Jawa Tengah menunjukkan tren yang semakin menurun seiring dengan penurunan angka partisipasi kerja angkatan tua.

**Tabel 6.5. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (juta orang)**

PENDIDIKAN	2016		2017		2018		2019
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB
SD KE BAWAH	8,92	8,44	8,69	8,40	8,49	8,25	8,50
SMP	3,28	3,29	3,47	3,35	3,59	3,38	3,46
SMA UMUM	1,9	1,78	1,97	2,11	1,95	2,17	2,15
SMA KEJURUAN	1,64	1,71	1,85	1,82	2,03	1,93	2,08
DIV/III DAN UNIVERSITAS	0,36	0,35	0,35	0,39	0,34	0,39	0,38
UNIVERSITAS	1,06	0,93	1,12	1,12	1,06	1,12	1,24
<b>TOTAL</b>	<b>17,16</b>	<b>16,5</b>	<b>17,44</b>	<b>17,19</b>	<b>17,46</b>	<b>17,25</b>	<b>17,81</b>

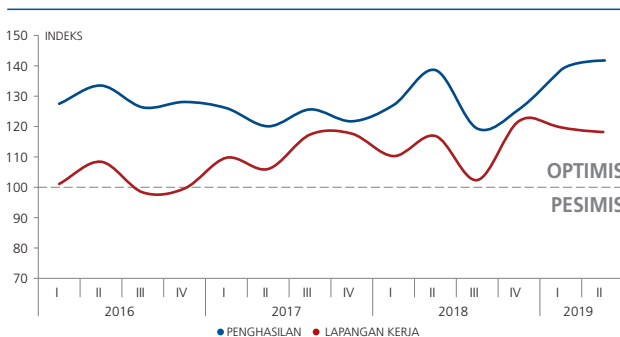
Sumber : BPS Jawa Tengah

## 6.2. PENGANGGURAN

**Angka pengangguran mengalami peningkatan pada Februari 2019 dibandingkan periode yang sama tahun 2018 namun menurun apabila dibandingkan dengan periode Agustus 2018.**

Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau pengangguran pada Februari 2019 tercatat sebanyak 0,78 juta orang, atau bertambah 1,30% (yoy) dibandingkan kondisi Februari 2018 yang berjumlah 0,77 juta orang. Namun pengangguran pada Februari 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode Agustus 2018 yang mencatatkan jumlah pengangguran sebesar 0,81 juta orang. Walaupun terjadi peningkatan jumlah pengangguran, namun peningkatan tersebut jauh lebih kecil dibandingkan peningkatan jumlah angkatan kerja yang meningkat sebesar 1,97%. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa terjadi penyerapan tenaga siap kerja di Jawa Tengah yang lebih baik sejalan dengan pertumbuhan lapangan kerja. Berdasarkan data tersebut, Provinsi Jawa Tengah menyumbang 11,44% dari total angka pengangguran nasional yang berjumlah 6,82 juta orang.

**Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)<sup>9</sup> Jawa Tengah mengalami sedikit penurunan.** TPT Jawa Tengah terpantau menurun dari 4,23%(yoy) pada Februari 2018 menjadi 4,22%(yoy) pada Februari 2019.



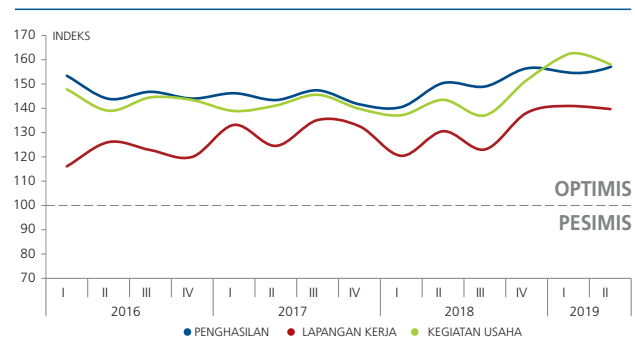
**Grafik 6.2** Indeks Kondisi Ketenagakerjaan dan Penghasilan Saat Ini

9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja

Angka TPT Jawa Tengah ini masih lebih baik dibandingkan angka TPT nasional yang sebesar 5,01%. Berdasarkan lokasi tempat tinggal, TPT pada Februari 2019 untuk wilayah perkotaan (5,43%) cenderung lebih tinggi dibandingkan TPT di wilayah perdesaan (2,99%). Apabila dibandingkan periode yang sama tahun lalu, TPT di perkotaan meningkat 0,83% sedangkan TPT di perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,89%. Berbagai kebijakan pemerintah terkait penciptaan lapangan kerja terlihat cukup berhasil dalam menekan tingkat pengangguran. Hal ini juga didukung oleh kinerja positif ekonomi Jawa Tengah di sepanjang tahun 2018.

Perbaikan berbagai indikator tenaga kerja ini sejalan dengan hasil Survei Konsumen pada aspek tenaga kerja. Konsumen memandang kondisi ketenagakerjaan Jawa Tengah triwulan II 2019 lebih baik dibandingkan triwulan yang sama tahun 2018. Hal tersebut tercermin dari tingkat keyakinan terhadap tingkat penghasilan saat ini. Konsumen menilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi faktor pendorong komponen penghasilan mengalami peningkatan signifikan.

Selain itu, hasil survei konsumen memperkirakan bahwa akan terjadi tren peningkatan laju pertumbuhan lapangan pekerjaan dan kegiatan usaha di Jawa Tengah untuk jangka waktu enam bulan yang akan datang.



**Grafik 6.3** Indeks Kondisi Ketenagakerjaan, Penghasilan, dan Kegiatan Usaha yang Akan Datang

Tingkat keyakinan yang meningkat tersebut tercermin dari indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja yang meningkat menjadi 138,44 dari sebelumnya 137,86 pada triwulan I 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi ketenagakerjaan pada periode enam bulan mendatang diperkirakan relatif membaik dibandingkan periode laporan. Walaupun ekspektasi atas kondisi penghasilan untuk periode enam bulan mendatang mengalami perlambatan.

### 6.3. NILAI TUKAR PETANI<sup>10</sup>

**Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan II 2019 menunjukkan kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya dan lebih baik dibandingkan triwulan yang sama tahun 2018.** NTP pada triwulan laporan tercatat sebesar 103,15 meningkat dibandingkan triwulan I 2019 yang sebesar 102,83 dan lebih baik dari periode yang sama tahun lalu sebesar 101,36. Dalam kurun dua tahun terakhir, NTP Jawa Tengah mencatatkan perbaikan dengan selalu berada di atas indeks 100, yang berarti penghasilan agregat yang diterima petani masih lebih tinggi dibandingkan pengeluaran yang dilakukan.

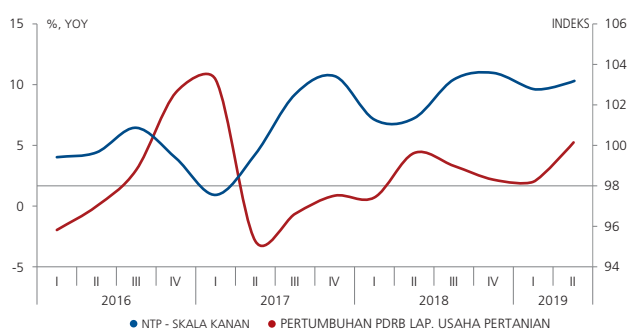
**Kenaikan NTP ini sejalan dengan kenaikan kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan pada triwulan laporan.** Pada triwulan II 2019, lapangan usaha ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,18% (yoy); meingkat dari triwulan I 2019

yang tumbuh 1,96% (yoy), dan juga lebih baik apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 4,30%; yoy.

**Kenaikan NTP Jawa Tengah pada triwulan II 2019 didorong oleh persentase kenaikan pengeluaran petani lebih rendah dibandingkan persentase kenaikan penerimaan.** Pengeluaran petani yang digambarkan oleh indeks harga yang dibayar petani (IB) mengalami peningkatan sebesar 1,49% (qtq) dari sebelumnya 134,49 pada triwulan I 2019 menjadi 136,50 pada triwulan II 2019. Data historis juga menunjukkan bahwa indeks yang dibayar petani mengalami tren peningkatan secara konsisten sepanjang tahun. Namun demikian, penerimaan petani mengalami peningkatan yang lebih besar. Indeks harga yang diterima petani (IT) dari sebesar 138,29 pada triwulan I 2019 menjadi sebesar 140,79 pada triwulan II 2019 atau mengalami peningkatan sebesar 1,81% (qtq).

**NTP empat subsektor pada triwulan ini mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya** yaitu subsektor hortikultura meningkat 3,81% (qtq), subsektor peternakan meningkat 1,11% (qtq), subsektor perikanan meningkat 0,24% (qtq), dan subsektor tanaman perkebunan rakyat meningkat 0,01% (qtq). Sedangkan subsektor tanaman pangan menunjukkan penurunan NTP sebesar 2,39% (qtq).

**Pada triwulan II 2019, peningkatan terbesar indeks yang diterima (IT) terjadi pada subsektor hortikultura** yang meningkat sebesar 5,66% (qtq) dari semula sebesar 133,14 pada triwulan I 2019 menjadi 140,68 pada periode laporan. Peningkatan IT pada triwulan II 2019 disebabkan oleh peningkatan secara rata-rata berbagai komoditas di kelompok sayur-sayuran (khususnya komoditas kacang merah, cabai merah, bawang merah, jengkol, cabai rawit) sebesar



Grafik 6.4 NTP dan PDRB Lapangan usaha Pertanian

Sumber: BPS Jawa Tengah

10. Pada Desember 2013, BPS melakukan perubahan tahun dasar NTP. Untuk itu NTP dalam laporan ini disesuaikan dengan menggunakan pendekatan perubahan per bulan.

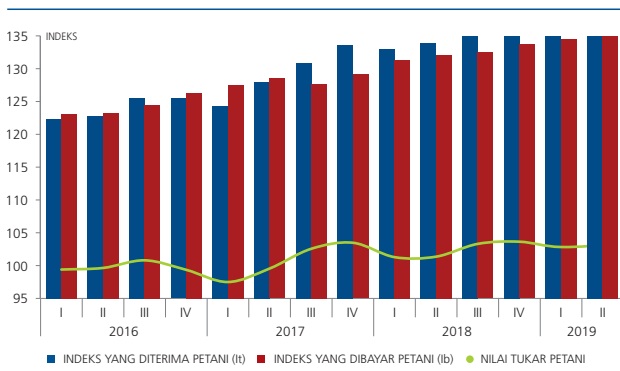
2,02% dan kelompok tanaman obat (khususnya jahe, temulawak, kunyit dan lengkuas) secara rata-rata naik sebesar 0,78%. Sedangkan kelompok buah-buahan (khususnya komoditas melon, semangka, salak dan pepaya) secara rata-rata turun sebesar 0,04%. Subsektor lain yang mengalami peningkatan yaitu subsektor tanaman perkebunan rakyat (1,57%; qtq), subsektor peternakan (1,94%; qtq), dan subsektor perikanan (1,88%; qtq).

**Sementara itu, subsektor tanaman pangan justru mengalami penurunan indeks penerimaan** sebesar 0,69% (qtq); dari 147,27 di triwulan I 2019 menjadi 146,25 pada triwulan laporan. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya indeks yang diterima kelompok palawija (jagung, ketela pohon/ubi kayu, ubi jalar dan kacang kedelai) sebesar 0,85%. Sedangkan kelompok padi (komoditas gabah) mengalami kenaikan It sebesar 0,01%.

**Pengeluaran petani pada triwulan II 2019, yang digambarkan oleh indeks yang dibayarkan petani (IB) meningkat sebesar 1,49% (qtq),** dari sebelumnya 134,49 pada triwulan I 2019 menjadi 136,50 pada triwulan laporan. Data historis menunjukkan bahwa indeks yang dibayar petani mengalami tren peningkatan secara persisten. Peningkatan biaya pengeluaran petani pada periode laporan juga berlangsung pada seluruh subsektor,

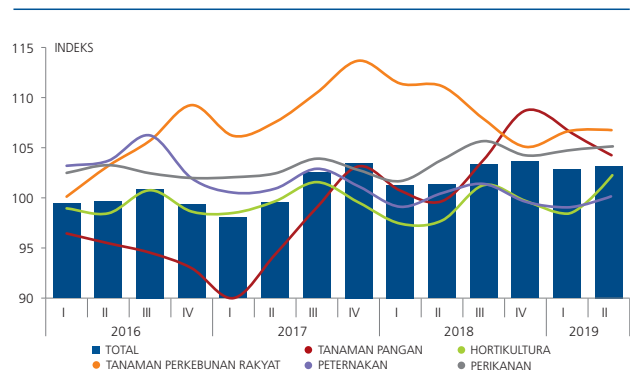
dengan kenaikan tertinggi pada subsektor hortikultura (1,79%; qtq), diikuti oleh subsektor tanaman pangan (1,74%; qtq), subsektor perikanan (1,64%; qtq) serta subsektor tanaman perkebunan rakyat dan peternakan masing-masing sebesar 1,56% (qtq) dan 0,82% (qtq).

Lebih lanjut, peningkatan biaya yang harus dibayarkan oleh petani terjadi di komponen biaya kebutuhan konsumsi rumah tangga untuk seluruh subsektor, sementara itu peningkatan biaya kebutuhan proses produksi dan penambahan barang modal juga terjadi di seluruh subsektor kecuali subsektor peternakan. Walaupun harga-harga cenderung terjaga, beberapa pengeluaran konsumsi seperti bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, sandang, kesehatan serta transportasi dan komunikasi mengalami peningkatan. Sementara itu, pengeluaran untuk modal meningkat untuk seluruh jenis komponen biaya maupun barang modal. Peningkatan biaya relatif lebih tinggi pada komponen konsumsi rumah tangga yang dipergunakan untuk mengantisipasi ataupun menangani gangguan proses budidaya tanaman/ternak yang berkaitan erat dengan faktor cuaca. **Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada musim menyebabkan fluktuasi kemampuan produksi petani. Lebih lanjut, hal ini pun turut memengaruhi tingkat kesejahteraan petani sebagaimana tercermin dari angka NTP.**



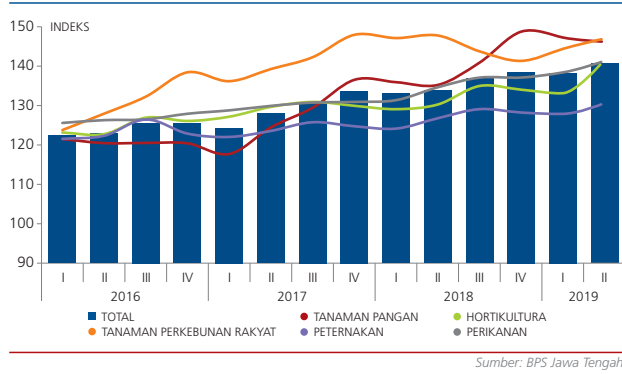
Grafik 6.5 NTP Jawa Tengah dan Komponen Penyusunnya

Sumber: BPS Jawa Tengah



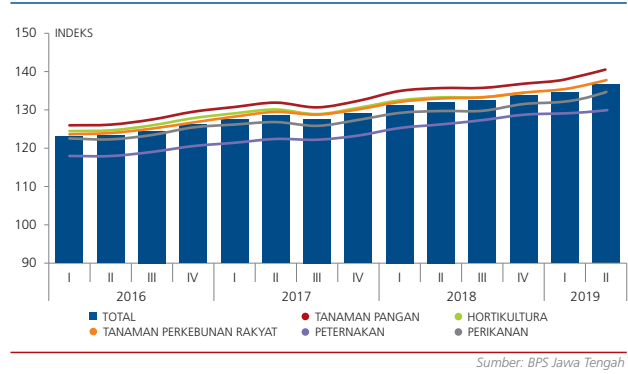
Grafik 6.6 NTP Berdasarkan Subsektor di Jawa Tengah

Sumber: BPS Jawa Tengah



Sumber: BPS Jawa Tengah

Grafik 6.7 Indeks yang Diterima berdasarkan Subsektor



Sumber: BPS Jawa Tengah

Grafik 6.8 Indeks yang Dibayar berdasarkan Subsektor

Tabel 6.6 Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)

SUBSEKTOR	2016				2017				2018				2019	
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	
TANAMAN PANGAN	99,83	99,22	98,17	94,61	99,42	102,76	107,90	104,80	102,98	106,15	111,59	108,63	107,51	
HORTIKULTURA	106,84	109,76	107,99	107,66	109,28	110,04	108,79	107,26	107,08	110,19	108,76	106,68	112	
TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT	111,07	114,32	119,03	114,35	116,07	117,92	122,96	120,60	119,35	114,69	112,02	112,85	114,23	
PETERNAKAN	110,44	113,32	109,00	107,62	108,24	109,50	108,22	106,04	107,14	107,24	105,23	104,81	107,01	
PERIKANAN	112,06	111,87	112,7	113,06	113,46	113,57	113,18	112,45	114,77	115,65	114,6	114,74	116,4	
<b>TOTAL</b>	<b>106,16</b>	<b>107,85</b>	<b>106,78</b>	<b>104,44</b>	<b>106,88</b>	<b>108,79</b>	<b>110,71</b>	<b>108,36</b>	<b>107,83</b>	<b>108,93</b>	<b>109,51</b>	<b>108,07</b>	<b>109,70</b>	

Sumber: BPS Jawa Tengah

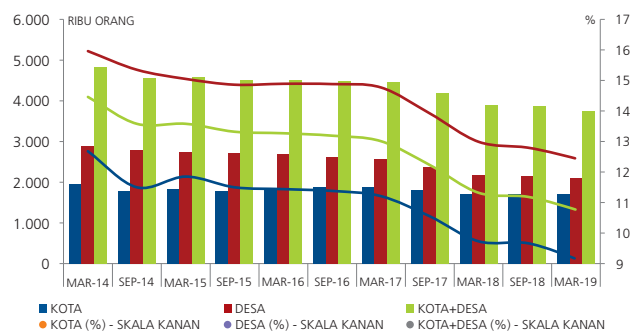
Sejalan dengan indikator NTP, kemampuan produksi petani pada periode laporan tercatat juga tercatat mengalami peningkatan. Kemampuan produksi petani yang tercermin dari Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)<sup>11</sup> pada triwulan II 2019 meningkat dari 108,07 menjadi 109,70 atau meningkat 1,51% (qtq). Peningkatan NTUP pada triwulan laporan terjadi pada subsektor hortikultura (4,99%; qtq), subsektor tanaman perkebunan rakyat (1,22%; qtq), subsektor peternakan (2,10%; qtq), dan subsektor perikanan (1,45%; qtq) sedangkan subsektor tanaman pangan mengalami penurunan (1,03%; qtq).

#### 6.4. TINGKAT KEMISKINAN

Angka kemiskinan Jawa Tengah pada Maret 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tingkat kemiskinan Jawa Tengah per Maret 2019 sebanyak 3.743 ribu jiwa atau menurun bila dibandingkan periode yang sama

tahun lalu sebanyak 3.897 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan Jawa Tengah mengalami penurunan secara persentase menjadi 10,80% dari total penduduk Jawa Tengah, atau menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu 11,32% dari jumlah penduduk.

Penurunan persentase jumlah penduduk miskin tersebut terutama didorong oleh penurunan jumlah penduduk miskin yang berada di daerah perkotaan. Jumlah penduduk miskin yang ada di



Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.9. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah Tahun 2014-2019 (ribuan orang)

11. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, dimana komponen indeks yang dibayar hanya terdiri dari biaya produksi dan penambahan barang modal.

perkotaan mengalami penurunan dari 1.716 ribu jiwa pada Maret 2018 menjadi 1.634 ribu jiwa pada Maret 2019. Sementara itu, jumlah penduduk miskin yang berada di perdesaan menurun dari 2.181 ribu jiwa pada Maret 2018 menjadi 2.109 ribu jiwa pada Maret 2019.

**Penurunan angka kemiskinan pada Maret 2019 terutama didorong oleh penurunan jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan.** Apabila dibandingkan dengan periode Maret 2018, jumlah penduduk miskin di perkotaan turun sebesar 4,79% (yoy) atau setara dengan 82 ribu orang. Sementara di perdesaan, jumlah penduduk miskin turun 3,29% (yoy) atau setara dengan 72 ribu orang. Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2019 mencapai 1.634 ribu jiwa sedangkan di perdesaan mencapai 2.109 ribu jiwa. Secara persentase, tingkat kemiskinan di daerah perkotaan turun dari 9,73% pada Maret 2018 menjadi 9,20% pada Maret 2019, sedangkan tingkat kemiskinan di daerah perdesaan turun dari 12,99% pada Maret 2018 menjadi 12,48% pada Maret 2019. Penurunan angka kemiskinan ini ditengarai akibat peningkatan jumlah penduduk miskin di perdesaan yang lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk miskin di perkotaan.

Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang diturunkan melalui empat strategi, yakni i) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; ii) meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi; iii) mengembangkan UMKM, dan iv) sinergitas kebijakan antar instansi dengan optimalisasi program atau anggaran. Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program nasional dan program pemerintah provinsi

seperti Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) untuk masyarakat miskin.

Pada tahun 2017, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Jawa Tengah yang menerima bantuan sosial non tunai berjumlah 969.513 keluarga dengan total bantuan PKH yang dianggarkan sebesar Rp1,83 triliun. Jumlah KPM di Jawa Tengah ini memiliki kontribusi sebesar 16% - 17% terhadap jumlah KPM nasional. Sedangkan untuk KJS sendiri dialokasikan bagi 12.764 penerima dengan total anggaran sebesar Rp38,29 miliar. Selain itu, di tahun 2017 pemerintah menargetkan untuk melakukan perbaikan 20.027 unit RLTH yang tersebar di 385 Kecamatan dan di 1.141 Desa dengan total anggaran sebesar Rp200 miliar dari total seluruh RLTH Jawa Tengah yang berjumlah 1.682.723 unit.

**Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian, angka kemiskinan di tingkat nasional mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.** Tercatat, penduduk miskin nasional pada Maret 2019 sebanyak 25,14 juta jiwa, lebih rendah dibandingkan Maret 2018 sebesar 25,95 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin tingkat nasional ini mengalami penurunan sebesar 3,12% (yoy). Secara keseluruhan, Provinsi Jawa Tengah pada triwulan laporan berkontribusi sebesar 14,89% dari total penduduk miskin nasional. Angka ini menurun dibandingkan kontribusi pada Maret 2018 yang sebesar 15,02%.

**Garis kemiskinan terus mengalami peningkatan.<sup>12</sup>**

Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan garis kemiskinan perkotaan. Berdasarkan pembagian kelompok kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan, garis kemiskinan di perkotaan dalam

12. BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai pengeluaran kebutuhan minimum yang harus dikeluarkan oleh satu orang.

Tabel 6.7 Garis Kemiskinan Menurut Daerah, 2013-2018 (Rupiah)

GARIS KEMISKINAN	MAR 2014	SEP 2014	MAR 2015	SEP 2015	MAR 2016	SEP 2016	MAR 2017	SEP 2017	MAR 2018	SEP 2018	MAR 2019
KOTA	279.036	286.014	299.011	308.163	315.269	322.799	334.522	339.692	353.240	359.526	372.882
DESA	267.991	277.802	296.864	310.295	319.188	322.489	331.673	337.657	348.206	355.306	365.607
KOTA & DESA	273.056	281.750	297.851	309.314	317.348	322.748	333.224	338.815	350.875	357.600	369.385

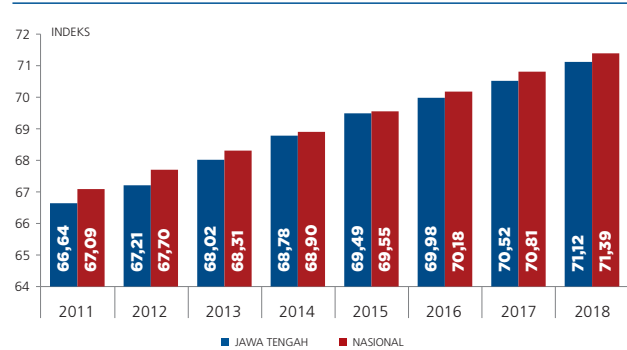
Sumber : BPS, diolah

periode yang sama tercatat mengalami peningkatan tahunan sebesar 5,56% (yoy) dari Rp353.240 per kapita/bulan pada Maret 2018 menjadi Rp372.882 per kapita/bulan pada Maret 2019. Sementara itu garis kemiskinan di perdesaan juga mengalami kenaikan sebesar 5,00% (yoy), dari Rp348.206 per kapita/bulan pada Maret 2018 menjadi Rp365.607 per kapita/bulan pada Maret 2019. Secara keseluruhan, garis kemiskinan kota dan desa meningkat 5,28% (yoy) dari Rp350.875 per kapita/bulan pada Maret 2018 menjadi Rp369.385 per kapita/bulan pada Maret 2019.

**Kenaikan garis kemiskinan berpotensi dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin.** Sesuai definisi yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan akan digolongkan menjadi penduduk miskin.

## 6.5. PEMBANGUNAN MANUSIA<sup>13</sup>

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun.** Pada tahun 2018, IPM Jawa Tengah tercatat sebesar 71,12 meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 70,52. Dengan perkembangan tersebut, status pembangunan manusia Provinsi Jawa Tengah sudah termasuk dalam kategori tinggi (nilai IPM 70 – 80). Namun capaian Jawa Tengah ini tercatat masih lebih rendah dibandingkan dengan nasional dengan nilai IPM 71,39; yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 70,81.



Sumber : BPS Nasional

Grafik 6.10. Perkembangan IPM Jawa Tengah dan Nasional

Tabel 6.8 Perbandingan IPM Provinsi Peers

PROVINSI	IPM			% Growth IPM
	2016	2017	2018	2017-2018
BANTEN	70,96	71,42	71,95	0,74
DKI JAKARTA	79,60	80,06	80,47	0,51
JAWA BARAT	70,05	70,69	71,30	0,86
JAWA TENGAH	69,98	70,52	71,12	0,85
DI YOGYAKARTA	78,38	78,89	79,53	0,81
JAWA TIMUR	69,74	70,27	70,77	0,71
<b>NASIONAL</b>	<b>70,18</b>	<b>70,81</b>	<b>71,39</b>	<b>0,82</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

**Dibandingkan dengan provinsi se-Kawasan Pulau Jawa, IPM Jawa Tengah menempati urutan kedua terendah setelah Jawa Timur.** Status pembangunan manusia di seluruh provinsi di kawasan Jawa telah berada pada kategori tinggi (nilai IPM 70-80) dengan indeks tertinggi pada provinsi DKI Jakarta sebesar 80,47. Pada tahun 2018 seluruh provinsi di Kawasan Jawa mengalami peningkatan IPM.

Ditinjau berdasarkan komponen, peningkatan terjadi di seluruh aspek baik kesehatan, pendidikan, maupun standar hidup.

13. Data IPM menggunakan metode perhitungan IPM standar tahun 2010, dengan komponen sebagai berikut:

- Kesehatan: Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)
- Pendidikan: i) Harapan Lama Sekolah (HLS); dan ii) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
- Standar Hidup: PNB per kapita

Tabel 6.9 IPM Jawa Tengah Menurut Komponen

DIMENSI	SATUAN	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>KESEHATAN</b>						
ANGKA HARAPAN HIDUP SAAT LAHIR (AHH)	TAHUN	73,88	73,96	74,02	74,08	74,18
<b>PENGETAHUAN</b>						
HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)	TAHUN	12,17	12,38	12,45	12,57	12,63
RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS)	TAHUN	6,93	7,03	7,15	7,27	7,35
<b>STANDAR HIDUP LAYAK</b>						
PENGELUARAN PER KAPITA DISESUAIKAN	RUPIAH	9.640	9.930	10.153	10.377	10.777
<b>IPM</b>		<b>68,78</b>	<b>69,49</b>	<b>69,86</b>	<b>70,52</b>	<b>71,12</b>
<b>PERTUMBUHAN IPM</b>	%	<b>1,12</b>	<b>1,04</b>	<b>0,71</b>	<b>0,77</b>	<b>0,85</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Pada tahun 2018, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup beragam. IPM tertinggi berada di Kota Semarang (82,72) dan terendah di Kabupaten Pemalang (65,67). Analisis secara spasial, 3 kota di Jawa Tengah sudah memiliki status pembangunan manusia sangat tinggi (nilai IPM > 80); 16 kabupaten/kota memiliki status pembangunan manusia tinggi (nilai IPM 70 – 80); 16 kabupaten/kota memiliki status pembangunan manusia sedang (nilai IPM 60 – 70); dan tidak ada yang memiliki status pembangunan manusia rendah (nilai IPM < 60).

Tiga kota dengan status pembangunan manusia sangat tinggi yaitu Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Surakarta. Sementara itu, tiga kabupaten dengan IPM terendah yaitu Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Banjarnegara. Pada periode ini, tercatat tiga kabupaten dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kabupaten

Wonosobo (1,38%), Kabupaten Tegal (1,34%) dan Kabupaten Brebes (1,26%). Kemajuan pembangunan manusia di tiga daerah tersebut terutama didorong oleh peningkatan pada dimensi umur panjang dan pengetahuan.

## 6.6. PEMERATAAN PENDUDUK

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Jawa Tengah pada Maret 2019 sedikit mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari koefisien Gini yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan melalui pengukuran yang berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti terjadi pemerataan sempurna di dalam suatu daerah, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Pada Maret 2019, koefisien Gini Jawa Tengah tercatat sebesar 0,361 atau meningkat dibandingkan September 2018 yang sebesar 0,357. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya peningkatan ketimpangan di Jawa Tengah. Apabila dibandingkan dengan nasional, koefisien Gini Jawa Tengah tersebut masih lebih rendah dibandingkan koefisien Gini Nasional yang sebesar 0,382. Dengan demikian, tingkat pemerataan pendapatan di Jawa Tengah relatif lebih baik dibandingkan dengan nasional.



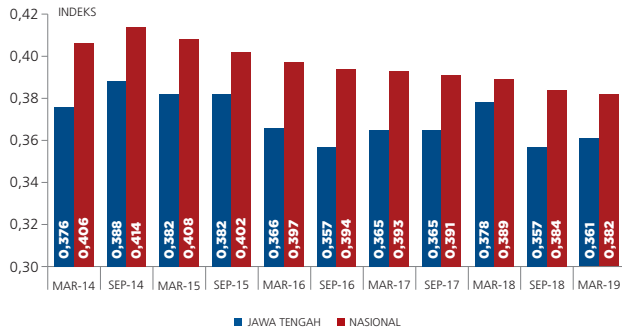
Gambar 6.1 IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Tabel 6.10 Perbandingan Koefisien Gini Provinsi Peers

PROVINSI	KOEFSIEN GINI							PERTUMBUHAN MAR 2019/ MAR 2018 (% , YOY)
	MAR- 16	SEP-16	MAR-17	SEP-17	MAR-18	SEP-18	MAR-19	
JAWA TENGAH	0.366	0.357	0.365	0.365	0.378	0.357	0.361	-4,50
BANTEN	0.394	0.392	0.382	0.379	0.385	0.367	0.365	-5,19
JAWA TIMUR	0.402	0.402	0.396	0.415	0.379	0.371	0.370	-2,37
JAWA BARAT	0.413	0.402	0.403	0.393	0.407	0.405	0.402	-1,23
DKI JAKARTA	0.411	0.397	0.413	0.409	0.394	0.390	0.394	0,00
DI YOGYAKARTA	0.420	0.425	0.432	0.440	0.441	0.422	0.423	-4,08
<b>INDONESIA</b>	<b>0.397</b>	<b>0.394</b>	<b>0.393</b>	<b>0.391</b>	<b>0.389</b>	<b>0.384</b>	<b>0.382</b>	<b>-1,80</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

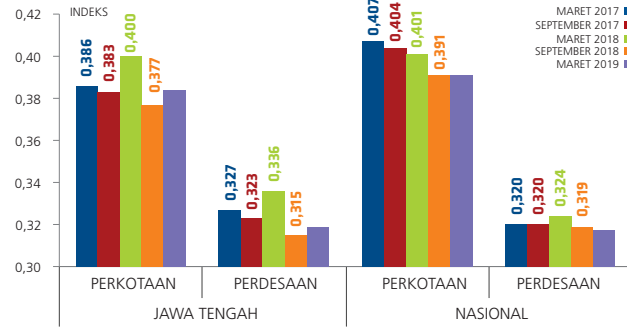


Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.11. Perkembangan Koefisien Gini Jawa Tengah dan Nasional

Apabila dibandingkan dengan provinsi lain di kawasan Jawa, koefisien Gini Jawa Tengah terendah, diikuti oleh Banten (0,365), Jawa Timur (0,370), dan DKI Jakarta (0,394), sedangkan tingkat ketimpangan tertinggi terjadi di provinsi Jawa Barat (0,402) dan D.I. Yogyakarta (0,423). Hampir seluruh provinsi di kawasan Jawa mencatatkan adanya penurunan tingkat ketimpangan dibanding kondisi satu semester sebelumnya, kecuali DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah. Peningkatan koefisien Gini dibandingkan September 2018 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang sedikit lebih tinggi pada periode laporan.

Ditinjau berdasar wilayah, tingkat ketimpangan yang lebih tinggi berada di kawasan perkotaan. Pada Maret 2019, koefisien Gini perkotaan Jawa Tengah tercatat sebesar 0,383; lebih tinggi dibandingkan perdesaan yang sebesar 0,318. Tingkat ketimpangan yang lebih tinggi di daerah perkotaan juga terjadi di tingkat nasional. Koefisien Gini



Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.12. Perkembangan Koefisien Gini Berdasarkan Wilayah

perkotaan tingkat nasional sebesar 0,392; lebih tinggi dibandingkan perdesaan yang sebesar 0,317.



## PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

**Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada 2019 diperkirakan mengalami perbaikan dibandingkan 2018, meski relatif terbatas.**

- Ditinjau dari sisi pengeluaran, akselerasi pertumbuhan diperkirakan berasal dari konsumsi RT, konsumsi LNPRT dan konsumsi pemerintah. Sementara itu, ekspor luar negeri diperkirakan tumbuh relatif terbatas seiring dengan perkiraan perlambatan volume perdagangan dunia. Pertumbuhan ekonomi global yang melandai dan risiko ketegangan hubungan dagang antarnegara yang memicu ketidakpastian perekonomian global ditengarai sebagai penyebab perlambatan tersebut. Pertumbuhan investasi juga diperkirakan sedikit melambat seiring dengan telah selesainya beberapa proyek strategis pemerintah pada akhir 2018.
- Ditinjau dari sisi lapangan usaha, peningkatan pertumbuhan berasal dari lapangan usaha pertanian dan perdagangan, sedangkan kinerja industri pengolahan diperkirakan tumbuh melambat utamanya dipengaruhi permintaan ekspor yang terbatas.
- Sementara itu, inflasi keseluruhan tahun 2019 berisiko lebih tinggi dibandingkan tahun 2018, didorong oleh tekanan eksternal.



## 7.1. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2019

**Secara keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada 2019 diperkirakan mengalami perbaikan dibandingkan 2018, meski relatif terbatas.** Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2019 diperkirakan berada pada batas bawah rentang 5,3%-5,7% (yoy), namun masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2018 yang sebesar 5,32% (yoy).

### 7.1.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran

**Permintaan domestik diperkirakan masih menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, dengan pangsa di atas 60%.** Peningkatan permintaan terutama didorong oleh optimisme terhadap masih kuatnya permintaan domestik. Optimisme terhadap percepatan konsumsi rumah tangga ditopang oleh prospek belanja pemilu serta dukungan belanja pemerintah melalui penyaluran bansos, yang selanjutnya dapat berdampak pada peningkatan kinerja konsumsi. Adanya tambahan pendapatan yaitu melalui peningkatan UMK 2019 sebesar 8,03% dan kenaikan gaji ASN pada tahun 2019 sebesar 5%, juga turut mendukung akselerasi kinerja konsumsi rumah tangga.

Dukungan belanja pemerintah melalui penyaluran bansos seperti stimulus bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan subsidi energi; diperkirakan berperan dalam menjaga daya beli masyarakat sehingga selanjutnya berdampak pada peningkatan kinerja konsumsi. Pada tahun 2019, pemerintah secara nasional menaikkan anggaran bantuan sosial PKH dari Rp19,3 triliun menjadi Rp 34,3 triliun yang disalurkan mulai Januari 2019 (*progress* penyaluran PKH tahap I mencapai 99,72%). Selain itu,

pagu anggaran dana desa tahun 2019 juga dinaikkan menjadi Rp70 triliun, sehingga diharapkan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Tingkat inflasi yang rendah dan terkendali mendukung terjaganya daya beli masyarakat, sehingga turut berperan terhadap akselerasi konsumsi rumah tangga. Optimisme rumah tangga terhadap kondisi perekonomian ke depan masih berlangsung. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Konsumen khususnya pada komponen ekspektasi penghasilan dan kegiatan usaha enam bulan ke depan.

Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kemudahan investasi dan berusaha di Indonesia, serta komitmen dalam penyelesaian pembangunan infrastruktur diperkirakan tetap mendukung pertumbuhan investasi pada 2019. Namun demikian, telah diselesaikannya beberapa proyek infrastruktur strategis pada akhir 2018 diperkirakan menahan kinerja investasi tahun 2019. Ketidakpastian perekonomian global serta iklim politik dalam negeri menjelang dan pasca kegiatan pemilihan umum, diperkirakan mendorong pelaku usaha mengambil sikap *wait and see* dalam melakukan investasi.

Lebih lanjut, kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan semakin membaik pada tahun 2019. Belanja pemerintah diperkirakan meningkat didorong oleh pelaksanaan rangkaian Pileg dan Pilpres 2019, serta berlanjutnya penyaluran stimulus fiskal dalam rangka perlindungan daya beli, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Rencana kenaikan gaji pokok ASN sebesar 5% pada tahun 2019 juga akan mendorong belanja pegawai. Lebih lanjut, pemerintah juga berkomitmen untuk menaikkan Transfer ke

Tabel 7.1 **Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penggunaan**

PENGELUARAN	2018**					2019p				
	I	II	III	IV	TOTAL	I**	II**	IIIp	IVp	TOTALp
KONSUMSI RUMAH TANGGA	4,67	5,13	4,29	4,71	4,69	4,79	5,16	↓	↑	↑
KONSUMSI LNPR	4,62	6,71	9,20	9,87	7,62	12,41	12,89	↓	↑	↑
KONSUMSI PEMERINTAH	5,11	2,44	1,77	3,17	2,98	5,71	5,56	↓	↑	↑
PMTB	6,60	8,48	9,69	5,95	7,68	6,92	4,14	↑	↑	↓
EKSPOR LUAR NEGERI	13,69	15,31	12,53	7,12	12,02	3,45	-2,57	↑	↑	↓
IMPOR LUAR NEGERI	18,51	45,75	47,81	21,73	32,61	6,13	-11,25	↑	↑	↓
NET EKSPOR ANTARDAERAH	18,92	53,02	46,07	137,59	48,66	4,51	-2,70	↑	↓	↓
PDRB	5,37	5,43	5,21	5,28	5,32	5,12	5,62	↓	↑	↑

Ket : \*) angka sementara, \*\*) angka sangat sementara, p) proyeksi Bank Indonesia  
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, dilolah, proyeksi oleh Bank Indonesia

Daerah dan Dana Desa. Secara keseluruhan tahun, anggaran pendapatan dalam APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (TA) 2019 ditetapkan sebesar Rp25,8 triliun atau meningkat 5,23% dari APBD-P 2018. Sementara itu, anggaran belanja dalam APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2019 ditetapkan sebesar Rp26,46 triliun atau meningkat 4,32% dari APBD-P 2018.

Sementara itu, pertumbuhan ekspor luar negeri pada tahun 2019 diperkirakan lebih terbatas dan cenderung melambat dibanding tahun 2018. Pertumbuhan penjualan ekspor diperkirakan relatif terbatas, yang disebabkan oleh konsolidasi pertumbuhan Amerika Serikat sebagai negara tujuan ekspor utama Jawa Tengah serta meningkatnya risiko ketidakpastian perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan tumbuh melandai, termasuk negara mitra dagang utama lainnya seperti Tiongkok, Eropa, dan Jepang. Lebih lanjut, risiko hubungan dagang antarnegara dan geopolitik yang kembali tereskalasi berdampak pada tertahannya volume perdagangan dunia, sehingga berpengaruh terhadap kinerja ekspor Jawa Tengah. World Economic Outlook (WEO) IMF April 2019 memperkirakan penurunan volume perdagangan global menjadi 3,4% (yoy) pada tahun 2019, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2018 sebesar 3,8% (yoy). *World Trade Volume* juga memperkirakan perlambatan ekspor barang dari 3,0% (yoy) pada 2018 menjadi 2,6% (yoy) pada tahun 2019 sejalan dengan

masih belum solidnya kondisi perekonomian global. Lebih lanjut, upaya peningkatan daya saing produk ekspor Jateng juga perlu terus mendapat perhatian, seiring dengan meningkatnya tekanan kompetisi dengan Vietnam, karena berpotensi menjadi faktor penahan pertumbuhan ekspor komoditas unggulan Jawa Tengah.

Sejalan dengan menurunnya permintaan ekspor dan perlambatan investasi tahun 2019, permintaan terhadap barang impor diperkirakan berkurang sehingga impor luar negeri diperkirakan tumbuh melambat dari tahun 2018. Lebih lanjut, impor luar negeri Jawa Tengah juga tergantung dengan kebijakan impor migas dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku industri pengilangan minyak di Cilacap.

### 7.1.2. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

**Pada sisi lapangan usaha (LU), ekonomi Jawa Tengah masih ditopang oleh LU industri pengolahan, LU pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta LU perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.** Sejalan dengan masih kuatnya permintaan domestik, permintaan terhadap produk Jawa Tengah diperkirakan mengalami peningkatan yang mendorong perbaikan kinerja lapangan usaha perdagangan. Perbaikan kinerja lapangan usaha tersebut didukung oleh faktor perbaikan akses konektivitas antarwilayah (Tol Trans

Jawa) serta terjaganya daya beli masyarakat sebagai pengaruh inflasi yang terkendali. Selain itu adanya peningkatan pendapatan berupa penyesuaian UMK, kenaikan gaji pokok ASN, stimulus fiskal/bansos serta kebijakan subsidi energi turut mendukung kinerja lapangan usaha perdagangan. Lebih lanjut, penyelenggaraan pemilihan legislatif dan presiden tahun 2019 diperkirakan turut mendorong aktivitas perdagangan.

Namun demikian, kinerja lapangan usaha industri pengolahan diperkirakan tertahan pada tahun 2019 seiring dengan melemahnya permintaan ekspor, akibat penurunan volume perdagangan dunia yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Lebih lanjut, penurunan impor luar negeri, khususnya kelompok bahan baku, dapat menjadi indikasi awal penurunan kapasitas maupun stok industri pengolahan, sehingga mengindikasikan kinerja lapangan usaha industri pengolahan yang relatif terbatas pada tahun 2019. Perlambatan impor nonmigas tercatat di beberapa komoditas seperti, serat tekstil dan produk tekstil, produk kimia dan plastik, serta benda-benda dari logam.

Selanjutnya, meskipun kinerja lapangan usaha pertanian di awal tahun sempat dipengaruhi oleh gangguan cuaca yang terjadi pada periode tanam sebelumnya, secara keseluruhan tahun 2019 kinerja lapangan usaha ini diproyeksikan lebih tinggi dibanding tahun 2018. Berdasarkan perkiraan iklim BMKG, pada Januari-Agustus 2019 diperkirakan terjadi El Nino kategori lemah, dengan curah hujan pada kategori di bawah normal sepanjang periode Juli-Oktober 2019. Lebih lanjut, awal musim kemarau 2019 juga diperkirakan jatuh lebih lambat atau mundur dari normalnya, yaitu pada bulan Mei 2019. Fenomena El Nino yang bersamaan dengan musim kemarau

diperkirakan menyebabkan musim kemarau 2019 lebih kering daripada tahun 2018, sehingga dampak kekeringan lebih besar dibanding musim kemarau 2018. Kemarau tahun 2019 diprediksi panjang dan kering dengan puncak kemarau terjadi pada bulan Agustus. Selanjutnya, awal musim hujan 2019/2020 di sebagian besar wilayah di Jawa Tengah diperkirakan lebih lambat dari rata-ratanya, yaitu terjadi paling awal pada Oktober Dasarian I dan paling akhir pada Desember Dasarian II.

Pada sisi swasta, komitmen pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi dan usaha reformulasi regulasi di berbagai kementerian dan lembaga, di tingkat pusat dan daerah; serta integrasi sistem perizinan dan kemudahan berusaha diharapkan menjadi faktor pendukung dan berdampak signifikan pada perekonomian. Peningkatan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Provinsi Jawa Tengah yang kompetitif juga menjadi faktor pendukung menariknya investasi ke Jawa Tengah. Adapun beberapa risiko yang perlu diwaspadai dapat menahan pertumbuhan ekonomi antara lain: (i) berlanjutnya ketegangan hubungan dagang AS dan Tiongkok serta sejumlah risiko geopolitik; (ii) pertumbuhan ekonomi dunia melambat, termasuk negara mitra dagang utama Jawa Tengah seperti AS, Tiongkok, dan Eropa; serta (iii) turunnya volume perdagangan dan harga komoditas global, termasuk harga minyak.

Meningkatnya ketidakpastian global berpotensi mengganggu prospek kesinambungan pertumbuhan ekonomi global dan perdagangan internasional. Di samping itu, perkembangan ekonomi dan keuangan global tersebut memberikan tantangan dalam mendorong ekspor unggulan Jawa Tengah. Lebih lanjut, tingginya persaingan di pasar global dengan negara yang memiliki produk ekspor serupa dengan

Tabel 7.2 **Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha**

LAPANGAN USAHA	2018**					2019p				
	I	II	III	IV	TOTAL	I**	II**	IIIp	IVp	TOTALp
PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	0,69	4,30	3,26	2,13	2,63	0,93	5,18	↓	↓	↑
INDUSTRI PENGOLAHAN	4,77	4,35	3,98	4,31	4,35	3,64	3,64	↓	↑	↓
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	5,16	5,34	5,81	6,47	5,70	6,80	6,43	↓	↑	↑
PDRB	5,37	5,43	5,21	5,28	5,32	5,12	5,62	↓	↑	↑

Ket : \*) angka sementara, \*\*) angka sangat sementara, p) proyeksi Bank Indonesia  
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah, proyeksi oleh Bank Indonesia

produk unggulan Jawa Tengah, seperti Vietnam juga perlu diwaspadai. Penguatan negosiasi perjanjian kerjasama perdagangan diperlukan guna meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia dibanding negara kompetitor.

## 7.2. PROSPEK INFLASI KESELURUHAN TAHUN 2019

**Inflasi tahunan Jawa Tengah pada tahun 2019 berisiko mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018.** Faktor utama yang diperkirakan mendorong peningkatan laju inflasi tahunan terutama berasal dari kelompok bahan makanan, serta kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, didorong oleh peningkatan permintaan konsumsi masyarakat menjelang hari raya keagamaan.

**Inflasi kelompok bahan makanan pada tahun 2019 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2018.** Peningkatan inflasi kelompok bahan makanan terutama disebabkan momentum penurunan pasokan produksi pangan dan hortikultura pasca berakhirnya masa panen pertama 2019, yang tiba bersamaan dengan peningkatan konsumsi masyarakat pada periode hari raya keagamaan dan masa libur (*festive season*) di akhir triwulan II 2019. Selanjutnya, terdapat risiko penurunan produktivitas pertanian, khususnya produk pangan dan hortikultura, sebagai dampak gangguan iklim El Nino Southern Oscillation (ENSO) tingkat moderat, yang diperkirakan berakibat pada pergeseran musim kemarau 2019.

Untuk memitigasi risiko gangguan produksi akibat gangguan cuaca di skala lokal dan regional, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian skala kecil dan medium seperti infrastruktur embung, dan jaringan irigasi sekunder. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah senantiasa berupaya memperbaiki distribusi logistik dan menjaga ketersediaan pasokan komoditas pangan sehingga inflasi tahun 2019 terjaga pada rentang bawah sasaran inflasi nasional yang sebesar  $3,5 \pm 1\%$ . Pemerintah secara jangka panjang telah mendorong pembangunan infrastruktur pertanian serta program subsidi pertanian menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan produksi pangan. Selanjutnya, tren perbaikan nilai tukar petani pada tahun 2018 diperkirakan juga dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi petani.

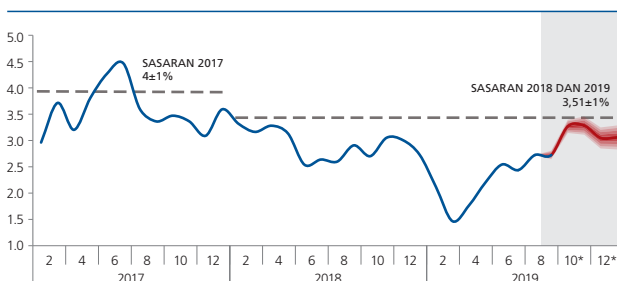
**Inflasi kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan juga diperkirakan akan meningkat pada keseluruhan tahun 2019.** Pola musiman yang mendorong peningkatan permintaan mobilisasi masyarakat diperkirakan akan memacu tekanan inflasi kelompok ini. Kesiapan infrastruktur konektivitas antar daerah diharapkan mampu mengurangi aspek spekulasi para pelaku usaha penyedia jasa transportasi. Selain itu, tren penurunan pasokan minyak dunia sebagai dampak ketegangan politik di Timur Tengah diperkirakan akan berdampak langsung pada harga minyak dunia dan substitusinya. Terkait hal tersebut, Pemerintah berusaha memitigasi risiko peningkatan

biaya energi, khususnya Bahan Bakar Minyak melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Melalui ketentuan tersebut, Pemerintah secara tidak langsung mengendalikan penetapan harga BBM nonsubsidi, namun dengan tetap mengacu pada perkembangan harga minyak dunia.

**Dengan Pemerintah dan kabinet terpilih pada awal triwulan IV 2019, terdapat beberapa risiko peningkatan tekanan inflasi pada kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan.** Risiko tersebut khususnya berasal dari rencana reformasi fiskal Pemerintah pada komponen subsidi energi, penyesuaian tarif Tarif Dasar Listrik (TDL) dan kebijakan skema distribusi tertutup untuk bahan bakar gas bersubsidi. Bank Indonesia dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat menjaga ekspektasi dan daya beli masyarakat serta sekaligus menyeimbangkan rasio kesehatan keuangan negara yang selanjutnya mampu mendukung kestabilan perekonomian dalam jangka panjang.

Sesuai dengan mandatnya, Bank Indonesia akan berusaha menjaga capaian inflasi berada pada sasaran inflasi 2018, yaitu  $3,5 \pm 1\%$  (yoy). Koordinasi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian

inflasi perlu terus diperkuat terutama dalam menghadapi sejumlah risiko terkait penyesuaian tarif energi sejalan dengan kebijakan lanjutan reformasi subsidi energi oleh Pemerintah. Selanjutnya, dalam rangka menjaga kestabilan harga dan pasokan komoditas pangan strategis, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah sudah mempersiapkan berbagai program pengendalian inflasi di tahun 2019. Diseminasi dan Sosialisasi penggunaan *mobile app* SIHATI untuk sinergi informasi pasokan pangan hulu-hilir, kebijakan pasar murah, operasi pasar, dan sidak lapangan di tingkat masyarakat ketika terjadi gejolak harga. TPID Jawa Tengah juga berupaya meningkatkan kelembagaan petani dengan penyusunan skema *Rice Market Center* untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi petani. Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat tetap menjaga inflasi Jawa Tengah tahun 2019 pada level yang terkendali.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 7.1 Proyeksi Inflasi Tahun 2019

